



DOKUMEN
INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAERAH
TAHUN 2018

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KATA PENGANTAR



Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) merupakan laporan mengenai kondisi lingkungan hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipublikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap tahunnya. Pelaporan DIKPLHD ini dilandasi oleh amanat Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi tentang kondisi lingkungan kepada masyarakat luas. Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat Tahun 2018 menggunakan kerangka kerja model *Driving force* (pemicu perubahan kualitas lingkungan) – *Pressures* (tekanan terhadap lingkungan) – *State* (kondisi aktual lingkungan hidup) – *Impact* (dampak terhadap lingkungan) – *Responses* (upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup) berdasarkan pada media lingkungan hidup, meliputi: tataguna lahan dan hutan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana, perkotaan dan tata kelola.

Pelaporan DIKPLHD sebagai sarana penyediaan data dan informasi pengelolaan lingkungan hidup dapat menjadi alat yang berguna dalam menyusun kebijakan pembangunan, terutama yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Nusa Tenggara Barat. Tekanan yang dihadapi lingkungan Nusa Tenggara Barat saat ini berupa perubahan penggunaan lahan dan degradasi lahan serta masih kurangnya pengelolaan terhadap sampah mengakibatkan penurunan pada beberapa indikator lingkungan hidup. Hal ini jelas menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan yang berkelanjutan masih perlu ditingkatkan. Selain itu, interaksi dari beberapa tekanan lingkungan menghasilkan dampak kumulatif yang memperkuat ancaman yang dihadapi oleh Nusa Tenggara Barat, khususnya untuk wilayah yang dinilai rentan terhadap dampak aktivitas perubahan penggunaan lahan.

Dalam penyusunan DIKPLHD tentunya diperlukan dukungan dari berbagai pihak baik dalam penyediaan data dan informasi maupun saran masukan untuk penyempurnaannya. Untuk itu disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak

yang telah berperan serta secara aktif hingga tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 ini.

Semoga Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengambilan keputusan, dalam rangka mewujudkan Visi Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu "Mewujudkan Nusa Tenggara Barat Yang Gemilang" sebagai refleksi dari pemaknaan atas ungkapan Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghofur atau daerah yang aman, nyaman dan menyenangkan, dimana hidup dan kehidupannya dipenuhi hikmah dan keberkahan.

Mataram, Mei 2019



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Dr. H. ZULKIFLI LIMANSYAH, SE. M.Sc



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

SURAT PERNYATAAN

PERUMUSAN ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Berdasarkan amanat Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pemerintah daerah mempunyai kewajiban mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu pengembangan sistem informasi lingkungan hidup dilakukan melalui penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD), yang didalamnya memuat isu utama yang menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa perumusan isu prioritas lingkungan hidup daerah dalam DIKPLHD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholder, sehingga isu-isu prioritas lingkungan hidup daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan sebagai berikut:

- a. Alih Fungsi Lahan
- b. Perubahan Kualitas dan kuantitas Air
- c. Peningkatan Timbunan Sampah dan minimnya penanganan sampah

Demikian Surat Pernyataan Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, Mei 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Dr. H. ZULKIFLI MANSYAH, SE. M.Sc



Nusa Tenggara Barat

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

2018

Pelindung:

Dr. H.Zulkieflimansyah, Gubernur Nusa Tenggara Barat

Pengarah:

Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc, P.hD, Sekretaris Daerah NTB

Ir. Madani Mukarom, BSc.F, M.Si, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB

Dr. Siti Hilyana- Universitas Mataram, NTB

Dr. Nurliah - Universitas Mataram, NTB

Penanggung Jawab :

Dr. Ahmad Fathoni, Kepala Bidang Penataan Lingkungan

Penulis:

Samsuddin, S.Hut. M.Si, Lalu Moh. Nazar Fajri, SE. MPA, Gendewa Tunas R, ST.MT,
Jufri, ST, Wahyuddin, ST. M.Eng, Baiq Hilmi Zuraída, ST, Taradina Wisudayani M, ST,
Intan Sumarni, S.Sos

Ucapan Terima Kasih:

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu:
BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BPBD, Dina ESDM, Dinas
Pertanian dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan
dan Perikanan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Bakesbangpoldagri, Bapenda
Instansi vertikal terkait di Nusa Tenggara Barat, yaitu: BPS NTB, BPDAS Dodokan
Moyosari, BKSDA NTB, LSM Bidang Lingkungan Hidup, yaitu: WWF dan WALHI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
 BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	I-1
I.2. Gambaran Umum Provinsi NTB.....	I-3
I.2.1. Kondisi Geografis	I-3
I.2.2. Wilayah Administrasi	I-4
I.2.3 Karakteristik Wilayah Pesisir	I-5
I.3. Geologi.....	I-11
I.4. Tata Ruang	I-14
I.5. Kondisi Ekologis.....	I-15
I.6. Tutupan Lahan	I-17
I.7. Tahapan Penyusunan DIKPLHD	I-19
I.8. Maksud dan Tujuan	I-23
I.9. Ruang Lingkup.....	I-23
 BAB II ANALISIS <i>DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT</i> DAN <i>RESPONSE</i> ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
II.1. Tataguna Lahan	II-1
II.1.1. Lahan	II-4
II.1.2. Lahan Kering.....	II-1
II.1.3. Lahan Kritis	II-6
II.1.4. Tututpan Lahan	II-10

II.1.5. Hutan	II-21
II.2. Kualitas Air	II-46
II.2.1. Kualitas Air Sungai	II-46
II.2.2. Kualitas Air Bendungan	II-55
II.2.3. Kualitas Air Laut	II-61
II.3. Kualitas Udara	II-62
II.4. Resiko Bencana	II-69
II.4.1. Gempa Bumi	II-71
II.4.2. Tsunami	II-76
II.4.3. Gunungapi	II-78
II.4.4. Tanah Longsor/Gerakan Tanah	II-81
II.4.5. Banjir	II-83
II.4.6. Kekeringan	II-85
II.4.7. Analisis Kerawanan Gabungan Bencana.....	II-87
II.5. Perkotaan.....	II-89
II.5.1. Kependudukan	II-89
II.5.2. Timbulan Sampah.....	II-92
II.6. Tata Kelola	II-96
II.6.1. Kearifan Lokal.....	II-96
II.6.2. Pengaduan Lingkungan Hidup	II-98
II.6.3. Personil Lembaga Pengelolaan Lingkungan Hidup	II-100
II.6.5. Peran Serta Masyarakat	II-101

BAB III ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

III.1. Tataguna Lahan	III-1
III.2. Penetapan Kriteria	III-2
III.3. Penetapan Isu Lingkungan Hidup	III-5
III.3.1. Alih Fungsi Hutan	III-5
III.3.2. Perubahan Kualitas dan Kuantitas Air	III-7
III.3.3. Peningkatan Timbulan Sampah dan Minimnya Penangan Sampah	III-8

BAB IV INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

IV.1. Program-program Lingkungan.....	IV-1
IV.1.1. Reboisasi dan Penghijauan	IV-1
IV.1.2. Zero Waste Program	IV-3
IV.1.3. Pengolahan Sampah Organik Teknologi Biokonversi Menggunakan Black Soldier Fly (BSF)	IV-11
IV.1.4. Proper	IV-20
IV.1.5. Gempita Kreatif	IV-21
IV.2. Pengawasan Lingkungan	IV-25
IV.2.1. Dokumen Izin Lingkungan	IV-25
IV.2.2. Pengawasan Izin Lingkungan	IV-28
IV.3. Penegakan Hukum	IV-35
IV.4. Peran Serta Masyarakat	IV-36
IV.4.1. Program Kampung Lingkungan	IV-36

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Luas daerah NTB menurut kanupaten/kota.....	I-4
Tabel 1.2 Jumlah Kecamatan dan desa di Provinsi NTB.....	I-5
Tabel 1.3 Perhitungan Tapak Ekologi Pulau Lombok	I-16
Tabel 1.4 Luas tutupan lahan eksisting Provinsi NTB.....	I-18
Tabel 2.1 Luasan Penggunaan Lahan di NTB.....	II-2
Tabel 2.2. Evaluasi kerusakan tanah di lahan kering	II-7
Tabel 2.3. Luas Areal Perambahan Hutan.....	II-8
Tabel 2.4. Luas Areal Perambahan Hutan masing-masing Kab/Kota.....	II-9
Tabel 2.5. Perkembangan Luas Lahan Kritis di Provinsi NTB.....	II-10
Tabel 2.6. Luasan Lahan Kritis di Provinsi NTB.....	II-13
Tabel 2.7. Perbandingan tutupan lahan yang diindikasikan menyimpang dari peruntukannya di wilayah provinsi NTB berdasarkan peta tutupan lahan 2016 dan 2009	II-14
Tabel 2.8. Simpangan pola ruang di wilayah provinsi NTB berdasarkan tutupan lahan tahun 2009 dan 2016	II-16
Tabel 2.9. Luas kawasan hutan menurut fungsi	II-20
Tabel 2.10 Luas Kawasan hutan tiap kabupaten/kota menurut fungsi	II-27
Tabel 2.11. Jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.....	II-29
Tabel 2.12. Jenis kemitraan pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi NTB	II-30
Tabel 2.13 Perubahan luas ekosistem hutan mangrove di Provinsi NTB	II-39
Tabel 2.14 Luas hutan mangrove di provinsi NTB tahun 2006 dan 2015 menurut kabupaten /kota	II-40
Tabel 2.15 Pembagian rencana alokasi ruang RZWP-3-K	II-44
Tabel 2.16. Alokasi ruang kawasan konservasi di WP3K Provinsi NTB tahun 2016..	II-52
Tabel 2.17. Data Jumlah Penduduk Provinsi NTB berdasarkan tingkat pendidikan ...	II-67
Tabel 2.18 Standard kualitas udara ambien PP No. 41/Tahun 1999.....	II-70

Tabel 2.19 Hasil Pengujian Kualitas Udara di Kabupaten/Kota se Provinsi NTB	II-72
Tabel 2.20 Curah Hujan Provinsi NTB.....	II-75
Tabel 2.21 Nilai Pembobotan masing-masing parameter gempa bumi	II-81
Tabel 2.22 Jumlah Penduduk Provinsi NTB tahun 2014-2018	II-96
Tabel 2.23. Kepadatan penduduk Provinsi NTB tahun 2018.....	II-98
Tabel 2.24. Penghargaan kampung iklim di provinsi NTB	II-103
Tabel 3. 1. Indeks Kualitas Air Provinsi NTB Tahun 2011-2017	III-8
Tabel 4. 1. Luas Lahan Kegiatan Reboisasi dan Penghijauan Tahun 2018	IV-2
Tabel 4. 2. Inovasi Dinas LHK NTB Tahun 2018	IV-21

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Casecading Provinsi NTB	I-3
Gambar 1.2 Peta Administrasi Provinsi NTB	I-5
Gambar 1.3. Pola Arus diperairan laut KSPN Komodo dan Sekitarnya	I-8
Gambar 1.4. Peta Arus Laut Perairan NTB Kondisi Pasang.....	I-10
Gambar 1.5. Peta Arus Laut Perairan NTB Kondisi Surut.....	I-10
Gambar 1.6. Peta Geologi Regional Pulau Lombok dan Sumbawa	I-14
Gambar 1.7. Peta Tutupan Lahan NTB Eksisting 2016	I-18
Gambar 1.8. Alur Penentuan Isu Prioritas Lingkungan Hidup	I-20
Gambar 2.1. Grafik luasan penggunaan lahan	II-3
Gambar 2.2. Diagram persentase luas lahan kering per kabupaten/kota di provinsi NTB.....	II-5
Gambar 2.3. Grafik luas area perambahan hutan di Provinsi NTB	II-9
Gambar 2.4. Grafik luas lahan sangat kritis berdasarkan fungsi kawasan di Provinsi NTB.....	II-12
Gambar 2.5. Grafik luas lahan kritis berdasarkan fungsi kawasan di provinsi NTB..	II-12
Gambar 2.6. Grafik luas lahan kritis berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB.....	II-13
Gambar 2.7. Peta tutupan lahan 2016 provinsi NTB	II-19
Gambar 2.8. Peta kesesuaian tutupan lahan 2016 dengan pola ruang provinsi NTB ...	II-20
Gambar 2.9. Peta kesesuaian pola ruang dengan tutupan lahan tahun 2016 dan 2019 di provinsi NTB	II-21
Gambar 2.10. Simpangan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya (pemukiman).....	II-22
Gambar 2.11. Simpangan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya (pertanian lahan kering).....	II-23
Gambar 2.12. Simpangan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya	

(sawah).....	II-24
Gambar 2.13. Diagram persentase komposisi fungsi hutan kawasan hutan di provinsi NTB	II-26
Gambar 2.14. Grafik luas kawasan hutan per kabupaten di Provinsi NTB	II-27
Gambar 2.15 Diagram luas padang lamun per kabupaten di Provinsi NTB	II-35
Gambar 2.16 Diagram luas terumbu karang per kabupaten di Provinsi NTB	II-37
Gambar 2.17 Peta Pola Ruang WP3K Provinsi NTB (Alur laut Perairan sekitar pulau Lombok)	II-47
Gambar 2.18 Peta Pola Ruang WP3K Provinsi NTB (Alur laut Perairan pulau Sumbawa bagian barat daya)	II-48
Gambar 2.19 Peta Pola Ruang WP3K Provinsi NTB (Alur laut Perairan pulau Sumbawa bagian timur)	II-49
Gambar 2.20 Peta Pola Ruang WP3K Provinsi NTB (Alur laut Perairan pulau Sumbawa bagian utara)	II-50
Gambar 2.21 Grafik Analisa BOD di Sungai Rabaluju, Brang Rea dan Sidutan	II-57
Gambar 2.22 Grafik Analisa BOD di Sungai Brang Biji, Sori Padolo dan Sari	II-57
Gambar 2.23 Grafik Analisa COD di Sungai Rabaluju dan Brang Rea.....	II-58
Gambar 2.24 Grafik Analisa DO di Sungai Rabaluju, Brang Rea dan Sidutan	II-59
Gambar 2.25 Grafik Analisa DO di Sungai Brang Biji, Sori Padolo dan Sari.....	II-59
Gambar 2.26 Grafik Analisa Nitrit di Sungai Rabajulu, Brang Rea dan Sidutan	II-60
Gambar 2.27 Grafik Analisa Nitrit di Sungai Brang Biji, Sori Padolo dan Sari.....	II-61
Gambar 2.28 Grafik Analisa Total Coli di sungai Rabajulu, Brang Rea dan Sidutan.....	II-62
Gambar 2.29 Grafik Analisa Total Coli di sungai Brang Biji, Sori Padolo dan Rabajulu	II-62
Gambar 2.30 Grafik Analisa BOD di Bendungan Batujai, Pengga, Pandanduri dan Tibukuning	II-64
Gambar 2.31 Grafik Analisa E-coli di Bendungan Batujai, Pengga, Pandanduri dan Tibukuning	II-65
Gambar 2.32 Grafik Analisa total coli di Bendungan Batujai, Pengga, Pandanduri dan Tibukuning	II-65

Gambar 2.33 Grafik Jumlah Rumah Tangga di Provinsi NTB per Kabupaten/Kota berdasarkan Tempat Buang Air Besar	II-66
Gambar 2.34 Diagram presentase jumlah penduduk Provinsi NTB berdasarkan tingkat pendidikan	II-68
Gambar 2.35 Grafik analisa BOD di laut Provinsi NTB Tahun 2016.....	II-69
Gambar 2.36 Grafik analisa nitrat di laut Provinsi NTB Tahun 2016.....	II-70
Gambar 2.37 Dampak bencana gempa di Kabupaten Lombok Utara.....	II-77
Gambar 2.38 Sejarah kejadian gempa bumi di Provinsi NTB dari tahun 1900 sampai dengan 2018 dan patahan- patahan yang mengakibatkannya ...	II-79
Gambar 2.39 Parameter analisis potensi bahaya gempa bumi	II-80
Gambar 2.40 Peta potensi bahaya gempa bumi Provinsi NTB bagian barat.....	II-82
Gambar 2.41 Peta potensi bahaya gempa bumi Provinsi NTB bagian timur.....	II-82
Gambar 2.42 Peta potensi bahaya Tsunami Lombok.....	II-84
Gambar 2.43 Peta potensi bahaya tsunami pulau Sumbawa.....	II-85
Gambar 2.44 Peta potensi bahaya letusan Gunung Rinjani pulau Lombok	II-86
Gambar 2.45 Peta potensi bahaya letusan Gunung Tambora dan Sangeangapi pulau Sumbawa.....	II-87
Gambar 2.46 Peta Potensi bahaya GerakanTanah/Tanah Longsor pulau Lombok.....	II-88
Gambar 2.47 Peta Potensi bahaya Gerakan Tanah/Tanah Longsor pulau Sumbawa..	II-89
Gambar 2.48 Potensi Banjir pulau Lombok	II-90
Gambar 2.49 Potensi Banjir pulau Sumbawa	II-91
Gambar 2.50 Peta Potensi Kekeringan pulau Lombok	II-92
Gambar 2.51 Peta Potensi Kekeringan pulau Sumbawa	II-93
Gambar 2.52 Potensi Rawan Bencana Gabungan pulau Lombok	II-94
Gambar 2.53 Potensi Rawan Bencana Gabungan pulau Sumbawa	II-95
Gambar 2.54 Grafik pertumbuhan penduduk NTB 2014-2018	II-97
Gambar 2.55 Persentase perkiraan jumlah timbulan sampah rumah tangga Provinsi NTB tahun 2018	II-99
Gambar 2.56 TPA Regional Kebon Kongok.....	II-100
Gambar 2.57 Sebaran TPA di Provinsi NTB	II-102
Gambar 2.58 Grafik perbandingan anggaran pengelolaan lingkungan hidup provinsi NTB	II-105

Gambar 2.59. Diagram jumlah personil lembaga pengelolaan lingkungan hidup.....	II-106
Gambar 3.1. Ladang Jagung di sepanjang jalur Sumbawa menuju Dompu	III- 6
Gambar 3.2.Kawasan Hutan Lindung Sekaroh yang habis ditebang untuk keperluan lading jagung.....	III- 7
Gambar 3.3. Tumpukan Sampah di sungai Tente Kabupaten Bima	III- 8
Gambar 4.1. Kegiatan Penghijauan di Kawasan Gunung Tunak Kabupaten Lombok Barat	IV- 2
Gambar 4.2. Alur Penanganan Sampah saat ini.....	IV- 4
Gambar 4.3. Konsep Ekonomi Sirkular	IV- 5
Gambar 4.4. Alur Pengelolaan SAmpah NTB di Masa Depan.....	IV- 5
Gambar 4.5. Road Map dan Milestones.....	IV- 9
Gambar 4.6. Elemen-elemen dalam penilaian Balanced Score card NTB Zero Waste	IV- 11
Gambar 4.7. Strategic Map NTB Zero Waste berdasarkan Balanced Scorecard.....	IV- 11
Gambar 4.8. Siklus Hidup <i>Black Soldier Fly (BSF)</i>	IV- 12
Gambar 4.9. Gambar Reaktor	IV- 14
Gambar 4.10. Rearing House	IV- 15
Gambar 4.11 Rak Penetasan telur BSF	IV- 15
Gambar 4.12. Alur kegiatan di BSF	IV- 18
Gambar 4.13.Unloading dan pemilahan sampah	IV- 17
Gambar 4.14.Pemasukan sampah ke bioreaktor	IV- 17
Gambar 4.15.Lafva BSF	IV- 18
Gambar 4.16.Lalat BSF.....	IV- 19
Gambar 4.17.Peringkat Proper Tahun 2018.....	IV- 20

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Tabel Data (65 tabel)
- Lampiran 2 Dokumentasi Foto Kegiatan
- Lampiran 3 CV Tenaga Ahli



PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) setiap tahun sebagai laporan kondisi lingkungan hidup yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah memiliki peran besar dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup suatu daerah. Pelaporan DIKPLHD ini dilandasi oleh amanat Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi tentang kondisi lingkungan kepada masyarakat luas. Tujuan pelaporan adalah untuk menyediakan data dan informasi resmi tentang keadaan lingkungan hidup kepada seluruh masyarakat sekaligus menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan, baik penentu kebijakan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat luas dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi sangat penting karena menyajikan hubungan kausalitas antara unsur-

unsur pemicu, penyebab terjadinya persoalan lingkungan hidup, status, akibat dan upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Informasi tentang tekanan, kondisi dan upaya yang dilakukan terhadap lingkungan diharapkan dapat menjadi pertimbangan utama dalam membuat perencanaan lingkungan. Informasi ini pula akan memenuhi kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang "Keterbukaan Informasi Publik (KIP)".

Pada tahun 2018, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan untuk menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023. Pada tanggal 19 september 2018, Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo telah melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Dr. Zulkieflimansyah dan Dr. Sitti Rohmi Djalilah untuk periode tahun 2018-2023. Selanjutnya visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mewarnai dokumen RPJMD Provinsi NTB 2018-2023 untuk mencapai NTB Gemilang. Rencana pembangunan jangka panjang daerah Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 memiliki visi pembangunan adalah "Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Maju dan Sejahtera". Salah satu hal penting dari RPJMD Provinsi NTB Tahun 2018-2023 adalah dengan dimasukkannya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai salah satu indikator, sebagaimana tertuang dalam casecading berikut:



Gambar 1.1 Casecading Provinsi NTB

I.2. GAMBARAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I.2.1. Kondisi Geografis

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan ratusan pulau-pulau kecil. Dari 380 pulau yang ada, terdapat 38 pulau yang telah berpenghuni. Luas wilayah NTB adalah 49.312,19 km² yang terdiri dari daratan 20.153,15 km² dan lautan 29.159,04 km². Luas daratan Pulau Lombok adalah 4.738,7 km² (23,5 %) dan Pulau Sumbawa 15.414,45 km² (76,5 %). Terletak antara 115°46'-119°05' Bujur Timur dan 8°10'-9°05' Lintang Selatan. Batas-batas wilayah administrasi Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

- Utara : Laut Jawa dan Laut Flores
- Selatan : Samudera Hindia
- Timur : Selat Sape / Provinsi NTT
- Barat : Selat Lombok / Provinsi Bali

Topografi wilayah NTB didominasi daerah perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan antara 26 – 46%. Secara administratif Provinsi NTB terdiri atas 8 (delapan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota dengan ibu kota terletak di Kota Mataram. Dimana Kabupaten Sumbawa merupakan daerah terluas dengan luas daerah 6643.98 km² atau 32.97 %, sedangkan daerah terkecil yaitu Kota Mataram dengan luas daerah 61.3km² atau 0.3 %. Rincian luas daerah NTB menurut Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Luas Daerah NTB menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten / Kota	Luas (km ²)	Persentase
1	Lombok Barat	1.053,87	5,23
2	Lombok Tengah	1.208,4	6
3	Lombok Timur	1.605,55	7,97
4	Sumbawa	6.643,98	32,97
5	Dompu	2.324,6	11,53
6	Bima	4.389,4	21,78
7	Sumbawa Barat	1.849,02	9,17
8	Lombok Utara	809,53	4,02
9	Kota Mataram	61,3	0,3
10	Kota Bima	207,5	1,03
TOTAL		20.153,15	100

Sumber: NTB dalam angka, 2018

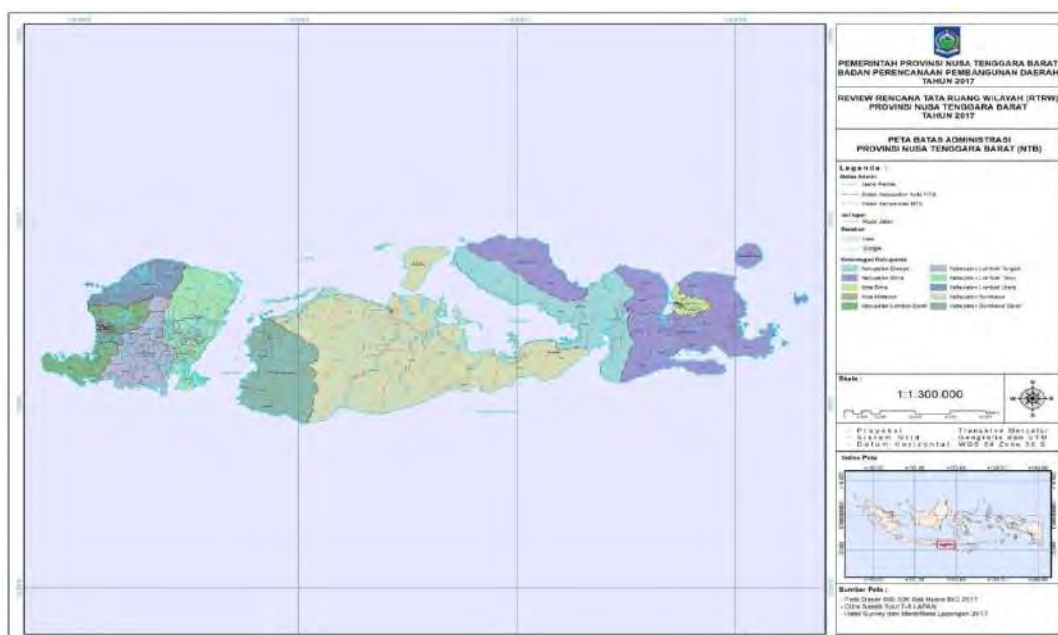
I.2.2. Wilayah Administrasi

Wilayah administrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 10 Wilayah Kabupaten/Kota, 116 kecamatan dan 1.141 kelurahan / desa, tersebar di dua pulau utama yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Tabel 1.2 Jumlah Kecamatan dan Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
Kabupaten			
1	Lombok Barat	10	122
2	Lombok Tengah	12	139
3	Lombok Timur	20	254
4	Sumbawa	24	166
5	Dompu	8	81
6	Bima	18	193
7	Sumbawa Barat	8	65
8	Lombok Utara	5	33
Kota			
9	Mataram	6	50
10	Bima	5	38
Nusa Tenggara Barat		116	1.141

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2018



Gambar 1.2. Peta Administrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

I.2.3. Karakteristik wilayah pesisir

Karakteristik wilayah pesisir Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan dua gugus pulau utama yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa serta puluhan pulau kecil disekitarnya. Perairan lautnya meliputi perairan terbuka di bagian selatan yaitu Samudera Hindia dan Laut Flores di bagian utara. Selat Alas menyatukan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Memperhatikan kondisi tersebut, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi NTB memiliki 4 tipe karakteristik perairan, yaitu perairan laut terbuka (laut lepas), perairan selat, perairan teluk dan perairan sekitar pulau-pulau kecil. Masing-masing tipe perairan memiliki karakteristik tersendiri dan pemanfaatan ruang di masing-masing tipe tersebut perlu memperhatikan karakteristik fisik, kimia dan biologi, dinamika oseanografi, dan sosial budayanya.

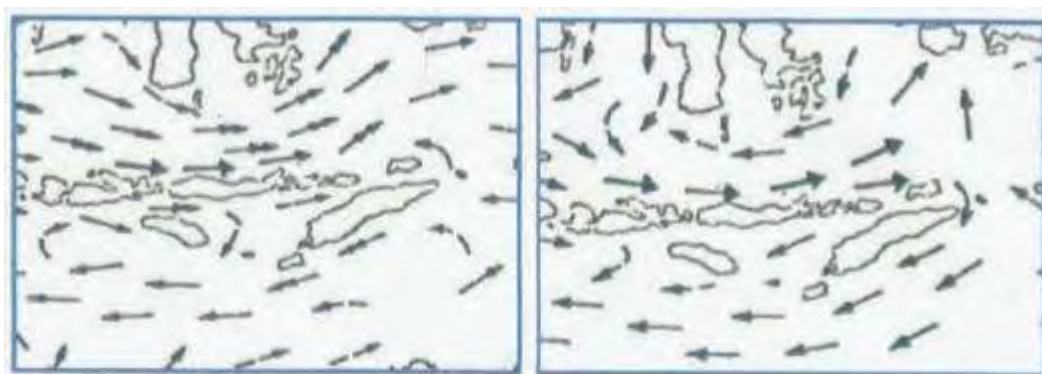
I.2.3.1. Pasang Surut

Bermacam tipe pasang surut (pasut) ditemukan di perairan Indonesia, yaitu tunggal (*diurnal*), ganda (*semi diurnal*), campuran dominan tunggal (*mixed tide predomandty diurnal*), campuran dominan ganda (*mixed tide predomandty diurnal*). Menurut Wyrski (1961), tipe pasut di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi NTB dipengaruhi oleh pasut dari Laut Flores dan dari Samudera Hindia yang keduanya bertipe campuran semi diurnal. Tipe pasang surut di perairan Selat Lombok dan sekitarnya adalah pasut campuran yang dominan ke harian ganda (*Mixed Tide Predominantly Semi Diurnal*), artinya dalam satu hari terjadi dua kali pasang dan dua kali surut. Hal yang sama terjadi di perairan Selat Alas yang memiliki pasang surut tipe pasut campuran yang dominan ke harian ganda. Di lokasi Badas Sumbawa bagian utara Pasang surut juga bertipe campuran ganda hal ini didukung dengan kondisi pasut *realtime* stasiun Badas.

I.2.3.2. Arus Laut

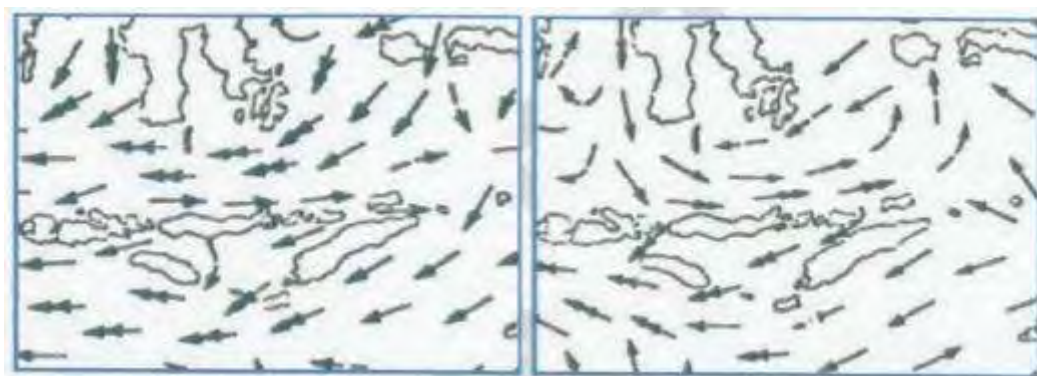
Secara umum perairan laut Nusa Tenggara Barat mempunyai arus yang kuat di sekitar pulau-pulau dan perairan selat. Kondisi arus ini sebagai konsekuensi dari morfologi dasar laut yang curam dan pengaruh arus global serta arus pasang surut yang dipengaruhi oleh dua lautan utama yaitu Laut Flores dan Samudera Hindia.

Secara global, perairan laut Nusa Tenggara Barat masih memperoleh pengaruh dari Arus Lintas Indonesia (ARLINDO) yang berasal dari Selat Makasar yang sebagian berbelok kearah timur menuju Laut Flores dan sebagian bergerak ke Samudera Hindia melalui Selat Lombok. Massa air yang bergerak ke Laut Flores sebagian berbelok ke selatan memasuki Samudera Hindia melalui Selat Alas dan Selat Sape. Arus-arus kuat umumnya terjadi pada periode menjelang pasang dan menjelang surut karena terdapat pergerakan massa air yang besar antara Laut Flores dan Samudera Hindia. Pola arus secara umum yang terjadi di Provinsi NTB dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Musim Barat (Desember-Februari)

Musim Peralihan 1 (Maret-Mei)



Musim Timur (Juni-Agustus)

Musim Peralihan 2 (September-November)

Gambar 1.3. Pola Arus di Perairan Laut KSPN Komodo dan Sekitarnya
(KLH, 2010)

Secara musiman, kecepatan arus tertinggi terjadi pada musim peralihan satu. Pada musim barat, arus di Laut Flores bergerak ke arah timur menuju Laut Banda dan sebagian berbelok ke selatan melalui Selat Sape menuju Laut Sawu dan bergerak ke arah timur. Pada musim peralihan satu, di perairan Laut Flores terjadi pertemuan massa air dari arah barat (Laut Jawa), Selat Makassar dan Laut Banda. Oleh karena massa air yang berasal dari arah barat lebih besar maka terjadi arus menyusur pantai di sebelah utara Flores menuju arah timur. Kondisi arus pada musim timur di daerah pesisir secara umum hampir sama dengan dengan kondisi arus pada musim peralihan satu. Pada musim peralihan dua, massa air yang dominan di sebelah utara berasal dari Selat Makassar. Arus yang berasal dari arah utara tersebut bertemu dengan arus laut yang berasal dari Laut Banda yang kemudian bergerak menyusur pantai ke arah timur.

Selat Lombok dalah koridor utama ARLINDO atau *Indonesian Through flow* (ITF). Arus ini membawa massa air Samudera Pasifik ke Samudera Hindia. Meskipun arah utama transportasi air dari timur laut, namun terbatas terjadinya pertukaran air dalam arah yang berlawanan. Aliran ITF yang hangat, rendah salinitas dari Pasifik Utara dan tengah,

menyediakan sumber air utama bagi Samudera Hindia bagian timur laut (Turak dan De Vanitier, 2011).

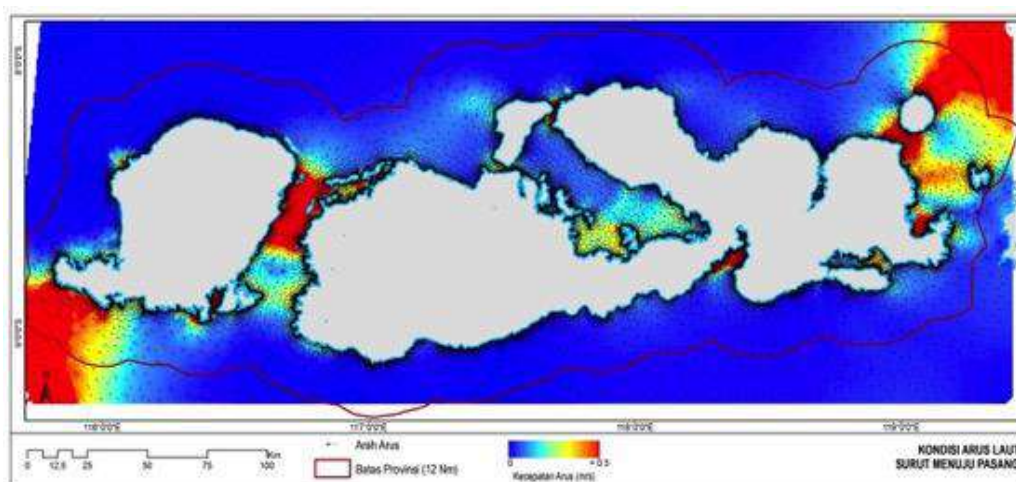
Keistimewaan Arlindo adalah karena massa air di Samudera Pasifik Ekuator Barat memiliki temperatur yang tinggi dan salinitas yang rendah dari pada massa air di Samudera Hindia. Jadi ketika memasuki Samudera Hindia massa airnya hangat dan tawar. Arlindo mengalir 80% melalui Selat Makasar sebagai jalur utama dan kemudian terpisah 25% melewati Selat Lombok dan 75% masuk ke Laut Flores, Banda dan keluar di Selat Ombai dan Laut Timor menuju Samudera Hindia. Dari Samudera Hindia diteruskan ke Afrika melalui Indian South Equatorial Current dan bergabung dengan Arus Agulhas di sekitar Afrika Selatan Samudera Atlantik. Jadi transport ARLINDO bisa mencapai 10.000 km dari Selat Lombok (Gordon, 2000).

Arlindo menguat dengan kecepatan melebihi 70 cm/dt selama bulan Juli-September, dan melemah pada bulan Januari-Maret, sedangkan arus pasang surut (pasut) mencapai kecepatan 350 cm/dt di daerah dangkalan (*sill*) antara Pulau Nusa Penida dan Lombok (Murrays dan Arief, 1988). Selain itu, interaksi antara pasang surut setengah harian (12,42 jam) dengan kedangkalan (*sill*) antara Pulau Nusa Penida dan Lombok menyebabkan terbentuknya soliton berupa paket gelombang yang menjalar dalam dua arah: ke Utara menuju Laut Flores dan mencapai Pulau Kangean dan ke Selatan menuju laut lepas Samudera Hindia. Dengan demikian, paling tidak ada 4 faktor utama: ARLINDO, alun (*swell*), pasut, dan soliton yang saling berinteraksi dan menyebabkan Selat Lombok senantiasa berombak dan memiliki arus kuat serta mengalami perubahan cepat (dalam hitungan jam).

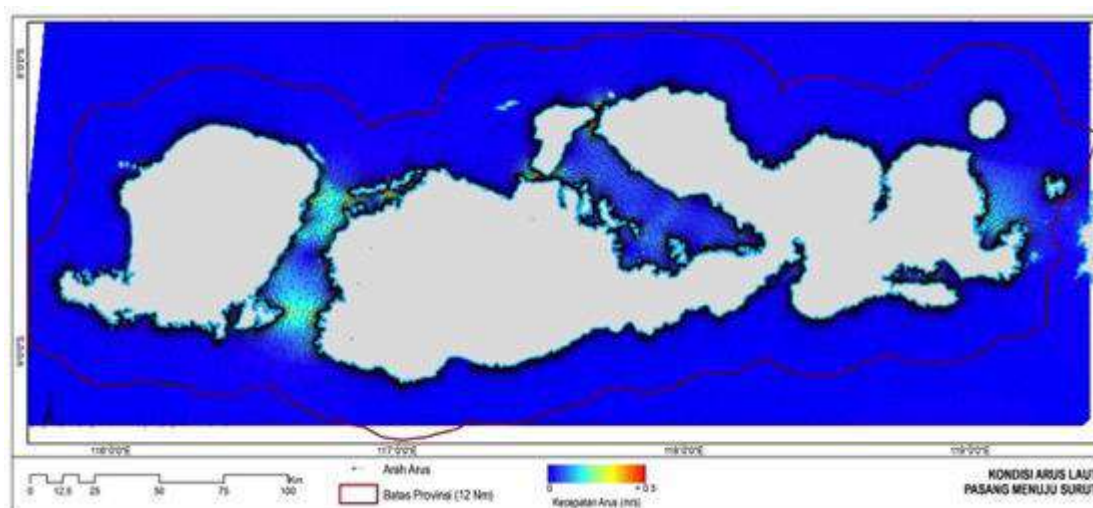
Berdasarkan hasil penelitian Manopp *et al.* (2014), diketahui bahwa rata-rata kecepatan arus permukaan perairan Lombok selama setahun (2013) adalah berkisar antara 24 – 55 cm/det. Kecepatan arus tertinggi

mencapai nilai lebih dari 40 cm/det terjadi pada bulan Januari, Maret dan tertinggi di bulan Juli 2013 mencapai 55 cm/det. Pada kondisi tersebut, wilayah yang terkena dampak paling tinggi adalah perairan teluk yang berada di daerah Lombok Barat), dimana terlihat arah arus hampir sepanjang tahun mengarah ke dalam perairan teluk yang berada di Kabupaten Lombok Barat tersebut.

Berdasarkan hasil pemodelan, arus laut di perairan NTB sangat dipengaruhi oleh fenomena pasut arah yang cenderung bolak balik.



Gambar 1. 4. Peta Arus Laut Perairan NTB Kondisi Pasang
(Sumber : Dokumen awal RZWP3K NTB, 2015)



Gambar 1. 5. Peta Arus Laut Perairan NTB Kondisi Surut
(Sumber : Dokumen awal RZWP3K NTB, 2015)

1.2.3.3. Gelombang

Gelombang di laut dibedakan menjadi beberapa macam tergantung gaya pembangkitnya, misalnya gelombang angin (ombak), gelombang tsunami, gelombang pasang surut, dan lain-lain. Gelombang, terutama gelombang angin, dapat menimbulkan energi untuk membentuk pantai atau merusak pantai, menimbulkan arus dan transport sedimen dalam arah tegak lurus dan sepanjang pantai. Gelombang tidak hanya sebagai faktor utama mempengaruhi pantai, tetapi juga memiliki energi yang misterius. Ukuran dan bentuk gelombang di perairan pesisir yang dangkal tidak teratur, sedangkan gelombang di laut dalam cenderung lebih teratur dan ada hubungan yang jelas antara periode gelombang dengan panjang gelombang dan kecepatannya. Semakin besar periode gelombang maka panjang gelombang semakin besar dan kecepatannya pun semakin tinggi.

Demikian juga halnya terjadi perbedaan kondisi gelombang yang tumbuh di perairan tertutup (perairan antar pulau) dan perairan terbuka (perairan terbuka ke samudera lepas). Selanjutnya untuk perairan di NTB, tinggi rata-rata gelombang signifikan mencapai nilai maksimum sekitar 2,0- 2,5 m di utara dan 2,5 – 3,0 m di selatan. Artinya bagian selatan NTB termasuk Selat Lombok mendapat hantaman langsung energi gelombang angin dari arah laut lepas Samudera Hindia (dari Selatan) (Sofian *et al.*, 2008).

Kondisi gelombang perairan NTB berdasarkan Stasiun Labuhan Badas dengan tinggi signifikan 0,3-0,8 m, dengan tinggi maksimumnya berkisar antara 0,5 -1,3 m. Sedangkan angin berasal dari tenggara dan selatan dengan kecepatan berkisar 2-20 knot.

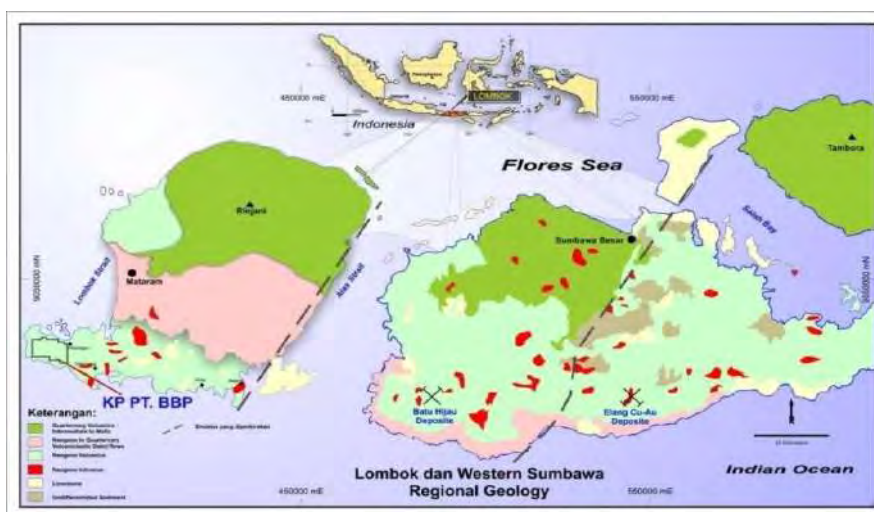
I.3. Geologi

Geologi wilayah Nusa Tenggara Barat secara umum ditutupi oleh kumpulan dari batuan andesit vulkanik, epiklastik breksi dan setempat dijumpai sisipan batu gamping kalsitis dan batu gamping koral dan di beberapa lokasi dijumpai intrusi andesit porfiri. Tidak ada struktur-struktur besar dan yang dapat dipetakan telah tercatat kecuali rekahan-rekahan yang secara umum berarah timur laut dan beberapa berarah barat daya sementara pada peta image "landsat dan foto udara" terlihat jelas liniament - kelurusan yang umumnya berarah NE - SW dan NW – SE.

Pulau Lombok terletak pada pusat kegiatan tektonik dari busur magmatic Sunda-Banda berarah Barat-Timur yang menunjukkan tempat bertemunya tiga lempeng tektonik besar (Hamilton, 1979). Geologi Pulau Lombok dicirikan oleh busur kepulauan dari tipe sedimentasi batuan gunung api yang terbentuk pada oligosenakhir hingga kwarter. Bagian selatan dari Pulau Lombok dibangun oleh batuan gunung api andesitikalkalin lemah hingga kalk-alkalin dengan terendah, perlapisan vulkaniklastik, intrusi intermediet k-rendah dan batuan sedimen laut dangkal serta batu gamping (Garwin, 2002).

Batuan berkomposisi dasitik secara lokal terpetakan di daerah ini, dimana umumnya menempati topografi yang tinggi. Batuan termuda adalah batuan gunung apikwarter yang sebagian besar menempati dibagian utara Pulau Lombok dan tidak terfokuskan untuk dieksplorasi, karena tidak mengalami proses dari sistem hydrothermal. Longsor batuan dan tanah pada daratan di bagian tengah dari Pulau Lombok sebagai pemisah antara batuan kwarter di utara dan batuan erosi busur gunung apipersier di selatan.

Pada bagian utara Pulau Sumbawa didominasi oleh batuan vulkanik yang berumur Kwartir sampai Resen(Qtv), dan terdapat pada bahagian hulu sungai Sai, sedangkan G. Lambuwu merupakan salah satu batuan yang berumur kwarter . Pada sisi Doro Saka ditemukan kerucut vulkanik muda yang berukuran kecil dan muncul kepermukaan. Gunung Tambora pernah meletus pada tahun 1815 , dan merupakan salah satu peristiwa letusan yang sangat besar dan melemparkan abu gunung api keudara dengan radius sekitar 15 km², Material gunung api yang dihasilkan dari letusan tersebut berupa batu apung, dan aliran lava. Abu letusan tersebut saat ini menutupi sebahagian besar wilayah penelitian dengan ketebalan hingga beberapa meter. Pada peristiwa letusan tersebut menelan korban jiwa sekitar 100.000 orang. Gunung api yang terdapat pada wilayah Sangiang (pulau yang terletak pada bahagian Timurlaut Sumbawa) pada saat ini sudah tidak menunjukkan aktifitas lagi semenjak tahun 1980. Pola patahan yang terdapat pada wilayah ini mengakibatkan Pulau Sumbawa terpotong dengan arch Timur laut, Barat laut dan Timur - Barat. Zona patahan yang terbentuk tersebut sebahagian diketahui mengandung mineralisasi. Peta geologi regional Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok dapat dilihat pada gambar 1.5.



Gambar 1.5. Peta geologi regional Pulau Lombok dan Sumbawa

I.4. Tata Ruang

Perencanaan Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat diarahkan seiring dengan pembangunan sistem pemerintahan dari sentralistik menuju desentralistik. Karena itu, kebijakan pemerintah dan masyarakat menjadikan penataan ruang di Provinsi NTB lebih menekankan pada pengembangan ruang berbasis sumberdaya lokal.

1. Rencana Pengembangan Wilayah Prioritas.

Terdiri dari wilayah bermasalah (rawan bencana dan hutan lindung), wilayah potensial (sepanjang jalur transportasi utama dan wilayah tujuan wisata), wilayah yang memiliki sumberdaya alam besar (emas di Sekotong, pasirbesi di Selong, emas-tembaga-perak di Jereweh, pasir besi di Alas, pasir besi dan belerang di Dompu, emas-perak-pasirbesi di Bima), dan kawasan di sekitar pelabuhan udara dan pelabuhan laut.

2. Rencana Pemantapan Kawasan Lindung.

Terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap wilayah dibawahnya (kawasan hutan lindung, resapan air, sempadan sungai dan sempadan pantai), kawasan sekitar waduk/danau, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam (kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa, hutan bakau dan kawasan suaka alam laut), dan kawasan rawan bencana.

3. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya.

Terdiri dari kawasan hutan produksi (hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap), kawasan pertanian pangan (sawah, tegalan/kebun), kawasan perikanan (ikan laut, ikan darat, tambak), kawasan perkebunan, kawasan peternakan, dan kawasan pariwisata.

I.5. Kondisi Ekologis

Tingginya pertumbuhan penduduk di Pulau Lombok berbanding terbalik dengan luas wilayah Pulau Lombok yang sempit. Diperkirakan pada tahun 2035 jumlah penduduk Pulau Lombok terus meningkat menjadi 4.573.319 jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,56 persen setiap tahunnya, dalam kurun waktu 20 tahun mendatang jumlah penduduknya bertambah sebesar 1.222.331 jiwa.

Setiap tahunnya lahan pertanian seperti sawah luasannya semakin berkurang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pesatnya perkembangan ekonomi. Hal ini akan dapat mempengaruhi jumlah produksi padi dimasa yang akan datang. Salah satu dampak konversi lahan yang sering mendapat sorotan masyarakat luas adalah terganggunya ketahanan pangan yang merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional (Irawan 2005). Saat ini Pulau Lombok diperkirakan surplus beras sekitar 155.707 ton dengan jumlah produksi 5.884.353 ton/hektar dan rata-rata konsumsi beras meningkat sebesar 127,8 kg per kapita per tahun dibandingkan sebelumnya sebesar 122 kg/kapita/tahun.

Tabel 1.3. Perhitungan Tapak Ekologi Pulau Lombok

No	Penggunaan Lahan	Produksi	Produktivitas Hasil Panen	Faktor Penyama	Area Digunakan	Jumlah Penduduk	Tapak ekologi
		ton/tahun	ton/ha/tahun	gha/ha	gha	jiwa	gha/jiwa
1	Lahan Pertanian <i>Tanaman Pangan</i>						
a	Padi sawah + Ladang	1.008.823	4,88	2,51	518.707	3.352.988	0,15470
b	jagung	156.348	5,64	2,51	69.622	3.352.988	0,02076
c	ubi kayu	53.080	19,09	2,51	6.980	3.352.988	0,00208
d	ubi jalar	13.115	17,19	2,51	1.915	3.352.988	0,00057
e	kacang tanah	17.097	1,27	2,51	33.747	3.352.988	0,01006
f	kacang kedelai	18.668	1,07	2,51	45.895	3.352.988	0,01309
g	kacang hijau	1.661	1,34	2,51	3.112	3.352.988	0,00093
	Perkebunan						
a	kakao	62.928	1,32	2,51	129.292	3.352.988	0,03856
b	kopi	1.990	0,38	2,51	12.979	3.352.988	0,00387
c	jahe mete	4.640	0,18	2,51	65.799	3.352.988	0,01962
d	tembakau	31.520	1,41	1,80	40.346	3.352.988	0,01203
2	Lahan Peternakan Populasi Terbak	49.191	0,22	0,46	104.801	3.352.988	0,03126
3	Lahan Perikanan Perikanan darat dan laut	84.989	3,12	0,37	10.089	3.352.988	0,00301
4	Lahan Kehutanan Kayu	1.343	0,07	1,26	25.621	3.352.988	0,00764
5	Lahan Terbangun Perumahan, perkantoran, dll	29.084	3,61	2,51	263.550	3.352.988	0,07860
6	Lahan Penyerap Karbon Hutan	9.440	0,13	1,37	99548,0549	3.352.988	0,02969
Total Tapak Ekologi:							0,42649

Sumber : data olahan, Geomedia Volume 15 Nomor 2 November 2017

Hasil perhitungan nilai tapak ekologi menunjukkan bahwa total jumlah permintaan sumberdaya diberbagai jenis penggunaan ruang adalah sebesar 0,42649 gha/jiwa. Permintaan sumberdaya paling tinggi di wilayah Pulau Lombok berada pada kategori penggunaan lahan pertanian sebesar 0,27629 gha. Sedangkan perhitungan nilai biokapasitasnya diketahui bahwa ketersediaan sumberdaya yang ada di Pulau Lombok sebesar 0,44627 gha. Pasokan sumberdaya yang paling tinggi tersedia pada kategori penggunaan lahan pertanian sebesar 0,27433 gha.

Tabel 1.4. Perhitungan Biokapasitas pada Penggunaan Lahan Pulau Lombok

No	Penggunaan Lahan	Luas <i>Existing</i>	Faktor Panen	Faktor Penyuma	Ketersediaan Lahan	Jumlah Penduduk	Biokapasitas
		ha	(-)	gha/ha	gha	jiwa	gha/jiwa
1	Lahan Pertanian						
	<i>Tanaman Pangan</i>						
a	Padi sawah + Ladang	206.656	0,98	2,51	529.292	3.352.988	0,15786
b	jagung	27.738	0,98	2,51	71.043	3.352.988	0,02119
c	ubi kayu	2.781	0,98	2,51	7.123	3.352.988	0,00212
d	ubi jalar	763	0,98	2,51	1.954	3.352.988	0,00058
e	kacang tanah	13.445	0,98	2,51	34.436	3.352.988	0,01027
f	kacang kedelai	17.488	0,98	2,51	44.791	3.352.988	0,01336
g	kacang hijau	1.240	0,98	2,51	3.176	3.352.988	0,00095
	Perkebunan						
a	kelapa	51.511	0,98	2,51	131.931	3.352.988	0,03935
b	kopi	5.171	0,98	2,51	13.244	3.352.988	0,00395
c	jambu mete	26.215	0,98	2,51	67.142	3.352.988	0,02002
d	tembakau	22.415	2,57	1,8	15.699	3.352.988	0,00468
2	Lahan Peternakan						
	Lahan Pengembalaan	273.817	1,81	0,46	69.588,9	3.352.988	0,02075
3	Lahan Perikanan						
	Perikanan darat dan laut	27.269	3,36	1,26	10.225,7	3.352.988	0,00305
4	Lahan Kehutanan						
	Hutan Produksi	20.334	0,82	0,37	9175,2	3.352.988	0,00274
5	Lahan Terbangun						
	Pemukiman, perkantoran, dll	87.251	0,98	2,51	214.620,3	3.352.988	0,06401
6	Lahan Penyerap Karbon						
	Hutan	163.343	0,82	1,37	272.902,3	3.352.988	0,08139

Sumber : data olahan, Geomedia Volume 15 Nomor 2 November 2017

Perhitungan tapak ekologi dan biokapasitas menghasilkan nilai keseimbangan ekologi sebesar 0,01978 gha. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Pulau Lombok berada pada kategori Wilayah Surplus sumberdaya. Kondisi lahan perikanan dan penyerap karbon relatif masih aman meskipun pada lahan penyerap karbon dapat dilihat permintaan cenderung tinggi namun jumlah pasokan masih mampu untuk memenuhi permintaan sumberdaya. Kondisi lahan pertanian, peternakan, kehutanan dan lahan terbangun berada dalam kondisi defisit dimana jumlah

biokapasitasnya tidak mampu mengimbangi tingginya jumlah tapak ekologi.

I.6. Tutupan Lahan

Tutupan lahan eksisting didapatkan dari hasil digitasi peta citra landsat tahun 2015-2016 oleh Kementerian ATR/Kepala BPN, hasil digitasi yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 154. dan Peta 1.7.

Dari total luas lahan 1,96 juta ha, tutupan lahan didominasi oleh semak belukar luas 780.563 ha (39,65 %) dan Hutan lahan kering 623.316,92 ha (31,66%).

Tabel 1.5. Luas tutupan lahan eksisting di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016

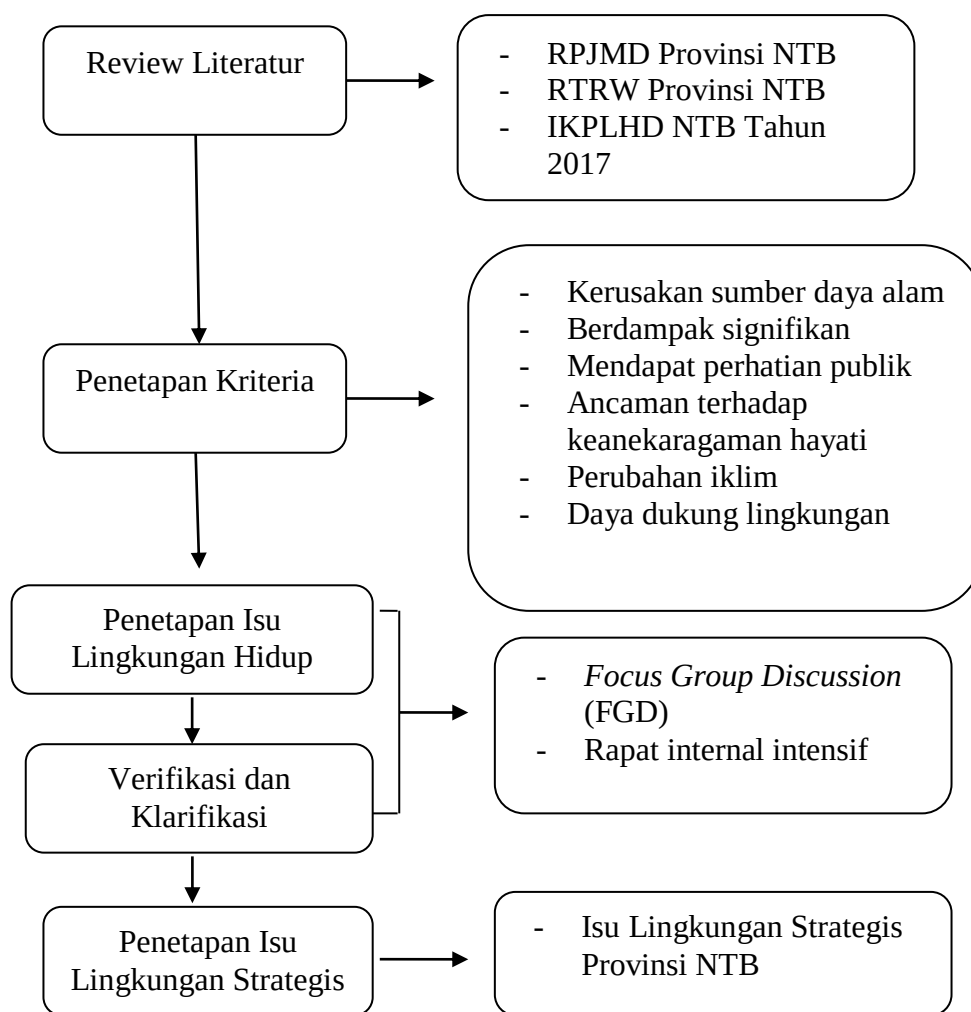
No.	KAWASAN LINDUNG & KAWASAN BUDIDAYA	LUAS (Ha)	%
1.	Hutan Lahan Kering Primer	623.316,92	31,66
2.	Hutan Lahan Kering Sekunder	83.346,51	4,23
3.	Hutan Mangrove Primer	24,55	0.001
4.	Hutan Mangrove Sekunder	391,95	0,02
5.	Lahan Terbuka	47.732,52	2,42
6.	Pemukiman	109.506,14	5,56
7.	Pertanian Lahan Kering	201.267,91	10,22
8.	Sawah	96.871,90	4,92
9.	Semak/Belukar	780.563,44	39,65
10.	Semak/Belukar Rawa	5.351,55	0,27
11.	Tambak	1.359,59	0,07
12.	Badan Air	11.522,23	0,59
13.	Belum Terklasifikasi	7.562,12	0,38
JUMLAH		1.968.817,33	100

Sumber : Hasil Digitasi Citra Landsat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 (Kementerian ATR/Kepala BPN)

terkait, nara sumber dari kalangan Perguruan Tinggi, serta Lembaga Masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat didasari pada aspek kapabilitas disiplin keilmuan dan posisi/jabatan yang memiliki wewenang terkait isu atau substansi.

3. Penentuan Isu Prioritas

Dalam penyusunan dan perumusan isu lingkungan prioritas di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Gambar 1.8. Alur Penentuan Isu Prioritas Lingkungan Hidup

Tahap awal yang dilakukan dalam upaya penjaringan isu dilaksanakan dengan melakukan desk study dilanjutkan dengan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD). Langkah review literatur meliputi kajian terhadap pustaka dan konsep-konsep pengelolaan lingkungan yang telah ada. Diantara literatur yang diacu adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB yang didalamnya membahas Visi dan Misi Nusa Tenggara Barat, Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB, Kajian Rawan Bencana NTB dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Renstra DLHK Provinsi NTB.

Penjaringan isu strategis dilaksanakan dengan melakukan analisis data dasar menggunakan metode analisis spasial. Data dasar yang dianalisis umumnya berupa gambaran umum kondisi sosial ekonomi dan lingkungan di Provinsi NTB. Beberapa data dilengkapi dengan data time-series yang menggambarkan trend kondisi demografi, ekonomi, sumberdaya alam. Analisis spasial juga digunakan untuk melihat perubahan penggunaan lahan.

FGD dilakukan dengan pola konsultasi dan diskusi berbagai sektor yang melibatkan stakeholders, baik dari unsur pemerintah, swasta dan masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat digali isu-isu penting yang terkait dengan berbagai permasalahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Identifikasi isu-isu panjang dilakukan dengan menghimpun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan yang didasarkan pada data dan/ atau analisis teknis (ilmiah) serta berdasarkan nomenklatur yang ada.

Isu lingkungan hidup yang dikemukakan adalah isu strategis yang terkait dengan perkembangan wilayah dan dampaknya terhadap lingkungan daerah.

Kriteria yang dapat dijadikan isu prioritas :

- Kerusakan sumberdaya alam;
- Kerusakan keanekaragaman hayati;
- Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan;
- Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen)

4. Analisis Data

Analisis data pada Laporan DIKPLHD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengikuti kerangka kerja DPSIR (*Drivers-Pressures-State-Impact-Responses*). Struktur isi menggunakan struktur generik (substansi yang harus ada) untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antar waktu. Struktur isi generik ditentukan melalui telaahan ketersediaan data dan kesamaan ekosistem. Struktur isi generik berdasarkan media lingkungan hidup meliputi: tataguna lahan dan hutan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana, dan perkotaan. Kelima media memberikan kesimpulan mengenai status atau kondisinya apakah baik, buruk ataupun diantaranya, dan dilengkapi dengan penyebab terjadinya kondisi tersebut (tekanan/Pressure), serta upaya-upaya untuk mengatasinya (Response). Pengumpulan data dilakukan berdasarkan jenis data (spasial dan tabular) dan bentuk data (numerik, narasi, gambar atau foto), sedangkan pengolahan data dilakukan dengan urutan pemilihan, pemilahan, penapisan dan perhitungan data dengan satuan yang konsisten.

5. Sumber Data

Sumber data DIKPLHD, antara lain:

- a. Organisasi Perangkat Daerah terkait di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- b. Hasil Kajian, penelitian dan survey dari Instansi Pemerintah maupun Swasta;
- c. Unit kerja internal di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- d. Data dari pihak lain.

Data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan DIKPLHD Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan tahun 2018 dan dilaporkan pada tahun 2019.

I.8. MAKSUD DAN TUJUAN

I.8.1. MAKSUD

Maksud dari penyusunan dokumen IKPLHD Provinsi NTB adalah untuk memberikan data informasi kinerja pengelolaan lingkungan di Provinsi NTB, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup Nusa Tenggara Barat pada Tahun-Tahun mendatang;

I.8.2. TUJUAN

1. Dapat digunakan sebagai dasar saat pengambilan keputusan untuk memperbaiki lingkungan di Provinsi NTB. Dengan adanya dasar ini maka perbaikan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan lebih mudah untuk dilaksanakan.
2. Memberi gambaran secara nyata melalui data yang diambil dari lingkungan secara nyata guna meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan pengertian kepada masyarakat tentang kondisi lingkungan. Dengan adanya pemahaman dari

masyarakat tersebut akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan demi perbaikan lingkungan.

3. Dapat digunakan untuk mengukur perkembangan dan kemajuan lingkungan di suatu daerah tertentu.

I.9. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup yang disajikan dalam Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah ini meliputi:

1. Ruang lingkup wilayah Nusa Tenggara Barat meliputi wilayah daratan dan pesisir;
2. Ruang lingkup materi yang tercantum dalam panduan Nirwasita Tantra, yakni penentuan isu prioritas, analisis P-S-R dan inovasi dalam pengelolaan daerah;
3. Ruang lingkup kedalaman data mengikuti ketentuan yang terdapat dalam panduan Nirwasita Tantra.



ANALISIS DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT DAN RESPONSE ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 menggunakan kerangka kerja model *Drivers-Pressures-State-Impact-Responses* berdasarkan pada media lingkungan hidup, meliputi: tataguna lahan dan hutan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana, perkotaan dan tata kelola.

II.1. TATAGUNA LAHAN

II.1.1. Lahan

Lahan merupakan bagian dari bentang lahan (*Landscape*) yang meliputi lingkungan fisik termasuk di dalamnya iklim, topografi/relief, hidrologi tanah dan keadaan vegetasi alami yang

semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Pada umumnya, penetapan penggunaan lahan didasarkan pada karakteristik lahan dan daya dukung lingkungannya. Bentuk penggunaan lahan yang ada dapat dikaji melalui proses evaluasi sumber daya lahan, sehingga dapat diketahui potensi sumber daya lahan untuk berbagai penggunaannya. Pengelolaan lahan yang ramah lingkungan dan penyusunan tata ruang yang tepat, dapat mengurangi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan antara lain banjir, kekeringan dan longsrer.

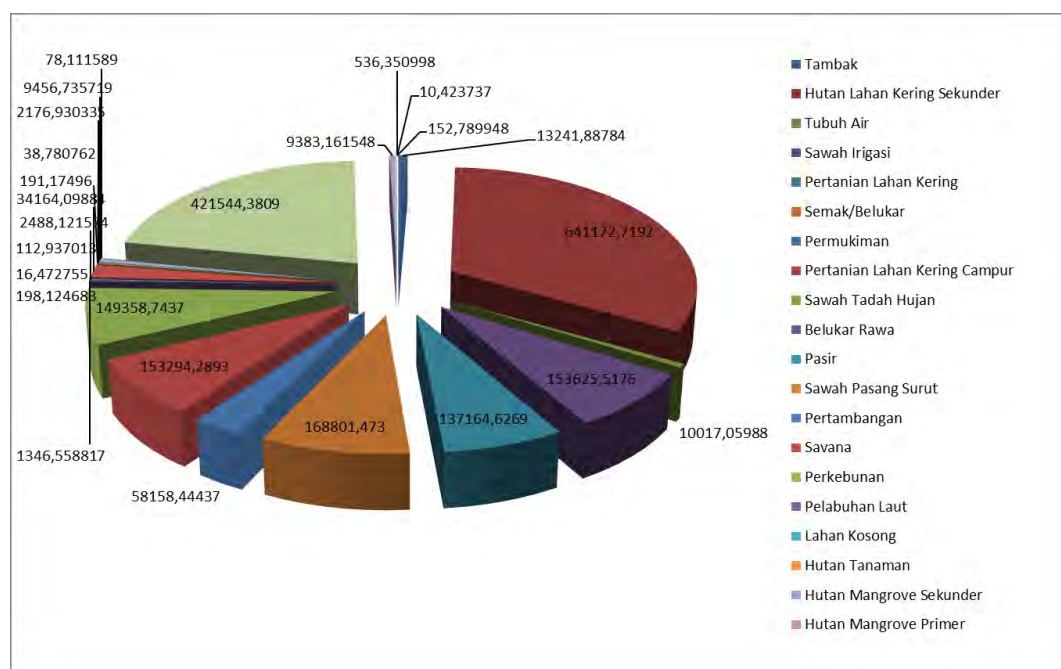
Pada Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan revisi dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031. Hal ini disebabkan karena seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan alih fungsi lahan untuk mewujudkan perkembangan di masing-masing Kabupaten/Kota. Luasan masing-masing lahan di Nusa Tenggara Barat dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1. Luasan Penggunaan Lahan di NTB

No	Penggunaan Lahan di NTB	Luas Area (Ha)	Prosentase penggunaan Lahan (%)
1	Hutan Lahan Kering Primer	421544,3809	21,434
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	641172,719224	32,601
3	Hutan Lahan Kering Campuran	10,423737	0,001
4	Hutan Tanaman	2176,930335	0,111
5	Hutan Mangrove Primer	78,111589	0,004
6	Hutan Mangrove Sekunder	9456,735719	0,481
7	Pertanian Lahan Kering	137164,6269	6,974
8	Pertanian Lahan Kering Campur	153294,2893	7,794
9	Perkebunan	191,17496	0,010
10	Sawah Irigasi	153625,5176	7,811
11	Sawah Pasang Surut	16,472755	0,001
12	Semak/Belukar	168801,473	8,583
13	Sawah Tadah Hujan	149358,7437	7,594
14	Belukar Rawa	198,124683	0,010
15	Lahan Kosong	38,780762	0,002

16	Savana	34164,09884	1,737
17	Tanah Terbuka	9383,161548	0,477
18	Pasir	1346,558817	0,068
19	Pertambangan	2488,121574	0,127
20	Permukiman	58158,44437	2,957
21	Pelabuhan Laut	112,937013	0,006
22	Bandar Udara Domestik/Internasional	536,350998	0,027
23	Bandar Udara Domestik	152,789948	0,008
24	Tambak	13241,89	0,67
25	Tubuh Air	10017,06	32,60
	TOTAL	1.966.729,916	100

Sumber : RBI-25K dan Intepretasi Citra SPOT 6_7



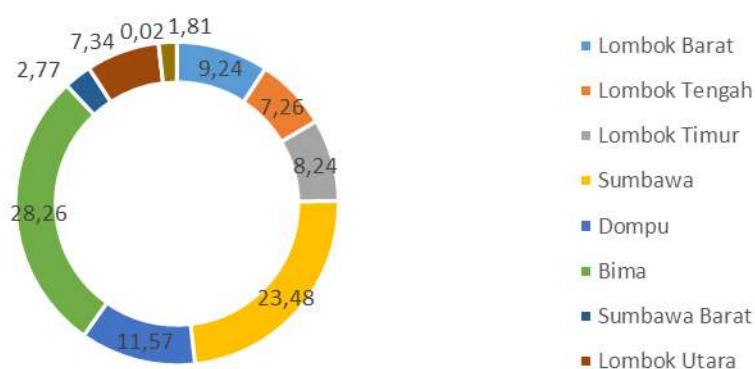
Gambar 2.1. Grafik Luasan Penggunaan lahan

Berdasarkan grafik pada Gambar 2.1. diketahui bahwa penggunaan lahan terbesar adalah pada areal hutan lahan kering sekunder yaitu seluas 641.172,72 Ha atau sekitar 32,60% dari total penggunaan lahan di NTB, sedangkan penggunaan lahan terkecil ada pada hutan lahan kering sampuran seluas 10,42 Ha atau sekitar 0.001% dari total penggunaan lahan di NTB.

II.1.2. Lahan kering

Kesuburan tanah sangat penting bagi pertumbuhan tanaman karena asupan nutrisi bagi tanaman disediakan oleh tanah dan salah satu penentu kesuburan tanah ini adalah jenis lahannya. Perbedaan jenis lahan akan turut serta menentukan jumlah nutrisi yang ada didalamnya. Salah satu jenis lahan ini adalah lahan kering. Lahan kering adalah hamparan lahan yang tidak pernah digenangi air atau tergenang air pada sebagian waktu selama setahun. Lahan kering dapat digunakan untuk usaha pertanian dengan menggunakan air secara terbatas dan biasanya hanya mengharapkan dari curah hujan.

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan lahan kering, antara lain adalah tingkat kesuburan tanah yang relative rendah, mudah tererosi, ketersediaan air terbatas dan topografi umumnya tidak datar. Adapun solusi untuk lahan kering adalah perlunya pengolahan tanah yang baik, pemberian pupuk organik pada lahan kering, pembuatan terasering agar permukaan tanah yang miring menjadi bertingkat-tingkat untuk mengurangi kecepatan air yang meresap kedalam tanah. Selain itu juga dengan melakukan konservasi secara kultur teknik, penggunaan varietas unggul yang tahan terhadap kekeringan dan melakukan pola tanam yang efektif.



Gambar 2.2. Diagram Persentase Luas Lahan Kering Per Kabupaten/kota di Provinsi NTB

Diketahui sekitar 16% lahan di Provinsi NTB adalah lahan kering. Berdasarkan Gambar 3.2. dapat diketahui luas lahan kering terbesar terdapat di Kabupaten Bima yaitu 89,911 Ha atau 28,26% dan terendah Kota Mataram sebesar 73 Ha atau 0,02%.

Dari tabel 8 (Buku Data) dapat diketahui hasil evaluasi kerusakan tanah di lahan kering berdasarkan pengambilan sampel di Kabupaten Lombok Timur dan dilakukan uji laboratorium dimana uji ketebalan solum, redoks, dan jumlah mikroba melebihi batas ambang kritis. Pada uji ketebalan solum hasil pengamatannya sebesar > 100 cm sedangkan batas ambang kritis hanya <20 cm.

Tabel 2.2. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering

No.	Parameter	Ambang Kritis	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
1	Ketebalan Solum	< 20 cm	> 100 cm	Melebihi
2	Kebatuan Permukaan	> 40 %	10 - 15 %	Tidak Melebihi
3	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	10 % - 20%	Tidak Memenuhi
		> 80 % pasir kuarsitik	35%	Tidak Melebihi
4	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1,24	Tidak Melebihi
5	Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	57,40%	Tidak Melebihi
6	Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0 cm/jam	5,67	Tidak Melebihi
7	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	6,22	Tidak Melebihi
8	Daya Hantar Listrik	> 4,0 mS/cm	0,44	Tidak Melebihi
9	Redoks	< 200 mV	92,2	Melebihi
10	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	1,29 x 10	Melebihi

Sumber : Balai Pengujian Teknologi Pertanian, NTB.2017

II.1.3. Lahan kritis

Lahan kritis dapat didefinisikan sebagai lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan. Fungsi yang dimaksud pada definisi tersebut adalah fungsi produksi dan fungsi tata airnya. Fungsi produksi berkaitan dengan fungsi tanah sebagai sumber unsur hara bagi tumbuhan, sedangkan fungsi tata air berkaitan dengan fungsi tanah sebagai tempat berjangkarnya akar dan menyimpan air tanah. Lahan kritis dapat menyebabkan kerusakan fisik, kimia dan biologi tanah.

Faktor penyebab lahan kritis adalah perambahan hutan, penebangan liar (*illegal logging*), kebakaran hutan, pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak berazaskan kelestarian, penataan zonasi kawasan belum berjalan, pola pengelolaan lahan tidak konservatif, perambahan hutan dan pengalihan status lahan untuk berbagai kepentingan.

Penebangan hutan yang tidak terkendali yang diikuti perladang berpindah akan mengakibatkan lahan terbuka sehingga butiran hujan akan langsung menerpa tanah dan butiran tanah akan hancur dan terlepas, aliran permukaan akan menghanyutkan butiran tanah yang terlepas sekaligus membawa humus dan unsur hara, sehingga menurunkan kesuburan tanah. Pengelolaan lahan dengan tanaman yang sama terus menerus tanpa adanya usaha mengembalikan unsure hara yang terbawa dari hasil panen akan mengakibatkan pengurasan hara tertentu yang akan mengganggu keseimbangan hara dalam tanah. Hal ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman.

Pembakaran yang tidak terkontrol terutama dalam persiapan lahan akan mengakibatkan hilangnya sumber bahan organik dan humus tanah, terganggunya kehidupan dan kegiatan jasad renik, hilangnya unsur hara tertentu seperti nitrogen dan menurunnya fungsi penyimpanan dan penyediaan air serta hara. Lahan kritis dapat mengakibatkan daya resap tanah terhadap air menurun sehingga kandungan air tanah berkurang yang mengakibatkan kekeringan pada waktu musim kemarau, terjadinya arus permukaan tanah pada musim hujan yang mengakibatkan banjir dan longsor, menurunnya kesuburan tanah, dan daya dukung lahan serta keanekaragaman hayati, krisis air bersih, meluasnya penyakit tropis seperti malaria, demam berdarah dan diare. Selain itu, lahan kritis juga mengakibatkan kebakaran hutan dan hilangnya jutaan spesies

flora dan fauna karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan suhu bumi.

Kasus perambahan hutan yang terjadi selama kurun waktu 2018 di kawasan hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai luasan sebesar 96.238,24 Hektar yang tersebar di masing-masing Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dirinci berdasarkan kawasan wilayah Balai Kesatuan Pemangku Hutan seperti pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4.

Tabel 2.3 Luas Areal Perambahan Hutan

No	Balai Kesatuan Pemangku Hutan	Luas Area Perambahan (Ha)
1	AMPANG PLAMPANG	17140,2
2	AMPANG RIWO SOROMANDI	14261,6
3	MARIA DONGGOMASA	6845,67
4	ORONG TELU BRANG BEH	7830,39
5	PUNCAK NGENGAS BATULANTEH	2792,51
6	RINJANI BARAT, PELANGAN, TASTURA	23014,02
7	RINJANI TIMUR	9002,99
8	ROPANG	1073,32
9	SEJORONG MATAIANG BRANG REA	53,05
10	TAHURA NURAKSA	302,69
11	TAMBORA	1482
12	TOFO PAJO, MADAPANGGA ROMPU, WAWORADA	12439,8
	TOTAL	96.238,24

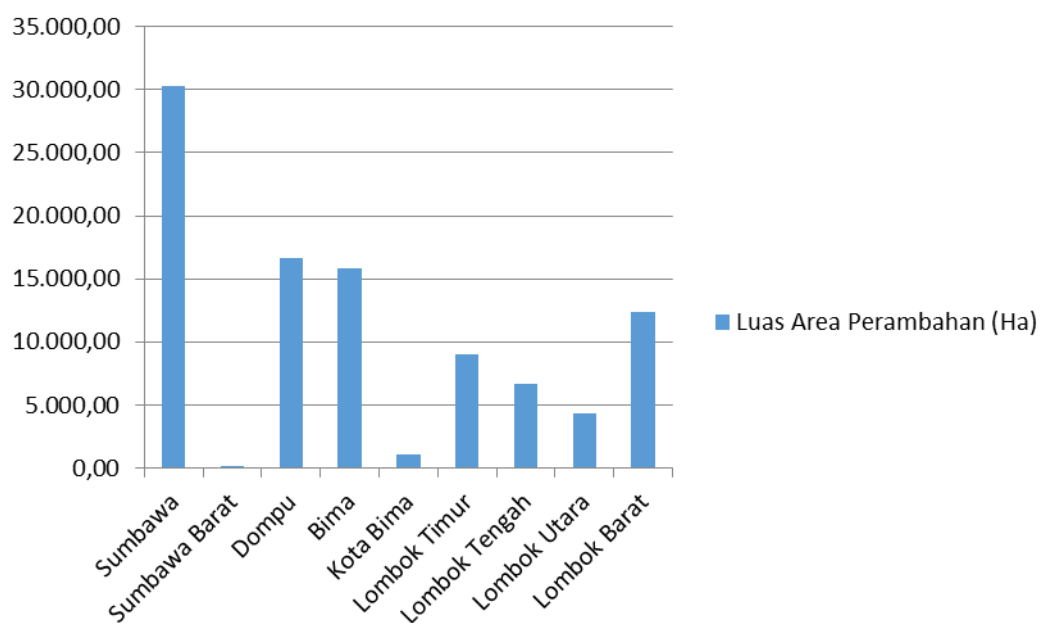
Sumber data : olah data KPH dan Tahura pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2018

Tabel 2.4 Luas Areal Perambahan Hutan di masing-masing
Kabupaten/Kota se NTB

No.	Kabupaten	Luas (Ha)
1	Sumbawa	30,291.48
2	Sumbawa Barat	53.05
3	Dompu	16,690.26
4	Bima	15,790.38
5	Kota Bima	1,093.37
6	Lombok Timur	9,002.99
7	Lombok Tengah	6,686.95
8	Lombok Utara	4,299.67
9	Lombok Barat	12,330.09
	TOTAL	96.238,24

Sumber data : olah data KPH dan Tahura pada Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Provinsi NTB, 2018

Luas Area Perambahan Hutan (Ha)



Gambar 2.3. Grafik luas area perambahan hutan di Provinsi NTB

Penanganan lahan kritis mutlak dilakukan karena berdampak sangat luas terhadap lingkungan dan kehidupan makhluk hidup. Lahan kritis dapat memicu kejadian bencana alam, kegagalan panen dan pada akhirnya meningkatkan kemiskinan penduduk.

Oleh karena itu, perlu upaya untuk mencegah terjadinya lahan kritis. Beberapa upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah dengan mengurangi eksploitasi hutan, tindakan yang tegas terhadap pembukaan lahan area untuk kegiatan apapun di kawasan hutan lindung, melakukan penghijauan yang intensif pada kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan yang teridentifikasi sebagai lahan kritis, menghindari meluasnya alih fungsi lahan, tidak memberikan izin penambangan, harus ada sanksi tegas bagi masyarakat yang membuang sampah di sungai, melakukan kampanye tentang pelestarian lingkungan, tidak membakar hutan dan lahan serta pelestarian hutan tropis.

Selama 5 (lima) tahun sejak 2013 – 2017 terjadi penambahan luasan lahan kritis baik di dalam maupun diluar kawasan hutan. Lahan kritis tersebut meliputi 3 (tiga) kategori yaitu sangat kritis, kritis dan agak kritis seperti pada Tabel 2.5.

Tabel. 2.5. Perkembangan Luasan Lahan Kritis di Provinsi NTB

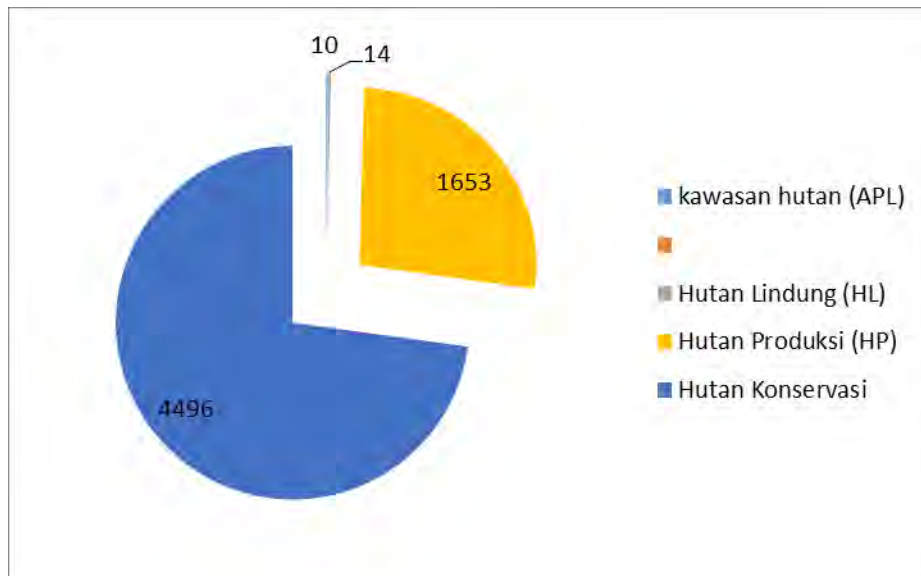
No .	LAHAN KRITIS	Tahun 2013 (Ha)	Lahan Kritis Hasil Peta Citra 2017 (Ha)	Penambahan Lahan Kritis dlm 5 tahun (Ha)
1	Dalam Kawasan Hutan	141.376	280.941	139.565
2	Luar Kawasan Hutan	437.270	577.650	140.380
Jumlah NTB		578.646	858.591	279. 945

Sumber : data olah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018

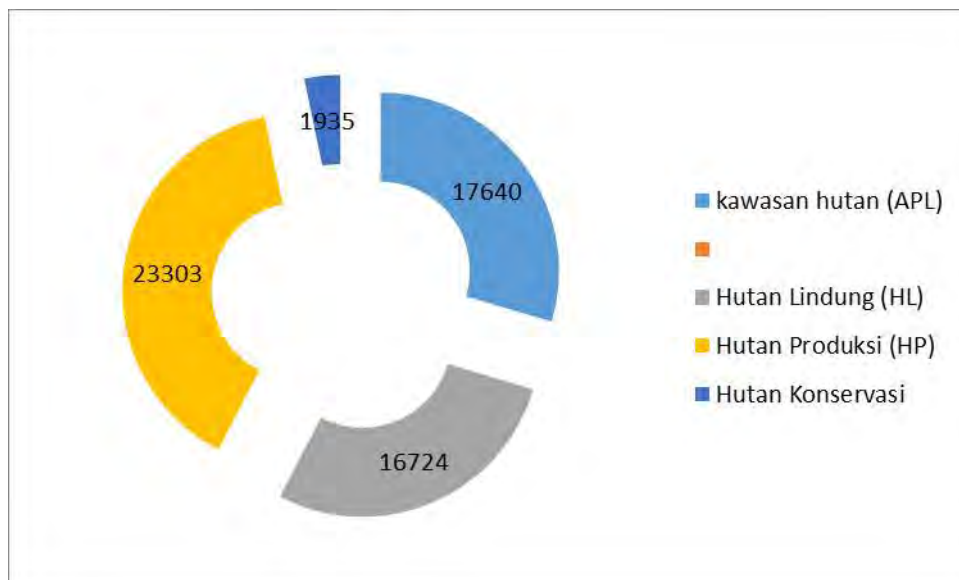
Berdasarkan Tabel 2.5 diketahui bahwa terjadi penambahan luasan lahan kritis seluas 279.945 Ha selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2013. Factor utama yang menyebabkan semakin meluasnya lahan kritis di Provinsi Nusa Tenggara Barat diantaranya:

1. Permasalahan di dalam kawasan hutan
 - a. Perambahan/perladangan liar untuk tanaman semusim (padi, jagung, pisang)
 - b. Pembalakan liar
 - c. Penguasaan kawasan tanah
 - d. Kebakaran hutan
 - e. Keterbatasan tenaga pengamanan hutan
(rasio 1 petugas : 2.200 Ha)
2. Permasalahan di lahan milik
 - a. Konversi kebun menjadi lading terbuka
 - b. Teknis pembukaan lahan dengan pembakaran
 - c. Perubahan tradisi pola tanam agroforestry/tumpangsari
 - d. Penyempitan dan pendangkalan sungai karena erosi/sedimentasi
 - e. Keterbatasan penyuluh dengan rasio 1 petugas : 5 desa.

Luas Lahan Kritis Propinsi NTB sesuai SK Penetapan Lahan Kritis Nasional adalah 65.799 Ha atau sekitar 3,26 % dari luas wilayahnya. Lahan kritis yang dimaksud hanya mencatat 2 (dua) kategori yaitu sangat kritis dan kritis sementara untuk kategori lahan potensial kritis atau lahan agak kritis tidak dihitung dalam data tersebut. Lahan kritis yang terdapat didalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan. Lahan kritis paling luas terdapat di Kabupaten Sumbawa yaitu 22.521 Ha dengan rincian 12.933 Ha didalam kawasan hutan dan 9.528 Ha di luar kawasan hutan.



Gambar 2.4. Grafik luas lahan sangat kritis berdasarkan fungsi kawasan di Provinsi NTB



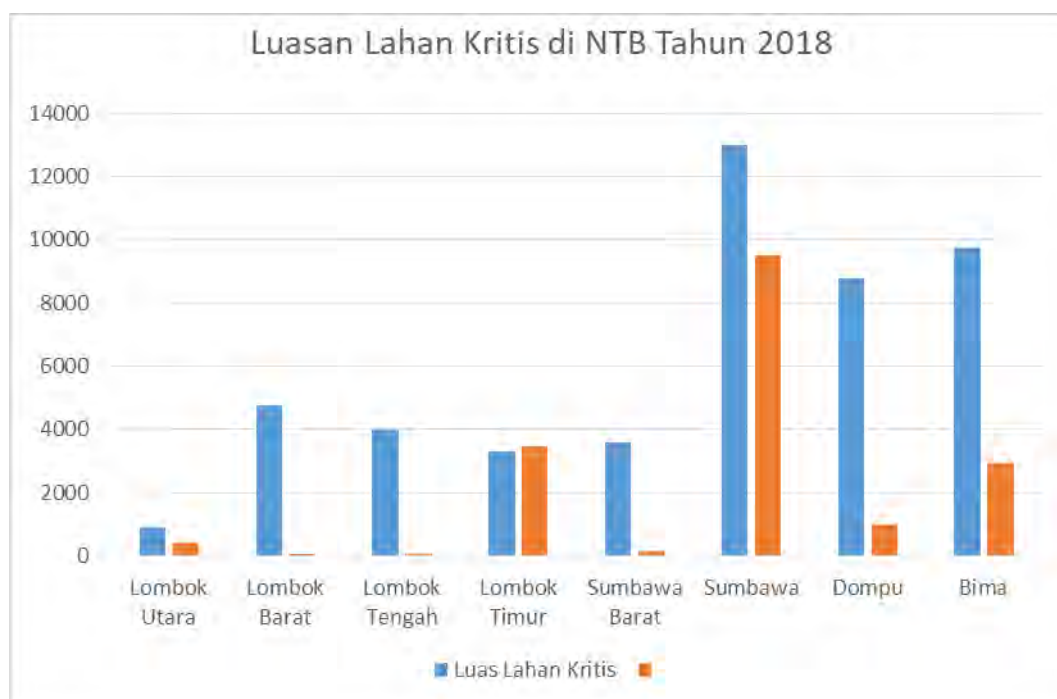
Gambar 2.5. Grafik luas lahan kritis berdasarkan fungsi kawasan di Provinsi NTB

Berdasarkan Grafik 2.3 dan 2.4 diketahui bahwa luasan lahan kritis dan sangat kritis ada pada kawasan hutan konservasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 2.6. Luasan Lahan Kritis di Provinsi NTB

Kabupaten/Kota	Luas Lahan Kritis	
	Dalam Kawasan Hutan (Ha)	Luar Kawasan Hutan (Ha)
Lombok Utara	922	446
Lombok Barat	4.754	61
Lombok Tengah	4.012	72
Lombok Timur	3.302	3.472
Sumbawa Barat	3.611	130
Sumbawa	12.993	9.528
Dompu	8.781	978
Bima	9.750	2.963
TOTAL	48.125	17.650

Sumber: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dodokan Moyosari, 2018.



Gambar 2.6. Grafik luas lahan kritis berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB

II.1.4. Tutupan Lahan

Tutupan lahan adalah kondisi penampakan biofisik permukaan bumi yang diamati. Analisis mengenai tutupan lahan akan lebih efektif jika data yang dihasilkan penggabungan dari lokasi perubahan, tipe perubahan dan bagaimana perubahan terjadi. Pada tahun 2016 ini data tutupan lahan yang disajikan berupa perbandingan tutupan lahan yang diindikasikan menyimpang dari peruntukannya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan peta tutupan lahan 2016 dan 2009.

Tabel 2.7. Perbandingan tutupan lahan yang diindikasikan menyimpang dari peruntukannya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan peta tutupan lahan 2016 dan 2009

No	Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya	Tutupan Lahan yang Diindikasikan Menyimpang	Luas (Ha)		
			Tahun 2009	Tahun 2016	Penambahan
1	Kawasan Lindung				
	a. Kawasan Lindung	Hutan Tanaman	324	146	
		Permukiman	179	4.944	4.765
		Perkebunan	3.669	835	
		Pertanian Lahan Kering	1.436	6.648	5.212
		Pertanian Lahan Kering Campuran	70.006,58	432,65	
		Sawah	204,43	13.182,76	12.978,33
		Tambak	173,42	66,90	
	b. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya alam	Hutan Tanaman	595,50	-	
		Permukiman	240,94	829,43	588,49
		Perkebunan	510,41	55,23	
		Pertanian Lahan Kering	97,45	2.078,14	1.980,70
		Pertanian Lahan Kering Campuran	946,83	103,47	

	c. Kawasan Hutan Mangrove	Sawah	673,60	344,94	
		Tambak	49,17	5,46	
		Permukiman	4,26	431,38	427,12
		Perkebunan	36,98	3,66	
		Pertanian Lahan Kering	33,16	765,35	732,19
		Pertanian Lahan Kering Campuran	125,25	11,90	
		Sawah	4,57	444,12	439,55
		Tambak	161,95	13,16	
2	Kawasan Budidaya				
	a. Kawasan Hutan Produksi	Permukiman	443,02	2.930,05	2.487,03
		Perkebunan	5.217,96	190,66	
		Pertambangan	19,21	-	
		Pertanian Lahan Kering	5.540,53	17.891,33	12.350,80
		Pertanian Lahan Kering Campuran	21.105,64	4.289,47	
		Sawah	619,60	794,27	174,67
		Tambak	1.887,21	319,72	
	b. Kawasan Pertanian	Permukiman	537,40	25.477,40	24.940,00
		Perkebunan	3.704,90	569,61	
	c. Kawasan Perkebunan	Permukiman	1.460,31	27.521,69	26.061,38
		Sawah	960,68	21.303,63	20.342,95
		Tambak	965,63	296,57	
	d. Kawasan peternakan	-	-	-	-
	e. Kawasan Pemukiman	-	-	-	-
	f. Kawasan Pertambangan	Permukiman	-	47,00	47,00
	g. Danau/Waduk	Permukiman	10,55	1.420,39	1.409,84

Sumber data : Bappeda Provinsi NTB, 2017

Tabel 2.8. Simpangan Pola Ruang Di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Tutupan Lahan Tahun 2009 Dan 2016

No	Tutupan Lahan	Pola Ruang	Peningkatan Luas Antara Tahun 2009-2016 (Ha)	Lokasi
1	Permukiman	Kawasan Lindung	4.764,50	Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat
		Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Cagar Budaya Alam	588,49	Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Sumbawa Barat
		Kawasan Hutan Mangrove	427,12	Bima, Dompu, Sumbawa Barat
		Kawasan Hutan Produksi	2.487,03	Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Dompu, Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat
		Kawasan Pertanian	24.940,00	Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Kota Bima dan Kota Mataram
		Kawasan Perkebunan	26.061,38	Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Dompu, Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, Kota Bima dan Kota Mataram
		Kawasan Pertambangan	47,00	Sumbawa Barat

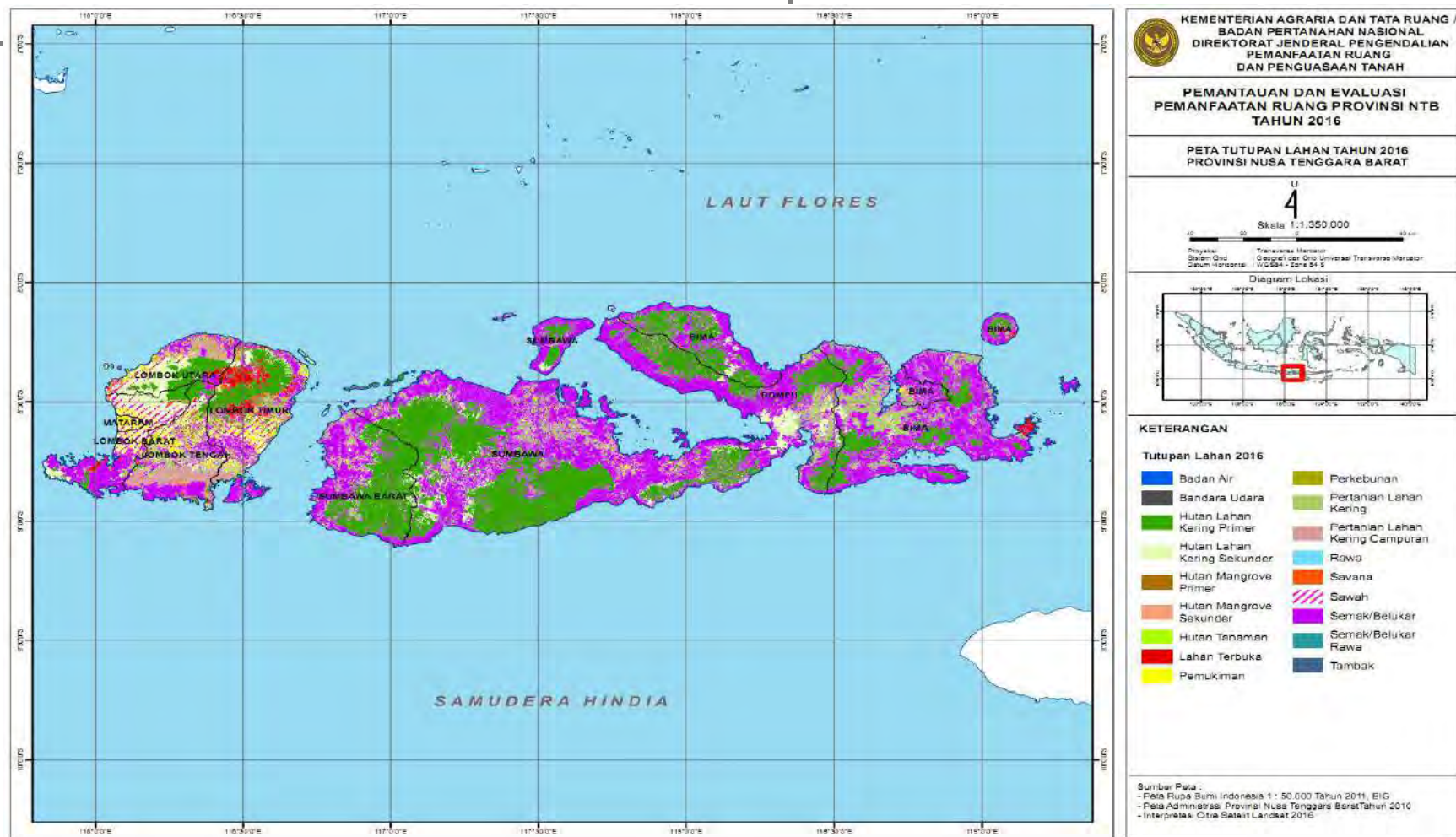
		Danau/Waduk	1.409,84	Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat
2	Pertanian Lahan Kering	Kawasan Lindung	5.212,05	Lombok Tengah, Dompu, Bima, Sumbawa dan Kota Bima
		Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Cagar Budaya Alam	1.980,69	Lombok Timur, Dompu, Bima, Sumbawa dan Sumbawa Barat
		Kawasan Hutan Mangrove	732,19	Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Dompu, Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat
		Kawasan Hutan Produksi	12.350,80	Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Dompu, Bima, Dan Kota Bima
3	Sawah	Kawasan Lindung	12.978,33	Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara dan Dompu
		Kawasan Hutan Mangrove	439,55	Lombok Barat dan Lombok Tengah
		Kawasan Hutan Produksi	175,67	Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara dan Bima
		Kawasan Perkebunan	20.342,95	Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Bima dan Kota Mataram

Sumber data : Bappeda Provinsi NTB, 2017

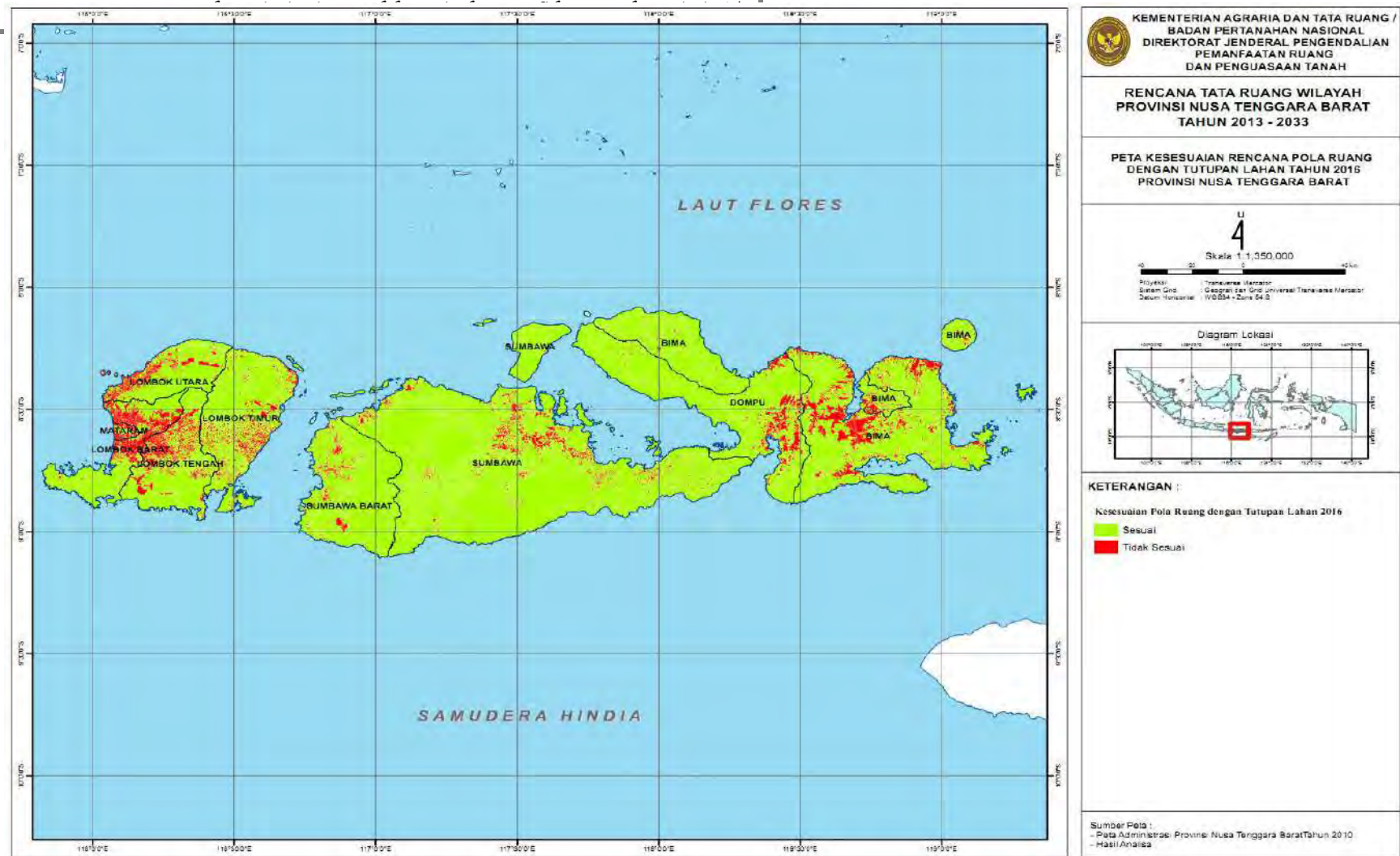
Dari Tabel 2.7. diatas diketahui tutupan lahan yang diindikasikan menyimpang terbesar untuk kawasan lindung terdapat di sawah yaitu penambahannya sebesar 12.978,33 Ha. Untuk Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya alam terbesar di pertanian lahan kering dengan penyimpangan sebesar 1.980,70 Ha. Sedangkan untuk kawasan hutan mangrove indikasi penyimpangan terbesar di Pertanian lahan kering sebesar 732,19 ha.

Untuk kawasan budidaya penyimpangan terbesar terjadi di hutan produksi yang terdapat di pertanian lahan kering sebesar 12359,8 Ha. Untuk kawasan pertanian penyimpangan terbesar di daerah pemukiman sebesar 24,940.000 Ha. Kawasan perkebunan indikasi penyimpangan terdapat di kawasan permukiman sebesar 26.061,38 Ha. Untuk kawasan Pertambangan dan danau/waduk penyimpangan terbesar di permukiman yaitu sebesar 1.409,84 Ha dan 47 Ha

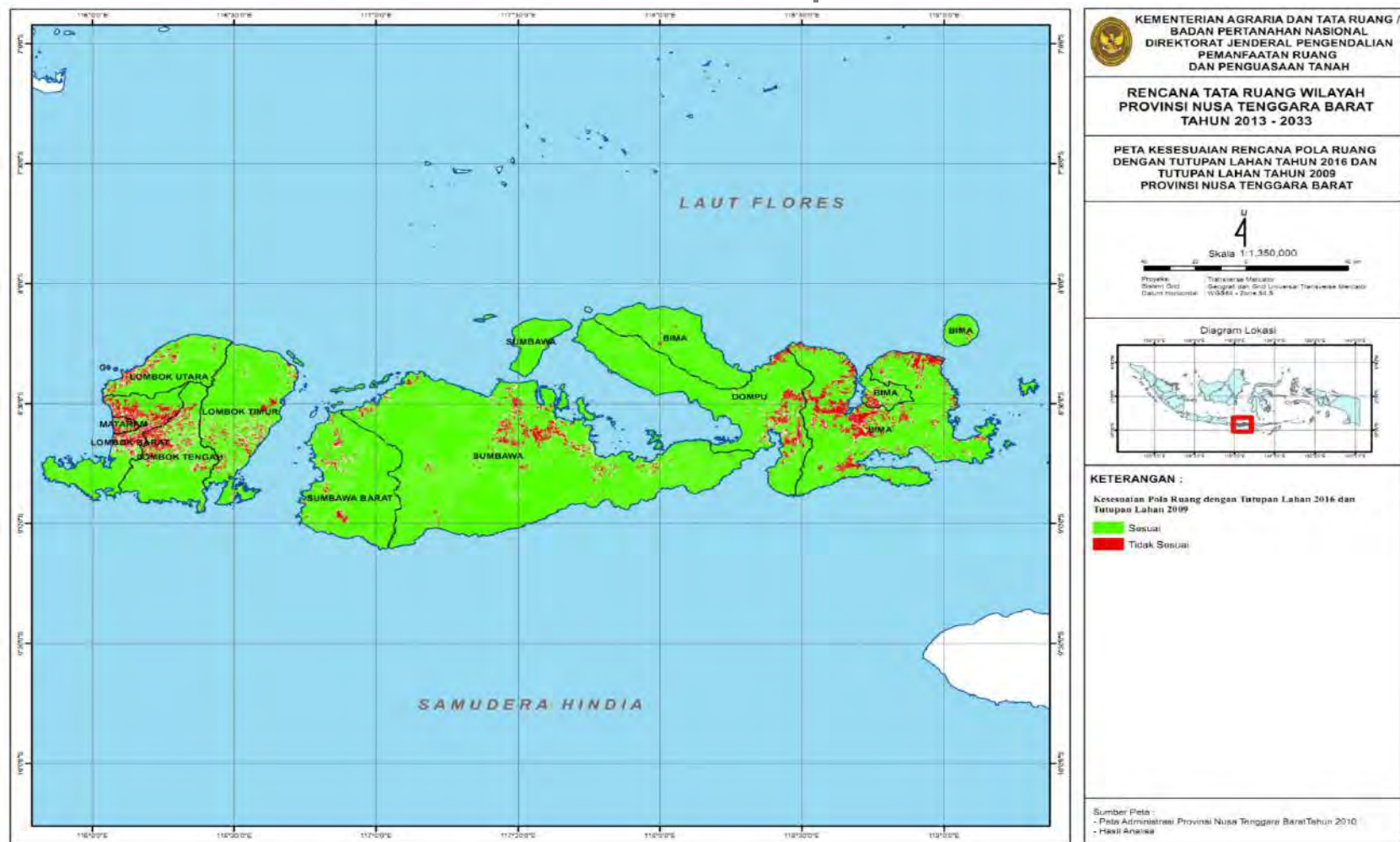
Dari Tabel 2.8. diketahui simpangan pola ruang peningkatan lahan terbesar terapat di daerah tutupan lahan pertanian dengan pola ruang kawasan perkebunan sebesar 26.061,38 Ha. Untuk daerah tutupan lahan pertanian lahan kering peningkatan terbesar terdapat di kawasang hutan produksi dengan peningkatan sebesar 12.350,8 Ha. Sedangkan di pola ruang sawah peningkatan tertinggi terdapat di kawasan perkebunan yaitu sebesar 20.342,95 Ha. Peta tutupan lahan, peta kesesuaian tutupan lahan dengan pola ruang dan peta simpangan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya dapat dilihat pada gambar 2.7- 2.10.



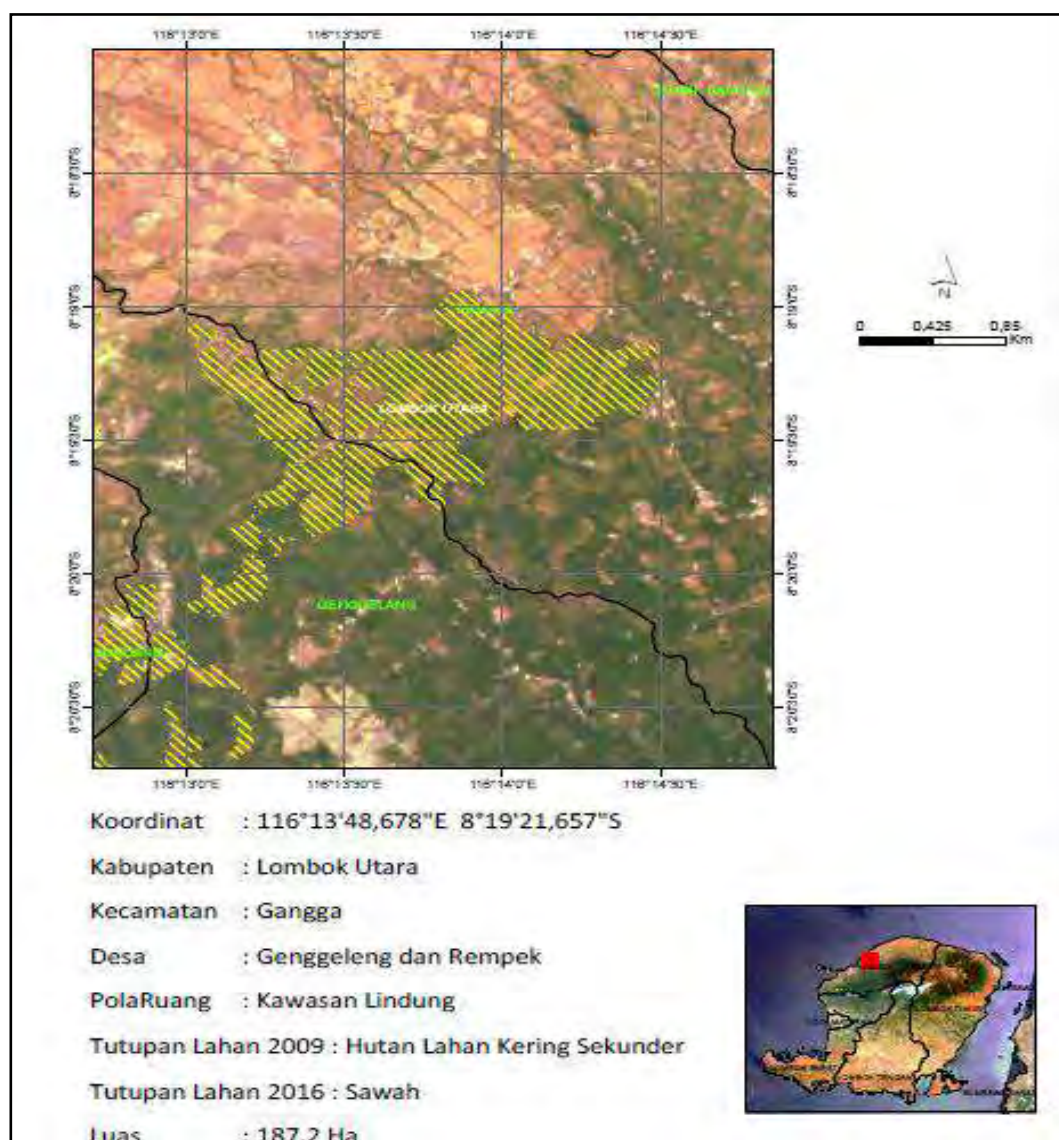
Gambar 2.7. Peta Tutupan Lahan Tahun 2016 di Provinsi Nusa Tenggara Barat



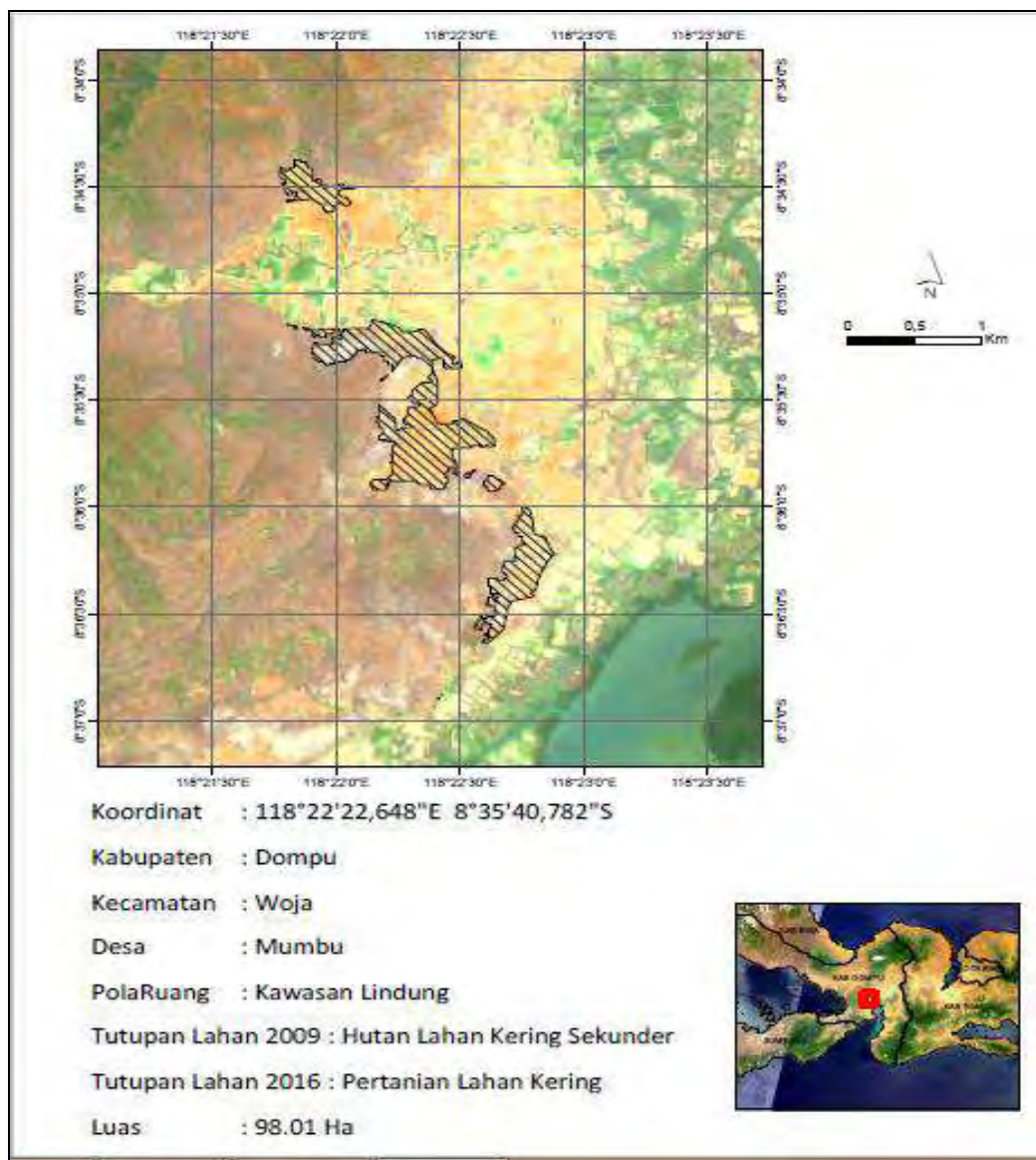
Gambar 2.8. Peta Kesesuaian Tutupan Lahan Tahun 2016 Dengan Pola Ruang di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat



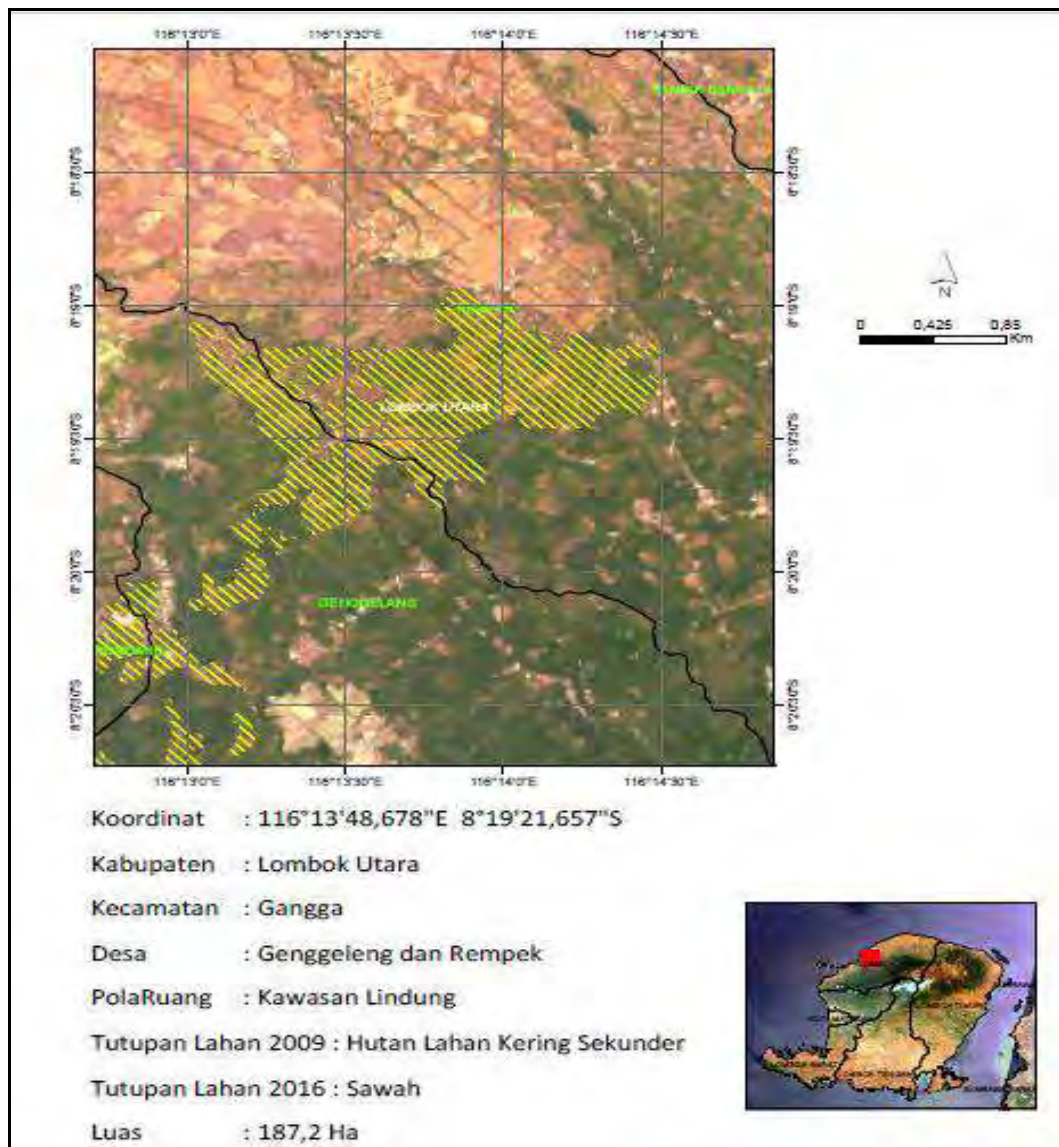
Gambar 2.9. Peta kesesuaian pola ruang dengan tutupan lahan tahun 2016 dan tahun 2009 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat



Gambar 2.10. Simpangan Kawasan Lindung Menjadi Kawasan Budidaya (Permukiman)



Gambar 2.11. Simpangan Kawasan Lindung Menjadi Kawasan Budidaya
(Pertanian Lahan Kering)



Gambar 2.12. Simpangan Kawasan Lindung Menjadi Kawasan Budidaya (Sawah)

II.1.5. Hutan

Hutan merupakan ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati, berperan dalam penyediaan jasa lingkungan dan tempat bergantung masyarakat yang hidup disekitar hutan serta menyimpan karbon terrestrial dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu hutan juga merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah pengendalian daur air, erosi dan longsor lahan. Harapan ini perlu didukung bersama untuk mewujudkan, karena banyak kelebihan ekosistem hutan untuk mewujudkan harapan tersebut. Nilai peran hutan ditentukan oleh luas, jenis, struktur pertumbuhan, keadaan pertumbuhan dan struktur hutannya. Ekosistem hutan juga dipengaruhi oleh keadaan iklim, geologi, struktur tanah dan geomorfologi, sehingga di dalam membangun hutan harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi dan masalah kependudukannya.

Sesuai dengan karakteristik/ciri khasnya dan untuk kepentingan nasional, berdasarkan peruntukan/fungsi utamanya, hutan diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu:

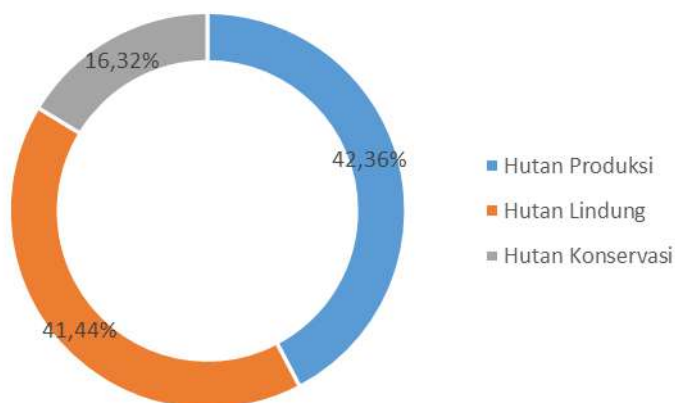
1. *Hutan Produksi*, adalah hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan sebagai penghasil komoditas kayu serta hasil hutan lainnya.
2. *Hutan Lindung*, adalah hutan yang karena sifat alamnya diperuntukan secara khusus untuk melindungi tata air, pencegahan erosi, banjir, abrasi pantai serta pelindung terhadap tiupan angin.
3. *Hutan Konservasi*, adalah hutan yang karena sifat-sifatnya diperuntukkan sebagai pelindung dan pelestarian bagi flora dan fauna, atau untuk pelindung suatu ekosistem.

Provinsi NTB memiliki luas wilayah yaitu 2,015,315 Ha, dengan luas kawasan hutan 1.071,722,83 Ha atau 53 % dari luas wilayah NTB, persentase ini sudah melebihi persentase minimum kawasan hutan di suatu wilayah yaitu 30% dari total luas daratannya. Luas kawasan hutan menurut fungsinya dapat dilihat pada tabel 2.9. dan diagram komposisi fungsi kawasan hutan di Provinsi NTB dapat dilihat pada gambar 3.11.

Tabel 2.9. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi

No.	Fungsi	Luas (Ha)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1	Hutan Produksi	453.936,97
	Hutan Produksi Tetap	160.250,74
	Hutan Produksi Terbatas	293.685,83
2	Hutan Lindung	444.149,86
3	Hutan Konservasi	174.939,31
	Taman Nasional Gunung Rinjani	41.330,00
	Taman Nasional Gunung Tambora	71.645,64
	Taman Wisata Alam	21.976,06
	Cagar Alam	36.832,61
	Taman Hutan Raya	3.155,00
Total Luas Hutan		1.071.722,83

Sumber data : Statistik Kehutanan Provinsi NTB

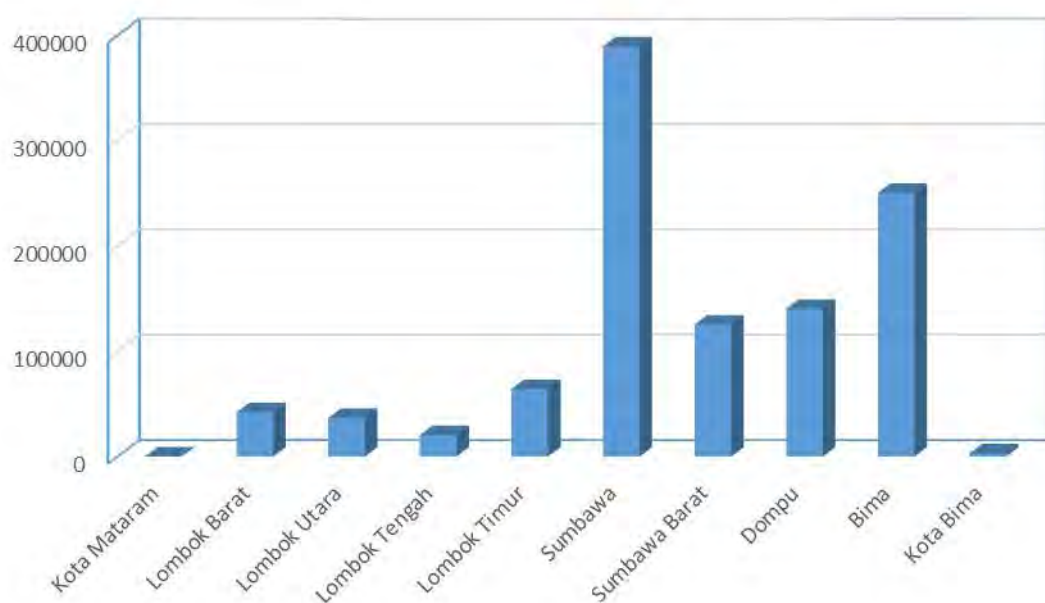


Gambar 2.13. Diagram persentase komposisi fungsi kawasan hutan di Provinsi NTB

Tabel 2.10. Luas Kawasan Hutan Tiap Kabupaten/Kota Menurut Fungsi

No.	Kab./Kota	Luas Wilayah (Ha)	Hutan. Hutan Konservasi (Ha)						Hutan Lindung (Ha)	Hutan Produksi (Ha)		Total Luas Kawasan Hutan (Ha)
			Kawasan Suaka Alam		Kawasan Pelestarian Alam			Taman Buru				
			CA	SM	TN	TWA	THR				Terbatas (HPT)	
1	Kota Mataram	6.130,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-
2	Lombok Barat	105.387,00	-	-	-	3.402,27	3.155,00	-	25.078,94	10.041,00	304,67	41.981,88
3	Lombok Utara	80.953,00	-	-	10.210,00	2.954,00	-	-	11.198,22	6.984,38	5.171,52	36.518,12
4	Lombok Tengah	120.840,00	-	-	3.675,00	2.149,29	-	-	9.926,14	-	4.583,89	20.334,32
5	Lombok Timur	160.555,00	-	-	27.104,50	-	-	-	31.498,67	-	5.565,00	64.168,17
6	Sumbawa	664.398,00	1.641,25	-	-	6.100,50	-	22.537,90	168.667,68	137.036,14	53.691,88	389.675,35
7	Sumbawa Barat	184.902,00	524	-	-	4.538,00	-	-	63.107,71	38.349,94	18.816,11	125.335,76
8	Dompu	232.460,00	0,00		27.445,00	2.600,00	-		51.482,59	32.586,78	26.119,11	140.233,48
9	Bima	438.940,00	10.826,55		44541,14	232	-		82.866,11	67.190,59	44.740,03	250.396,42
10	Kota Bima	20.750,00	-	-	-	-	-		323,8	1.497,00	1.258,53	3.079,33
TOTAL		2.015.315,00	12.991,80		112.975,64	21.976,06	3.155,00	22.537,90	444.149,86	293.685,83	160.250,74	1.071.722,83

Sumber data : Statistik Kehutanan Provinsi NTB



Gambar 2.14. Grafik luas kawasan hutan per kabupaten di Provinsi NTB

Dari grafik diatas diketahui luas kawasan hutan terbesar terdapat di Kabupaten Sumbawa yaitu sebesar 389,675.35 Ha atau 58.65% dari luas wilayahnya sedangkan yang terendah yaitu Kota Mataram yang tidak memiliki kawasan hutan.

Sampai dengan Tahun 2018, terdapat 4 (empat) perusahaan yang mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang ada di Provinsi NTB dengan total luas 97,234 Hektar yang dirinci dalam Tabel 2.11. sebagai berikut:

Tabel 2.11. Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Provinsi NTB

No	Nama Perusahaan / Direktur	IZIN	LOKASI	No. SK	Luas (Ha)
1	PT. Usaha Tani Lestari	IUPHHK-HT	KAB. DOMPU DAN KAB. BIMA	SK Menhut No. 660/Menhut-II/2009 tgl 15 Oktober 2009	22,820.00
2	PT. Koin Nesia	IUPHHK-HT	KAB. BIMA	SK Menhut No. 428/Menhut-II/2009 tgl 22 Juli 2009	41,960.00
3	PT. Sadhana Arifnusa	IUPHHK-HT	KAB. LOMBOK TIMUR, KAB. LOMBOK BARAT DAN KAB. LOMBOK UTARA	SK.256/Menhut-II/2011 tanggal 12 Mei 2011	3,810.00
4	PT. Agro Wahana Bumi	IUPHHK-HA	KAB. DOMPU DAN KAB. BIMA	SK. 102/Menhut-II/2013 tanggal 11 Pebruari 2013	28,644.00
				TOTAL	97,234.00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2018

Tabel 12. Jenis kemitraan pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi NTB

NO.	KPH/MITRA	LOKASI	LUAS (Ha)	JENIS KEMITRAAN	BAGI HASIL	KETERANGAN
I RINJANI BARAT PELANGAN TASTURA						
1	PT. Tanah Hufa Indonesia	Dusun Klui, Dusun Lendangluar dan Dusun Malimbu, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kab. Lombok Utara	105.62	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam	- Penyediaan jasa dan sarana wisata alam : Provinsi NTB 15% dan PT. THI 85%	Sedang Proses Pembangunan Sarpras
2	PT. Ira Zhafran Wisata	Dusun Lendang Luar, Dusun Malak, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara dan Dusun Mangsit, Desa Sengigi, Kec. Batu Layar, Kab. Lombok Barat	175.48	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam	- Penyediaan sarana wisata alam : Provinsi NTB 20% PT. IZW 80%, - penyediaan jasa wisata alam : Provinsi NTB 30% PT. IZW 70%	Sedang Proses Pembangunan Sarpras
3	BumDes Sesaot	Desa Sesot, kec. Namada, Kab. Lombok Barat	4.20	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam	- Provinsi NTB : 15 % - Kabupaten Lombok Barat 10% - Bumdes Sesaot : 75%	Rp 16,500,000 (Retribusi s.d. April 2018)
4	Koperasi KPRI "Rimbawan"	Desa Buwun Sejati, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat	15.00	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam	- Koperasi Rimbawan : 70% - Provinsi NTB: 15% - Kabupaten Lombok Barat :10% - Desa Buwun Sejati : 5%	Rp 50,258,250 (Retribusi s.d. April 2018)

NO.	KPH/MITRA	LOKASI	LUAS (Ha)	JENIS KEMITRAAN	BAGI HASIL	KETERANGAN
5	Koperasi Syariah "Gunung Janggut Lestari"	Desa Aik Berik, Kec. Batukliang Utara, Kab. Lombok Tengah	50,00	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam	- Koperasi : 72,5% - Provinsi NTB : 15% - Kabupaten Lombok Tengah : 7,5% - Desa Aik Berik : 5%	Rp 2,385,000 (Retribusi s.d. April 2018)
6	PT. Berjaya Lombok Tirta	Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, Kab. Lombok Utara	4,00	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air	- Provinsi NTB : Rp 2550,- /m kubik, - BUMDes Desa Bukit Tinggi (sumber mata air) : Rp 100,-/m kubik - BUM Desa Sigar Penjalin (tempat unit pengolahan dan sarana usaha) Rp 50,- /m kubik	Sedang Proses Pembangunan Sarpras
7	BumDes Pusuk Lestari	Desa Pusuk Lesatari, Kecamatan Batu Layar, Kab. Lombok Barat	100,00	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam	- BUMDes Pusuk Lestari : 75%, - Provinsi NTB : 15%, - Kab Lombok Barat : 10%	
8	Koperasi Tani Maju Bersama	Wisata Alam Air Terjun Tiu Teja Desa Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kab. Lombok Utara	25,00	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam	- Koperasi : 70%, - Provinsi NTB : 10%, - Kab Lombok Utara : 10%, - Desa Santong : 10%	Rp 4,750,000 (Retribusi s.d. April 2018)

NO.	KPH/MITRA	LOKASI	LUAS (Ha)	JENIS KEMITRAAN	BAGI HASIL	KETERANGAN
9	KSU Kompak Sejahtera	Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kab. Lombok Utara	623.25	Pemanfaatan Hutan	- HHK : KPH 25%, Koperasi 75% - HHBK : KPH 10%, Koperasi 90% - Pemanfaatan kawasan : KPH 10%, Koperasi 90%. *setelah dipotong biaya operasional dan PNPB	Sedang persiapan operasional
10	Yayasan Pondok Pesatren Al-Ma'arif Qamarul Huda dan Forum Kawasan Hutan Ranget.	Kawasan Hutan Lindung Ranget (RTK 6) Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.	2.60	Pemanfaatan Jasa Lingkungan	- belum ada	Sedang Proses Pembangunan Sarpras
11	Gapoktan Sanga Pati	Desa Gumantar, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara	370.72	Pemanfaatan kawasan, HHBK, HHK dan Jasling	- Pemanfaatan HHK :Provinsi NTB : 25%, Gapoktan: 75% - Pemanfaatan kawasan, HHBK dan Jasling: Provinsi NTB: 10%, Gapoktan: 90%.	Menunggu proses pengesahan SPKS
12	KTH Pandan Tinggang	Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah.	113.68	Pemanfaatan kawasan, HHBK, HHK.	- belum final	Sedang proses pembahasan SPKS
13	KTH Mertak Grepek	Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah.	101.38	Pemanfaatan kawasan, HHBK, HHK.	- belum final	Sedang proses pembahasan SPKS
14	Koperasi Tunas Karya	Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah.	1,400.00	Pemanfaatan kawasan, HHBK, HHK.	- belum final	Sedang proses pembahasan SPKS

NO.	KPH/MITRA	LOKASI	LUAS (Ha)	JENIS KEMITRAAN	BAGI HASIL	KETERANGAN
II RINJANI TIMUR						
1	Koperasi Wisatani	Bukit Pergasingan, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kab. Lombok Timur.	60.00	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam	- Pemprov NTB 20%, Koperasi 80%.	Rp 4,470,000
2						(Retribusi s.d. April 2018)
III SEJORONG MATAYANG BRANG REA						
1	BUMDES Orong Kleta	Desa Sekongkang	1,100.00	Pemanfaatan HHBK	- 80% Bumdes, 20% KPH Bagi hasil berdasarkan hasil bersih setelah dikurangi biaya operasional dan PNBP.	
IV AMPLANG PLAMPANG						
1	CV Sahabat Forestry	Desa Gapit dan Desa Bobi Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa	1,000.00	Pemanfaatan HHK Hutan Tanaman (Jenis Sengon Laut)	- HHK: Pemprov 30%, CV. SF 70%	Setelah PNBP dan biaya operasional. Sedang dalam tahap penanaman dan telah mendapat pembiayaan dari BLU Kemen LHK.
		Luas Total	5,250.93			

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2018

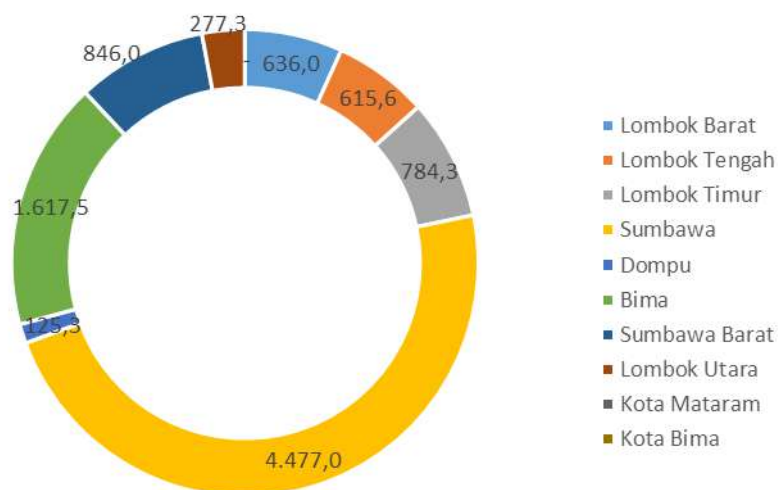
II.1.6. Laut dan Pesisir

Secara biofisik, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempunyai potensi sumberdaya pesisir dan laut yang cukup luas. Luas wilayah pesisir dan laut Provinsi NTB hingga radius 12 mil laut adalah sekitar 49.312,19 km. Luas daratannya sebesar 20.153,15 km atau 40,87% dari luas wilayah NTB seluruhnya dan luas lautannya 29.159,04 Km atau 59,13% dari luas NTB seluruhnya. Wilayah daratan Provinsi NTB terdiri atas dua pulau besar, yaitu Pulau Lombok (4.700 Km) dan Pulau Sumbawa (13.000 Km). Panjang pantai di Provinsi NTB adalah 2.333 km dan perairan karang sekitar 3.601 km. Sementara itu panjang pantai Pulau Lombok 423 km, sedang Pulau Sumbawa 1.202 Km.

- **Padang Lamun**

Lamun (*seagrass*) adalah tumbuhan berbunga (*angiospermae*) berbiji satu (*monokotil*) yang hidup di laut dangkal, mempunyai akar rimpang (*rhizome*), daun, bunga dan buah, serta berkembang biak secara generatif dan vegetatif (tunas). Padang lamun sebagai salah satu ekosistem pesisir dan laut merupakan ciri khas daerah tropis. Vegetasi lamun biasanya hidup di perairan dangkal dan tenang seperti di sekitar teluk Pulau Lombok. Komunitas lamun sering berasosiasi dengan komunitas bakau (mangrove dan terumbu karang). Habitat padang lamun terletak antara habitat bakau (garis atas) dan habitat terumbu karang (garis bawah). Habitat lamun juga merupakan habitat yang baik bagi beberapa larva biota laut seperti ikan dan udang. Kumpulan daun (*thalus*) lamun yang rapat merupakan tempat berlindung dan memijah bagi larva, ikan dan udang. Selain itu, padang lamun memiliki kandungan *blue green algae* yang mempunyai kemampuan memfiksasi Nitrogen. Oleh karena itu, padang lamun merupakan ekosistem yang produktif dan sumber daya yang

bernilai tinggi yang memperkaya kesuburan laut dan memberi makan serta perlindungan bagi berbagai spesies yang memiliki nilai ekonomis. Kerusakan padang lamun dapat mengganggu ekosistem pesisir sehingga sangat perlu untuk dijaga kelestariannya.



Gambar 2.15. Diagram luas padang lamun di Provinsi NTB per Kabupaten/Kota

Luas padang lamun di Provinsi NTB yaitu 9,379 Ha dimana padang lamun terluas terdapat di Kabupaten Sumbawa dengan luas 4,477 Ha sedangkan Kota Bima dan Kota Mataram tidak memiliki padang lamun. Jenis lamun yang terdapat di Provinsi NTB *Zostera sp*, *Cymodocea rotundata*, *Cymodocea serrulata*, *Halodule pinifolia*, *Halodule uninervis*, *Syringodium isoetifolium*, *Thalassodendron ciliatum*, *Enhalus acoroides*, dan *Thalassia hemprichii*.

Padang lamun di Kecamatan Alas merupakan yang paling luas yaitu 1.013,2 Ha (10,80%), diikuti Kecamatan Langgudu seluas 835,6 Ha (8,91%), Kecamatan Buer 690,0 Ha (7,36%), dan Kecamatan Lape 663,3 ha (7,07%). Wilayah kecamatan di Pulau Lombok yang cukup luas hamparan padang lamunnya adalah Kecamatan Sekotong Tengah yaitu 625,4 Ha (6,67%) dan

Kecamatan Jerowaru seluas 571,5 Ha (6,09%). Data tersebut memberikan informasi dan mengindikasikan bahwa secara umum kondisi perairan WP3K Pulau Sumbawa lebih sesuai untuk kehidupan lamun dibanding perairan WP3K Pulau Lombok.

Nilai penutupan lamun di perairan WP3K pada seluruh kawasan pengembangan kelautan dan perikanan Provinsi NTB berkisar antara 10,00% hingga 77,15%. Status penutupan lamun paling besar terdapat di perairan Kawasan Teluk Sanggar dan sekitarnya yaitu 74,3% dengan status "Kaya/Sehat". Sedangkan penutupan lamun yang berstatus "Miskin" yaitu di Kawasan Senggigi dan sekitarnya dengan tutupan mulai 18,70% sampai 28,80%.

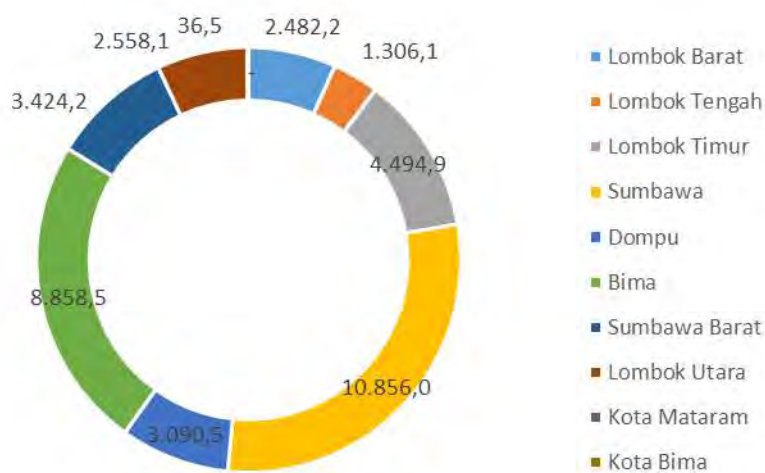
Padang lamun di Provinsi NTB memiliki nilai penting bagi kepentingan ekologi yang bermuara pada ketahanan pangan dan kesehatan manusia, keanekaragaman biodiversitas perairan pesisir, dan keberadaan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, sudah selayaknya Pemerintah Provinsi NTB menginisiasi kawasan konservasi berdasarkan keberadaan ekosistem padang lamun.

- **Terumbu Karang**

Ekosistem terumbu karang adalah ekosistem perairan yang dinamis dengan kompleksitas dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Ekosistem terumbu karang rentan terhadap tekanan perubahan lingkungan, baik yang terjadi secara alamiah maupun yang disebabkan oleh manusia. Faktor-faktor pembatas alami kehidupan, distribusi, dan stabilitas ekosistem terumbu karang antara lain suhu air, cahaya matahari, salinitas, kejernihan air, dan substrat dasar perairan. Ekosistem terumbu karang mempunyai fungsi ekologi yang penting. Keberadaan ekosistem terumbu karang sangat penting bagi ikan dan berbagai biota laut, yaitu

sebagai daerah perlindungan (*nursery ground*), daerah pencarian makanan (*feeding ground*), dan tempat pemijahan (*spawning ground*). Keberadaan terumbu karang juga berperan dalam mencegah abrasi pantai karena mampu memecah ombak sehingga kekuatan ombak yang mencapai bibir pantai menjadi berkurang.

Ekosistem terumbu karang dapat mereduksi gas karbon dioksida di udara melalui mekanisme fotosintesis. Gas karbon dioksida yang terlarut dalam air laut merupakan sumber karbon utama dalam reaksi fotosintesis. Kemampuan terumbu karang menyerap karbon dioksida sangat penting dalam mencegah pemanasan global. Jadi, ekosistem terumbu karang tidak hanya penting bagi kelestarian kehidupan biota laut, tetapi juga bagi kehidupan di daratan.



Gambar 2.16. Diagram luas terumbu karang di Provinsi NTB per Kabupaten/Kota

Dari gambar 3.14. diketahui luas terumbu karang di Provinsi NTB yaitu 37,107 Ha, dimana Kabupaten Sumbawa memiliki terumbu karang terbesar dengan luas 10.856 Ha sedangkan Kota Mataram

tidak memiliki ekosistem terumbu karang. Sebaran terumbu karang terluas berada di perairan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K) Kawasan Teluk Saleh yang mencapai 5.319,50 Ha atau sekitar 30,59% dari luas keseluruhan ekosistem terumbu karang di KPKP Provinsi NTB. Sedangkan yang paling sempit adalah sebaran ekosistem terumbu karang di "Kawasan Senggigi dan sekitarnya (159,40 Ha)" dan "Kawasan Gili Matra dan sekitarnya (236,25 Ha)". Kedua kawasan pariwisata yang sudah terkenal di manca Negara tersebut harus terus menerus dilakukan aksi perlindungan serta rehabilitasi dan transplantasi ekosistem terumbu karang secara sinambung dan berkelanjutan agar ekosistem terumbu karang bertambah luas dan sehat.

- **Mangrove**

Hutan mangrove merupakan hutan yang tumbuh diatas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Ekosistem mangrove mempunyai multi fungsi antara lain berperan menjebak dan menahan sedimen, meredam badai pantai dan energi gelombang seperti tsunami, kontrol terhadap erosi, menetralsir limbah cair sehingga melindungi laut dari pencemaran (fungsi ekologis/fisik).

Selain itu, mangrove juga berfungsi menjaga kestabilan produktivitas dan ketersediaan sumberdaya hayati wilayah pesisir karena sebagai pemasok hara dan makanan bagi plankton (fungsi biologis), serta menjadi daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) yang produktif, penghasil berbagai produk seperti kayu, bahan pewarna, makanan, madu, obat-obatan, kosmetika dan lain-lain yang bernilai ekonomi (fungsi ekonomi), dan sebagai obyek dan

daya tarik wisata alam, pendidikan dan ilmu pengetahuan (fungsi pariwisata).

Pada tahun 2015, dari hasil analisis peta citra menunjukkan bahwa luas hutan mangrove Provinsi NTB saat ini diestimasi seluas 12.144,3 Ha. Jika dibandingkan dengan tahun 1993, luas hutan mangrove di Provinsi NTB masih seluas 49.174 Ha, terjadi degradasi hutan mangrove seluas 37.029,7 Ha. Ekosistem hutan mangrove tersebut tersebar pada perairan pasang surut mulai dari Selat Lombok hingga Selat Sape, Laut Flores, Samudera Hindia, perairan teluk, dan pulau-pulau kecil. Hutan mangrove dengan kerapian tinggi di wilayah pesisir terdapat antara lain di Teluk Lembar, Teluk Sepi, Teluk Bumbang, Teluk Ekas, Teluk Serewe, Teluk Jor, Teluk Saleh, Teluk Sape, Teluk Waworada, dan Teluk Cempi. Sedangkan di PPK, hutan mangrove masih tumbuh lebat diantaranya di Gili Gede, Gili Sulat, Gili Lawang, Gili Petagan, Gili Belang, Gili Namo, Gili Kalong, P. Panjang, P. Saringgi, P. Temudong, P. Kramat, P. Medang, dan P. Rea (Tabel 2.10., Tabel 2.11.).

Tabel 2.13. Perubahan Luas Ekosistem Hutan Mangrove di Provinsi NTB

No	Tahun	Luas Hutan Mangrove (Ha)	Perubahan (Ha/Tahun)	Rasio Perubahan Luas (%/Tahun)
1	1993	49.174	-	
2	1999	20.234,26	(4.823,29)	(9,81)
3	2006	18.256,88	(282,48)	(1,40)
4	2015	12.144,30	(679,18)	(3,72)
Rerata Perubahan			(1.683,17)	(3,42)

Sumber : DISHUT Provinsi NTB (1994);

BP DAS Dodokan Moyosari (2011);

DISHUT Provinsi NTB (2007);

DKP Provinsi NTB (2015) (Diolah)

Tabel 2.14. Luas Hutan Mangrove di Provinsi NTB Tahun 2006 dan 2015
Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/ Kota	Luas Hutan Mangrove (Ha)		Perubahan Luas (Ha/Tahun)	Rasio Perubahan Luas (%/Tahun)
		2006	2015		
A. Pulau Lombok		3304,63	2514,4	-87,8	
1	Kabupaten Lombok Barat	438,54	510,4	7,98	1,82
2	Kabupaten Lombok Utara	-	6,7	-	0
3	Kabupaten Lombok Tengah	202,68	110,8	-10,21	-5,04
4	Kabupaten Lombok Timur	2.663,41	1.886,50	-86,32	-3,24
5	Kota Mataram	-	-	-	-
A. Pulau Sumbawa		15.052,25	9.566	-609,56	-4,05
1	Kabupaten Sumbawa Barat	152,22	672,20	57,78	37,96
2	Kabupaten Sumbawa	10.664,78	6.172,80	-499,11	-4,68
3	KabupatenDomp u	3.373,57	2.038,10	-148,39	-4,4
4	Kabupaten Bima	861,68	663,30	-22,04	-2,56
5	Kota Bima	-	19,80	2,2	0
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		18.356,88	12.080,60	-697,36	-3,8

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2017

Berdasarkan data pada Tabel 2.14. di atas terlihat bahwa terjadi pengurangan rasio perubahan luas ekosistem hutan mangrove sepanjang periode 1999—2006 yaitu menjadi 1,40%/tahun dari 9,81%/tahun (periode 1993-1999). Kondisi ini mengindikasikan semenjak tahun tahun 1999 telah dilakukan aksi positif dari Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten) dan para pemangku kepentingan lainnya dalam meredam laju kerusakan ekosistem hutan mangrove. Namun demikian, kerusakan ekosistem

hutan mangrove mengalami eskalasi selama periode 2006-2015 menjadi 3,72%/tahun. Kerusakan ekosistem hutan mangrove di NTB lebih cenderung diakibatkan oleh faktor pemenuhan kebutuhan manusia dibanding karena faktor alam. Kerusakan yang paling besar diduga untuk dimanfaatkan sebagai areal pertambahan.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa tingkat penurunan luas ekosistem hutan mangrove di Pulau Sumbawa lebih besar dibanding di Pulau Lombok. Kabupaten Lombok Tengah mengalami tingkat kerusakan paling tinggi, yang disusul berturut-turut oleh Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu. Ketiga wilayah kabupaten tersebut memiliki tingkat kerusakan ekosistem hutan mangrove melebihi tingkat kerusakan hutan mangrove Provinsi NTB. Sedangkan tingkat penambahan luas hutan mangrove terluas adalah di Kabupaten Sumbawa Barat dan disusul oleh Kabupaten Lombok Barat.

Status kondisi ekosistem hutan mangrove di Provinsi NTB berkisar rusak hingga baik, namun didominasi oleh kondisi baik. Adapun kepadatan vegetasi mangrove tingkat pohon berkisar antara 1.200 individu/hektar (Sedang) di kawasan Kuta-Awang dan sekitarnya hingga 16.267 individu/hektar (Sangat Padat) di kawasan Labuhan Kertasari-Maluk dan sekitarnya. Sedangkan penutupan mencapai 15,16% (Jarang) sampai 95,50% (Sangat Padat) di kawasan Kuta-Awang dan sekitarnya, yang didominasi oleh kondisi "Sangat Padat" (Tabel 8 - Lampiran).

Secara keseluruhan, kondisi ekosistem hutan mangrove di Provinsi NTB masih berada pada status "Baik" dengan tingkat kepadatan dan penutupan berstatus "Sangat Padat" (kepadatan rerata: 4.551-4.552 individu/hektar). Sementara itu, tingkat

penutupan yang mencapai rerata 59,08% mengindikasikan status “Sedang”

Ekosistem hutan mangrove di Kawasan Teluk Sanggar dan sekitarnya kondisinya sangat mengkhawatirkan sehingga perlu mendapat perhatian lebih banyak dari pemerintah. Lembaga pengambil kebijakan dan pengambil keputusan sebaiknya segera melakukan rehabilitasi bekas habitat mangrove dalam upaya memperluas habitat ekosistem hutan mangrove.

- **Rencana Alokasi Ruang**

Provinsi NTB merupakan daerah yang berada di wilayah pesisir dan laut sehingga membutuhkan perencanaan alokasi ruang pesisir dan laut. Pengertian pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi konservasi, peruntukan ruang untuk fungsi pemanfaatan umum, peruntukan ruang untuk fungsi strategis nasional tertentu dan peruntukan ruang untuk fungsi alur laut. Sedangkan penentuan alokasi ruang didasarkan pada analisis kesesuaian perairan, harmonisasi zona dan subzona dari beberapa dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Kabupaten/Kota, dan Paket sumber daya. Alokasi ruang terbentuk dari distribusi peruntukan ruang yang terdiri dari alokasi-alokasi ruang dengan fungsi-fungsi tertentu.

Alokasi Ruang RZWP-3-K memuat:

- Pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Alur Laut;
- Keterkaitan antara ekosistem darat dan ekosistem laut dalam suatu bioekoregion;
- Penetapan pemanfaatan ruang laut; dan

- Penetapan prioritas kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.

Apabila dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam RZWP-3-K terdapat Kawasan Strategis Nasional, maka pengalokasian ruang harus mengacu pada Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional.

Rencana alokasi ruang WP-3-K berfungsi :

- Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam WP-3-K;
- Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional;
- Sebagai alokasi ruang untuk kepentingan perlindungan cadangan sumberdaya ikan;
- Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang darat – laut dan di ruang pesisir itu sendiri;
- Mengatur keseimbangan, keserasian, dan sinergitas peruntukan ruang di laut.

Alokasi Ruang di dalam Kawasan Konservasi (KK), Kawasan Pemanfaatan Umum (KPU), dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), dan Alur Laut dijabarkan dalam zona, sub zona, dan arahan pemanfaatan zona pada masing-masing kawasan (Tabel 2.15.).

Tabel 2.15. Pembagian Rencana Alokasi Ruang RZWP-3-K

Kawasan	Arahan Pemanfaatan	
	Zona	Subzona
1. Kawasan Pemanfaatan Umum (KPU)	Pariwisata	1. Wisata Alam Bentang Laut 2. Wisata Alam Pantai/Pesisir & Pulau-pulau kecil 3. Wisata Alam Bawah Laut 4. Wisata Olah Raga Air
	Pelabuhan	1. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp); dan/atau 2. Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan.
	Pertambangan	1. Mineral/Pasir Laut; 2. Minyak dan Gas Bumi
	Perikanan Budidaya	1. Budidaya Laut; dan/atau 2. Budidaya Air Payau.
	Perikanan Tangkap	1. Pelagis; 2. Demersal; dan/atau 3. Pelagis dan Demersal
Kawasan Konservasi (KK)	KKP3K dan KKM, dirinci atas: 1. Zona Inti	Pemanfaatannya antara lain:
Kawasan Konservasi dikategorikan atas:		
a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K)		1. Perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut; 2. Perlindungan ekosistem pesisir unik dan/atau rentan terhadap perubahan; 3. Perlindungan situs budaya atau adat tradisional; 4. Penelitian; dan/atau 5. Pendidikan
b. Kawasan Konservasi Maritim (KKM);		
c. Kawasan Konservasi Perairan (KKP);		

Kawasan	Arahan Pemanfaatan	
	Zona	Subzona
	2. Zona Pemanfaatan Terbatas	Pemanfaatannya, antara lain: 1. Perlindungan habitat dan populasi ikan 2. Pariwisata dan rekreasi 3. Penelitian dan pengembangan 4. Pendidikan
	3. Zona Lain sesuai peruntukan kawasan (zona lain sesuai dengan peruntukan Kawasan)	Pemanfaatannya, antara lain: 1. Rehabilitasi 2. Perlindungan
Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT)	Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (pada peta RZWP-3-K digambarkan batas terluarnya)	
Kawasan Strategis Nasional Tertentu, yang dimanfaatkan untuk :		
1) Pengelolaan batas-batas maritim kedaulatan negara; 2) pertahanan dan keamanan negara; 3) pengelolaan situs warisan dunia; 4) kesejahteraan masyarakat; dan/atau 5) pelestarian lingkungan.		
Alur Laut	Alur Pipa/kabel bawah laut : 1. Kabel listrik; 2. pipa air bersih; 3. kabel telekomunikasi; 4. pipa dan kabel lainnya.	

Kawasan	Arahan Pemanfaatan	
	Zona	Subzona
	Alur Pelayaran : 1. Pelayaran Internasional; 2. Pelayaran Nasional; 3. Pelayaran Regional; 4. Pelayaran Lokal; Alur Migrasi Biota Laut : 1. Migrasi Mamalia Laut 2. Migrasi Penyu; 	

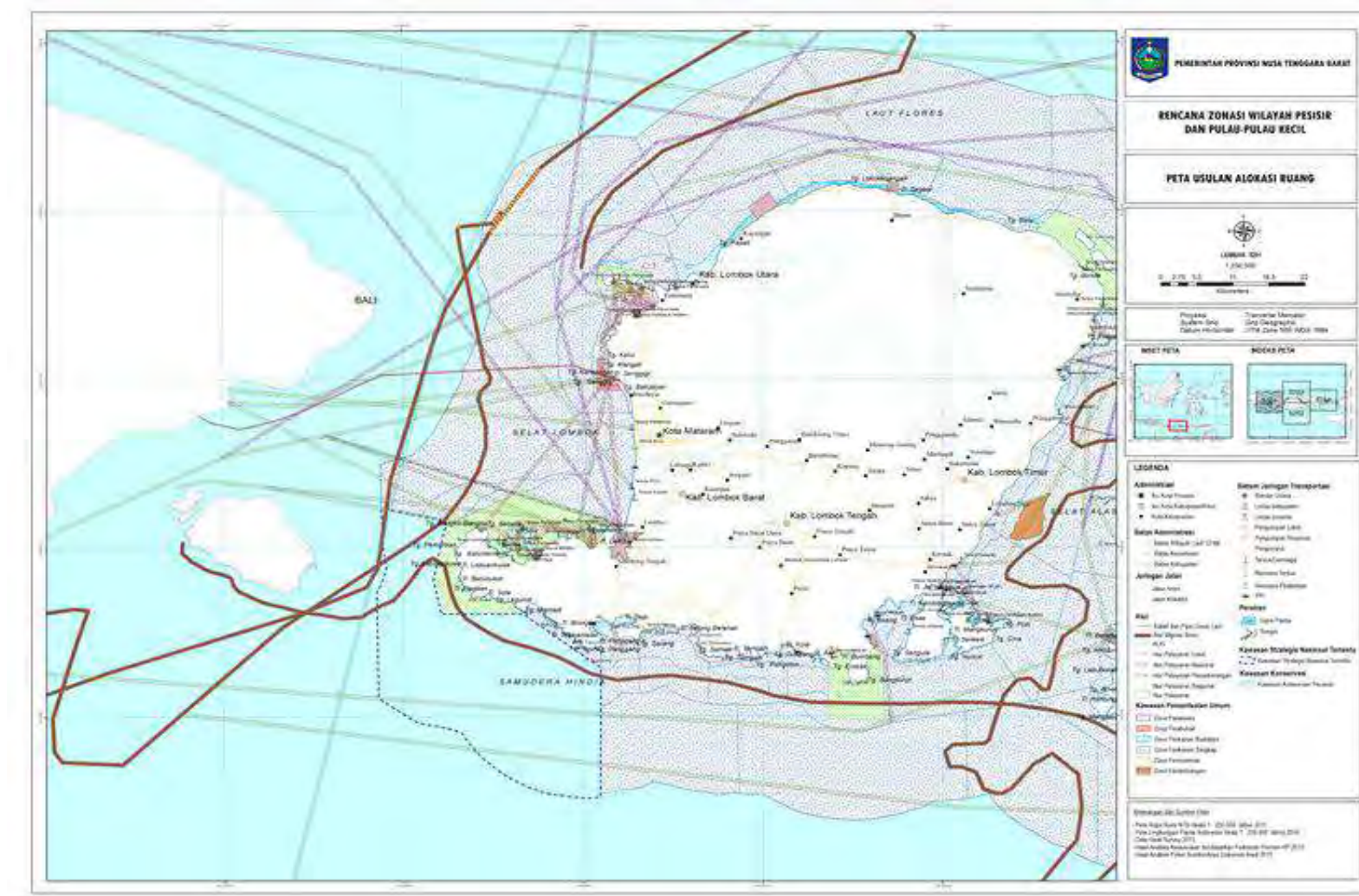
Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2017

- **Alokasi Ruang Perairan Pesisir**

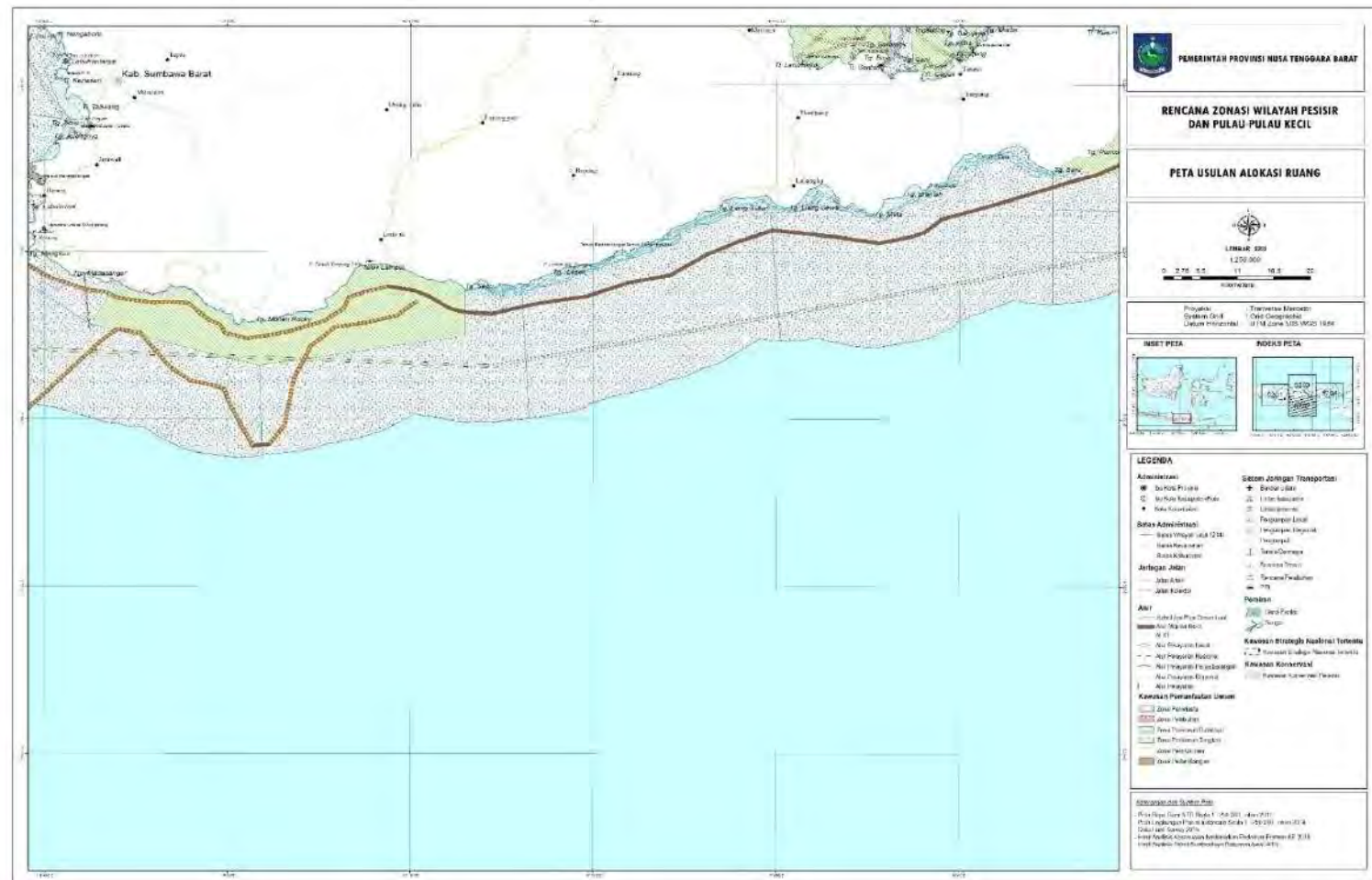
Alokasi ruang perairan WP3K Provinsi NTB dalam RZWP-3-K Provinsi NTB terdiri dari Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Nasional Tertentu, dan Alur Laut. Luas perairan WP3K Provinsi NTB mencapai 2.915.903,96 hektar yang terbagi menjadi:

- Kawasan Konservasi : 341.864,93 hektar (11,70%)
- Kawasan Pemanfaatan Umum : 2.484.523,06 hektar (85,23%)
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu : 89.515,97 hektar (3,07%)

Kawasan pemanfaatan umum mendominasi peruntukan ruang kawasan perairan WP3K NTB yang mencapai 85,23%, dan tersebar mendominasi di seluruh perairan WP3K Provinsi NTB. Selengkapnya alokasi ruang perairan pesisir Provinsi NTB dapat dilihat pada Gambar 2.17 sampai dengan Gambar 2.20.



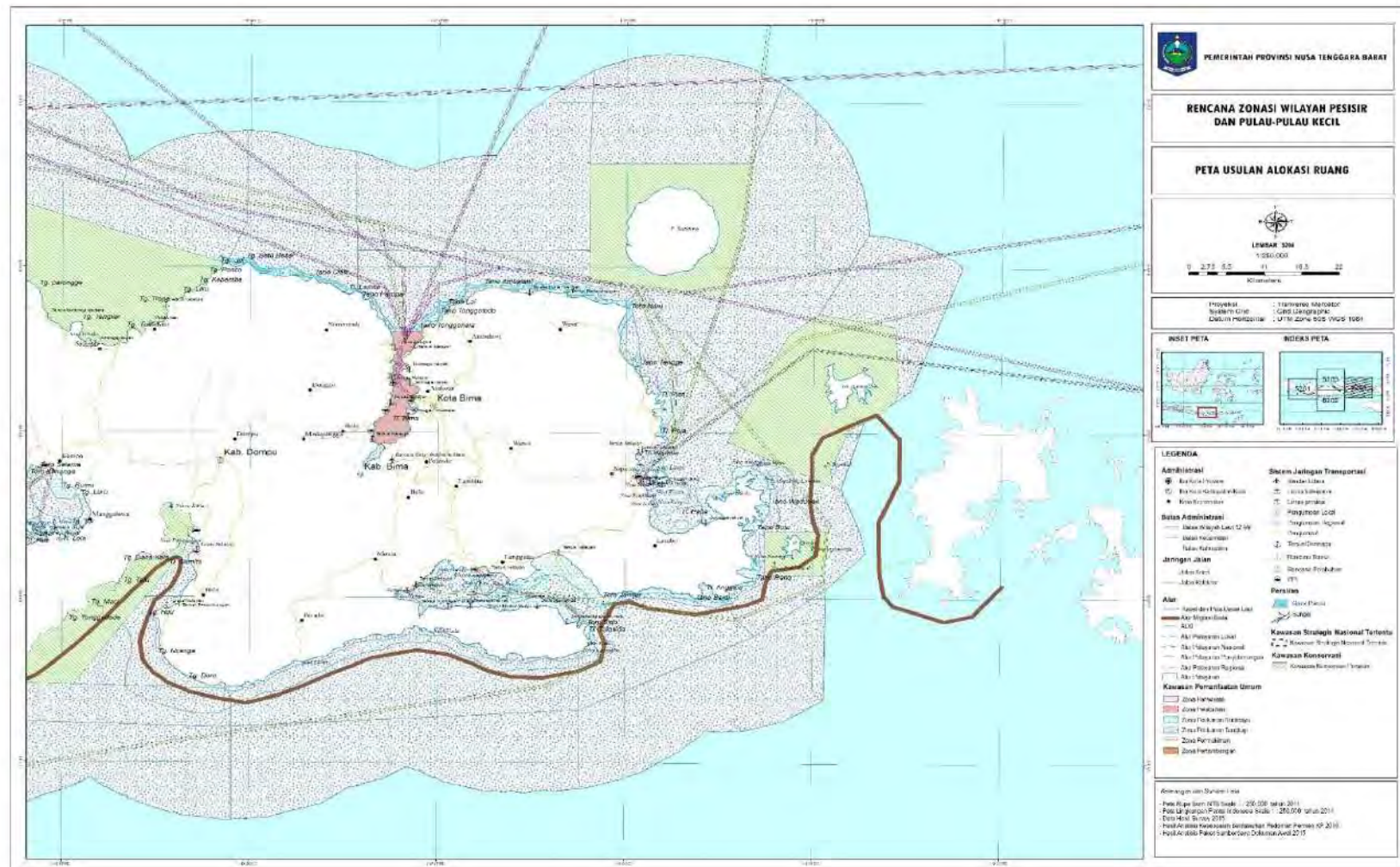
Gambar 2.17. Peta Pola Ruang WP3K Provinsi NTB (Alur Laut Perairan Sekitar Pulau Lombok)



Gambar 2.18. Peta Pola Ruang WP3K Provinsi NTB (Alur Laut perairan Pulau Sumbawa bagian Barat Daya)



Gambar 2.19. Peta Pola Ruang WP3K Provinsi NTB (Alur Laut perairan bagian Timur Pulau Sumbawa)



Gambar 2.20. Peta Pola Ruang WP3K Provinsi NTB (Alur Laut Perairan pantai Utara Pulau Sumbawa)

- **Alokasi Ruang Kawasan Konservasi**

Kawasan konservasi adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Kebijakan penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi (KK) yang dikelola berdasarkan sistem zonasi, dilaksanakan dengan penetapan kategori pengelolaan. Kebijakan penetapan dan pengelolaan KK dilaksanakan dengan dasar perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan (SDI) dan ekosistemnya secara berkelanjutan. Kategori pengelolaan kawasan konservasi di Provinsi NTB terdiri dua kategori yaitu: (a) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) dan (b) Kawasan Konservasi Perairan (KKP)

Hingga tahun 2016, luas kawasan konservasi pemerintah Provinsi NTB adalah 341.144,87Ha (Tabel 3.6) yang terdiri dari:

- 1) Kawasan konservasi yang telah memperoleh penetapan pemerintah pusat seluas 11.554,00 Ha.
- 2) Pencadangan kawasan konservasi yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 523-505 Tahun 2016 adalah seluas **192.583,69** hektar.
- 3) Usulan perluasan kawasan konservasi yaitu 137.007,18 Ha

Luas kawasan konservasi perairan sebagaimana tersebut baru mencapai 8,25% dari luas wilayah laut Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam rangka mendukung target luas kawasan konservasi nasional tahun 2020 adalah seluas 400.000 Ha.

Tabel 2.16. Alokasi Ruang Kawasan Konservasi di WP3K Provinsi NTB tahun 2016

Kategori Penetapan Kawasan Konservasi	Posisi Geografi		Lokasi	Luas (ha)
	Lon (X)	Lat (Y)		
1) Penetapan Kawasan	116,05662	-8,35349	TWP Pulau Gili Ayer, Meno, dan Trawangan di Lombok Utara	2.954,00
(Keputusan Menteri)	117,50765	-8,30142	TWAL Pulau Moyo di Kab. Sumbawa	6.000,00
	117,74692	-8,10622	TWA Pulau Satonda di Kab. Dompu	2.600,00
JUMLAH				11.554,00
2) Pencadangan Kawasan	115,89656	-8,74569	TWP Gili Tangkong, Nanggu, dan Sudak di Kab. Lombok Barat	21.556,00
(Keputusan Gubernur)	116,70973	-8,32263	TWP Gili Sulat dan Gili Lawang di Kab. Lombok Timur	10.000,00
	116,38586	-8,95308	TWP Teluk Bumbang di Kab. Lombok Tengah	6.310,00
	116,82257	-8,51140	TPK Gili Balu di Kab Sumbawa Barat	6.005,20
	117,07028	-8,38044	TPK Pulau Kramat, Bedil, dan Temudong di Kab. Sumbawa	2.000,00
	117,72340	-8,51415	TWP Pulau Liang dan Ngali di Kab. Sumbawa	33.461,00
	119,25674	-8,44085	TWP Gili Banta di Kab. Bima	40.500,00
	118,32330	-8,79527	SAP Teluk Cempi di Kab. Dompu	22.387,31
	117.09770	-9.10034	TP Penyu Tatar Sepang-Lunyuk di Kab. Sumbawa Barat dan di Kab. Sumbawa	50.364,18
JUMLAH				192.583,

Kategori Penetapan Kawasan Konservasi	Posisi Geografi		Lokasi	Luas (ha)
	Lon (X)	Lat (Y)		
				69
3) Usulan Perluasan Kawasan Konservasi	116.92917	-8.42942	KKP3K Pulau Panjang di Kab. Sumbawa	15.012,93
	117.39969	-8.13771	KKP Pulau Medang di Kab. Sumbawa	11.339,56
	117.97245	-8.65945	KKP Pulau Rakit di Kab. Sumbawa	12.146,00
	117.83920	-8.66594	KKP Pulau Lipan dan Gili Taekebo di Kab. Sumbawa	14.494,76
	118.28879	-8.25501	KKP Teluk Sanggar di Kab. Dompu	46.237,50
	119.22670	-8.68268	KKP3K Pulau Kelapa di Kab. Bima	5.970,70
	119.05087	-8.18098	KKP3K Pulau Sangiang di Kab. Bima	31.805,73
JUMLAH				137.007.18
Total				341.144,87

Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2017

- **Kawasan Pemanfaatan Umum**

Kawasan Pemanfaatan Umum merupakan kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya seperti kegiatan perikanan, prasarana perhubungan laut, pertambangan, pariwisata, dan permukiman. Kawasan pemanfaatan umum di Provinsi NTB seluas 2.485.243,12 hektar dijabarkan menjadi beberapa zona yaitu:

- a) Zona Parwisata : 8.606,76 ha
 - b) Zona Permukiman : 17,06 Ha
 - c) Zona Pelabuhan : 13.571,66 ha
 - d) Zona Perikanan Budidaya : 72.863,59 ha
 - e) Zona Perikanan Tangkap : 2.385.868,05 ha
 - f) Zona Pertambangan : 3.274,20 ha
 - g) Zona energi : 321, 75 ha
- b. Luas Zona Energi yang beririsan dengan KSNT dan Konservasi di Kawasan Lembar yaitu seluas 1.408,46 Ha.

II.2. KUALITAS AIR

II.2.1. Kualitas Air Sungai

Air hujan yang jatuh ke bumi sebagian menguap kembali menjadi uap air di udara, sebagian masuk ke dalam tanah (*infiltrasi*) dan sebagian lagi mengalir di permukaan (*run off*). Aliran air di permukaan ini kemudian akan berkumpul mengalir ke tempat yang lebih rendah dan membentuk sungai yang kemudian mengalir ke laut. Air sungai menjadi salah satu indikator kondisi lingkungan hidup di sekitarnya, terutama kondisi biofisik lahan dan perilaku masyarakat sekitar dalam mengelola lingkungan. Aliran

sungai normal sesuai karakteristiknya menandakan kondisi biofisik lahan di sekitarnya terjaga dan berfungsi dengan baik. Prilaku masyarakat dalam mengelola lingkungan selain berpengaruh terhadap kondisi biofisik lahan, juga berpengaruh terhadap kualitas air sungai. Air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sungai memiliki sifat dinamis, maka dalam pemanfaatannya dapat berpotensi mengurangi nilai manfaat dari sungai dan dampak lainnya dapat mempengaruhi lingkungan secara luas. Sungai memiliki fungsi penting dalam kehidupan yaitu sebagai sumber bahan baku air minum, pengairan, daerah wisata dan lain sebagainya.

Air sungai yang keluar dari mata air biasanya mempunyai kualitas yang sangat baik. Namun, dalam proses pengalirannya, air sungai akan menerima berbagai macam bahan pencemar baik berupa bahan alamiah maupun bahan-bahan buangan hasil kegiatan manusia. Hasil buangan kegiatan manusia tersebut kurang lebih 75% – 80% akan dibuang dalam bentuk yang sudah kotor dan tercemar yang dikenal dengan limbah cair.

Keberadaan atau masuknya limbah cair ke dalam sungai akan menyebabkan penurunan kualitas air sungai karena bahan-bahan atau zat yang terkandung dalam limbah cair tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan kualitas air sungai untuk menentukan status kualitas air guna mencegah dan menanggulangi pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Status kualitas air adalah tingkat kondisi kualitas air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan hasil

pengukuran air dengan baku mutu air yang ditetapkan. Kualitas air permukaan dapat ditentukan dengan menggunakan kombinasi parameter fisika dan kimia.

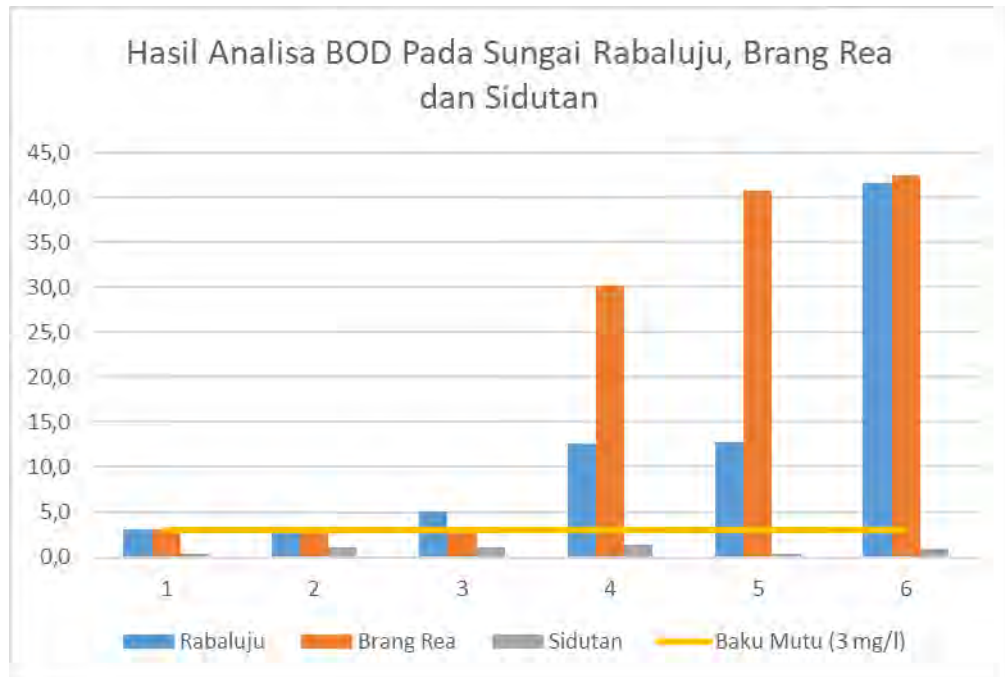
Pemantauan kualitas air sungai dilakukan oleh UPTB Balai Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB. Pemantauan kualitas air dilakukan di 10 (sepuluh) sungai yaitu sungai Ancar, Dodokan, Babak, Tojang, Sidutan, Brang Rea, Brang Biji, Raalaju, Padolo dan Sungai Sari yang dilakukan pemantauan sebanyak 3 (tiga) periode, titik pengambilan sampel di bagian hulu, tengah dan hilir dari sungai tersebut. Keseluruhan sungai yang dilakukan pemantauan tersebut termasuk dalam golongan air kelas II.

Pemantauan kualitas air sungai mengukur parameter fisik Temperatur, DHL, TDS, dan TSS, parameter kimia pH, DO, BOD, COD, NO₂, nitrat (NO₃-N), amonia (NH₃-N), tembaga (Cu), besi (Fe), timbal (Pb), seng (Zn), fosfat (PO₄), sulfat (SO₄²⁻) Parameter mikrobiologi yang diujikan adalah kandungan koliform dan kolitinja. Sedangkan untuk parameter kimia organik mengukur minyak dan lemak serta deterjen. Baku mutu yang digunakan yaitu baku mutu Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 tahun 2001.

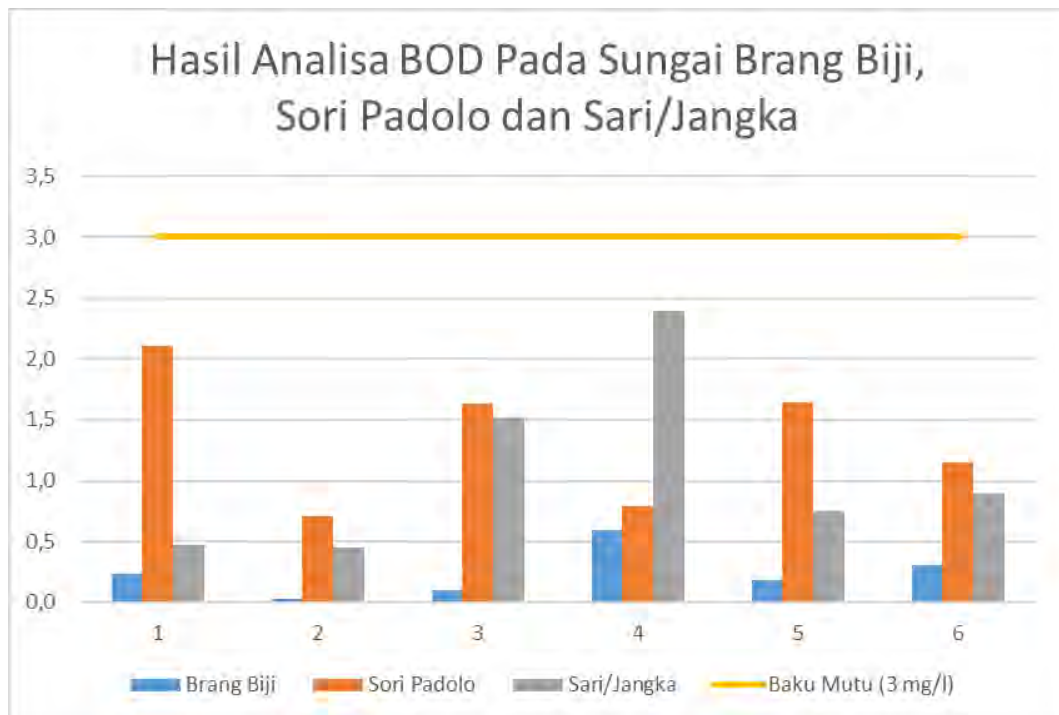
Parameter-parameter yang melebihi baku mutu adalah :

1. BOD : BOD (Biochemical Oxygen Demand) artinya kebutuhan oksigen biokimia yang menunjukkan jumlah oksigen yang digunakan dalam reaksi oksidasi oleh bakteri. Sehingga makin banyak bahan organik dalam air, makin besar B.O.D nya sedangkan D.O akan makin rendah. Jika kandungan BOD tinggi dapat Menyebabkan mikroorganisme tidak bisa terurai

akibat dari kekurangan oksigen sehingga makin banyak bahan organik dalam air tersebut.

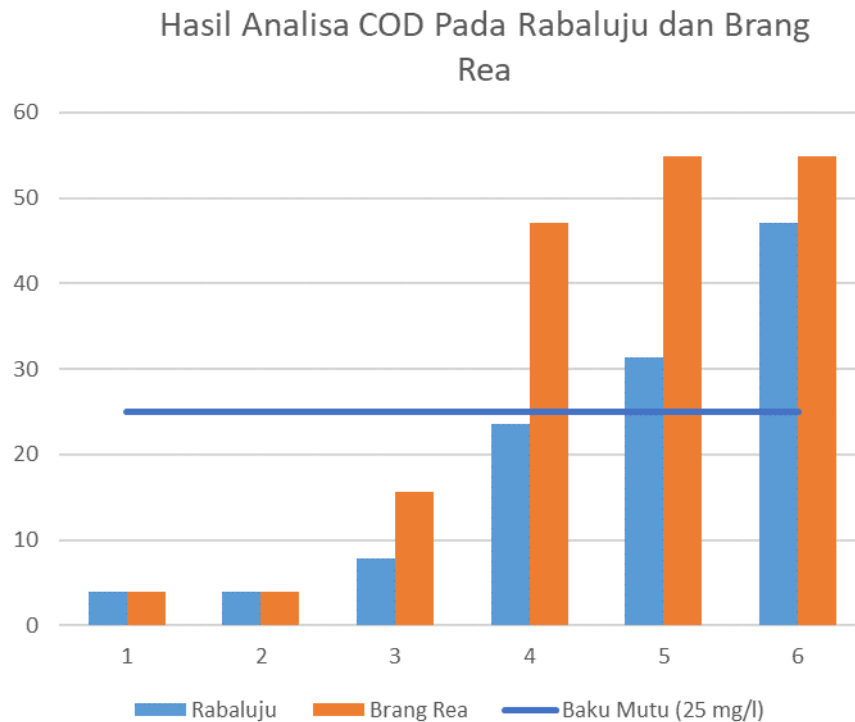


Gambar 2.21. Grafik Analisa BOD di Sungai Rabajulu, Brang Rea dan Sidutan



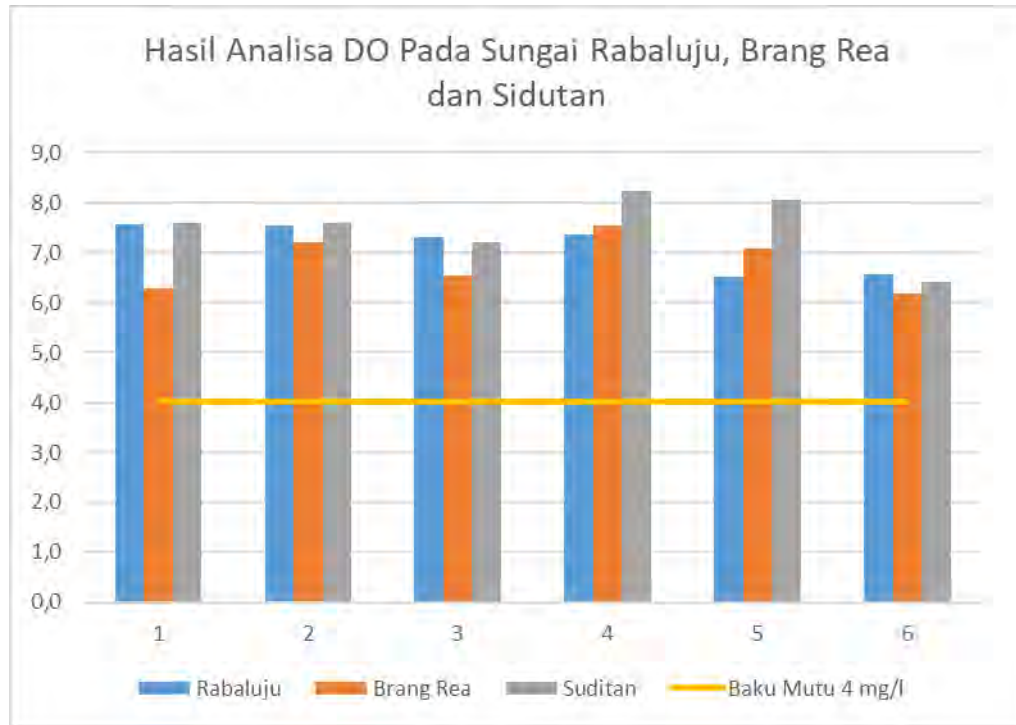
Gambar 2.22. Grafik Analisa BOD di Sungai Brang Biji, Sori Padolo dan Sari/Jangka

2. COD : Menyebabkan mikroorganisme tidak bisa terurai atau mendekomposisi bahan organik dalam kondisi aerobik untuk mengoksidasi karbon dan nitrogen akibat dari kekurangan oksigen.

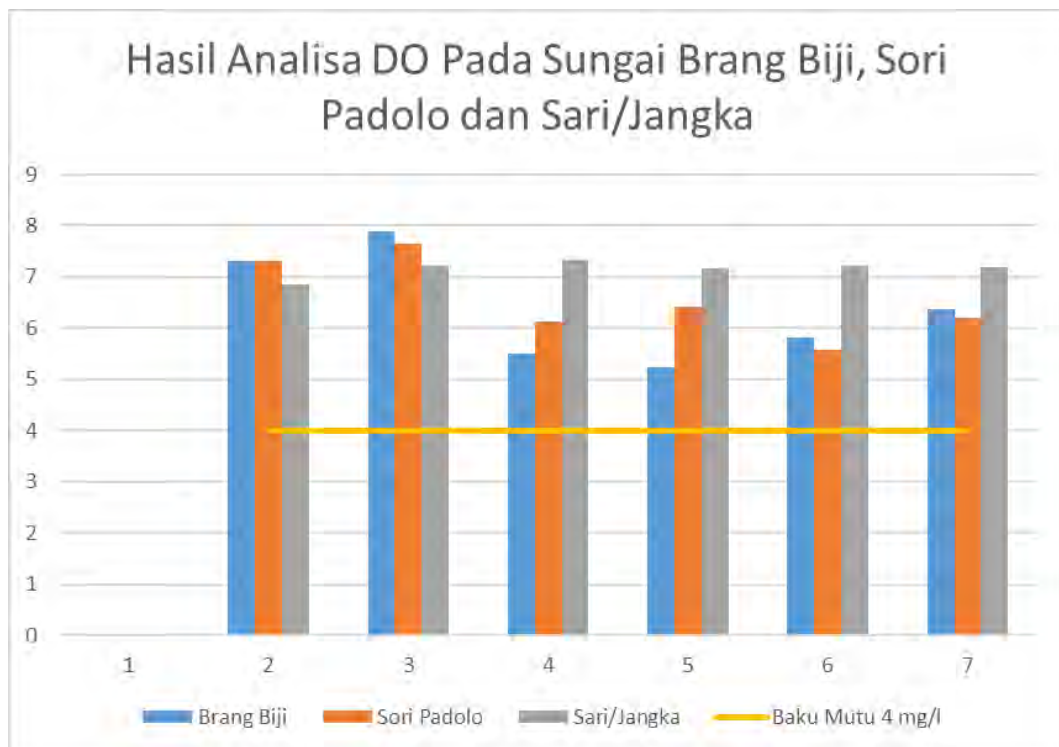


Gambar 2.23. Grafik Analisa COD di Sungai Rabajulu dan Brang Rea

3. DO : DO adalah oksigen terlarut yang terkandung di dalam air, berasal dari udara dan hasil proses fotosintesis tumbuhan air. Jika kadar oksigen terlarut berkurang mengakibatkan hewan-hewan seperti ikan, udang dan kerang akan mati.

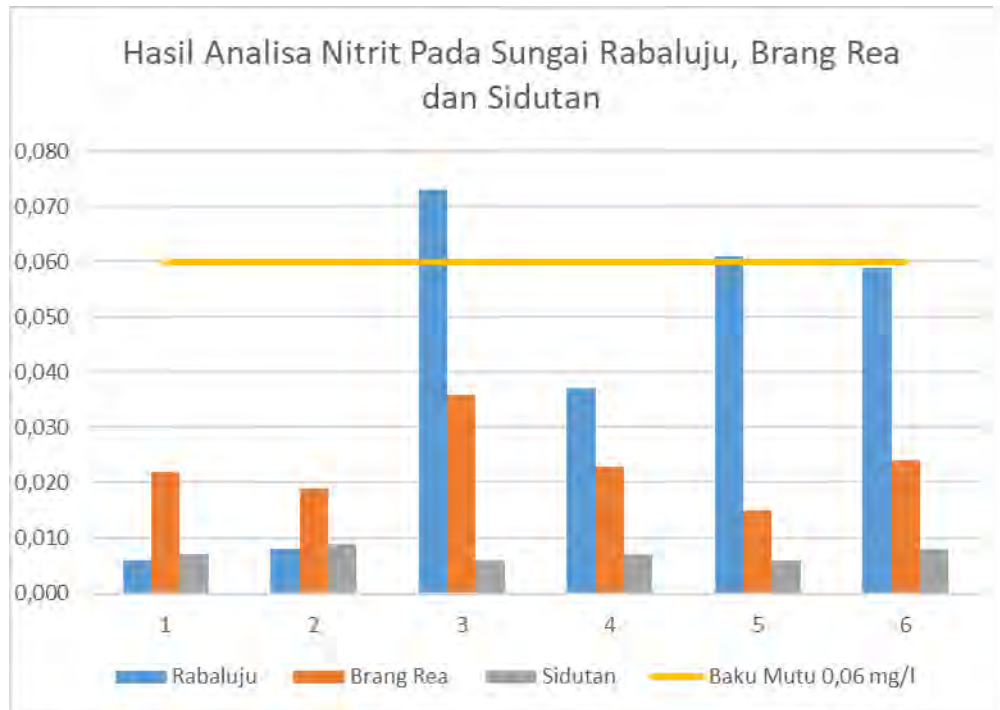


Gambar 2.24. Grafik Analisa DO di Sungai Rabajulu, Brang Rea dan Sidutan

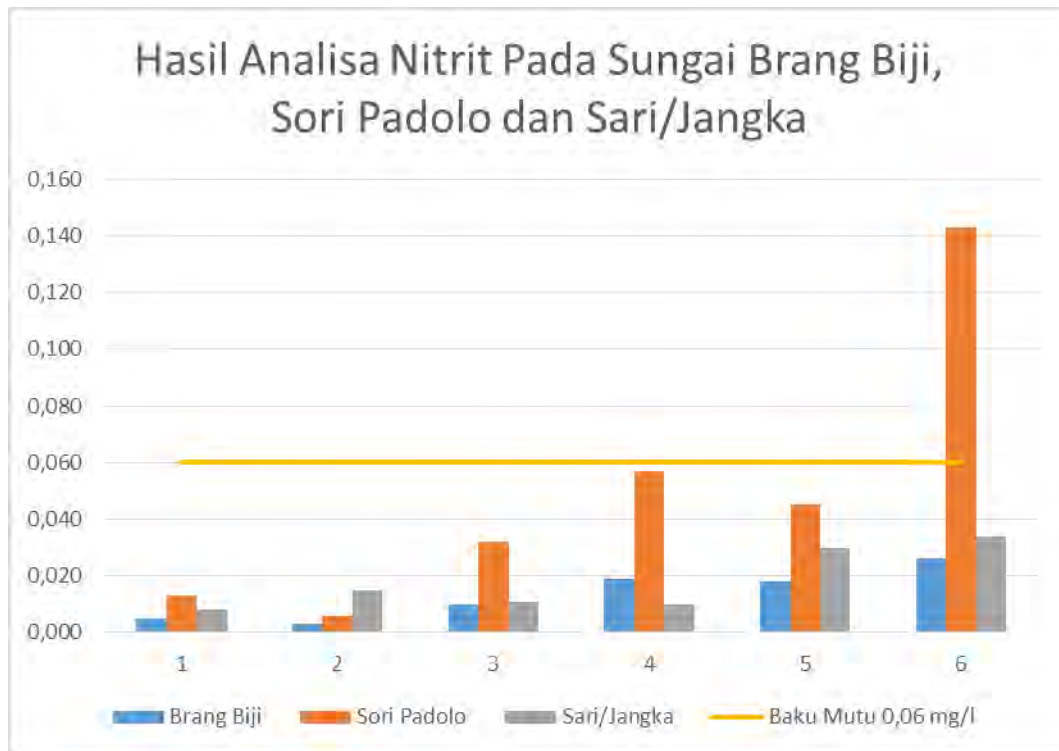


Gambar 2.25. Grafik Analisa DO di Sungai Brang Biji, Sori Padolo dan Sari/Jangka

4. Nitrit : Nitrit dapat membahayakan kesehatan karena dapat bereaksi dengan hemoglobin dalam darah, hingga darah tersebut tidak dapat mengangkut oksigen lagi. Di samping itu, NO_2 juga menimbulkan nitrosamin pada air buangan tertentu yang dapat menyebabkan kanker.



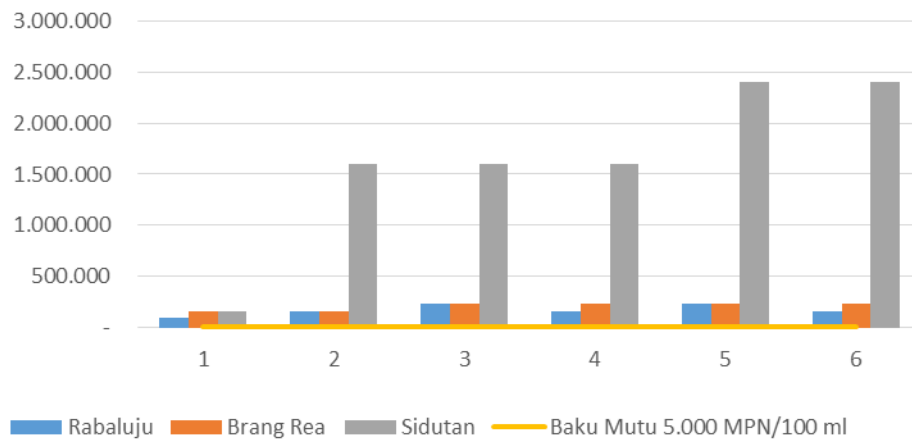
Gambar 2.26. Grafik Analisa Nitrit di Sungai Rabajulu, Brang Rea dan Sidutan



Gambar 2.27. Grafik Analisa Nitrit di Sungai Brang Biji, Sori Padolo dan Sari/Jangka

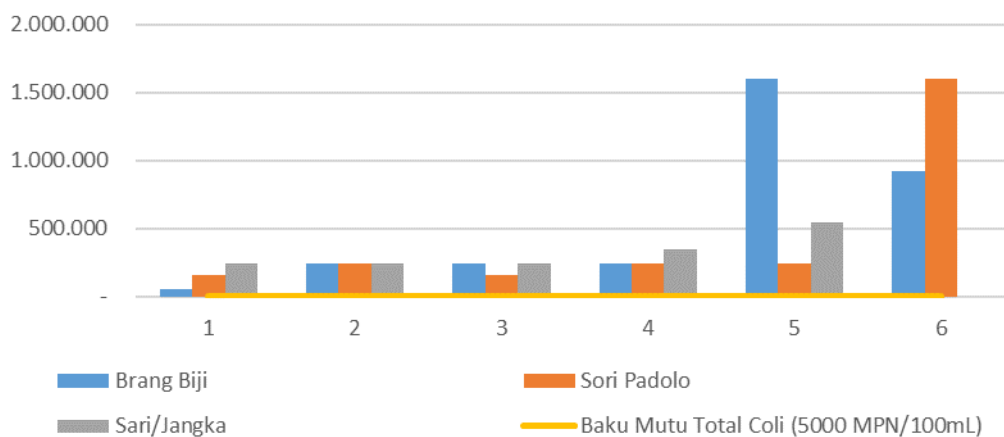
5. Total Coli : Diakibatkan karena kebiasaan masyarakat yang buang air langsung di sungai karena mereka tidak mempunyai WC atau *septic tank* yang bermuara di sungai.
 - Diseluruh sungai yang dilakukan sampling melebihi baku mutu.

Hasil Analisa Total Coli di Sungai Rabajulu, Brang Rea dan Sidutan



Gambar 2.28. Grafik Analisa Total Coli di Sungai Rabajulu, Brang Rea dan Sidutan

Hasil Analisa Total Coli di Sungai Brang Biji, Sori Padolo dan Rabaluju



Gambar 2.29. Grafik Analisa Total Coli di Sungai Brang Biji, Sori Padolo dan Rabajulu

II.2.2. Kualitas Air Bendungan

Waduk, situ dan embung merupakan ekosistem perairan yang dicirikan oleh komponen air sebagai medium bagi berlangsungnya kehidupan hayati dan proses-proses biofisik-kimia badan air dan daerah tangkapan sebagai komponen pengaliran air dan penampung air, komponen hayati yaitu biota air.

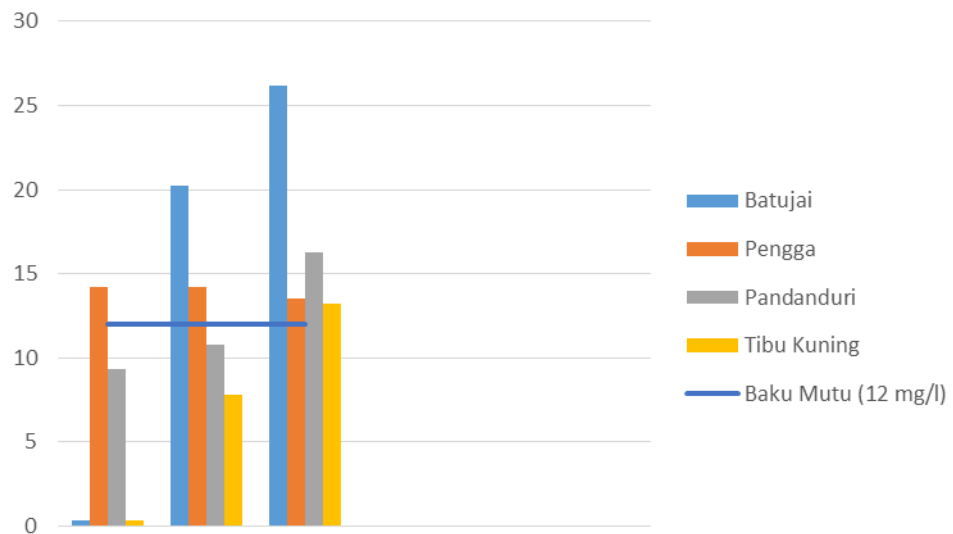
Pemantauan kualitas air bendungan dilakukan oleh Balai Informasi Infrastruktur Wilayah Provinsi NTB di empat bendungan di wilayah NTB yaitu di Bendungan Batu Jai, Bendungan Pengga, Bendungan Pandanduri dan Bendungan Tibu Kuning. Titik pengambilan sampel di hulu, tengah dan hilir dari bendungan. Berdasarkan hasil klasifikasi maka ke empat bendungan tersebut termasuk dalam mutu air kelas IV.

Pemantauan kualitas air bendungan mengukur parameter fisik Temperatur, TDS dan TSS, parameter kimia pH, DHL, DO, BOD, COD, amonia ($\text{NH}_3\text{-N}$), Klorida, besi (Fe), seng (Zn), Florida,, Parameter mikrobiologi yang diujikan adalah kandungan koliform dan kolitinja. Sedangkan untuk parameter kimia organik mengukur minyak dan lemak serta deterjen. Baku mutu yang digunakan yaitu baku mutu Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 tahun 2001.

Parameter-parameter yang melebihi baku mutu adalah :

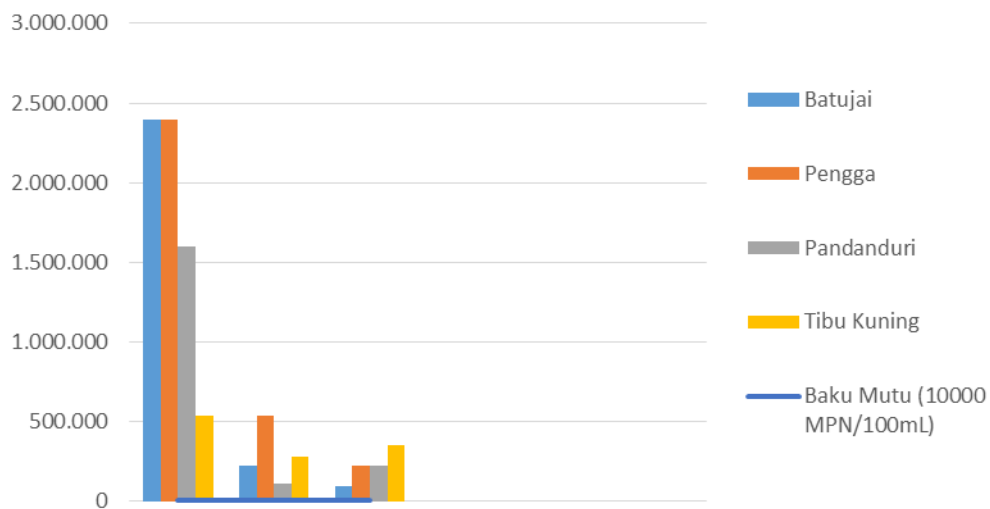
1. BOD : BOD (Biochemical Oxygen Demand) artinya kebutuhan oksigen biokimia yang menunjukkan jumlah oksigen yang digunakan dalam reaksi oksidasi oleh bakteri. Sehingga makin banyak bahan organik dalam air, makin besar B.O.D nya sedangkan D.O akan makin rendah. Jika kandungan BOD tinggi dapat Menyebabkan mikroorganisme tidak bisa terurai akibat dari kekurangan oksigen sehingga makin banyak bahan organik dalam air tersebut.
 - Bendungan Batujai : dibagian tengah (titik 2) dan hilir (titik 3)

- Bendungan Pengga : diseluruh titik pengambilan sampel
- Bendungan Pandanduri : dibagian hilir (titik 3)
- Bendungan Tibu Kuning : dibagian hilir (titik 3)

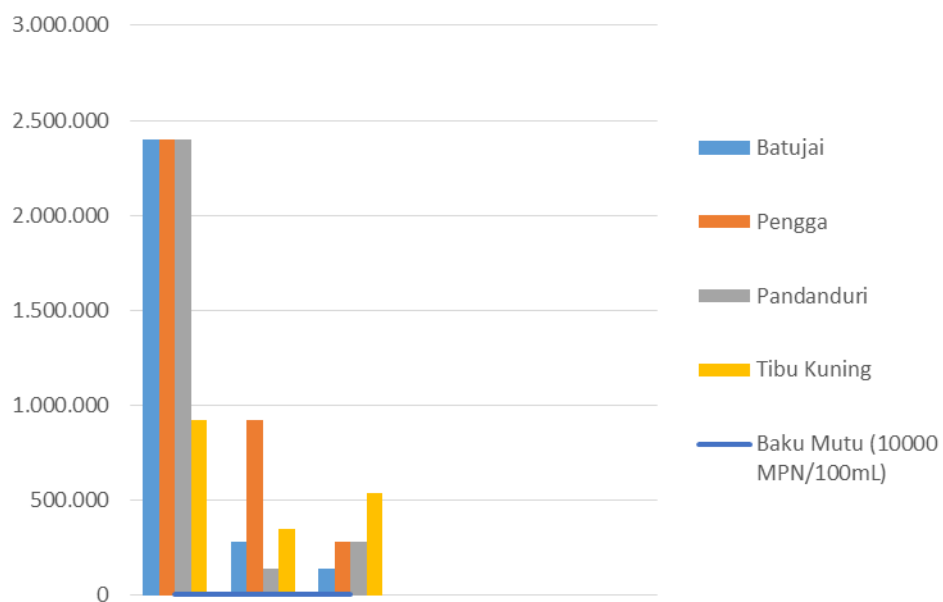


Gambar 2.30 Grafik Analisa BOD di Bendungan Batujai, Pengga, Pandanduri dan Tibu Kuning

2. Fecal coli dan total coli : Diakibatkan karena kebiasaan masyarakat yang buang air langsung di sungai karena mereka tidak mempunyai WC atau *septic tank* yang bermuara di sungai.
 - Diseluruh titik pengambilan sampel air bendungan melebihi baku mutu



Gambar 2.31. Grafik Analisa E-coli di Bendungan Batujai, Pengga, Pandanduri dan Tibu Kuning

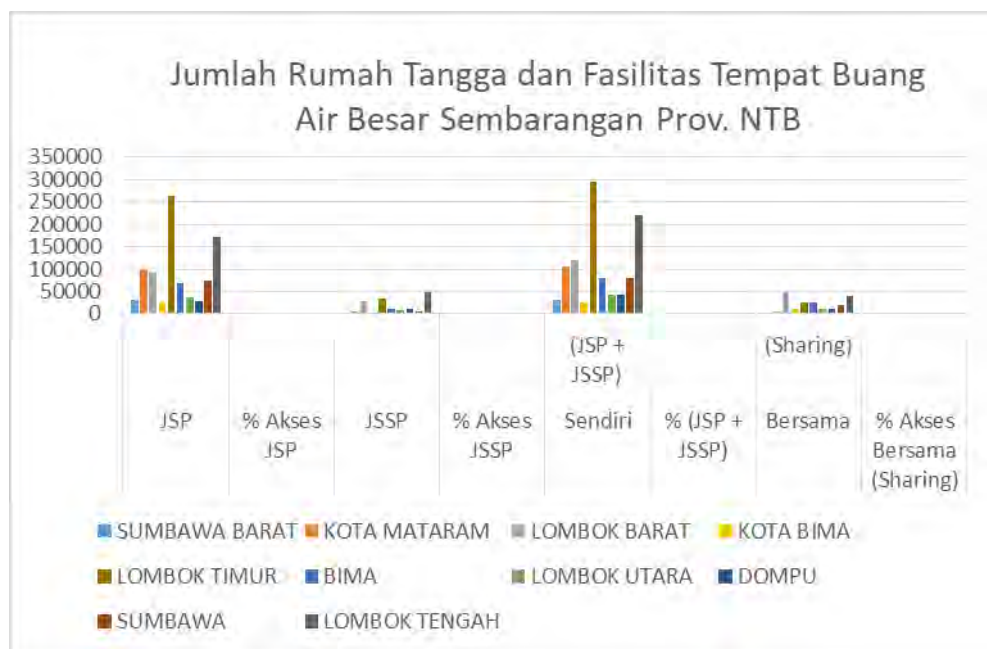


Gambar 2.32. Grafik Analisa Total coli di Bendungan Batujai, Pengga, Pandanduri dan Tibu Kuning

Dari data kualitas air sungai dan bendungan dapat diketahui jika sumber pencemar utama yaitu bakteri e-coli yang disebabkan kebiasaan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai sering

memanfaatkan sungai dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti mencuci dan mandi. Penduduk yang bermukim di sepanjang sungai juga biasanya memanfaatkan badan sungai sebagai lokasi buang air besar (BAB) dan tempat pembuangan limbah padat/sampah maupun limbah cair.

Fasilitas tempat buang air besar sangat dibutuhkan oleh setiap rumah tangga. Namun, kepadatan penduduk di suatu wilayah dapat menimbulkan permasalahan bagi penyediaan tempat buang air besar. Pada Tahun 2018, dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 1.445.560 masih ada sekitar 14,56% KK yang belum memiliki jamban sendiri.



Gambar 2.33 Grafik Jumlah Rumah Tangga Di Provinsi NTB Per Kabupaten/Kota Berdasarkan Tempat Buang Air Besar

Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2018 seperti terlihat pada gambar 3.40 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah rumah tangga yang buang air besar

dengan menggunakan jamban pribadi tertinggi di Kabupaten Lombok Timur yaitu sebesar 262.223 KK sedangkan yang terendah di Kota Bima yaitu 24.557 KK. Untuk penggunaan jamban bersama/MCK umum terbesar di Kabupaten Lombok Barat yaitu 49.654 KK sedangkan yang terendah yaitu Kabupaten Sumbawa Barat yaitu 611 KK.

Penyebab utama masyarakat buang air besar (BAB) masih disungai selain karena tidak tersedianya MCK di rumah juga akibat pendidikan masyarakat disekitar bantaran sungai masih minim, ini dibuktikan dengan jumlah penduduk yang belum atau tidak sekolah di Provinsi NTB yang tinggi.

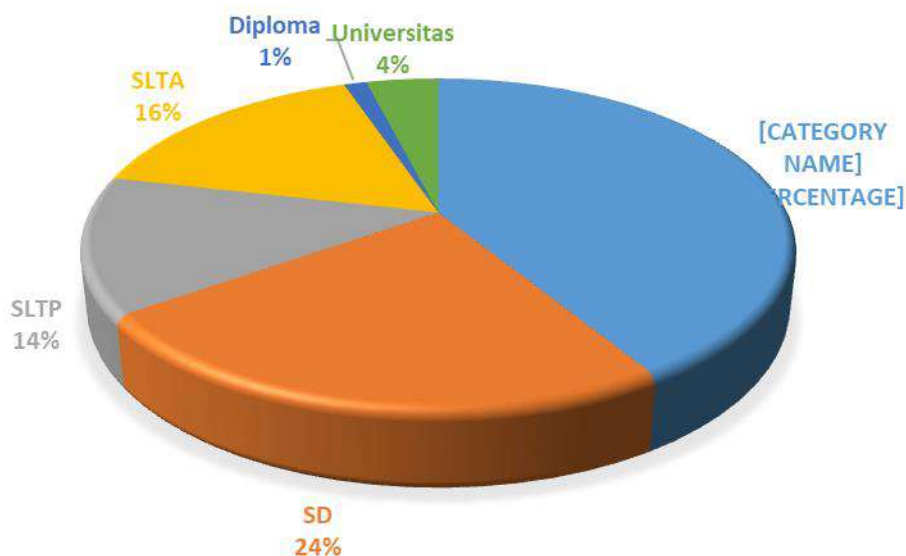
Tingkat pendidikan penduduk menggambarkan kualitas sumber daya manusia disuatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk tentunya makin tinggi kualitas sumber daya manusia (SDM) dan semakin tinggi pula kesadarannya terhadap kelestarian lingkungan, sehingga tekanan terhadap lingkungan semakin berkurang. Data jumlah penduduk Provinsi NTB berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.14. berikut.

Tabel 2.17. Data jumlah penduduk Provinsi NTB berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Kabupaten/ Kota	Tingkat Pendidikan					
		Tidak Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana
1	Lombok Barat	298.592	187.738	89.340	110.560	7.333	20.285
2	Lombok Tengah	493.328	221.684	143.974	136.708	10.935	45.173
3	Lombok Timur	503.414	386.634	188.465	162.126	11.684	37.584
4	Sumbawa	172.647	153.540	78.204	82.039	7.394	15.410
5	Dompu	114.508	27.653	24.327	36.219	4.318	7.770
6	Bima	195.458	116.211	63.771	122.019	7.006	20.212
7	Sumbawa Barat	46.843	38.845	16.791	24.504	2.199	5.849

8	Lombok Utara	115.562	56.219	26.802	27.955	2.042	5.111
9	Kota Mataram	169.262	44.297	54.597	104.962	8.844	37.544
10	Kota Bima	52.209	16.578	16.087	41.473	3.436	11.511
TOTAL		2.161.823	1.249.399	702.358	848.565	65.191	206.449

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , 2018



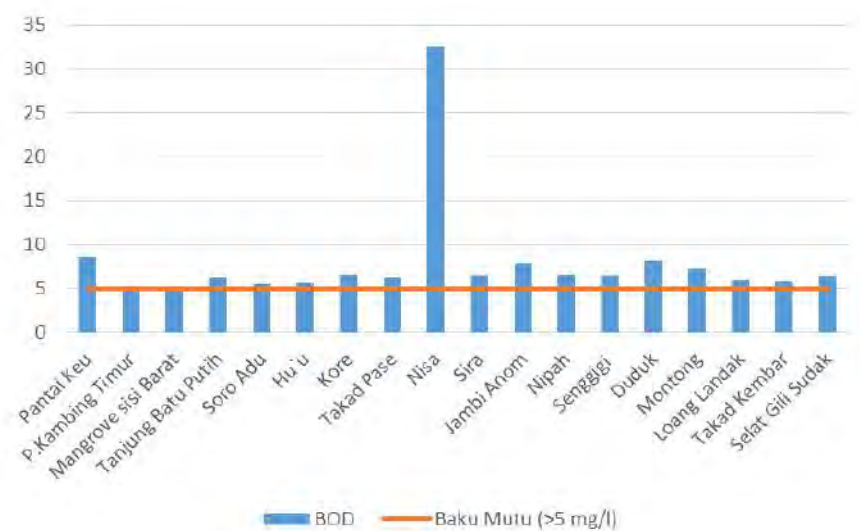
Gambar 2.34. Diagram persentase jumlah penduduk Provinsi NTB berdasarkan tingkat pendidikan

Dari tabel 3.9. dan gambar 3.42. menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Provinsi NTB pada tahun 2017 tidak / belum bersekolah sebesar 41% berstatus lulusan SD sebanyak 24 %diikuti SLTA sebanyak 16%, SLTP sebanyak 14%, universitas sebanyak 4% dan diploma 1%.

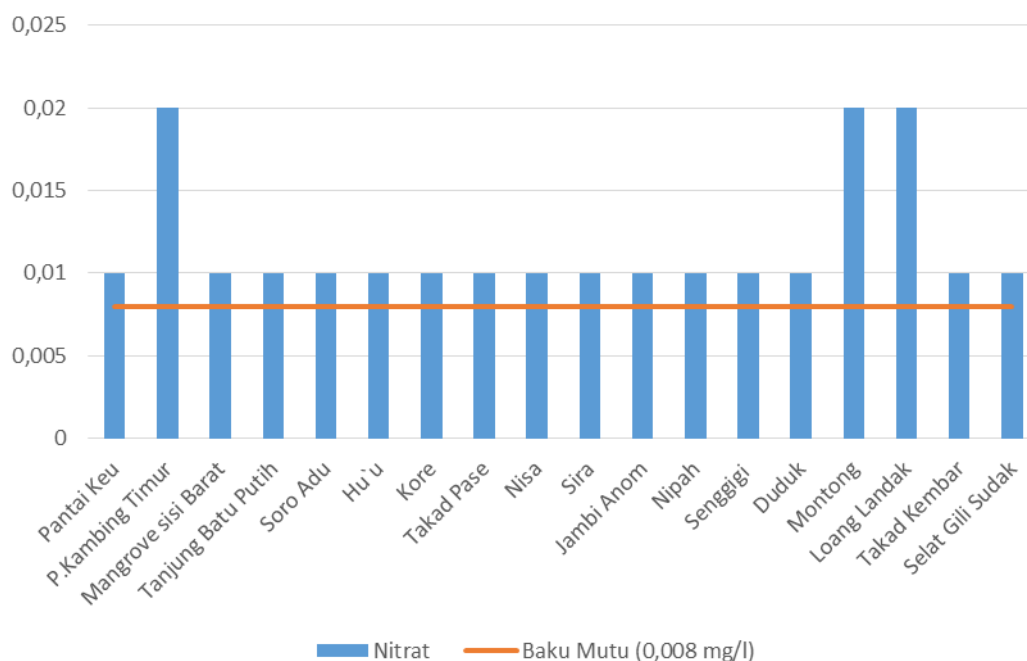
II.2. Kualitas Air laut

Pada tahun 2016, Dinas Kelautan dan Perikanan telah melakukan pemantauan kualitas air laut di 6 lokasi (18 titik) di seluruh wilayah Provinsi NTB. Keenam lokasi pemantauan yaitu di Teluk Bima, Teluk Cempi, Teluk Sanggar, Gili Matra, Senggigi dan Sekotong.

Dari hasil pengambilan sampel di 18 titik diperoleh hasil uji kualitas air laut untuk perairan pelabuhan, wisata bahari dan biota laut sudah sesuai baku mutu. Hanya di di Mangrove sisi barat (titik 3) untuk DO (oksigen terlarut) sebesar 4,65 mg/l dibawah baku mutu (> 5 mg/l), dimana DO adalah oksigen terlarut yang terkandung di dalam air, berasal dari udara dan hasil proses fotosintesis tumbuhan air. Jika kadar oksigen terlarut berkurang mengakibatkan hewan-hewan seperti ikan, udang dan kerang akan mati. Sedangkan untuk nitrat diseluruh titik pengambilan sampel (18 titik) melebihi baku mutu. Biasanya disebabkan dari aktifitas masyarakat yang menggunakan pestisida, membuang sampah dan tinja ke laut dan dapat menyebabkan perairan bersifat toksik bagi ikan.



Gambar 2.35. Grafik Analisa BOD di Laut Provinsi NTB Tahun 2016



Gambar 2.36. Grafik Analisa Nitrat di Laut Provinsi NTB Tahun 2016

II.3. KUALITAS UDARA

Kondisi kualitas udara jalan raya di Provinsi NTB dapat diketahui dengan melihat hasil pemantauan setiap parameter yang diukur. Pada tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB melakukan uji kualitas udara di seluruh Kabupaten/Kota. Baku Mutu yang dipakai adalah PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara seperti dibawah.

Tabel 2.18. Standard Kualitas Udara Ambien PP. No. 41/tahun 1999

No	Parameter	Metode/ Alat	Prinsip Pengukuran	Standar Waktu Pengukuran	Baku Mutu (ug/m3)
1	Total Suspended Partikulat (TSP)	High Volume Air Sampler (HVAS)	Gravimetri	24 jam	150
2	Sulfur dioksida	Spektrofotometer/UV	Menggunakan efek	1jam 24 jam	900 365

	(SO ₂)	Fluorescence	fluorescence , UV Fluorescence sebagai teknik pengukuran	1 tahun	60
3	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	Spektrometer	Metode Saltzman	1jam 24 jam 1 tahun	400 150 100
4	Carbon Monoksida (CO)	Analyzer (NDIR)	Penyerapan panjang gelombang tertentu dari spectrum infra merah oleh CO	1 jam 24 jam	30000 10000
5	Ozone (O ₃)	Spektrofotometer	Chemiluminescent	1 jam 1 tahun	235 50
6	Timbal (Pb)	Gravimetri/AS	Atomisasi kation Pb dengan pengukuran panjang gelombang	24 jam	2
7	Hidrokarbon (HC)	FID GC	Flame Ionisasi atom HC dan dideteksi dengan detector FID	1 jam	160

Sumber: PP No. 41 tahun 1999

Hasil pemantauan kualitas udara jalan raya secara umum di masing-masing lokasi untuk masing-masing parameter kualitas udara diperoleh sebagai berikut:

Tabel 2.19. Hasil Pengujian Kualitas Udara di Kabupaten/Kota se Provinsi NTB

Lokasi	Peruntukan	SO₂ (ug/Nm³)	No₂ (ug/Nm³)
KABUPATEN LOMBOK BARAT	Transportasi	6,92	6,00
	Industri	8,61	3,90
	Pemukiman	7,31	4,70
	Perkantoran	9,96	3,60
KABUPATEN LOMBOK TENGAH	Transportasi	< 2,57	8,10
	Industri	4,23	7,50
	Pemukiman	6,55	7,10
	Perkantoran	6,49	7,50
KABUPATEN LOMBOK TIMUR	Transportasi	6,14	15,70
	Industri	4,40	11,39
	Pemukiman	6,03	6,30
	Perkantoran	3,80	11,80
KABUPATEN SUMBAWA	Transportasi	8,27	15,80
	Industri	7,95	15,90
	Pemukiman	4,84	7,20
	Perkantoran	< 2,57	10,00
KABUPATEN DOMPU	Transportasi	9,20	25,36
	Industri	< 2,57	8,60
	Pemukiman	3,92	8,20
	Perkantoran	4,32	9,40

KABUPATEN BIMA	Transportasi	< 2,57	5,60
	Industri	23,23	4,40
	Pemukiman	13,12	7,50
	Perkantoran	13,90	14,50
KABUPATEN SUMBAWA BARAT	Transportasi	16,11	11,80
	Industri	10,28	11,40
	Pemukiman	21,84	11,00
	Perkantoran	< 2,57	7,20
KABUPATEN LOMBOK UTARA	Transportasi	7,71	5,40
	Industri	7,14	6,40
	Pemukiman	2,80	5,67
	Perkantoran	3,97	2,40
KOTA MATARAM	Transportasi	4,66	13,50
	Industri	13,90	9,30
	Pemukiman	4,83	8,00
	Perkantoran	16,54	17,70
KOTA BIMA	Transportasi	7,91	13,10
	Industri	16,02	12,00
	Pemukiman	11,68	13,70
	Perkantoran	11,95	14,20

Sumber data : Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Dari tabel diatas diketahui bahwa hampir seluruh parameter yang diuji memenuhi standar baku mutu sesuai dengan PP no 41 tahun 1999.

Sumber pencemaran udara yang paling tinggi yaitu asap dari sisa pembakaran mesin kendaraan bermotor. Dimana diketahui jumlah kendaraan bermotor tiap tahun terus meningkat sehingga menyebabkan tekanan terhadap lingkungan. Pembentukan gas buang tersebut terjadi selama pembakaran bahan bakar fosil bensin dan solar didalam mesin. Jenis proses pembakaran yang terjadi pada mesin kendaraan bermotor tidak sempurna didalam industri dan menghasilkan bahan pencemar pada kadar yang lebih tinggi. Bahan pencemar yang terutama terdapat didalam gas buang kendaraan bermotor adalah karbon monoksida (CO), berbagai senyawa hidrokarbon, oksida nitrogen (NOx), sulfur (SOx), dan partikulat debu termasuk timbal (Pb).

Jumlah penduduk di Provinsi NTB yang semakin meningkat dari tahun ke tahun mengakibatkan bertambahnya jumlah kendaraan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk sangat bergantung kepada alat transportasi dalam melakukan aktivitasnya, sehingga kebutuhan akan sarana dan prasarana transportasi meningkat.

Selain jumlah kendaraan dan panjang jalan, curah hujan juga sangat berpengaruh dalam proses pencemaran udara dimana Bahan-bahan pencemar tersebut dapat jatuh ke tanah bersama air hujan atau mengendap bersama debu, dan mengkontaminasi tanah dan air. Senyawa tersebut selanjutnya juga dapat masuk ke dalam rantai makanan yang pada akhirnya masuk ke dalam tubuh manusia melalui sayuran, susu ternak, dan produk lainnya dari ternak hewan.

Curah hujan dinyatakan sebagai tinggi air hujan yang jatuh ke permukaan tanah sebelum mengalami aliran permukaan, evaporasi, dan

infiltrasi kedalam tanah. Curah hujan merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap dan tidak mengalir. Curah hujan 1 mm, artinya dalam luasan 1 meter persegi pada tempat yang datar tertampung air setinggi 1 mm atau tertampung air sebanyak 1 liter.

Tabel 2.20. Curah Hujan Provinsi NTB

NO	Nama dan Lokasi Stasiun Pengamat	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agsts	Sept	Okt	Nov	Des
1	Lombok Barat/kediri	449	227	99	92	18	41	1	12	89	55	361	149
2	Lombok Tengah/BIL	458	291	325	34	1	9	6	9	5	0	247	112
3	Sumbawa/Stamet Sumbawa	208	268	170	17	0	—	—	0	19	—	162	166
4	Bima/Stamet Bima	349	191	137	30	0	5	—	3	14	4	129	277

Sumber : BMKG, 2018

II.4. Resiko Bencana

Aktivitas manusia yang berkaitan dengan pembangunan juga mempunyai peran yang penting terhadap perubahan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol cenderung merusak kesetimbangan alam. Hal ini memicu terjadinya bencana alam yang pada akhirnya merugikan manusia. Sebagai contoh, penebangan liar (*illegal logging*) di hutan alami menyebabkan erosi dan banjir pada musim hujan karena hutan tidak mampu lagi berfungsi sebagai peresap air permukaan; pembukaan lahan perkebunan di kawasan hutan dengan pembakaran menyebabkan kebakaran hutan yang tidak terkontrol sehingga menimbulkan

kabut asap. Kabut asap dapat mengancam kesehatan manusia terutama saluran pernapasan, dan juga dapat mengganggu aktivitas transportasi, perdagangan, dan aktivitas vital lain. Contoh lainnya, sebagian besar sungai-sungai di Indonesia sudah beralih fungsi menjadi tempat pembuangan sampah dan limbah, baik dilakukan oleh masyarakat maupun kalangan industri. Sungai kemudian menjadi tercemar sehingga menurunkan kualitas air dan keragaman biotik di dalamnya.

Wilayah Pulau Lombok merupakan busur vulkanik yang dihasilkan akibat subduksi antara Lempeng Indo Australia yang bergerak ke utara dengan Lempeng Eurasia yang telah berlangsung sejak Jaman Kapur Akhir (sekitar 65 juta tahun yang lalu) dan masih berlangsung hingga kini. Aktivitas tektonik tersebut mengakibatkan terbentuknya zona subduksi di bagian selatan Nusa Tenggara dan kompresi di bagian utaranya. Morfologi Pulau Lombok merupakan morfologi tubuh gunungapi dan sebagian besar batuanannya tersusun oleh endapan Kuartar berupa batuan rombakan gunungapi muda dan endapan aluvial pantai dan aluvial sungai. Batuan rombakan gunungapi muda terdiri dari tuff, breksi gunungapi, lava dan sebagian telah mengalami pelapukan. Endapan aluvial pantai, sungai dan batuan rombakan gunungapi muda yang telah mengalami pelapukan bersifat lunak, urai, lepas, belum kompak (*unconsolidated*) dan memperkuat efek guncangan gempabumi, sehingga mudah berubah susunannya apabila terkena guncangan gempa bumi. Gempabumi tersebut terjadi akibat aktivitas zona sesar naik busur belakang Flores (*Flores back arc thrust*) yang terletak di laut Flores utara Pulau Lombok. Menurut data mekanisme sumber USGS kedudukan sesar naik penyebab gempabumi adalah strike $N 93^{\circ}$ E, dip 28° , dan rake 93° .

Kejadian gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara Pada Juli 2018 dengan kekuatan 7 SR telah mengakibatkan adanya fenomena geologi permukaan berupa sesar permukaan (*surface rupture*), retakan tanah, likuifaksi dan gerakan tanah/longsoran. Sesar permukaan ditemukan di Desa Sambik Bengkol, Kecamatan Gangga; Dusun Beraringan, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan; dan Desa Selengan, Kecamatan Kayangan. Retakan dan sesar permukaan yang ditemukan pada ketiga daerah tersebut secara umum berarah barat – timur dan mengakibatkan bangunan mengalami rusak berat/ roboh. Retakan tanah ditemukan di Kecamatan Pemenang, Tanjung, Gangga, dan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Lokasi likuifaksi tersebar di Kecamatan Gangga, Kayangan dan Bayan. Gerakan tanah ditemukan di Kecamatan Gangga, Kayangan dan Bayan. Semua bangunan yang dilalui oleh sesar permukaan, retakan tanah dan likuifaksi mengalami rusak berat/ roboh. Menurut analisis Tim Tanggap Darurat Badan Geologi sesar permukaan tersebut yang berarah barat – timur mengindikasikan dominan gerakan naik (*thrust fault*) dengan *off set* vertikal di Desa Sambik Bengkol, Kayangan dan Selengan bervariasi antara 2 cm hingga maksimal 50 cm.

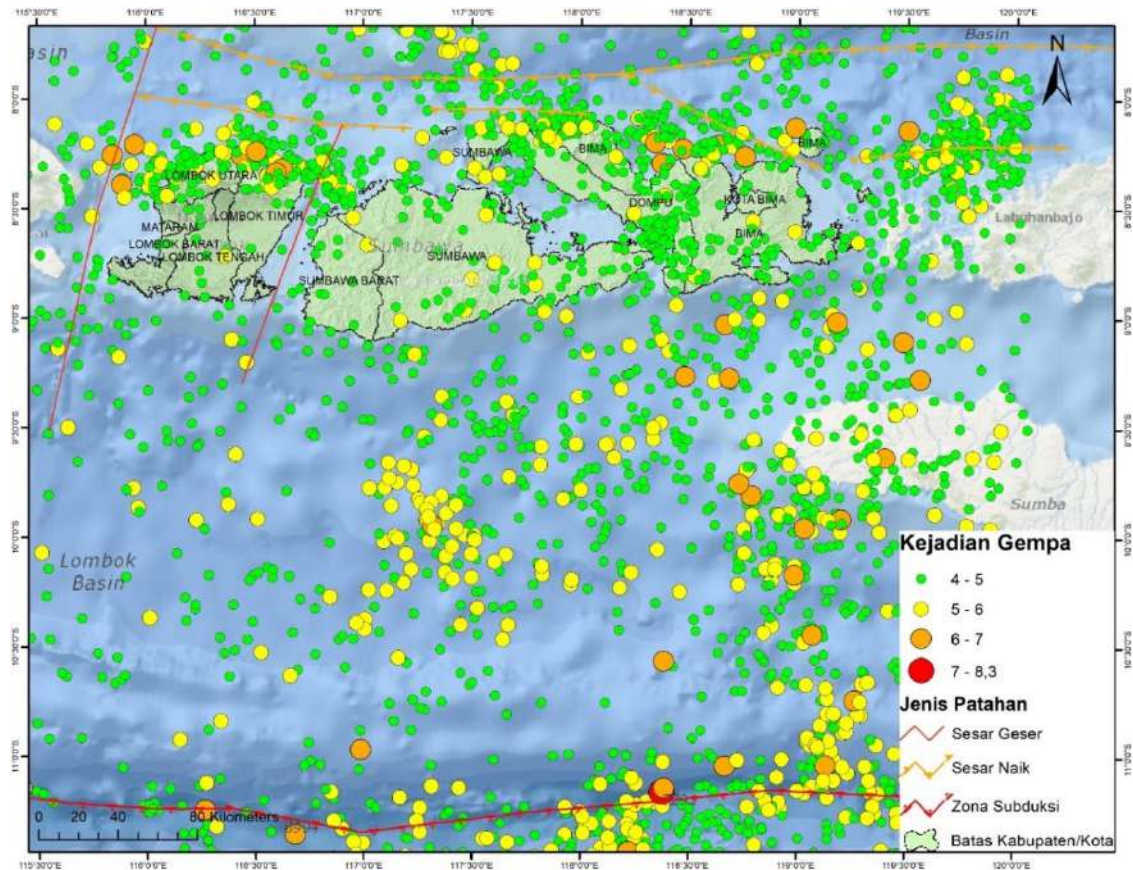


Gambar 2.37. Dampak bencana gempa di Kabupaten Lombok Utara

II.4.1. Gempa Bumi

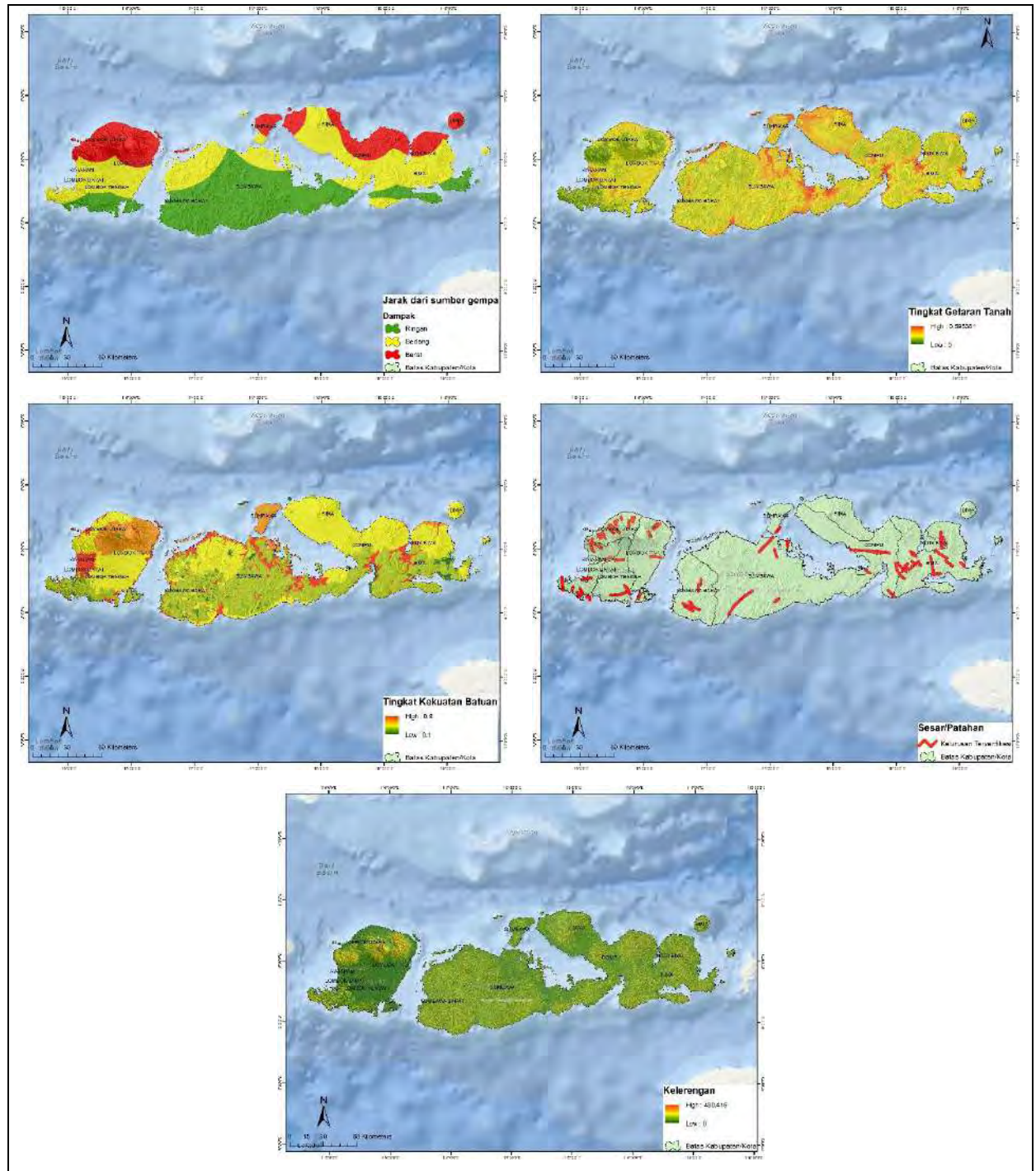
Kejadian gempa bumi adalah kejadian yang berulang sehingga perlu dilakukan upaya mitigasi untuk mengurangi dampak resiko dari proses tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis potensi bahaya gempa bumi terutama di wilayah NTB.

Gempa bumi bulan Juli dan Agustus 2018 yang terjadi di darat dengan 5 kali magnitudo diatas 6 SR mengakibatkan dampak bencana yang cukup besar bagi NTB khususnya Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa dan Mataram. Tercatat sejak tahun 1900an (gambar 2.38) sudah terjadi puluhan gempa dengan maginitudo diatas 6 SR atau gempa merusak di NTB dan ribuan gempa dengan magnitudo dibawah 4 s/d 6 SR. Hal ini tidak terlepas dari adanya zona-zona patahan aktif yaitu zona subduksi lempeng Indo-Australia dengan Eurasia di bagian Selatan, Sesar Naik Utara Flores dan beberapa sesar minor di bagian selatan NTB.



Gambar 2.38. Sejarah kejadian gempa bumi di NTB dari tahun 1900 s/d 2018 dan patahan – patahan yang mengakibatkanannya.

Untuk melakukan analisis potensi bahaya gempa bumi dilakukan melalui pendekatan PSHA dengan parameter – parameter jarak dari sumber gempa bumi, kekuatan batuan, tingkat getaran tanah, patahan dan kemiringan lereng (gambar 2.39).



Gambar 2.39. Parameter analisis potensi bahaya gempa bumi (a. jarak dari sumber gempa bumi, b. tingkat getaran tanah, c. tingkat kekuatan batuan, d. sesar/patahan, e. tingkat kelerengan)

Berdasarkan penilaian ahli selanjutnya semua parameter diberikan bobot yaitu :

Tabel 2.21. Nilai pembobotan masing-masing parameter gempa bumi

Parameter	Kelas	Bobot (%)
Jarak dari sumber gempa bumi	3	30
Tingkat getaran tanah	3	20
Tingkat kekuatan batuan	3	20
Jarak dari sesar/patahan	3	20
Tingkat kelerengan	3	10
Total bobot		100

Dengan metode analysis spatial berbasis raster semua data dikalkulasi berdasarkan bobotnya masing-masing menggunakan operasi raster calculator (Al-shatnawi, Al-shboul, Al-fawwaz, & Al-sharafat, 2014).

Dari analisis tersebut dihasilkan peta potensi bahaya gempa bumi NTB (gambar 2.40 dan gambar 2.41) dimana potensi bahaya gempa bumi cenderung berada dekat dengan lokasi patahan naik Flores atau patahan naik Utara NTB, hal ini diakibatkan oleh lokasi patahan utara berada dekat dengan daratan dan hal ini juga sesuai dengan kejadian bencana gempa 30 tahun terakhir bahwa bencana gempa terbanyak yang menimbulkan korban adalah dibagian utara. Seperti tahun 1979 gempa di utara pemenang dan gempa tahun 2018 gempa di utara Lombok Utara dan Lombok Timur.

II.4.2. Tsunami

Tsunami merupakan sebuah fenomena alam berupa naiknya air laut secara mendadak dan dapat mengakibatkan bencana besar. Adapun penyebab tsunami adalah gempa bumi, gunung meletus, longsor dipalung laut dan atau meteor jatuh dilaut.

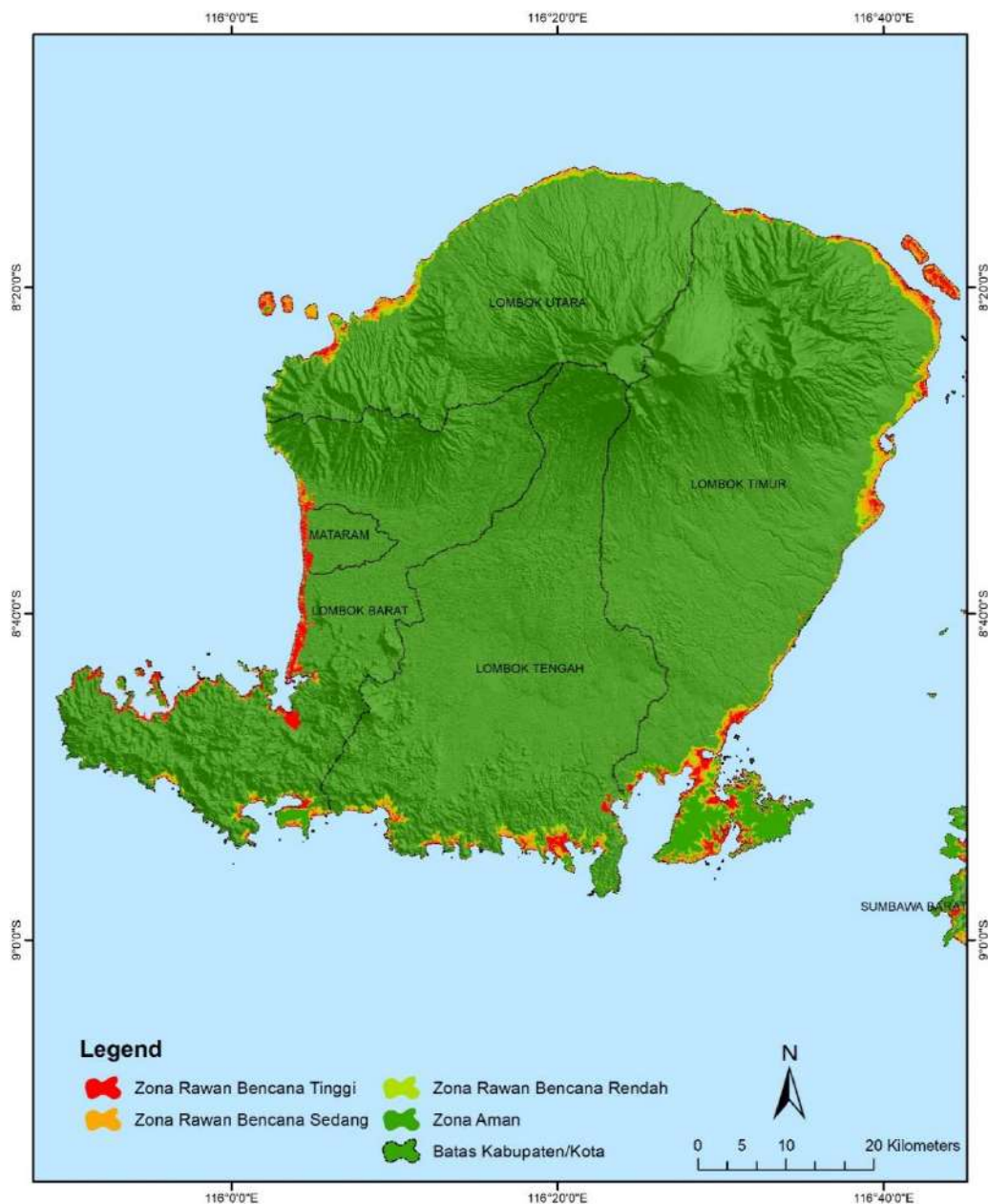
Tidak semua gempa dapat berdampak pada tsunami, hanya gempa yang terjadi dilaut, kekuatan gempa bumi lebih dari 6,5 SR dan sistem sesar yang mendukung displasemen naik atau turun yang dapat berdampak pada tsunami. Nusa Tenggara Barat yang diapit oleh 2 sistem tektonik besar yaitu zona subduksi di bagian Selatan dan Sesar Naik Flores dibagian Utara oleh karena itu NTB memiliki risiko yang besar terdampak gempa bumi dan tsunami.

Tsunami memiliki karakteristik sebagai gelombang laut dengan kecepatan yang sangat besar ditengah laut dan gelombang yang sangat tinggi ketika mencapai daratan. Oleh karena itu, morfologi laut dan daratan sangat memiliki peranan dalam ketinggian tsunami dan daya rusaknya.

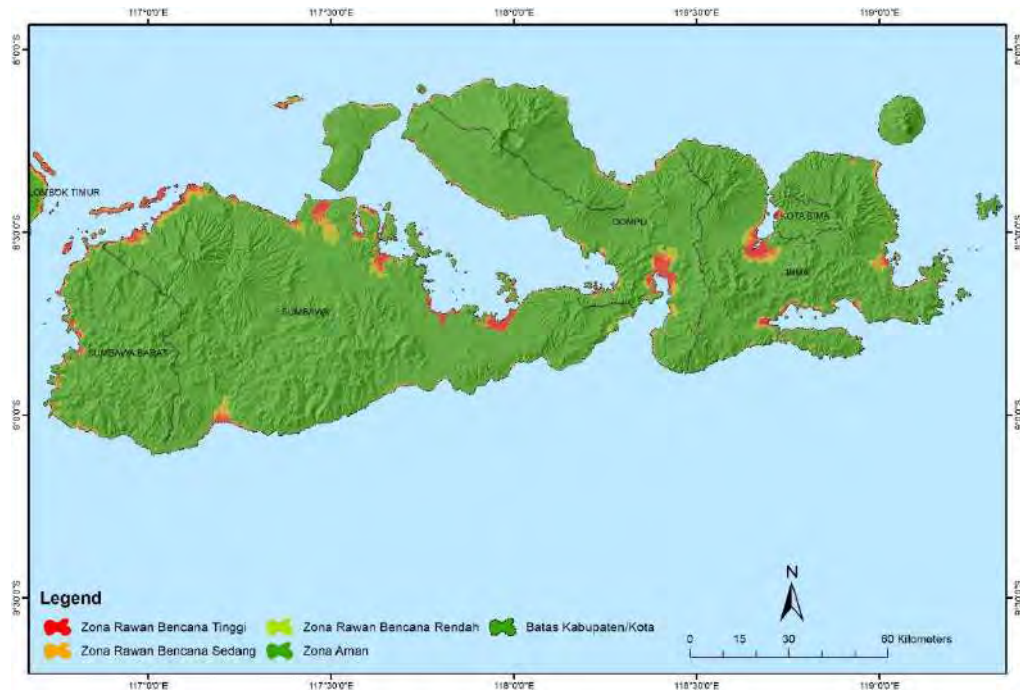
Melihat karakteristik tsunami maka dalam penelitian ini dilakukan analisis besaran potensi bahaya tsunami berdasarkan parameter-parameter elivasi, arah sumber gempa bumi, dan morfologi daratan (Leonard & Rogers, 2014).

Dalam pemodelan ini digunakan parameter ketinggian maksimal tsunami 15 meter, hal ini berdasarkan sejarah tsunami tertinggi yang pernah terjadi didaerah Lunyuk, Kabupaten Sumbawa. Dengan menggunakan parameter tersebut, potensi bahaya tsunami dibagi menjadi 3 (tiga) kelas yaitu tinggi (0 - 5 meter), sedang (5 – 10 meter) dan rendah (10 – 15 meter). Selain itu, untuk mendapatkan hasil genangan berdasarkan sumber gempa bumi dan koneksi antara saluran pembawa air maka, digunakan metode Iterasi dengan pemodelan *GIS-Based* (Marfai, 2003).

Hasil dari analisis menunjukkan bahwa daerah-daerah yang langsung berhadapan dengan zona patahan aktif memiliki potensi yang lebih besar terdampak tsunami pada ketinggian yang telah dimodelkan (Gambar 2.42). Selain itu, bentuk morfologi daratan sangat berpengaruh terhadap potensi jangkauan tsunami dimana daerah teluk yang sempit memiliki potensi rambatan air lebih jauh ke daratan begitu juga keberadaan sungai besar dapat menambah potensi air untuk masuk lebih kedalam didaratan.



Gambar 2.42. Peta potensi bahaya Tsunami Lombok



Gambar 2.43. Peta potensi bahaya Tsunami Pulau Sumbawa

II.4.3. Gunungapi

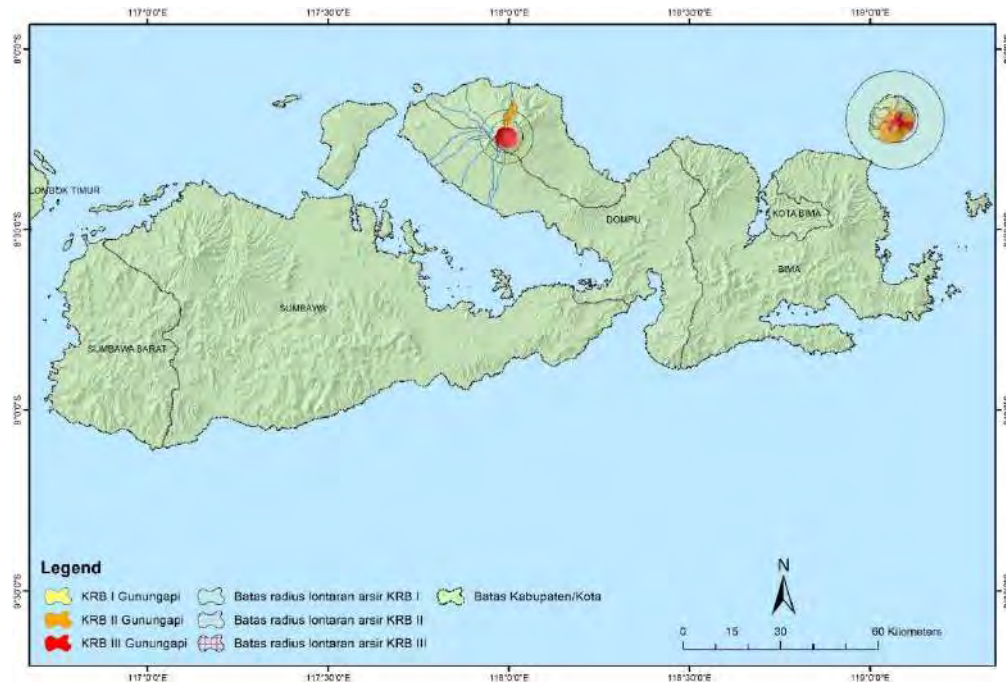
Gunungapi merupakan sebuah manifestasi dari adanya sistem tektonik besar yang aktif. Keberadaan zona subduksi lempeng Indo-Australia dengan Eurasia berdampak pada terbentuknya deretan gunungapi aktif di Indonesia. Tercatat ada 129 buah gunungapi aktif tipe A di Indonesia. Sedangkan untuk wilayah NTB terdapat 3 gunungapi aktif tipe A yaitu Gunungapi Rinjani, Tambora dan Sangeangapi. Gunungapi Rinjani yang saat ini pusat aktivitasnya ada dikawah Baru Jari merupakan gunungapi yang terletak di Pulau Lombok sedangkan Gunungapi Tambora dengan pusat aktivitasnya di Doro Api To'i berada di Pulau Sumbawa. Untuk Gunungapi Sangeangapi terdapat pada pulau sendiri yang disebut pulau Sangeang yang termasuk dalam administrasi Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

Keberadaan tiga gunungapi tersebut telah dimonitor secara kontinue oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melalui stasiun/pos pengamatan di masing-masing gunungapi tersebut.

Peta potensi bahaya gunungapi untuk ketiga gunungapi tersebut sudah disediakan dalam format JPEG (gambar) oleh PVMBG sebagai instansi resmi dalam pembuatan peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi. Penelitian ini untuk bahaya gunungapi hanya melakukan digitasi dan klasifikasi ulang dari peta yang sudah ada menggunakan software SIG sehingga didapatkan data yang dapat digunakan untuk pembuatan peta risiko bencana untuk tahap analisis selanjutnya (Gambar 2.44 dan 2.45).



Gambar 2.44 Peta potensi bahaya Letusan Gunung Rinjani Pulau Lombok (sumber, PVMBG)



Gambar 2.45. Peta potensi bahaya Letusan Gunung Tambora dan Sangeangapi Pulau Sumbawa (Sumber, PVMBG)

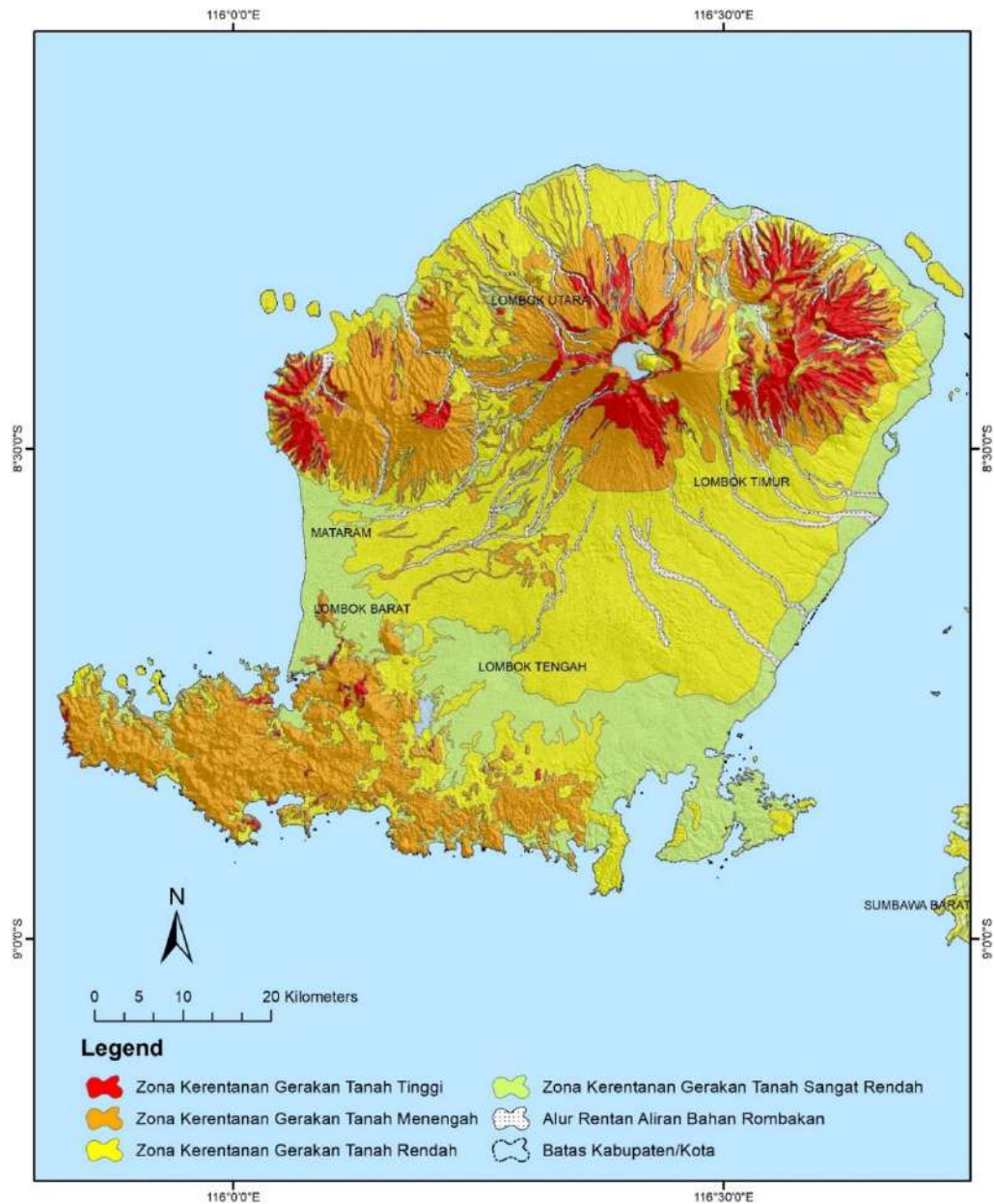
II.4.4. Tanah Longsor/ Gerakan Tanah

Gerakan tanah atau tanah longsor merupakan suatu peristiwa perpindah masa tanah dari atas lereng menuju ke bagian kaki lereng. Peristiwa ini memiliki potensi bahaya apabila dibawah lereng dihuni oleh masyarakat.

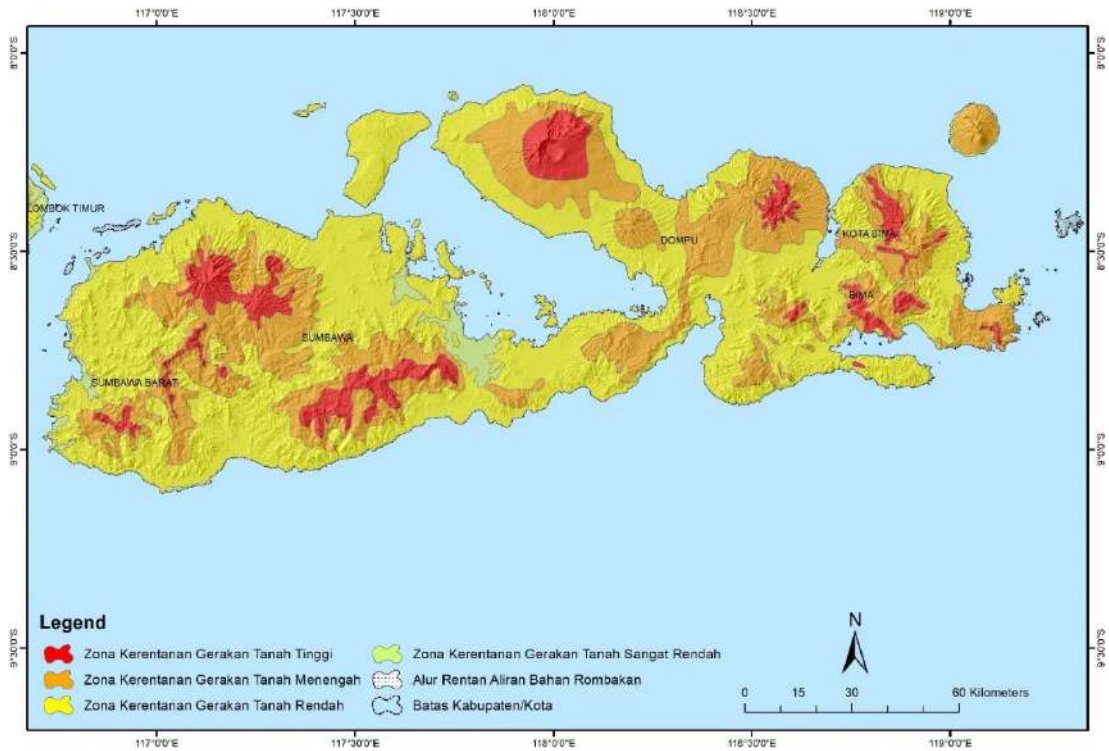
Tanah longsor pada umumnya diakibatkan oleh terjadinya pembebanan yang berlebihan dibagian atas lereng atau gangguan keseimbangan lereng oleh aktivitas pemotongan lereng baik untuk jalan dan lain-lain. Selain itu, getaran juga bisa berdampak pada gangguan kestabilan lereng yang dapat berdampak pada tanah longsor seperti getaran karena gempa bumi.

Selain potensi bahaya gunungapi, PVMBG juga melakukan pembuatan peta potensi bahaya gerakan tanah/tanah longsor. Setelah kami melakukan analisis sejarah kejadian tanah longsor di NTB dengan Peta Potensi Bahaya Tanah Longsor yang dikeluarkan oleh PVMBG, sebagian besar kejadian bencana tanah longsor terjadi pada daerah dengan potensi tanah longsor tinggi oleh karena itu, untuk penelitian ini kami

menggunakan data potensi bahaya tanah longsor yang dikeluarkan oleh PVMBG.



Gambar 2.46. Peta potensi bahaya Gerakan Tanah/Tanah Longsor Pulau Lombok



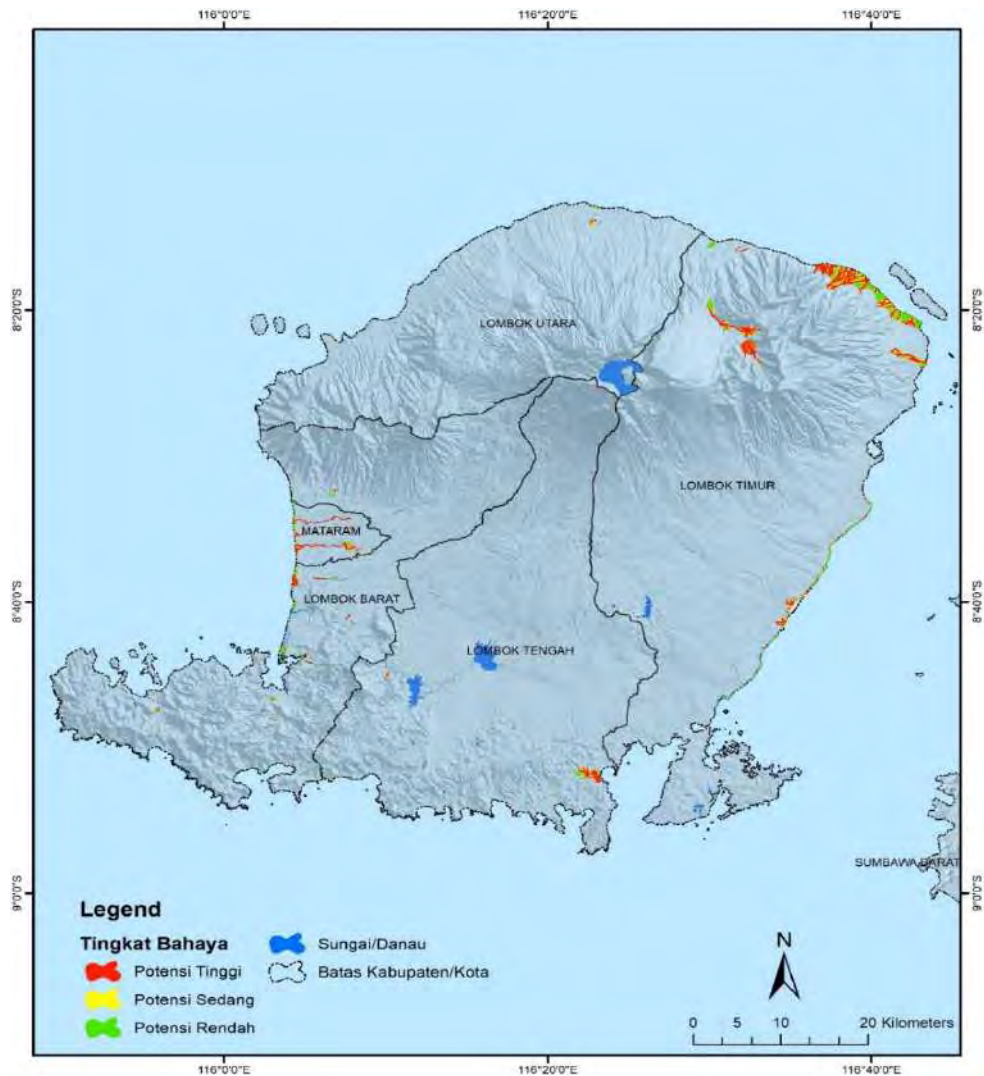
Gambar 2. 47. Peta potensi bahaya Gerakan Tanah/Tanah Longsor Pulau Sumbawa

4.1.5 Banjir

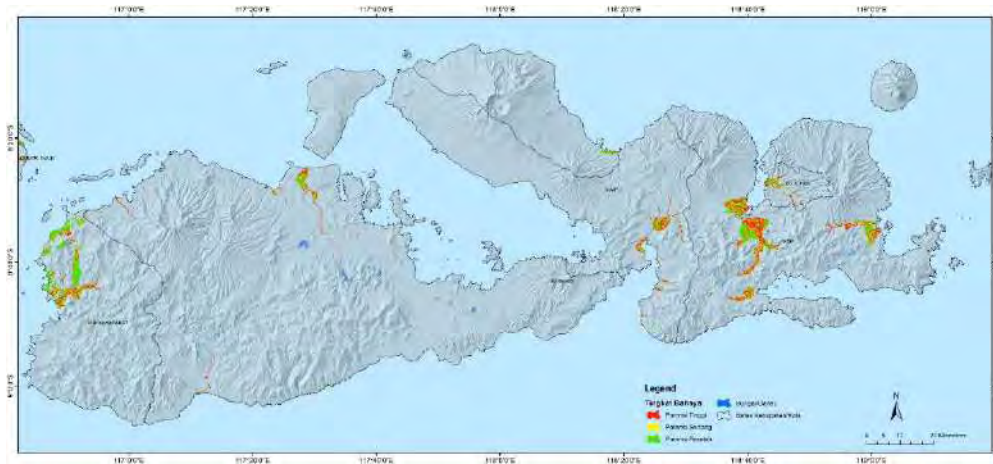
Banjir dan banjir bandang merupakan salah satu bencana yang hampir setiap tahun melanda Provinsi NTB. Banjir sering kali disebabkan oleh kondisi meteorologi, kondisi topografi dan kondisi tutupan lahan. Kondisi meteorologi seperti hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada kondisi tertentu. Kondisi topografi lebih berhubungan dengan rendahan atau daerah lembah seperti bantaran sungai atau daerah dataran banjir sungai yang sudah mulai di tinggali masyarakat. Kondisi tutupan lahan terutama akhir-akhir ini menjadi faktor dominan penyebab banjir karena banyaknya perubahan tata guna lahan oleh masyarakat menjadikan intensitas banjir di NTB 10 tahun terakhir meningkat.

Tiga kondisi tersebut menjadi dasar dalam penentuan potensi ancaman banjir di Provinsi NTB. Dari hasil analisis dijumpai daerah-daerah yang berpotensi banjir adalah daerah Lombok Timur terutama

kecamatan Sambelia dan Sembalun, Lombok Barat, Kota Mataram, Selatan Lombok Tengah, Kecamatan Taliwang KSB, Kota Sumbawa Besar, Dompu dan Bima.



Gambar 2.48. Potensi Banjir di Pulau Lombok

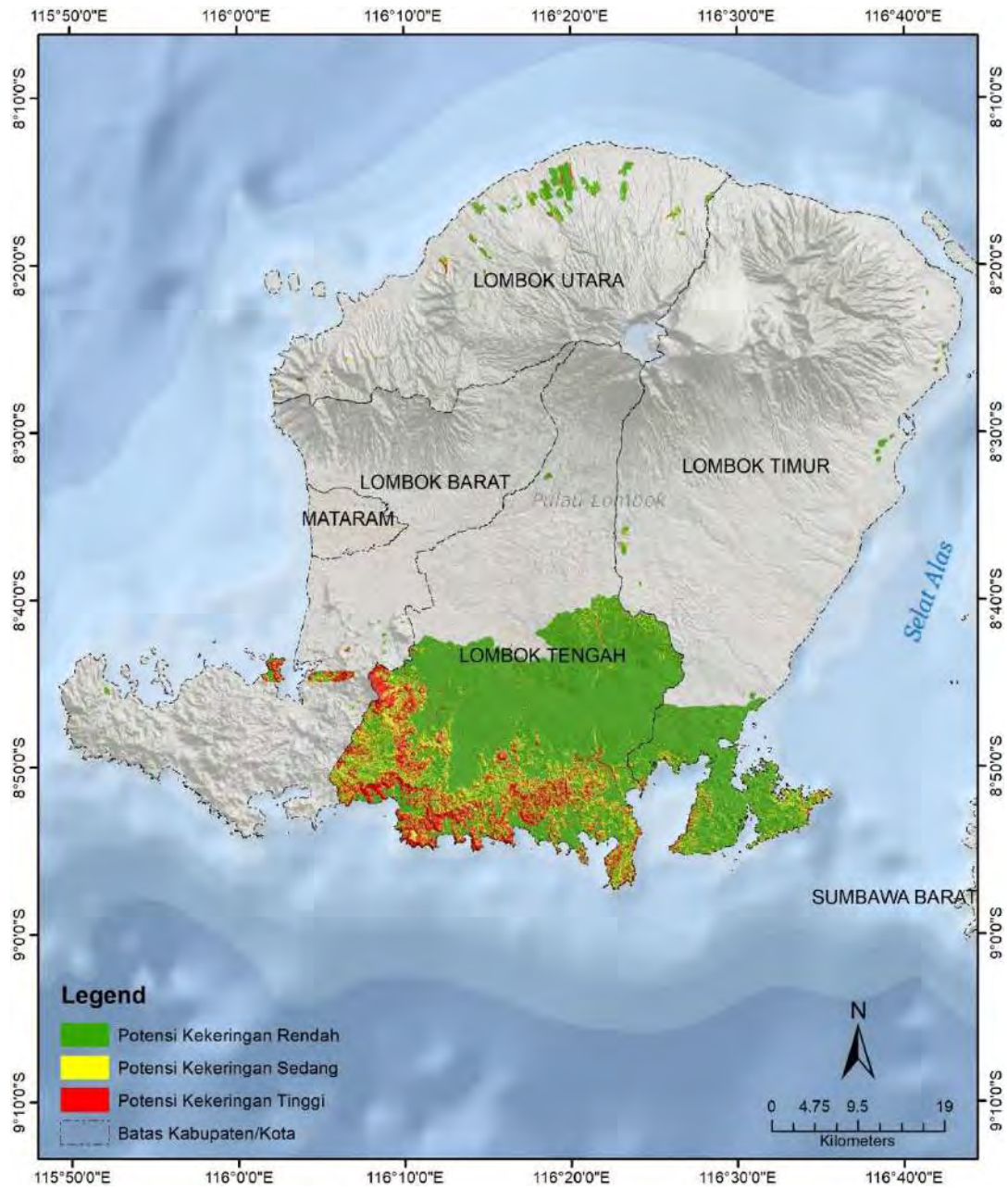


Gambar 2.49. Potensi Banjir Pulau Sumbawa

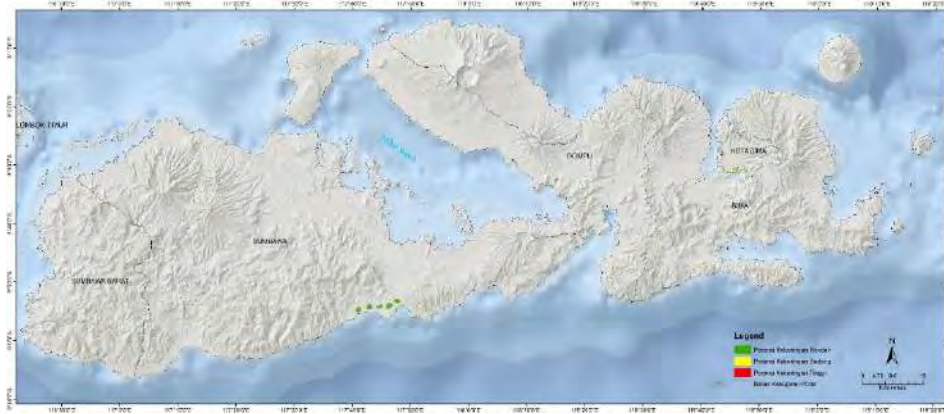
II.4.6. Kekeringan

Kekeringan merupakan salah satu bencana yang rutin terjadi di NTB. Kondisi meteorologi dan kondisi batuan menjadi penyebab utama kekeringan di NTB. Oleh karena itu potensi terbesar kekeringan berada di Provinsi NTB adalah di daerah-daerah dengan kondisi hidrogeologi yang kurang.

Beberapa daerah yang berpotensi untuk terjadi kekeringan adalah didaerah selatan Lombok seperti Kecamatan Pujut dan Praya Barat Daya Lombok Tengah, Kecamatan Pringgabaya dan Kopang Lombok Timur, Kecamatan Bayan dan kayangan Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Sekotong Lombok Barat dan Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa.



Gambar 2.50. Peta Potensi Kekeringan Pulau Lombok



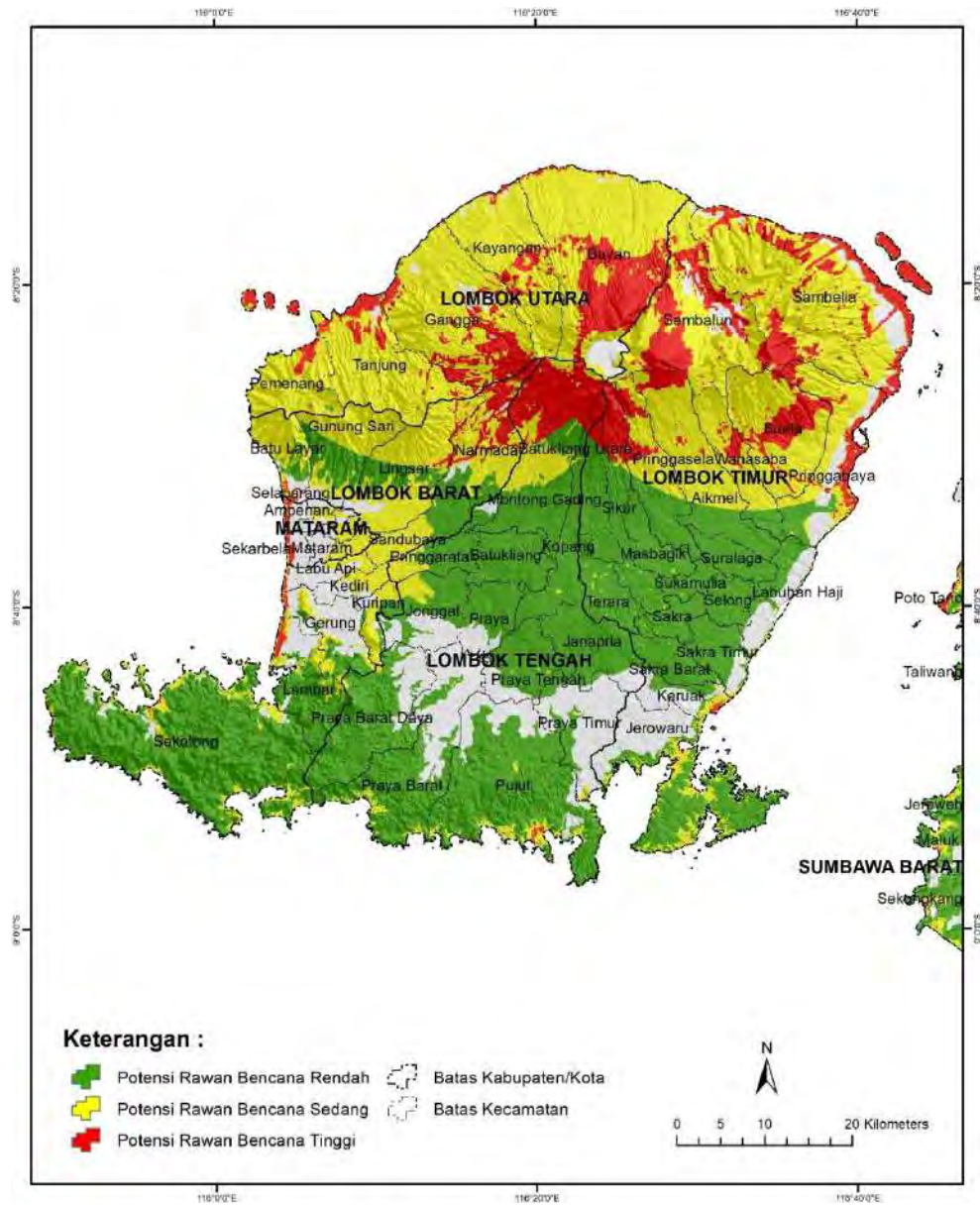
Gambar 2.51. Peta Potensi Kekeringan Pulau Sumbawa

II.4.7. ANALISIS KERAWANAN GABUNGAN BENCANA

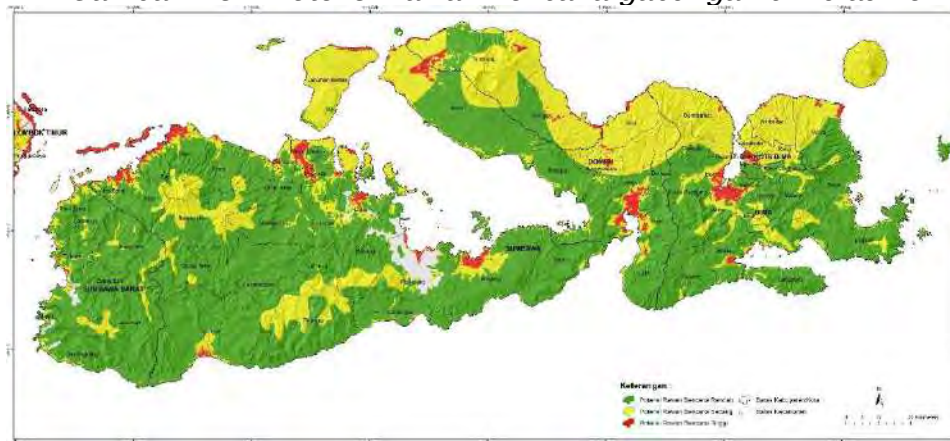
Suatu daerah dapat berpotensi untuk terjadi lebih dari 1 jenis bencana oleh karena itu, perlu dilakukan analisis seberapa besar suatu daerah untuk terdampak lebih dari 1 jenis bencana. Dari keenam jenis bencana yang sudah dianalisis selanjutnya dilakukan pembobotan berdasarkan tingkat risikonya. Hasil dari pembobotan itu selanjutnya dikalkulasi untuk mendapatkan potensi kerawanan bencana secara umum.

Dari hasil analisis dijumpai bahwa daerah pesisir dan daerah pegunungan merupakan daerah-daerah yang memiliki kerentanan yang lebih tinggi dari daerah lainnya (Gambar 21 dan 22). Untuk Pulau Lombok, dijumpai daerah seperti pesisir Tanjung, Pemenang, Sambelia, Pringgabaya, Keruak, Jerowaru, Pujut, Lembar, Gerung, Labuapi dan Mataram sebagai daerah yang berpotensi dibagian pesisir. Sedangkan untuk bagian gunung yaitu Narmada, Batukliang Utara, Suela, Sembalun, Bayan, Kayangan dan Gangga lah yang memiliki potensi bencana tinggi.

Untuk pesisir Sumbawa yang memiliki potensi tinggi yaitu Taliwang, Poto Tano, Alas Barat, Alas, Buer, Utan, Sumbawa Besar, Moyo Utara, Empang, Pekat, Woja, Bolo dan Palibelo sedangkan untuk perbukitan di pulau Sumbawa memiliki potensi yang sedang sampai rendah.



Gambar 2.52. Potensi Rawan Bencana gabungan di Pulau Lombok



Gambar 1.53. Potensi Rawan Bencana gabungan Pulau Sumbawa

II.5. PERKOTAAN

II.5.1 Kependudukan

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahun merupakan faktor utama yang menyebabkan meningkatnya berbagai macam kebutuhan (pangan, papan, air bersih, energi/listrik, fasilitas sanitasi, transportasi, dan sebagainya). Jika laju pertumbuhan penduduk tersebut tidak diimbangi dengan laju peningkatan kuantitas sarana dan prasarana kebutuhan bagi penduduk, maka akan terjadi pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi daya dukungan dan daya tampung lingkungan, sehingga lingkungan menjadi rusak. Sebagai contoh, masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan mengalami kekurangan pasokan energi/listrik untuk kegiatan sehari-hari (misalnya untuk penerangan dan memasak), maka penduduk akan mulai memanfaatkan kayu sebagai alternatifnya. Akibatnya, kejadian penebangan pohon di hutan meningkat sehingga hutan menjadi rusak.

Jumlah penduduk yang besar memberi konsekuensi terhadap kebutuhan barang dan jasa yang makin tinggi secara kuantitas sehingga merupakan pangsa pasar yang potensial terutama menyangkut kebutuhan sehari-hari. Disisi lain, jumlah penduduk yang besar akan mampu menyediakan tenaga kerja dalam kegiatan industri dan meningkatkan output daerah karena adanya nilai tambah (*value added*) serta mendorong sektor primer berkembang cepat untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan sektor tersier (sektor jasa) dalam memenuhi kebutuhan aktivitas pendukung lainnya

II.5.1.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi NTB pada tahun 2018 yaitu sebesar 5.270.247 jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Lombok Timur sebesar 1.298.756 jiwa sedangkan jumlah penduduk terkecil yaitu Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 139.448 jiwa.

Apabila dilihat dari perkembangan jumlah penduduk Provinsi NTB pada kurun waktu 2014-2018, jumlah penduduk meningkat pesat yakni dari 4.773.795 jiwa pada tahun 2014 meningkat menjadi 5.270.247 pada tahun 2018.

Tabel 2.22. Jumlah Penduduk Provinsi NTB Tahun 2014-2018

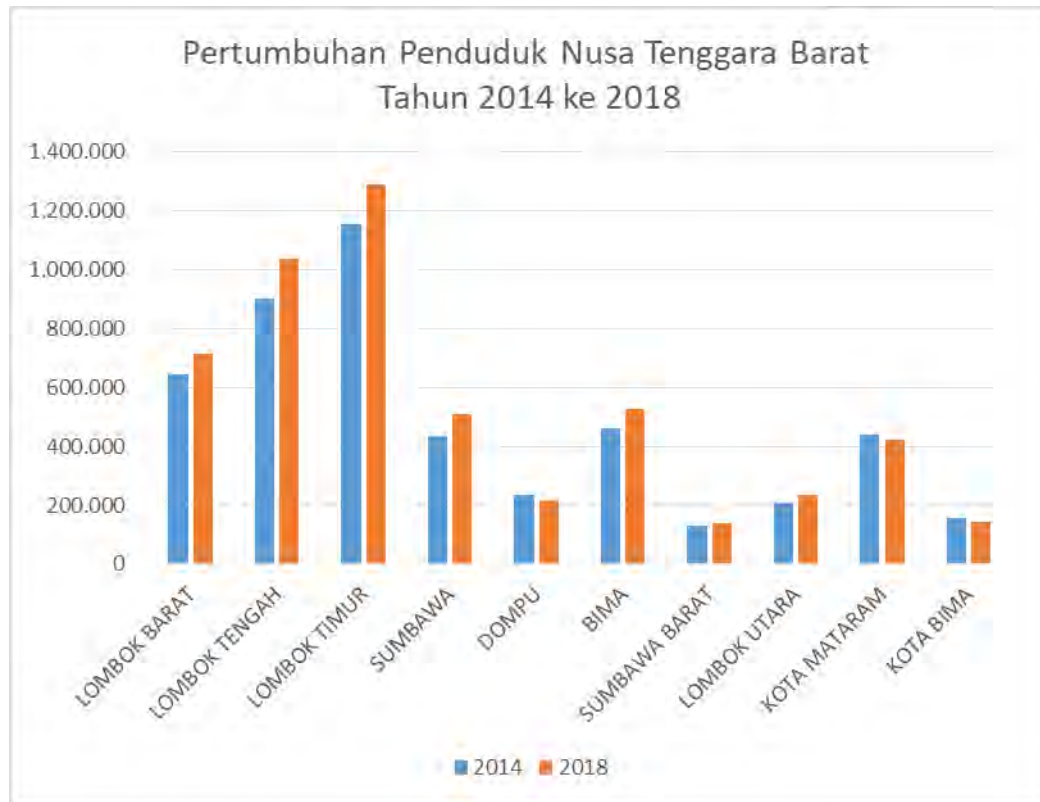
No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Lombok Barat	644.586	654.892	711.712	716.208	716.208
2	Lombok Tengah	903.432	912.879	1.032.258	1.037.293	1.037.293
3	Lombok Timur	1.153.773	1.164.018	1.286.048	1.291.514	1.291.514
4	Sumbawa	436.599	441.102	507.715	511.429	511.429
5	Dompu	234.665	238.386	214.152	216.352	216.352
6	Bima	463.419	468.682	523.111	525.858	525.858
7	Sumbawa Barat	129.724	133.391	134.343	136.612	136.612
8	Lombok Utara	210.133	212.265	232.747	235.409	235.409
9	Kota Mataram	441.064	450.226	417.354	421.675	421.675
10	Kota Bima	156.400	159.736	139.366	143.804	143.804
TOTAL		4.773.795	4.835.577	5.198.806	5.236.154	5.270.247

Sumber data : NTB dalam angka 2014, 2015

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2016, 2017 dan 2018

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan jumlah individu dalam populasi. Sebagaimana jumlah penduduk Provinsi NTB yang makin meningkat setiap

tahun, maka pertumbuhan penduduk pun mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut.



Gambar 2.54. Grafik pertumbuhan Penduduk NTB tahun 2014-2018

II.5.1.2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dan luas daerah yang didiami. Kepadatan penduduk sangat erat kaitannya dengan kemampuan wilayah dalam mendukung kehidupan penduduknya. Pada tabel 2.20. berikut ditampilkan data kepadatan penduduk Provinsi NTB 2018.

Tabel 2.23. Kepadatan penduduk Provinsi NTB tahun 2018

No	Kabupaten / Kota	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Lombok Barat	680
2	Lombok Tengah	858
3	Lombok Timur	804
4	Sumbawa	77
5	Dompu	93
6	Bima	120
7	Sumbawa Barat	74
8	Lombok Utara	291
9	Kota Mataram	6.879
10	Kota Bima	693
PROVINSI NTB		260

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2018

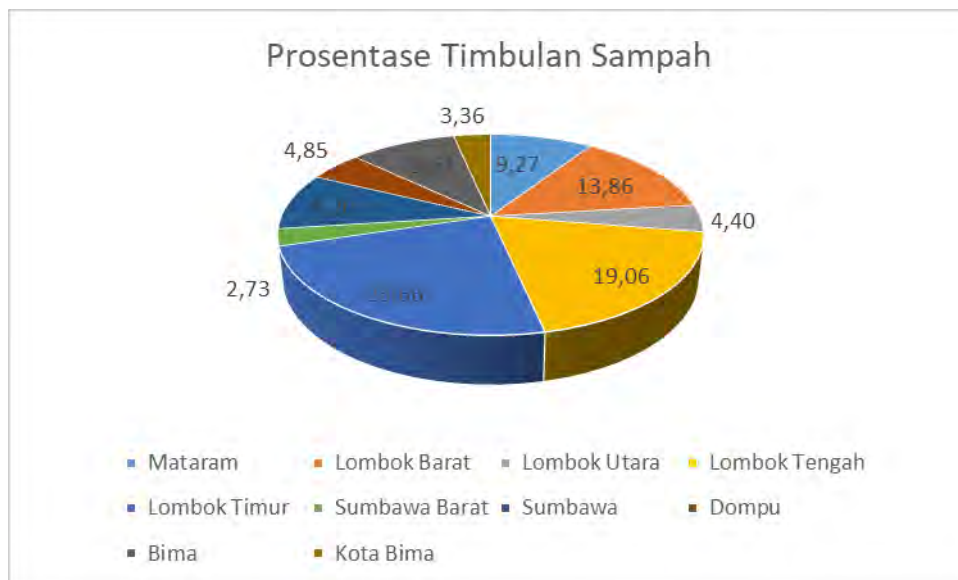
Bila ditinjau menurut Kabupaten/Kota, tingkat kepadatan tertinggi di Provinsi NTB tahun 2018 terdapat di Kota Mataram yaitu sebesar 6.879 Jiwa/km² sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah terapat di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu sebesar 74 Jiwa/km².

II.5.2. Timbulan Sampah

Pertumbuhan penduduk juga menjadi faktor utama peningkatan volume timbunan sampah. Semakin banyak penduduk maka sampah yang dihasilkan juga akan semakin bertambah. Sebagian besar sampah berupa limbah rumah tangga, baik limbah padat maupun cair. Gaya hidup konsumtif yang menjadi ciri masyarakat perkotaan menjadi faktor pendukung peningkatan volume sampah, bahkan sekarang sudah mulai terjadi di daerah pedesaan.

Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu. Dari tabel 42 – Lampiran dan gambar 3.61 dapat

diketahui total timbulan sampah rumah tangga yang dihasilkan per hari dari penduduk di Provinsi NTB tahun 2018 adalah 3.388,76 Ton/hari. Jumlah timbulan sampah terbesar yaitu di Kabupaten Lombok Timur sebesar 801,74 Ton/hari sedangkan yang terkecil yaitu Kabupaten Sumbawa Barat yaitu sebesar 92,39 Ton/hari.



Gambar2.55. Persentase perkiraan jumlah timbulan sampah Rumah Tangga di Provinsi NTB tahun 2018

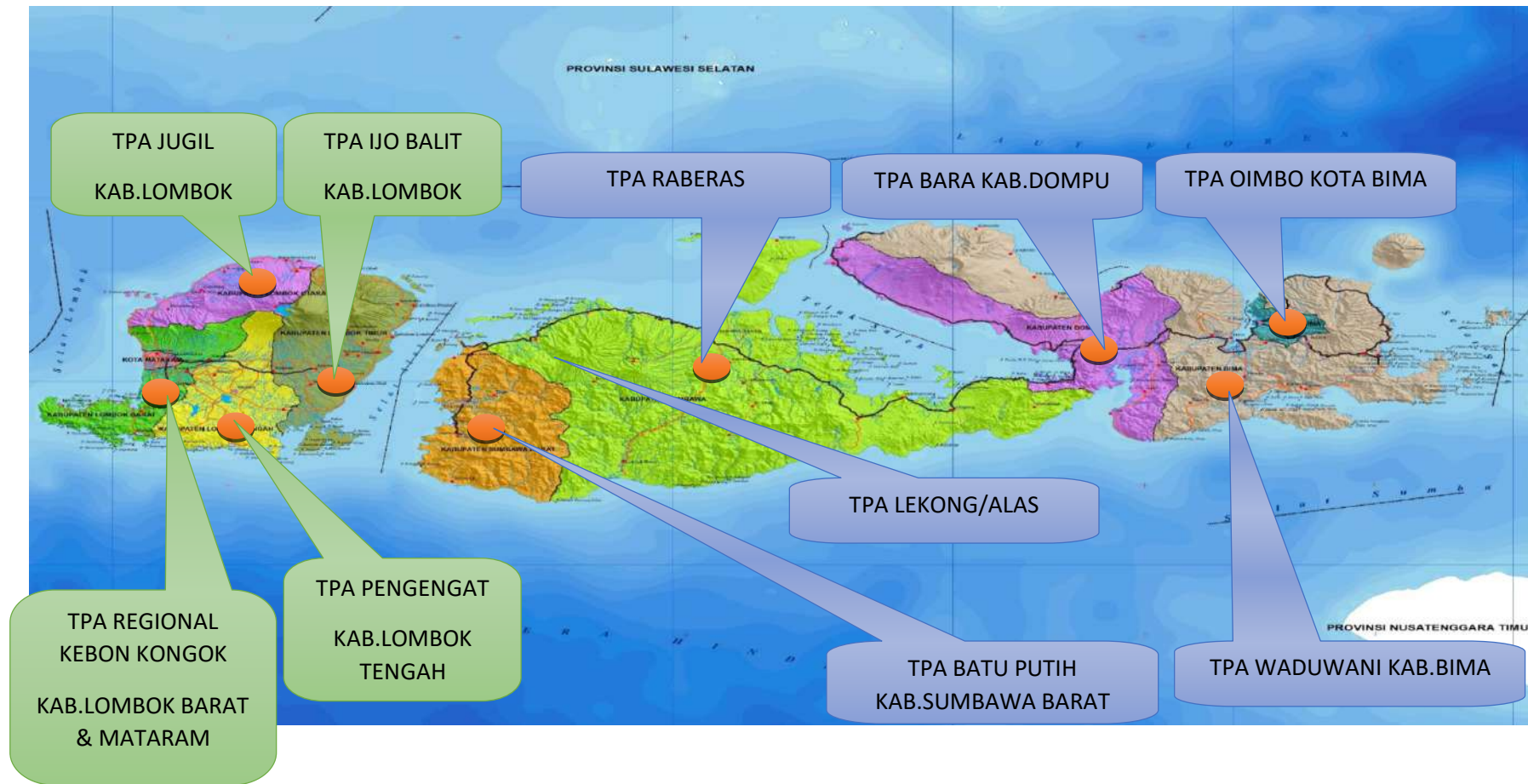
Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP), ditetapkan salah satu sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan pengelolaan sampah adalah peningkatan kualitas pengelolaan TPA menjadi sanitary landfill untuk kotametropolitan dan kota besar, serta controlled landfill untuk kota sedang dan kota kecil, serta tidak dioperasikannya TPA secara open dumping. Salah satu strategi yang ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut yaitu

dengan meningkatkan Pengelolaan TPA Regional. Hal ini didasari kenyataan bahwa kota-kota besar pada umumnya mengalami masalah dengan lokasi TPA yang semakin terbatas dan sulit diperoleh. Melalui kerjasama pengelolaan TPA antara kota/kabupaten akan sangat membantu penyelesaian masalah dengan mempertimbangkan solusi yang saling menguntungkan. Kerjasama antar daerah dalam TPA Regional tentu tidak berhenti sampai pada tahap pembangunan semata, tetapi juga sampai pada tahap pengelolaan (operasidan pemeliharaan). Berdasarkan amanat UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah untuk urusan pemerintah yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Oleh karenanya dibutuhkan kelembagaan yang tidak hanya mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan seluruh pihak yang berkerjasama namun juga harus dibangun berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam peraturanperundangan yang terkait.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, mulai mengelola TPA Kebon Kongok sepenuhnya sejak 1 Oktober 2018 dengan areal peyananan sampah dari kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. TPA Regional Kebon kongok memiliki luas 8,41 Ha dan menampung 333 ton sampah per hari dengan jumlah kendaraan masuk sebanyak 135 ritasi/hari.



Gambar 2.56. TPA Regiona Kebon Kongok



Gambar 2.53. Peta Sebaran TPA di Provinsi NTB

Keberadaan DLHK Provinsi NTB untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan menjadikan pengelolaannya harus dilakukan bersama-sama secara efektif, efisien oleh seluruh pihak yang terkait.

II.6. Tata Kelola

II.6.1. Kearifan lokal

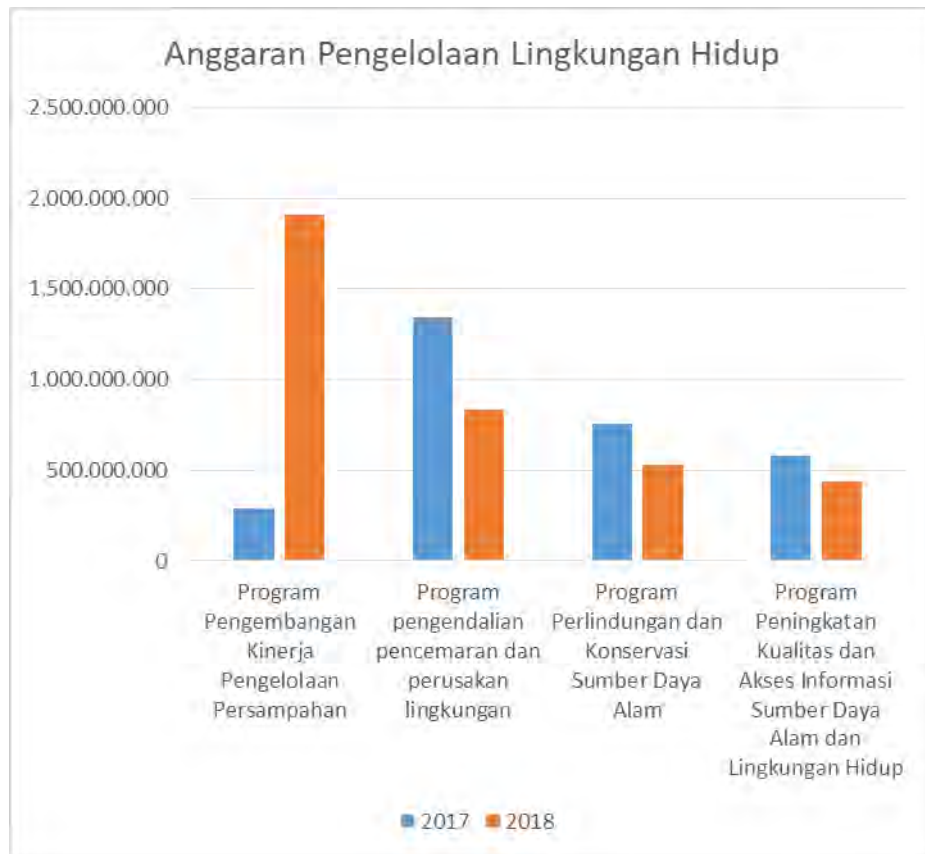
Kearifan lokal merupakan bagian dari suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal (local wisdom) biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal ada di dalam cerita rakyat, peribahasa, lagu, dan permainan rakyat. Kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat (Wikipedia, 2018)

Pada Tahun 2018, ada 5 (lima) kampung iklim yang berhasil mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu:

Tabel 2.24. Penghargaan Kampung Iklim di Provinsi NTB

Kelurahan Jempong Baru <u>Kota Mataram</u>	Kategori Pratama
Desa Rabakodo <u>Kabupaten Bima</u>	Kategori Pratama
Desa Dalam <u>Kabupaten Sumbawa Barat</u>	Kategori Pratama
Desa Beru <u>Kabupaten Sumbawa Barat</u>	Kategori Pratama
Desa Jurumapin <u>Kabupaten Sumbawa</u>	Kategori Madya

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2018



Gambar 2.58. Grafik perbandingan anggaran pengelolaan lingkungan hidup Provinsi NTB

Kearifan lokal dan anggaran pengelolaan lingkungan hidup yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan faktor pendorong (*driving force*) pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

II.6.2. Pengaduan Lingkungan Hidup

Berbagai kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan selalu muncul setiap saat. Hal ini sebagai dampak dari kegiatan/ aktifitas manusia termasuk di dalamnya kegiatan industri maupun jasa pariwisata serta kegiatan lainnya merupakan sumber pencemar yang perlu melaksanakan pengendalian sejak awal karena tanpa ada langkah- langkah pencegahan akan menimbulkan masalah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Di sisi lain sekarang masyarakat sangat sensitif

terhadap berbagai permasalahan hukum dan kecenderungan berbuat menurut caranya sendiri dengan mengerahkan masa mendatang kegiatan usaha yang mereka anggap sebagai penyebab pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Bertolak dari itu dirasakan betapa pentingnya peran pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator serta mediator untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan berbagai kasus permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Gubernur Nusa Tenggara Barat telah membentuk Pos P3SLHD sesuai SK nomor 223 Tahun 2010 sebagai sarana untuk menampung dan menerima aspirasi dan keluhan masyarakat tentang terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan baik yang dilakukan oleh badan usaha, kelompok masyarakat ataupun perorangan. Pos P3SLHD berfungsi melakukan penanganan pengaduan terhadap sengketa lingkungan berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh usaha/kegiatan yang kegiatannya beresiko tinggi terhadap lingkungan hidup, atau menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu Pos P3SLHD juga berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

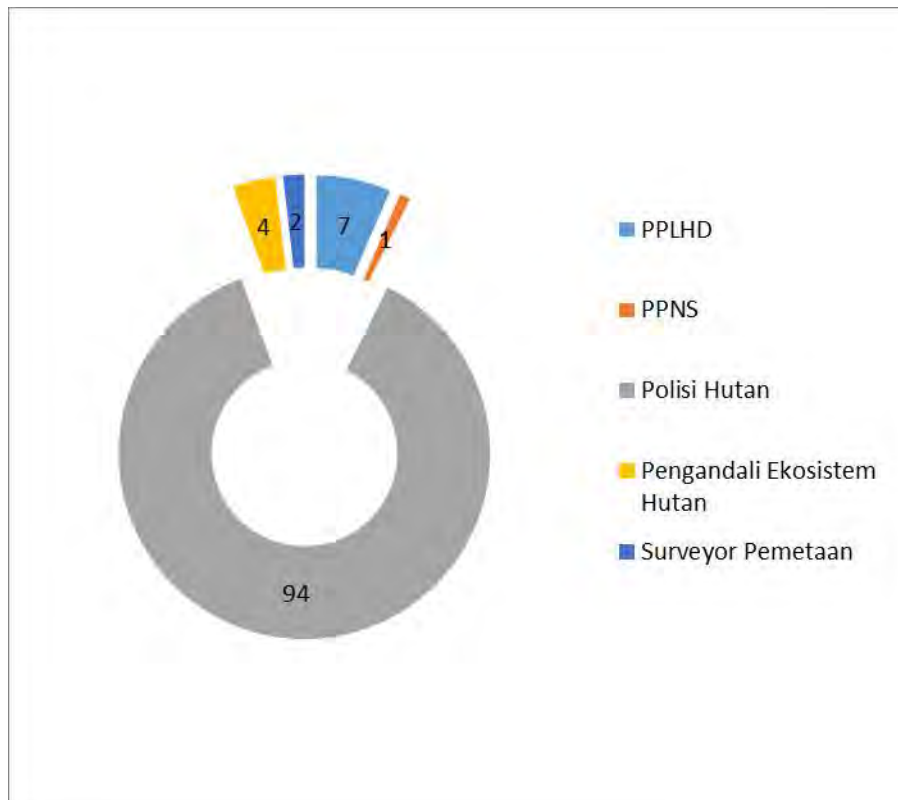
Provinsi NTB sebagai wilayah kepulauan yang mempunyai kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis tertentu sangat memungkinkan terjadinya kerusakan, dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh bencana alam maupun manusia sehingga berpotensi menimbulkan kerugian materi yang besar dan korban jiwa. Pada tahun 2018 permasalahan yang muncul dan yang telah ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB bersama instansi terkait adalah 2 (dua) kasus

pengaduan masyarakat rata-rata kasus lingkungan yang dilaporkan tentang:

1. Adanya genangan air dan bau tidak sedap yang diduga berasal dari air limbah dan sampah Hotel Aruna Senggigi yang bisa bersumber dari STP, saluran drainase dan areal sekitar Hotel
2. Dugaan pencemaran dari limbah yang dihasilkan oleh toko mirasa seperti bau yang tidak sedap.

II.6.3. Personil lembaga pengelolaan lingkungan hidup

Pada tahun 2018 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan DLHK berjumlah 637 orang. Jabatan fungsional dilingkungan DLHK yaitu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dimana jumlah staf yang sudah mengikuti diklat berjumlah 7 orang, PPNS Lingkungan Hidup sebanyak 1 orang, Polisi Hutan sebanyak 94 orang, Pengendali Ekosistem Hutan sebanyak 4 orang, dan Surveyor pemetaan sebanyak 2 orang.



Gambar 2.59 Diagram jumlah personil lembaga pengelolaan Lingkungan hidup

II.6.4. Peran serta masyarakat

II.6.4.1. Program Kampung Iklim

Dalam menghadapi perubahan iklim, seluruh pihak termasuk masyarakat perlu melakukan tindakan mitigasi untuk mengurangi pengaruh terhadap dampak yang ditimbulkan. Dengan dilakukannya upaya mitigasi terhadap perubahan iklim, diharapkan kondisi lingkungan semakin baik sehingga terutama pengaruh iklim terhadap kehidupan masyarakat. Selain mengurangi emisi GRK, upaya mitigasi yang dilakukan dapat menekan biaya adaptasi, karena semakin besarnya konsentrasi GRK yang memicu perubahan iklim, akan memicu dampak perubahan iklim yang lebih besar, sehingga akan berdampak pada biaya pelaksanaan upaya adaptasi.

Dengan dilakukannya upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, ketahanan masyarakat diharapkan akan meningkat sehingga risiko yang mungkin terjadi dapat diminimalkan, antara lain dengan cara menyiapkan infrastruktur yang tahan terhadap bencana iklim, memperkuat kemampuan ekonomi, kapasitas sosial, tingkat pendidikan, serta menerapkan teknologi adaptasi perubahan iklim yang sesuai dengan kondisi lokal. Selain melakukan upaya adaptasi, masyarakat perlu terus didorong untuk melakukan tindakan mitigasi yang akan memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi GRK secara global serta perbaikan tutupan vgetasi.

Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat terintegrasi dengan kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan masyarakat di tingkat lokal dengan memperhatikan faktor risiko iklim dan dampak perubahan iklim yang mungkin terjadi.

Konsentrasi gas karbon dioksida akan terus meningkat kecuali jika emisi/pancaran dari bahan bakar fosil dibatasi atau digunakan secara bijak bersama-sama. Sedangkan emisi karbon dioksida umumnya berasal dari minyak bumi, terutama dari gas alam, minyak bumi dan batubara, dari tahun ke tahun sebagai penyumbang terbanyak emisi gas CO₂ di muka bumi ini adalah dari peternakan dan pertanian.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) memperkirakan konsentrasi gas karbon dioksida didalam atmosfer akan naik menjadi sekitar 540 - 940 ppm pada tahun 2100. Kenaikan rata-rata konsentrasi gas CO₂ akan mengakibatkan kenaikan suhu rata-rata di bumi, hal tersebut mengakibatkan efek

pemanasan global, yang akan mempengaruhi perubahan iklim setempat di bumi, pada akhirnya tentu akan mempengaruhi kehidupan di bumi.

Maksud diselenggarakannya kegiatan Fasilitasi Program Kampung Iklim (Proklim) adalah untuk memberikan pembekalan dan penyamaan persepsi tentang program kampung iklim (proklim) agar dijadikan pedoman oleh berbagai instansi dan penyuluh lapangan dalam melaksanakan upaya-upaya terkoordinasi dan terintegrasi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Penanganan terhadap dampak perubahan iklim tidak dapat dilakukan oleh segelintir sektor saja. Oleh karena itu koordinasi antar instansi mutlak diperlukan demi menjamin keberhasilan masyarakat NTB dalam melakukan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.



ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Isu prioritas adalah isu utama yang menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. Isu prioritas merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan. Sebuah isu akan menjadi prioritas yakni apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang dalam jangka panjang. Penetapan isu prioritas atau isu strategis lingkungan hidup difokuskan pada permasalahan terkait lingkungan hidup yang telah, sedang dan/atau akan terjadi di daerah, dan prosesnya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah.

Penentuan isu prioritas lingkungan hidup dalam penyusunan DIKPLHD dilakukan melalui pengumpulan informasi yang dilakukan oleh kelompok pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan pendapat pakar (*expert opinion*) melalui forum *Focus Group Discussion* (FGD).

III.1. Review Literatur

Tahap awal yang dilakukan dalam upaya penjaringan isu dilaksanakan dengan melakukan desk study dilanjutkan dengan melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD).

Langkah review literatur meliputi kajian terhadap pustaka dan konsep-konsep pengelolaan lingkungan yang telah ada. Diantara literatur yang diacu adalah:

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB yang didalamnya membahas Visi dan Misi Nusa Tenggara Barat;
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB;
3. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB;
4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Kajian Rawan Bencana Nusa Tenggara Barat;
6. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)
7. Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

III.2. Penetapan Kriteria

Langkah penetapan kriteria dilakukan untuk memberikan landasan dalam langkah berikutnya, yakni penetapan isu lingkungan potensial. Mengingat banyaknya isu lingkungan yang teridentifikasi, penetapan kriteria akan menjadi penting untuk membuat isu lingkungan yang lebih terfokus.

Kriteria yang akan digunakan adalah sesuai dengan pedoman Nirwacita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup

Nomor 32 Tahun 2009, sehingga didapatkan kriteria sebagai berikut:

1. Kerusakan sumber daya alam, yakni seberapa besar kerusakan alam yang ditimbulkan dengan adanya isu lingkungan tersebut;
2. Dampak signifikan, kriteria ini membantu penetapan isu lingkungan potensial dengan menganalisis isu lingkungan yang memberikan dampak signifikan (penting) terhadap berbagai aspek lain, misalnya aspek sosial dan ekonomi;
3. Perhatian publik, isu lingkungan yang menjadi perhatian publik dan mendapat sorotan tajam dari berbagai diskusi ilmiah, forum masyarakat, serta media massa menjadi salah satu parameter untuk ditetapkan sebagai isu lingkungan potensial;
4. Kinerja jasa ekosistem, yang dapat dikategorikan dalam 4 (empat) jenis layanan, yaitu:
 - a. Layanan fungsional (provisioning services) : Jasa/Produk yang didapat dari ekosistem, seperti misalnya sumber daya genetika, makanan, air dan lainnya;
 - b. Layanan regulasi (regulating services) : manfaat yang didapatkan dari pengaturan ekosistem, seperti misalnya aturan tentang pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengendalian dampak perubahan iklim dan lainnya;
 - c. Layanan cultural (cultural services) manfaat yang tidak bersifat material/terukur dari ekosistem, seperti misalnya pengkayaan spirit, tradisi, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan;
5. Pemanfaatan sumber daya alam, yang berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 12 dijelaskan bahwa Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH (rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup). Namun

Dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:

- a) Keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan hidup;
 - b) Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c) Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
6. Ancaman keanekaragaman hayati, kondisi lingkungan yang diukur dengan indeks keanekaragaman hayati, apakah cenderung tetap, menurun atau meningkat. Ukuran lain bias dipakai, seperti kepunahan, kemerosotan dan kerusakan;
7. Dampak dan resiko lingkungan, yaitu dampak suatu kegiatan terhadap perubahan lingkungan hidup yang mendasar; dapat diukur dari beberapa media lingkungan antara lain: tanah, air, udara atau seperti yang tertuang dalam penjelasan PP 46 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 2 point a yang dimaksud dengan Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:
- a) Perubahan iklim;
 - b) Kerusakan, kemerosotan, dan/ atau kepunahan keanekaragaman hayati;
 - c) Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/ atau kebakaran hutan dan lahan;
 - d) Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
 - e) Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/ atau lahan;
 - f) Peningkatan jumlah penduduk miskin atau
 - g) Terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/ atau
 - h) Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

8. Perubahan iklim, seperti telah dijelaskan pada UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 bahwa Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

III.3. Penetapan Isu Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* yang telah dilaksanakan bersama stakeholder di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 20 Maret 2019, diperoleh isu prioritas lingkungan hidup sebagai berikut:

- a. Alih Fungsi Lahan
- b. Perubahan Kualitas dan kuantitas Air
- c. Peningkatan Timbulan Sampah dan minimnya penanganan sampah

Selanjutnya isu prioritas di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah ditetapkan akan menjadi landasan utama dalam pembahasan inovasi pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

III.3.1. Alih fungsi lahan

Selama periode 10 tahun terakhir, Provinsi Nusa Tenggara Barat menggalakkan program penanaman jagung. Hal ini berdampak pada peningkatan produksi jagung dan bertambahnya lahan produksi setiap tahun. Peningkatan produksi diiringi dengan perluasan lahan itu sebagian merambah kawasan hutan. Dari data Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, pada 2014, areal jagung 126.577 hektar. Dari luas tanam ini produksi jagung NTB mencapai 785.864 ton. Pada 2015, areal tanam naik jadi 143.117

hektar, dan produksi jadi 959.972 ton. Pada 2016, areal tanam meningkat jadi 206.997 hektar, dan produksi jagung naik jadi 1.101.244 ton. Pada 2017, jadi 310.990 hektar, produksi mencapai 2.127.324 ton. Pada 2018, capaian produksi 2.959.222 ton.



Gambar 3.1. Ladang Jagung di sepanjang jalur Sumbawa menuju Dompu..

Foto: Fathul Rakhman/ Mongabay Indonesia.

Sumber: <https://www.mongabay.co.id/2019/01/11/ladang-jagung-rambah-hutan-ntb-picu-bencana/>

Peningkatan produksi jagung memperluas kawasan hutan terambah. Luas lahan kritis di NTB di tahun 2018 sebesar 65.755 hektar. Dari luas ini, 48,125 hektar berada dalam kawasan hutan.



Gambar 3.2. Kawasan hutan lindung Sekaroh yang habis ditebang untuk keperluan ladang jagung.

Foto: Fathul Rakhman/ Mongabay Indonesia

Sumber: <https://www.mongabay.co.id/2019/01/11/ladang-jagung-rambah-hutan-ntb-picu-bencana/>

III.3.2. Perubahan Kualitas dan Kuantitas Air

Berdasarkan hasil perhitungan nilai Indeks kualitas air di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2018 berada pada angka 31, 34. Berdasarkan pengambilan dan pengujian sampel di 5 (lima) sungai yang ada di Pulau Lombok dan 5 (lima) sungai yang ada di Pulau Sumbawa selama 3 (tiga) periode pemantauan diketahui bahwa ada 2 sungai yang tercemar berat yaitu sungai Rabajalu dan Sungai Padolo. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualitas lingkungan dengan tidak membuang sampah di kawasan sungai. Sampai saat ini, permasalahan utama dalam pengelolaan sampah adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak menjadikan sampah sebagai tempat pembuangan sampah.



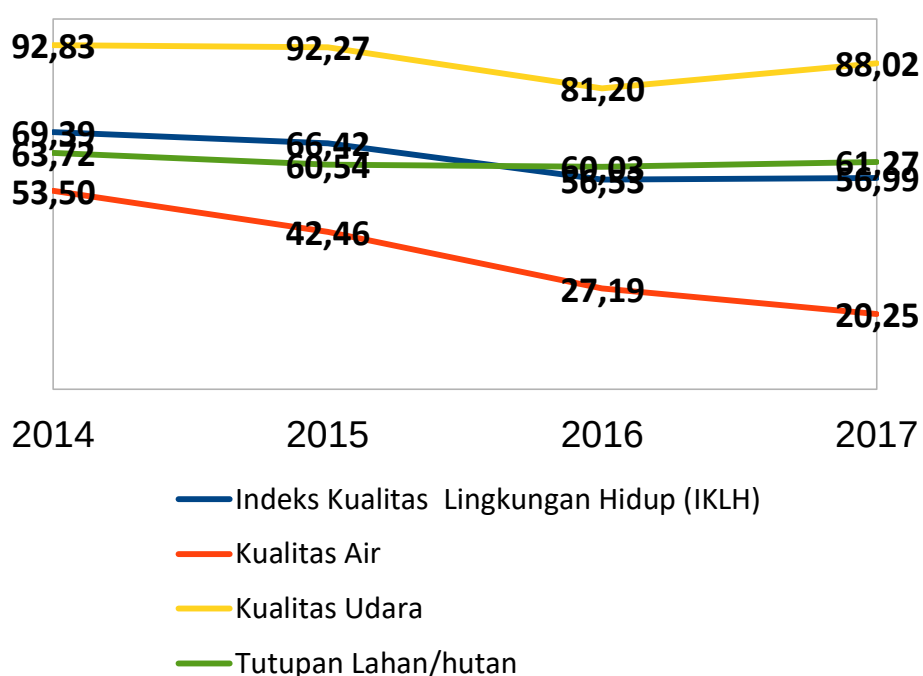
Gambar 3.3. Tumpukan Sampah di sungai Tente Kabupaten Bima

Sumber : www.mediantb.com/2017/09/tumpukan-sampah-di-kolom-jembatan-tente.html

Tabel. 3.1. INDEKS KUALITAS AIR PROVINSI NTB 2011 - 2017

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
47.25	54.00	54.13	53.50	42.46	33.13	30.54	31,34

Sumber : data analisa



Gambar 3.4. Trend Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi NTB

III.3.3. Peningkatan timbulan sampah dan minimnya penanganan sampah.

Pada Tahun 2018, jumlah timbulan sampah yang ada di Provinsi NTB sebesar 3.388,76 Ton/hari namun hanya sebesar 641,92 Ton/hari sampah yang masuk ke TPA dan 51,21 Ton/hari sampah yang didaur ulang.



INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas lingkungan diantaranya melalui program-program lingkungan, penguatan kelembagaan sumber daya manusia serta anggaran pengelolaan lingkungan.

Inovasi dalam pengelolaan lingkungan hidup akan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu program-program lingkungan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat.

IV.1. PROGRAM-PROGRAM LINGKUNGAN

IV.1.1 Reboisasi dan Penghijauan

Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul atau tandus. Tindakan reboisasi dilakukan dengan menanam hutan yang telah gundul akibat di tebang atau akibat bencana

alam. Tujuan dari reboisasi ini untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup melalui kualitas peningkatan sumber daya alam.

Reboisasi hanya dilakukan di hutan atau lahan yang kosong atau gundul, tentunya hutan yang dimaksud adalah hutan yang telah ditentukan oleh peraturan. Dengan demikian, membuat hutan yang baru pada area bekas tebang habis, bekas tebang pilih, lahan gundul ataupun pada lahan kosong lainnya yang terdapat di dalam kawasan hutan itu termasuk kedalam reboisasi.

Pada Tahun 2018 luas lahan reboisasi yang ditanami seluas 425 Hektar dengan jumlah pohon yang ditanam sejumlah 170.000 buah, sedangkan kegiatan penghijauan dilakukan sebagai upaya pemulihan, pemeliharaan dan peningkatan kondisi lahan agar lingkungan memiliki kondisi alam yang baik . Pada Tahun 2017, luas lahan penghijauan seluas 8.997,43 Hektar dengan jumlah pohon yang ditanam sejumlah 2.778.322 buah yang tersebar hampir di seluruh Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat kecuali Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Utara dan Kota Mataram;

Tabel 4.1. Luas Lahan Kegiatan Reboisasi dan Penghijauan Tahun 2018

NO	KABUPATEN/ KOTA	Reboisasi		Penghijauan	
		Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (Batang)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (Batang)
1	Kabupaten Lombok Barat	-	-	51,43	24.322
2	Kabupaten Lombok Tengah	-	-	-	-
3	Kabupaten Lombok Timur	250	100.000	1.381	96.500
4	Kabupaten Lombok Utara	-	-	-	-
5	Kabupaten Sumbawa	-	-	405	65.500
6	Kabupaten Sumbawa Barat	-	-	425	13.750

7	Kabupaten Dompu	50	20.000	550	120.000
8	Kabupaten Bima	125	50.000	6.060	2.408.250
9	Kota Mataram	-	-	-	-
10	Kota Bima	-	-	125	50.000
JUMLAH		425	170.000	8.997,43	2.778.322

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi NTB, 2018

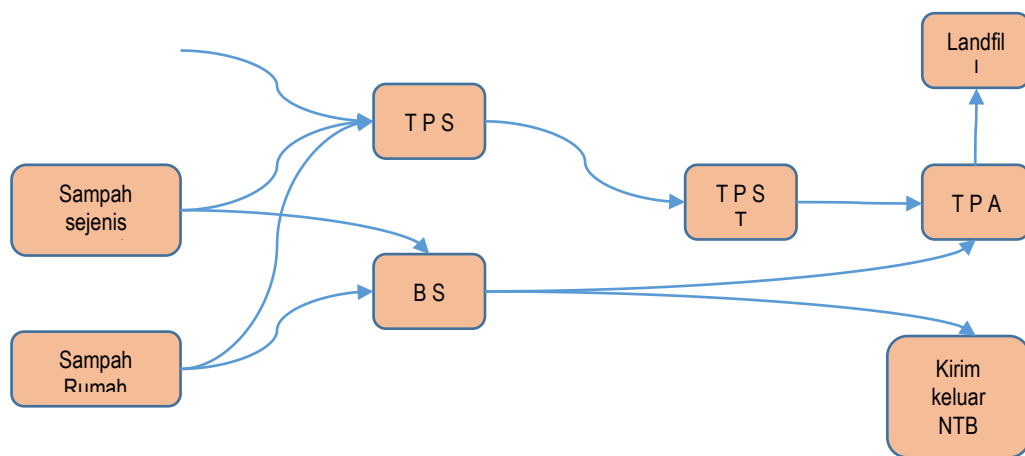


Gambar 4.1. Kegiatan penghijauan di kawasan Gunung Tunak Kabupaten Lombok Barat

IV.1.2. Zero Waste Program

Sampah merupakan salah satu isu utama kehidupan perkotaan di seluruh Indonesia, khususnya kota besar. Indonesia masuk dalam peringkat dua di dunia sebagai penghasil sampah plastik ke laut setelah Tiongkok (Indonesia Penyumbang Sampah Plastik Terbesar Ke-dua Dunia, 2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkirakan, pada tahun 2019 total jumlah sampah di Indonesia mencapai 68 juta ton dan sampah plastik diperkirakan mencapai 9,52 juta ton atau 14% dari total sampah yang ada.

NTB Zero Waste Province 2023 adalah Gerakan Menuju NTB Sebagai Provinsi Bebas Sampah Tahun 2023. Dilatarbelakangi oleh kepedulian Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terhadap permasalahan sampah di NTB. Pada Tahun 2018, hanya 20% sampah NTB yang dikelola (ditangani oleh pengangkutan sampah dan kegiatan daur ulang sampah) sedangkan sisanya dibuang secara illegal dan dibakar. Permasalahan ini dikhawatirkan akan membawa dampak yang lebih serius tidak hanya lingkungan dan kesehatan manusia, tapi juga terutama terhadap pariwisata.



Gambar 4.2. Alur Penanganan Sampah Saat Ini

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. NTB Zero Waste dilandasi oleh konsep pengelolaan sampah berbasis sebagai berikut:

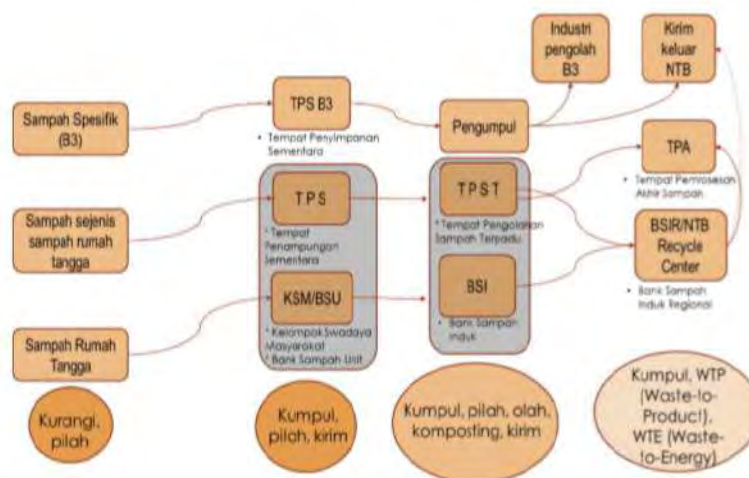
1. Pengurangan sampah yaitu dengan mengurangi jumlah sampah dari sumbernya;
2. Daur ulang sampah yaitu dengan mengubah sampah menjadi bentuk baru setelah melalui proses pengolahan;
3. Penggunaan kembali adalah menggunakan kembali sampah tanpa melalui pengolahan:

4. Ekonomi sirkuler adalah model bisnis/ekonomi yang memadukan konsep reduce, reuse, recycle dalam proses produksi/distribusi dan pola konsumsi masyarakat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.



Gambar 4.3. konsep Ekonomi Sirkuler

Tujuan jangka panjang dari program NTB Zero Waste adalah tercapainya model pengelolaan yang memperlakukan sampah sebagai sumber daya.



Gambar 4.4. Alur Pengelolaan Sampah NTB di masa depan

IV.1.2.1. Pencapaian tujuan Pengurangan dan Penanganan Sampah

Dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang NTB Zero Waste, target Tahun 2023 dalam NTB Zero Waste Province 2023 adalah tercapainya tujuan Pengurangan sampah 30% dan Penanganan sampah 70% melalui:

1. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Peduli Sampah/Lingkungan termasuk Bank Sampah (BS).

Dalam pengelolaan sampah, peran serta masyarakat secara penuh sangat penting untuk mulai mengelola sampah dari sumbernya. Pengelolaan sampah mulai dari hulu yaitu diantaranya pemilahan dan pengurangan sampah. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat, dilakukan pengembangan dan inisiasi BS dan KSM pengelola sampah. BS dan KSM mengelola sampah langsung dari sumber dengan cara mengambil sampah langsung dan melakukan pengelolaan awal (pemilahan). Untuk mendorong kegiatan pemilahan oleh masyarakat, dapat diberikan insentif kepada masyarakat yang melakukan pemilahan sampah. Selain sampah rumah tangga, BS dan KSM dapat juga berperan dalam pengelolaan sampah sejenis rumah tangga. Hingga BS dan KSM mampu menangani sampah sejenis rumah tangga, maka pemerintah melakukan kegiatan pengelolaan sampah sejenis rumah tangga ini.

Pada Tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB melakukan pembinaan dan bantuan terhadap 50 bank sampah se Pulau Lombok dengan tujuannya:

- a. Meningkatkan kegiatan pengelolaan sampah secara swadaya langsung dari sumber sampah melalui 3R;

- b. Mengurangi jumlah volume sampah yang masuk ke TPA;
- c. Meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kemiskinan;

2. Kerjasama pengelolaan sampah antar Pemerintah dan Pemerintah dengan nonPemerintah.

Adanya desentralisasi dan pembagian kewenangan antar tingkat pemerintah, kerjasama dalam kegiatan pengelolaan perlu adanya inisiasi berbagai pihak dalam pengelolaan sampah dan sinergisitas rencana, program dan tujuan. Kegiatan ini tidak akan berjalan apabila hanya dilakukan oleh Pemprov tanpa dukungan Pemkab dan Pemkot. Selain antar pemerintah, kerjasama juga perlu dilakukan dengan pihak swasta. Bentuk kerjasama dapat berupa peningkatan kapasitas operator pengelola sampah, pengelolaan bersama atau pendanaan terhadap infrastruktur pengolah sampah, riset dan pengembangan teknologi pengelolaan sampah, serta pengembangan sistem informasi dan tata kelola pengetahuan berbasis data;

3. Industrialisasi pengolahan dan daur ulang sampah NTB serta penerapan *Extended Producer Responsibility* (EPR).

Industri pengolahan dan daur ulang sampah sebagai hilir dalam pengelolaan sampah berperan sebagai pengolah sampah menjadi produk baru yang bermanfaat. Kehadiran industri ini di NTB, akan meningkatkan daya jual produk berbasis sampah di NTB karena berkurangnya cost akibat transportasi bahan baku ke luar NTB. Kegiatan pengolahan dan daur ulang sampah yang dapat dilakukan di NTB diantaranya daur ulang plastik, pembuatan pellet dari sampah, PLTSa, pengelolaan biogas (TPA dan biodigester).

Untuk meningkatkan kegiatan pengolahan dan daur ulang sampah, maka EPR perlu diterapkan secara penuh dan konsisten. Penerapan EPR akan mendorong perusahaan/produsen yang memasarkan produknya di NTB atau yang memproduksi produknya di NTB untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dimulai sejak produk dibuat di pabrik.

Sesuai amanat Perpres 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Indonesia menargetkan Pengurangan sampah 30% dan Penanganan sampah 70% di tahun 2025. Tanggung jawab penanganan sampah sebagian besar menjadi tanggung jawab pemerintah daerah mulai dari penangkutan hingga pemrosesan akhir di TPA. Dengan penerapan poin 1 s.d. 3 di atas, maka Pemprov dan Pemkab/Pemkot bisa fokus di kegiatan kampanye pemilahan sampah, penanganan TPS ilegal, peningkatan infrastruktur pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah. Khususnya di pemrosesan akhir, diharapkan tidak lebih dari 10% sampah residu yang masuk ke TPA.

Road Map dan Milestones (Peta Jalan dan Capaian-capaian)

Gambar 4.5. Road Map dan Milestones
(Peta Jalan dan Capaian-capaian)

IV.1.2.2. Indikator capaian dan langkah strategis

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi capaian NTB Zero Waste Province 2023, akan digunakan indikator berdasarkan elemen-elemen penilaian *Balanced Score Card* (BSC).

Balanced score card digunakan sebagai ukuran untuk mendapatkan keseimbangan dalam distribusi anggaran maupun program kegiatan. Dalam hal ini pembagian fokus kegiatan yaitu:

1. Perspektif masyarakat (25%) Penilaian terhadap perspektif masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan program di eksternal khususnya terhadap kepuasan masyarakat. Berkaitan dengan kegiatan Zero Waste, perspektif masyarakat diartikan sebagai tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat/cakupan pelayanan sampah. Jenis-jenis kegiatan yang dapat mendukung peningkatan perspektif masyarakat di antaranya:
 - a. Kegiatan edukasi dan kampanye pengelolaan sampah;
 - b. Pengembangan bank sampah dan KSM peduli sampah;
 - c. Penerapan EPR, dll.

2. Perspektif finansial (10%)

Perspektif finansial memberikan petunjuk mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, masuknya pendapatan daerah, dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Untuk meningkatkan perspektif finansial, kegiatan yang dapat dilakukan di antaranya:

- a. Pelatihan daur ulang;
- b. Pengembangan bank sampah
- c. Pengembangan industry daur ulang sampah;
- d. Pengembangan industry pengolahan sampah.

3. Perspektif proses internal (50%)

Perspektif proses internal memberikan petunjuk berkaitan dengan operasional sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta inovasi dalam pengelolaan sampah. Kegiatan terkait perspektif antara lain:

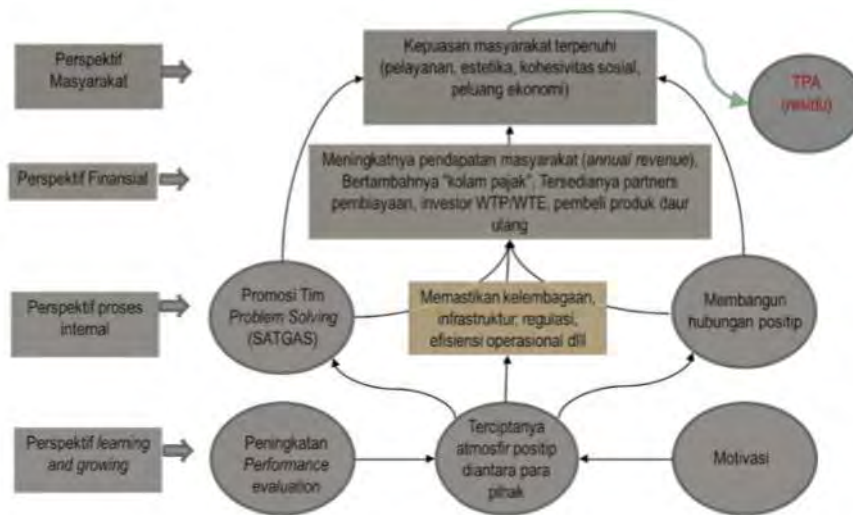
- a. Peningkatan efektivitas penanganan sampah;
- b. Insentif/remunerasi kepada pegawai;
- c. Operasional TPS, TPST dan TPA;
- d. Pengembangan PLTSa;
- e. Pengembangan Renewable energy berbasis sampah;
- f. Sistem informasi dan database terintegrasi, dll.

4. Perspektif learning & growing (15%)

Perspektif learning and growing memberikan petunjuk mengenai infrastruktur yang harus dibangun untuk pertumbuhan dan kinerja jangka panjang dari faktor SDM, sistem, dan prosedur. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk peningkatan proses learning & growing di antaranya: diklat untuk seluruh tenaga kerja, dan penyusunan SOP.

Perspektif Masyarakat (25%)	Harapan masyarakat terpenuhi (pelayanan, estetika, kohesivitas sosial, peluang ekonomi)						
Perspektif Finansial (10%)	Meningkatnya pendapatan masyarakat (annual revenue)			Bertambahnya "kolam pajak"		Tersedianya partners pembiayaan, investor WTP/WTE, pembeli produk daur ulang	
Perspektif Proses Internal (50%)	Comply dengan "amanat" nasional (capaian, kelembagaan, regulasi)	Infrastruktur memadai	Meningkatnya pelayanan operasional	Berkurangnya non-renewable resources dan greenhouse	Optimalnya siklus hidup sampah	Berkurangnya risiko kecelakaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat
Perspektif Learning & Growing (15%)	Meningkatnya motivasi & kehadiran		Meningkatnya keterampilan		Meningkatnya performance evaluation		Terciptanya atmosfer positif diantara para pihak

Gambar. 4.6. Elemen – elemen dalam penilaian Balanced Score card NTB Zero Waste



Gambar 4.7 Strategic Map NTB Zero Waste berdasarkan Balanced Scorecard

IV.1.3. Pengolahan Sampah Organik Teknologi Biokonversi menggunakan *Black Soldier Fly* (BSF)

Lalat Tentara Hitam atau *Black Soldier Fly* (BSF) yang memiliki nama latin *Hermetia illucens* adalah salah satu jenis lalat yang memiliki keunikan tidak makan pada tahap lalat dewasa (tidak memiliki mulut) sehingga tidak berpotensi menyebarkan penyakit, yang larvanya (maggot) memiliki kemampuan untuk mengolah bahan organik menjadi sumber

protein, penghasil pupuk organik atau pupuk hayati dan produk turunan lainnya yang bermanfaat untuk pertanian, peternakan dan perikanan. Dalam rangka mengurangi volume sampah khususnya sampah organik, penggunaan BSF untuk pengolahan sampah merupakan salah satu alternatif terbaik yang ramah lingkungan.



Gambar 4.8. Siklus Hidup *Black Soldier Fly* (BSF)

Bekerja sama dengan Yayasan Forest for Life Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat membangun pilot proyek pengolahan sampah teknologi biokonversi menggunakan BSF di Dusun Bebae, Lingsar, Lombok Barat. Kapasitas pengolahan sampah BSF direncanakan 2,4 ton/hari, dari 2 bioreaktor (masing-masing memiliki 24 ruang bioreaktor kecil). Kapasitas pengolahan dapat ditingkatkan hingga mencapai maksimal 4,8 ton/hari.

IV.1.3.1. Landasan Hukum

1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Yayasan Forest for Life Indonesia Nomor 420/271/DPMPTSP tanggal 19 Oktober 2017 tentang Kerjasama Pengelolaan Sampah Organik di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Memanfaatkan Teknologi Biokonversi;
2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dengan Yayasan Forest for Life Indonesia (FFLI) tanggal 2 April 2018 tentang Pengolahan Sampah Organik di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Memanfaatkan Teknologi Biokonversi.

IV.1.3.2. Uraian Kegiatan

Setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama, dibangun infrastruktur pendukung pengolahan sampah BSF di Dusun Bebae yang merupakan lahan milik Pemerintah Provinsi NTB memanfaatkan bangunan eks penggemukan sapi. Pembangunan infrastruktur sepenuhnya dibiayai oleh FFLI yang dimulai sejak tanggal 28 Mei 2018.

Infrastruktur yang dibangun antara lain:

1. Bioreaktor

Bioreaktor merupakan bangunan utama tempat pengolahan sampah, dimana sampah dan larva BSF dicampur.



Gambar 4.9. Gambar Bioreaktor

Bioreaktor yang dibangun merupakan modifikasi rumah pakan sapi yang sudah ada. Dibangun 2 bioreaktor yang masing-masing terdiri dari 24 reaktor kecil. Larva dewasa yang siap bermetamorfosa (pre pupa) akan dipindah ke Rearing house.

Ukuran masing-masing bioreaktor : 72m x 1,5m (24 buah 3m x 1,5m reaktor kecil)

2. Rearing house

Rearing house merupakan tempat pembiakan pupa menjadi lalat hingga bertelur. Desain bangunan menyerupai greenhouse, karena lalat memerlukan banyak cahaya. Dinding menggunakan jaring agar lalat tidak terbang ke alam bebas. Di dalam Rearing House lalat berkembang biak mulai dari lalat muda menjadi lalat dewasa, kawin dan bertelur. Sebagai tempat bertelur disiapkan balok kayu dan irisan kardus. Selanjutnya telur BSF dipindah ke

Hatchery untuk ditetaskan. Terdapat 2 unit Rearing house ukuran masing-masing 7m x 14m.



Gambar 4.10. Rearing house

3. Hatchery

Hatchery merupakan tempat penetasan telur menjadi larva. Digunakan rak-rak untuk menyimpan dan menetas telur BSF. Larva yang menetas diberi makan sampah organik lembut hingga berumur 10 hari kemudian dipindah ke bioreaktor untuk kegiatan pengolahan.



Gambar 4.11. Rak penetasan telur BSF

4. Pupuk cair maggot (PCM)

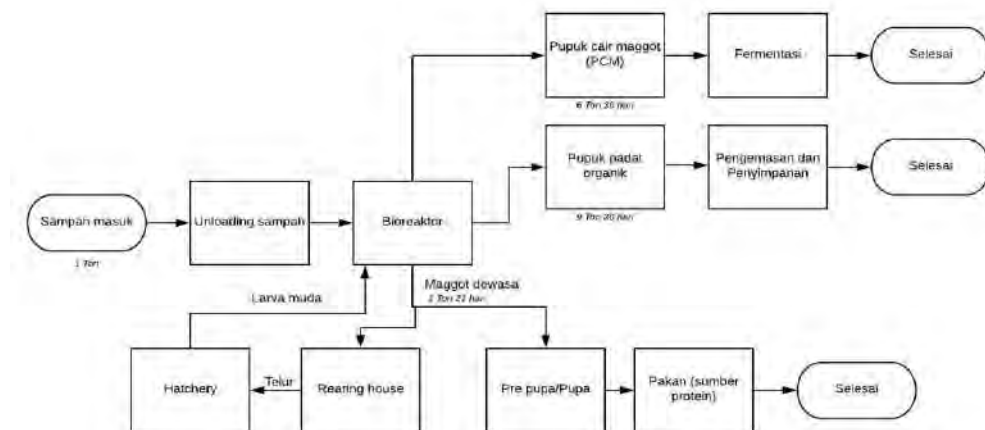
Pupuk cair dihasilkan dari pengolahan sampah di bioreaktor. Pupuk cair akan dialirkan menggunakan pipa menuju 2 buah bak PCM. Pupuk cair ini dapat digunakan dengan mencairkan pupuk cair dengan air dengan perbandingan 1 : 25.

5. Pupuk organik padat

Sampah hasil pengolahan dapat digunakan sebagai pupuk dengan sebelumnya dilakukan pengeringan, penggilingan, dan pengayakan.

IV.1.3.3. Desain Operasional

Operasional BSF memperkerjakan 7 orang tenaga kerja, dimana 6 orang tenaga kerja operasional, dan 1 orang petugas keamanan.



Gambar 4.12. 1Alur kegiatan di BSF adalah s dengan hitungan 1 ton sampah per hari

Keterangan proses operasional:

1. Sampah yang masuk dibongkar di unit unloading sampah. Disini sampah akan dipilah terlebih dahulu untuk mencegah sampah anorganik atau sampah keras lain (kayu, dll) masuk ke bioreaktor. Hanya sampah sisa makanan, sayur, buah-buahan yang boleh masuk ke bioreaktor.



Gambar 4.13. Unloading dan pemilahan sampah

2. Sampah yang sudah terpilah, dituang di bioreaktor dan dicampur dengan larva.



Proses Gambar 4.14. Pemasukan sampah ke Bioreaktor

3. Proses biologis pada bioreaktor akan menghasilkan pupuk organik padat dan pupuk organik cair yang siap untuk dipanen dalam waktu 30 hari.
4. Antara 18 - 21 hari, larva dewasa (pre pupa) akan bergerak naik keluar dari reaktor dan siap untuk dipanen. Sebagian pre pupa dibawa ke rearing house untuk dikembang biakkan, dan sebagian lainnya dipanen sebagai pakan.



Gambar 4.15. Larva BSF

5. Di rearing house, pre pupa berubah menjadi pupa kemudian bermetamorfosa menjadi lalat kemudian bertelur. Proses ini memakan waktu sekitar 24 hari.



6. Gambar 4.16. Lalat BSF

6. Telur BSF selanjutnya dipindahkan ke hatchery untuk ditetaskan. Telur BSF akan menetas dalam waktu sekitar 3-4 hari. Larva muda dibiarkan di hatchery hingga berumur 9 - 12 hari sebelum dipindah ke bioreaktor dengan diberi campuran buah busuk halus dan dedak sebagai makanannya.
7. Setelah larva siap (ukuran cukup besar), larva dipindahkan ke bioreaktor untuk mengolah sampah organik.
8. Output yang dihasilkan per 1 ton sampah/hari:
 - a. 6 ton pupuk cair (dalam 30 hari)
 - b. 9 ton pupuk padat (dalam 30 hari)
 - c. 1 ton pre pupa (dalam 21 hari).

IV.1.4. Sistem Informasi Manajemen Sampah Terintegrasi (SMASH)

Smash adalah sistem informasi manajemen sampah berbasis web & mobile yang saling terintegrasi dan bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional Bank Sampah di seluruh Indonesia. Smash

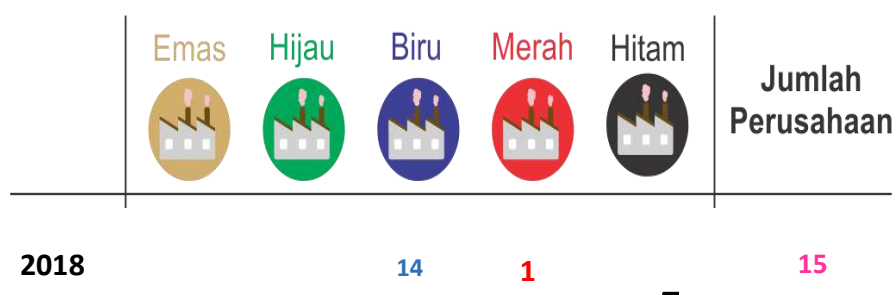
mengintegrasikan proses digitalisasi Bank Sampah dengan mengusung prinsip Praktis, Transparan, dan Aman. Target pengguna Smash adalah Bank Sampah di seluruh Indonesia, masyarakat yang terlibat pada inisiatif pemilahan sampah, dan juga pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mendukung penerapan Smart City dalam rangka tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Smash telah dirilis ke publik sejak Januari 2015 dan telah memiliki jumlah total pengguna 6.000 lebih di seluruh Indonesia (100-an Bank Sampah aktif dan 6.000-an nasabah).

Program SMASH akan segera menjadi salah satu bagian dari program zero waste dalam rangka mencapai zero waste Province di Tahun 2023.

IV.1.5. PROPER

Kegiatan Proper merupakan program penilaian pengelolaan lingkungan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan implementasi dokumen/izin lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah B3.

Sejauh ini, telah banyak manfaat yang didapatkan dengan pelaksanaan program ini, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas lingkungan, khususnya sungai.



Gambar 4.17. Peringkat Proper Tahun 2018

Pada tahun 2018, peserta program PROPER sebanyak 15 perusahaan dengan rincian: 8 (delapan) PLTD, 4 (empat) Pertamina, 1 (satu) Agro industry, 1 (satu) Perusahaan pertambangan dan 1 (satu) Air Minum Dalam Kemasan.

IV.1.6. Gempita Kreatif

Gempita Kreatif merupakan Gerakan Membangun Tata Kelola Hutan Secara Kolaboratif dan Inovatif yang di inisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB sebagai salah satu upaya pengelolaan dan pemanfaatan hutan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

Tabel 4.2. Inovasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018

No	Inovasi	Uraian Target dan Sasaran	Skema/Biaya
1	TAPAK	Tempat Pembuangan Akhir Sampah di kawasan hutan. upaya kerjasama Pemprov dengan Pemkot Mataram dan Pemkab Lombok Barat.	Koordinasi program
2	LIMBOP (Limbah Hutan Optimal)	Pemenuhan kebutuhan bahan baku unit mesin pelet, pengolah limbah hutan (semak belukar/ ranting), dan limbah kertas sebagai bahan campuran yang diperoleh dari berbagai instansi. Pelet tersebut sebagai pengganti cangkang sawit untuk memenuhi kebutuhan open tembakau di Pulau Lombok	Upah pangkas dan BBM truck di KPH Rinjani Barat
3	Paper Less Manajemen	Disposisi dan pemeriksaan surat melalui media elektronik untuk meminimalisir penggunaan kertas konsep, dan keterbatasan waktu/tempat karena keberadaan pejabat struktural sedang tugas luar	Pemograman
4	Pengamanan rutin berlapis	Upaya pengendalian perambahan / illegal logging □ Patroli hutan oleh KPH secara rutin 7 hari kerja	Optimalisasi kegiatan

	□ Pos penjagaan berlapis di 11 KPH (24 jam) secara terpadu dengan TNI & POLRI.	
5 APL- Daerah	Optimalisasi APL vegetasi hutan alam sekitar 11 KPH, yang belum ada peruntukan. Kawasan APL ini menjadi potensi illegal logging, yang perlu dilakukan pengamanan melalui penugasan Gubernur kepada Dinas LHK/KPH.	Optimalisasi kegiatan Inventarisasi
6 TAKIMHUT	Penataan pemukiman perambah hutan (uji coba 99 rumah), melalui sinergitas dengan program penataan rumah kumuh.Dinas Perumahan NTB.	Koordinasi dg Dinas Perumahan
	□ Mengembangkan kemitraan produktif dengan masyarakat pengelola hutan di 11 KPH	Optilisasi biaya pertemuan dan rapat rutin
7 KPH Berkoalisi	□ Menginventarisir potensi pendapatan daerah (HHBK, Jasling, TSL yang tidak dilindungi) □ Menerapkan PERDA 6 Tahun 2016 pada areal wisata di 11 KPH (Aiknyet, Sesaot, Aikberik, Benang Kelambu, Pusuk, Pusuk Sembalun dan	

Pegasingan dll).

- Transaksi kerjasama bagi hasil pengelolaan air dengan PDAM, dan PLTMH se NTB.

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

IV.2. Pengawasan Lingkungan

IV.2.1. Dokumen Izin Lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL)

Pembangunan merupakan suatu keniscayaan untuk menuju kemajuan bangsa. Namun, pada sisi lain, pembangunan dapat memberikan konsekuensi terhadap lingkungan seperti kerusakan dan pencemaran, apalagi dilakukan tanpa perencanaan yang baik. Pada dasarnya, pembangunan dan lingkungan hidup merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena sama-sama mendukung eksistensi manusia di bumi ini. Untuk itu, pembangunan dan lingkungan hidup harus berjalan secara serasi dan harmonis sehingga tujuan dan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh manusia. Tidak disadari bahwa akibat pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan harus diarahkan agar seminimal mungkin dapat berakibat rusaknya bentang alam lingkungan, baik lingkungan hayati dan non hayati. Untuk itu perlu dilakukan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup yang merupakan tujuan pengelolaan lingkungan hidup menjadi tumpuan keberlangsungan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu sejak awal perencanaan usaha dan/atau kegiatan sudah harus melakukan prakiraan dampak dengan melakukan kajian pada perubahan rona lingkungan hidup akibat pembentukan suatu kondisi lingkungan yang baru, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Menyadari hal tersebut, maka sebagai upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup terhadap

konsekuensi dari dilaksanakannya pembangunan perlu dilakukan suatu kajian/studi analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal), sebagaimana disebutkan di dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.

Amdal merupakan salah satu instrumen pengendali, yaitu sebagai perangkat preventif dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup, karena Amdal merupakan kajian mengenai dampak penting terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Amdal merupakan proses pengkajian terpadu yang mempertimbangkan aspek fisik kimia, sosio ekonomis, sosial budaya, kesehatan masyarakat dan transportasi sebagai pelengkap kelayakan teknis dan ekonomis suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, sehingga dengan dimasukkannya Amdal ke dalam proses perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan, maka akan diperoleh keputusan yang optimal. Dokumen Amdal yang sudah disusun oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan diajukan ke Komisi Penilai Amdal untuk dilakukan penilaian dan mendapatkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan Surat Keputusan Bupati tentang kelayakan lingkungan. Keputusan Kelayakan lingkungan ini merupakan salah satu syarat perizinan terhadap suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dibangun. Penilaian dokumen Amdal dilakukan oleh Komisi penilai Amdal yang sudah berlisensi. Untuk penilaian dokumen Amdal yang kegiatannya berada di wilayah Kabupaten/Kota, maka kewenangan penilaian ada di Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota yang berlisensi. Sedangkan apabila Kabupaten/Kota belum memiliki

Komisi Penilai Amdal yang berlisensi, maka penilaiannya dilimpahkan kepada Komisi Penilai Amdal Provinsi (sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota).

Upaya preventif yang dilakukan untuk mengendalikan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan ditempuh dengan diwajibkannya pemrakarsa untuk menyusun dokumen Amdal terlebih dahulu sebelum usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan. Sedangkan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting diwajibkan menyusun dokumen UKL-UPL dan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan wajib menyusun DELH. Berdasarkan PP Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap pemrakarsa wajib memiliki izin lingkungan sebagai syarat terbitnya izin usaha dimana masa berlaku izin lingkungan sama dengan izin usaha.

Dalam perkembangannya banyak sekali penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan beranggapan bahwa dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL atau DPLH) hanya merupakan syarat untuk mendapatkan ijin-ijin yang mendukung keberlangsungan kegiatan perusahaan bukan merupakan dokumen yang dijadikan pegangan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan selanjutnya. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan DPL) yang dimiliki.

Selama kurun waktu Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2018, jumlah dokumen lingkungan yang dibahas oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 111 Dokumen yang

terdiri dari Dokumen AMDAL, UKL-UPL maupun DPLH, seperti yang tertuang dalam tabel 4.4. sebagai berikut:

Tabel 4.4. Pengawasan AMDAL dan UKL-UPL Tahun 2018

JENIS DOKUMEN DI TAHUN 1996

NO	Jenis Dokumen	Nama Kegiatan	Pemrakarsa	Konsultan	Tgl. Kelayakan / Rekomendasi
1.	AMDAL	Pertambangan Tembaga Emas Batu Hijau, Kec Jereweh, Kab. Sumbawa	PT. Newmont Nusa Tenggara	Siegfried Lesiesel dibantu - Dames & Moore Inc. - IPB - UI - Newmont Gold Co. - PT. NNT - Marine Resource Consultants - Rescan Environmental Consultants - Duke University - Harland Bartholomew Consultants	2 Oktober 1996 Kep-41/MENLH/10/1996

JENIS DOKUMEN DI TAHUN 1997

NO	Jenis Dokumen	Nama Kegiatan	Pemrakarsa	Konsultan	Tgl. Kelayakan / Rekomendasi
1.	AMDAL	Pembangunan dan Pengusahaan Hotel Oberoi Lombok di Kec. Tanjung, Kab. Lobar	PT. Waka Oberoi Indonesia	Ir. Abdullah, MT. dkk	23 Juli 1998 No : 660/212/Bapedalda/98

JENIS DOKUMEN DI TAHUN 2000

NO	Jenis Dokumen	Nama Kegiatan	Pemrakarsa	Konsultan	Tgl. Kelayakan / Rekomendasi
1.	AMDAL	Pembangunan TPA Sampah Kota Praya, Kab. Loteng	Dinas Cipta Karya	PT. Metana Engineering Consultant	-

JENIS DOKUMEN DI TAHUN 2001

NO	Jenis Dokumen	Nama Kegiatan	Pemrakarsa	Konsultan	Tgl. Kelayakan / Rekomendasi
1.	UKL - UPL	Restoran PT. Lombok Karang Laut Lestari Kerandangan	PT. Lombok Karang Laut Lestari	-	-

JENIS DOKUMEN DI TAHUN 2003

NO	Jenis Dokumen	Nama Kegiatan	Pemrakarsa	Konsultan	Tgl. Kelayakan / Rekomendasi
1.	AMDAL	Pembangunan TPA Sampah Kota Praya, Kab. Loteng	Dinas Cipta Karya	PT. Metana Engineering Consultant	-

JENIS DOKUMEN DI TAHUN 2004

NO	Jenis Dokumen	Nama Kegiatan	Pemrakarsa	Konsultan	Tgl. Kelayakan / Rekomendasi
1.	AMDAL	Pembangunan Bandar Udara Khusus di Pesin Desa Sekongkang Bawah Kec. Sekongkang	CV. Tropical Air Strip	CV. Tropical Air Strip	Mataram, 18 Januari 2005 No : 814/37/II/BPDL/2005
2.	AMDAL	Usaha Pertambangan Pasir Besi di Kec. Wera dan Ambalawi Kab. Bima	PT. Jagad Mahesa Karya	Puslit Geoteknologi-LIPI Bandung	-
3.	UKL – UPL	Pembangunan Kantor Jasa Konsultasi Pengembangan Properti dan Konsultasi Bisnis dan Manajemen	PT. Bukit Batu Layar	-	Mataram, 25 September 2004 No : 814/492/II/BPDL/2004

JENIS DOKUMEN DI TAHUN 2005

NO	Jenis Dokumen	Nama Kegiatan	Pemrakarsa	Konsultan	SK. Kesepakatan, Kelayakan / Rekomendasi
1.	UKL - UPL	Pembangunan Jembatan Phase-1 (Japan Grant Aid) Ruas Jalan Sejong-Tetar-Lunyuk, Kab. Sumbawa Barat	Dinas Kimpraswil Prov. NTB	-	- Rekomendasi No : 660/121.A/II/BPDL/2006 Tgl. 9 Maret 2006
2.	AMDAL	Pembangunan Embung Tibu Kuning di Kab. Lobar	SNVT PPSA Dep. PU	PT. Alpindo Arga Cipta dan PT. Tataguna Patria Jaya	- SK Kelayakan No : 814/540/II/BPDL/2005 Tgl. 25 Nov. 2005
3.	AMDAL	Pembangunan Embung Pernek di Kab. Sumbawa	SNVT PPSA Dep. PU	PT. Ika Adya Perkasa	- SK Kesepakatan No : 814/148/II/BPDL/2005 Tgl, 19 April 2005 - SK Kelayakan No : 814/540/II/BPDL/2005 Tgl, 25 Nov. 2005
4	AMDAL	Pembangunan Lapangan Golf di Desa Sekokang Atas Kab. Sumbawa Barat	Koperasi Karyawan Katala	-	- SK Kelayakan No : 814/340/II/BPDL/2005 Tgl, 18 Agst 2005

JENIS DOKUMEN DI TAHUN 2006

NO	Jenis Dokumen	Nama Kegiatan	Pemrakarsa	Konsultan	SK. Kesepakatan, Kelayakan / Rekomendasi
1.	AMDAL	Pembangunan Embung Telaga Lebur Di Kab. Lombok Barat	Departemen Pekerjaan Umum SNVT-PPSA NTB	PT. Tata Guna Patria Konsultan	- SK Kesepakatan No : 814/666/II/BPDL/2006 Tgl, 29 Sept. 2006 - SK Kelayakan No : 814/102/II/BPDL/2007 Tgl. 26 Januari 2007
2.	AMDAL	Pembangunan bendungan Pandanduri Suangi Di Kabupaten Lombok Timur	Departemen Pekerjaan Umum SNVT-PPSA NTB	PT. Ika Adya Perkasa Konsultan	- SK Kesepakatan No : 814/722/II/BPDL/2006 Tgl. 6 Okt 2006 - SK Kelayakan No : 814/104/II/BPDL/2007 Tgl. 29 januari 2007
3.	AMDAL	Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Di Kabupaten Lombok Tengah	Dinas Perikanan dan Kelautan provinsi NTB	CV. Tripod Konsultan	- SK Kesepakatan No : 814/208/II/BPDL/2006 Tgl. 11 April 2006 - SK Kelayakan No : 814/134/II/BPDL/2007

4.	UKL - UPL	Pembangunan Minyak Pelumas bekas (B3) Di Kabupaten Lombok Barat	PT. Yudatama Suraswadana	-	- SK Rekomendasi No : 660/943.A/II/BPDAL/ 2006 Tgl. 26 Desember 2006
5.	UKL - UPL	Pembangunan Jalan dan Jembatan Sekokat – Mbawi Di Kabupaten Sumbawa	Dinas Kimpraswil Provinsi NTB	PT. Nursula JAYA Utama & CV. Kenzo Konsultan	- SK Rekomendasi No : 660/897/ II/ BPD/ 2006 Tgl. 11 desember 2006
6.	AMDAL	Pembangunan Pelabuhan Telong Elong Di Kabupaten Lombok Timur dan Pelabuhan Lalar Di Kab. Sumbaawa barat	Dinas Perhubungan Provinsi NTB	PT. Intersys Kelola Maju	- SK Kesepakatan No: 814/79/II/BPDL/2006 Tgl. 26 Des 2006 - SK Kelayakan No: 814/1303/II/BPDL/2007 Tgl. 19 Desember 2007
7.	UKL - UPL	Pembangunan Pelabuhan Teluk Cempi di Dusun Pinis Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dan Teluk Waworada di Dusun Pasir Putih Kecamatan Langudu Kabupaten Bima	Dinas Perhubungan Provinsi NTB	PT. GEO SARANA GUNA	-

8.	UKL - UPL	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro PLTM Santong Kab. Lobar	PT. PLN (Persero)	PT. Tata Guna Patria	- SK Rekomendasi No : 660/258/II/BPDL/2006 Tgl. 1 April 2006
----	-----------	---	-------------------	----------------------	--

JENIS DOKUMEN DI TAHUN 2007

NO	Jenis Dokumen	Nama Kegiatan	Pemrakarsa	Konsultan/Penyusun	SK. Kesepakatan, Kelayakan / Rekomendasi
1.	AMDAL	Pembangunan Jalan Lingkar Provinsi Ruas Jalan Lunyuk-Ropang – Sekokat-Mbawi sepanjang 183 km di Kab. Sumbawa Barat	Dinas Kimpraswil Provinsi NTB	PT. Nursula Jaya Utama & CV. Kenzo Konsultan	- SK Kesepakatan No: 814/423/II/BPDL/2007 Tgl. 16 Juli 2007 - SK Kelayakan No : 814/914/II/BPDL/2007 Tgl. 31 Okt 2007
2.	UKL-UPL	Pengawasan Obat dan Makanan	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram	Dra. Dewi Prawitasari, Apt, M.Kes. & Tim	- SK Rekomendasi No : 814/960/II/BPDL/2007 Tgl. 14 Nopember 2007
3.	UKL - UPL	RSUD Mataram	RSUD Mataram	PT. Pandu Persada	- SK Rekomendasi No: 660/1246/II/BPDL/2007 Tgl. 8 Desember 2007

JENIS DOKUMEN DI TAHUN 2008

NO	Jenis Dokumen	Nama Kegiatan	Pemrakarsa	Konsultan/Penyusun	SK. Kesepakatan, Kelayakan / Rekomendasi
1.	AMDAL	Pembangunan Pelabuhan Labangka	Dinas Perhubungan Provinsi NTB	PT. Geo Sarana Guna	- SK Kesepakatan 814/979.c/II/BPDL/2008 Tgl. 19 Agustus 2008 -
2.	AMDAL	Hutan Tanaman Industri Di Kabupaten Dompu dan Bima	PT. Usahatani Lestari	Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) UNRAM	- SK Kesepakatan 814/982/II/BPDL/2008 Tgl. 16 Agst 2008 - SK Kelayakan Lingkungan nomor 180 tahun2009 tgl. 25 Maret 2009
3.	UKL-UPL	Penyusunan Dokumen UKL-UPL Dermaga Medang-Moyo Kabupaten Sumbawa	Dinas Perhubungan Provinsi NTB	PT. Nursula Jaya Utama	- SK Rekomendasi No : 660/719/II/BPDL/2008 Tgl. 19 Juni 2008 (Moyo) - SK Rekomendasi No : 660/710.a/II/BPDL/2008 Tgl. 19 Juni 2008 (Medang)
4.	UKL-UPL	Pemasangan Jaringan SUTT 150 kV Ampenan-Praya-Endok	PT. PLN (Persero) Proyek Pembangkit & Jaringan Jawa Bali Nusa	PT. Citrawees Salawasna	- SK Rekomendasi No : 660/783/II/BPDL/2008 Tgl. 24 Juni 2008

			Tenggara		
5.	UKL-UPL	Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas	CV. Wahyu Nusantara Indah	-	- SK Rekomendasi No : 660/810.b/II/BPDL/2008 Tgl. 14 Juli 2008
6.	UKL-UPL	Proyek Peningkatan Jalan Pal IV-KM. 70 (KM 27+700 – KM 59+500) dan Proyek Peningkatan Jalan Sumbawa Besar-Bypass (9,20 KM) & Jalan Pal IV-KM. 70 (KM 4+700 – KM 6+500)	Departemen PU Dirjen Bina Marga Jakarta	-	- SK Rekomendasi No : 660/979.a/II/BPDL/2008 (ENB 01 A/B) 660/979.b/II/BPDL/2008 (ENB 01 C)
NO	Jenis Dokumen	Nama Kegiatan	Pemrakarsa	Konsultan/Penyusun	SK. Kesepakatan, Kelayakan / Rekomendasi
6.	AMDAL	Pembangunan Ruas Jalan Bangko-Bangko – Teluk Mekaki di Kec. Sekotong Tengah, Kab. Lombok Barat	Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Prov. NTB	CV. Karya Utama Jaya Jl. Lely No. 3 Mataram	- SK Kesepakatan 660/237/II/BLHP/2008 tgl 21 Oktober 2008 - SK kelayakan lingkungan nomor 181 tahun 2009 tgl. 25 Maret 2009
7.	UKL-UPL	Pembangunan Jembatan Tahap 2 (Bantuan Hibah Jepang)	Dep. PU Dirjen Bina Marga Direktorat Bina Teknik	-	- SK Rekomendasi 660/266/II/BLHP/2008 Tgl. 11 November 2008
8.	AMDAL	Pekerjaan Review	Dinas	CV. Duta Perdana	- SK Kesepakatan

		Pembangunan Bendungan Mujur Lombok Tengah	Permukiman dan Prasarana Wilayah Prov. NTB	Consulting Engineers Jl. Tanjung Bebera Blok J No. 3 – Mataram Telp. (0370) 646322	814/629/II/BLHP/2008 Tgl. 30 Des 2008 - SK kelayakan Lingkungan No: 348 tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010
9.	UKL-UPL	PLTM Melaga dan Batu Kliang Kokok Putih	PT. Nusantara Indo Energy	-	- Rekomendasi No: 660/473/II/BLHP/2009

JENIS DOKUMEN DI TAHUN 2009

NO	Jenis Dokumen	Nama Kegiatan	Pemrakarsa	Konsultan/Penyusun	SK. Kesepakatan, Kelayakan / Rekomendasi
1.	AMDAL	HTI Blok Soriutu	PT. Usaha Tani Lestari	-	- SK kesepakatan nomor 176 tahun 2009 20 Maret 2009 - SK kelayakan no 283 th 2009 tgl 26 Mei 2009
2.	UKL-UPL	Pembangunan SUTT 150 kV Praya-PK Montong-	PT.PLN (Persero) wilayah NTB		- Rekomendasi No: 814/625/II/BLHP/2009 tanggal 27 Mei 2009
3.	UKL-UPL	SUTT 70 kV GI Bonto Kabupaten Dompu-Bima	PT.PLN (Persero) wilayah NTB	PPLH Udayana	Rekomendasi No. 660/1982/II/BLHP/2009 tanggal 9 Desember 2009

JENIS DOKUMEN DI TAHUN 2010

NO	Jenis Dokumen	Nama Kegiatan	Pemrakarsa	Konsultan/Penyusun	SK. Kesepakatan, Kelayakan / Rekomendasi
1.	AMDAL	Pembangunan Bendungan Bintang Bano Kab. Sumbawa Barat	Dinas Pu Kab. Sumbawa Barat	PT. Indra Karya Wilayah I-Malang	- Kesepakatan KA-ANDAL Nomor: 348 tahun 2010 tgl 25 Mei 2010 - Kelayakan No.581 th 2010 tgl. 19 Okt 2010
2.	AMDAL	Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pda Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Luas 32.784 Kab. Dompu dan Bima	PT. Agro Wahana Bumi		- Kesepakatan KA-ANDAL nomor 530 tahun 2010 tgl 14 Sept 2010 - Kelayakan No 613 th 2010 tg. 9 Nov 2010

JENIS DOKUMEN DI TAHUN 2012

NO	Jenis Dokumen	Nama Kegiatan	Pemrakarsa	Konsultan/Penyusun	SK. Kesepakatan, Kelayakan / Rekomendasi
1	AMDAL	Pengembangan Kawasan Pariwisata Mandalika Lombok di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat	PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)	PT. Pandu Persada	- Kesepakatan KA-ANDAL Nomor: 814/619/II/BLHP/2012 tgl 06 Agustus 2012 - SK Kelayakan Lingkungan Hidup No.660 th 2012 tgl. 14 Desember 2012 - SK Izin Lingkungan No 48 Tahun 2013 tgl 17 Januari 2013
2.	AMDAL	Perubahan dan Addendum Dokumen ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (HTI) menjadi Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (HA) di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dan	PT. Agro Wahana Bumi	PT. Agro Wahana Bumi	- SK Kelayakan Lingkungan Hidup No 626 Tahun 2012 tgl 5 Desember 2012 - Izin Lingkungan No 49 Tahun 2013 tgl. 17 Januari 2013

		Kecamatan Tambora Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.			
3.	AMDAL	Pembangunan Gedung IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat	Kementerian Dalam Negeri	PT. Multi Bina Kreasi	- Kesepakatan KA-ANDAL Nomor: 814/641/II/BLHP/2012 tgl 14 Agustus 2012 - SK Kelayakjan Lingkungan SK Gubernur No 245 Tahun 2013 tgl 1 April 2013
4.	UKL - UPL	Pembangunan Gardu induk dan Tranmisi 150 kV Ampenan Tanjung	PT. PLN (Persero)	PPLH Universitas Mataram	- Rekomendasi UKL-UPL No: 660/701/II/BLHP/2012 Tgl 5 September 2012
5.	UKL - UPL	Pembangunan Gardu induk dan Tranmisi 70 kV Labuhan - Tano - Taliwang	PT. PLN (Persero)	PPLH Universitas Mataram	- Rekomendasi UKL-UPL No: 660/702/II/BLHP/2012 - Tgl 5 September 2012

JENIS DOKUMEN DI TAHUN 2013

N O	Jenis Dokumen	Nama Kegiatan	Pemrakarsa	Konsultan/Penyusun	SK. Kesepakatan, Kelayakan / Rekomendasi
1.	AMDAL	Kegiatan Rencana Pembangunan Jalan By Pass BIL - Mataram Sepanjang 8 Km	Dinas PU Provinsi NTB	CV. Geospasia Wahana Jaya	- Persetujuan KA-ANDAL Nomor 813 Tahun 2013 Tgl 4 Desember 2013 - SK Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor: 660-859 Tahun 2014 Tanggal 31 Desember 2014 - Izin Lingkungan Nomor 503/01/03/LINK/BKPM&PT/ 2015
2.	AMDAL	Pembangunan Bendungan Tanju dan Bendungan Mila untuk Pengembangan Rababaka Kompleks di Kabupaten Dompu Provinsi NTB	Balai Wilayah Sungai NT I	PPLH Universitas Brawijaya	- Persetujuan KA-ANDAL Nomor 704 Tahun 2013 Tgl 29 Oktober 2013 - SK Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor 420-767 Tahun 2013 Tgl 31 Desember 2013 - Izin Lingkungan Nomor:503/001/03/LINK/BKPM&PT/2014 tgl 10 Januari 2014

3.	UKL/UPL	Pembangunan jaringan Tranmisi 70 kV dan gardu induk pada jalur Bima – Sape.	PT. PLN (Persero) UIP XI Nusa Tenggara Barat	PT. Gamma Epsilon	- Rekomendasi UKL-UPL Nomor 18 Tahun 2014 tgl 11 maret 2014 - Izin Lingkungan Nomor: 503/002/03LINK/BKPM&PT/ 2014 Tgl 17 Maret 2014
4.	AMDAL	Pembangunan Jalan Lingkar Utara Ibu kota Kabupaten Lombok Utara.	Dinas PU Kab. Lombok Utara	PT. Gelar Buana Semesta	- Persetujuan KA-ANDAL Nomor 54i.A Tahun 2013 Tgl 27 November 2013 - SK Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor: 21/I-SKKL/LH/2014 Tanggal 20 Mei 2014 - Izin Lingkungan Nomor: 22/I-IL/LH/2014 Tanggal 21 Mei 2014

JENIS DOKUMEN DI TAHUN 2014

NO	Jenis Dokumen	Nama Kegiatan	Pemrakarsa	Konsultan/Penyusun	SK. Kesepakatan, Kelayakan / Rekomendasi
1.	AMDAL	Kegiatan Rencana Pembangunan Jaringan Tranmisi 150 kV dan Gardu Induk Empang – Dompu di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu Oleh PT.PLN (Persero) UIP XI	PT. PLN (Persero) Unit Induk pembangunan XI	PT. Pro Lestari (Enviroment, Management & Engineering consultants)	- Persetujuan KA-ANDAL Nomor: 32-II Tahun 2014 Tgl: 21 April 2014 - SK Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor: 660-826 Tahun 2014 Tanggal 17 Desember 2014 - Izin Lingkungan 503/02/03/LINK/BKPM&PT/2015. Tgl 13 Januari 2015
2.	UKL-UPL	Pembangkit Listrik Tenaga MiniHydro (PLTM) DAS kokok Putih Oleh PT. Tirta Energi Hijau.	PT. Tirta Energi Hijau	PT. Tirta Energi Hijau	- Rekomendasi UKL-UPL Nomor 69-II Tahun 2014 tgl 14 Oktober 2014 - Izin Lingkungan Nomor: 503/03/03/LINK/BKPM&PT/2014 Tgl 23 Oktober 2014

3.	AMDAL	Rencana Pembangunan Condotel dan Villa AMARSVATI di dusun Malimbu Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kab. Lombok Utara oleh PT. Duta Megah Laksana	PT. Duta Megah Laksana	PT. Duta Megah Laksana	- Persetujuan KA-ANDAL Nomor 80 Tahun 2014 Tgl 28 Nopember 2014 - SK Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor:64/3-SKKL/LH/2016 Tgl. 27 Desember 2016 - Izin Lingkungan Nomor:63/57-IL/LH/2016 Tgl. 27 Desember 2016
----	-------	--	------------------------	------------------------	---

JENIS DOKUMEN DI TAHUN 2015

NO	Jenis Dokumen	Nama Kegiatan	Pemrakarsa	Konsultan/Penyusun	SK. Kesepakatan, Kelayakan / Rekomendasi
1.	AMDAL	Rencana Pembangunan Tranmisi 150 kV dan Gardu Induk Ampenan-Tanjung oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XI	PT. PLN (Persero) Unit Induk pembangunan XI	PT. Gelar Buana Semesta	- Persetujuan KA-ANDAL Nomor: 17 Tahun 2015 Tgl: 1 April 2015 - SK Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor: 671.31-441 Tahun 2015 Tanggal 3 Agustus 2015 - Izin Lingkungan 503/05/03/LINK/BKPM&PT/2015. Tgl 5 Agustus 2015
2.	UKL-UPL	Kegiatan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Lembar.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lembar	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lembar	- Rekomendasi UKL-UPL Nomor 21 Tahun 2015 tgl 26 Mei 2015 - Izin Lingkungan Nomor: 503/03/03/LINK/BKPM&PT/2015 Tgl 3 Juni 2015
3.	AMDAL	Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Bahan Galian Emas dan Mineral Pengikutnya di Kecamatan Ropang,	PT. Sumbawa Juta Raya	PT. General Konsultan	- Persetujuan KA-ANDAL Nomor 26 Tahun 2015 Tgl 15 Juni 2015 - Rekomendasi KPA Nomor: 660/217/II/BLHP/2015

		Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh PT. Sumbawa Juta Raya			Tanggal 23 April 2015 - SK Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor: 540-413 Tahun 2015 Tanggal 15 Juli 2015 - Izin Lingkungan Nomor: 503/04/03/LINK/BKPM&PT/2015 Tgl 28 Juli 2015
4.	UKL-UPL	Rencana Kegiatan Eksplorasi Penambangan Tembaga Hu'u Pulau Sumbawa Provinsi NTB	PT. Sumbawa Timur Mining.	PT. Sumbawa Timur Mining.	- Rekomendasi UKL-UPL Nomor 40-II Tahun 2015 Tgl 25 Agustus 2015 - Izin Lingkungan Nomor: 503/06/03/LINK/BKPM&PT/2015 Tgl 28 Agustus 2015
5.	UKL-UPL	Kegiatan Pembangunan Bagunan Pengaman Pantai Muara Sungai Meninting Prov NTB Oleh Balai Wilayah Sungai NT I	Balai Wilayah Sungai NT I.	CV. Geospasia Wahana Jaya.	- Rekomendasi UKL-UPL Nomor 39-II Tahun 2015 Tgl 24 Agustus 2015 - Izin Lingkungan Nomor: 503/07/03/LINK/BKPM&PT/2015 Tgl 1 September 2015
6.	AMDAL	Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Emas dan Mineral Pengikutnya di	PT. INTAM	PT. INTAM	- Persetujuan KA-AMDAL Nomor 33-II Tahun 2015 Tgl 7 Juli 2015 - SK Kelayakan Lingkungan

		Kecamatan Lantung, Ropang dan Lenangguar Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh PT. INTAM			Hidup 503/01/03/SKKL/BKPM&PT/2015 Tgl. 8 Oktober 2015 - Izin Lingkungan 503/08/03/LINK/BKPM&PT/2015 Tgl. 8 Oktober 2015
7.	UKL-UPL	Kegiatan Eksplorasi Pertambangan Batuan (Pasir Laut) di Lepas Pantai Dusun Tawun, Desa Sekotong Barat Kecamatan sekotong dan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat	PT. Timur Sukses Bersama.	PT. Timur Sukses Bersama.	- Rekomendasi UKL-UPL Nomor 62-II Tahun 2015 Tgl 12 November 2015 - Izin Lingkungan Nomor: 503/10/03/LINK/BKPM&PT/2015 Tgl 12 November 2015.
8.	UKL-UPL	Kegiatan/Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan (Pasir Laut) di Lepas Pantai Perairan Laut Selat Alas Kab. Lombok Timur Prov. NTB	PT. Dinamika Atria Raya.	PT. Dinamika Atria Raya.	- Rekomendasi UKL-UPL Nomor 63-II Tahun 2015 Tgl 12 November 2015 - Izin Lingkungan Nomor: 503/09/03/LINK/BKPM&PT/2015 Tgl 12 November 2015

9.	AMDAL	Rencana Penambangan Pasir Laut di Selat Lombok Kab. Lombok Barat, Provinsi NTB	PT. Timur Sukses Bersama.	PT. Timur Sukses Bersama.	- Persetujuan KA-ANDAL Nomor 62-II Tahun 2015 Tgl 12 Desember 2015 - SK Kelayakan Lingkungan Hidup 503/01- II/03/SKKL/BKPM&PT/2016 Tgl. 5 Pebruari 2016 - Izin Lingkungan 503/01- II/03/LINK/BKPM&PT/2016 Tgl. 5 Pebruari 2016
10.	AMDAL	Rencan Penambangan Pasir Laut di Selat Alas Kab. Lombok Timur Provinsi NTB	PT. Dinamika Atria Raya.	PT. Gelar Buana Semesta	- Persetujuan KA-ANDAL Nomor 08-II Tahun 2016 Tgl 11 Januari 2016 - SK Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor:503/09- VIII/03/SKKL/DPMPTSP/2017 Tgl. 18 Agustus 2017 - Izin Lingkungan Nomor:503/09- VIII/03/LINK/DPMPTSP/2017 Tgl. 18 Agustus 2017

11.	AMDAL	Rencana Pembangunan Jalan Pinggir Pantai Ampenan, Kota Mataram	Dinas PU Kota Mataram	PT. Geospasia Wahana Jaya	- Persetujuan KA-ANDAL Nomor 08-II Tahun 2016 Tgl 11 Januari 2016 -
12.	DELH	Bandar Udara Sultan M. Kaharuddin Sumbawa	Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara	PT. Ayamaru Bakti Pettiwi	- SK DELH Nomor 67-II Tahun 2015 Tgl 16 Desember 2015 - Izin Lingkungan Nomor: 503/11/03/LINK/BKPM&PT/2015 Tgl 28 Desember 2015.
13.	DELH	Bandar Udara Sultan M. Salahuddin Bima	Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara	PT. Ayamaru Bakti Pettiwi	- SK DELH Nomor 68-II Tahun 2015 Tgl 16 Desember 2015 - Izin Lingkungan Nomor: 503/12/03/LINK/BKPM&PT/2015 Tgl 28 Desember 2015.
14.	DELH	Kegiatan Ruas Jalan Nasional di Provinsi NTB (P. Sumbawa) sepanjang ± 627,48 Km	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan.	PT. Mitra Hijau Indonesia	- SK DELH Nomor 70-II Tahun 2015 Tgl 23 Desember 2015 - Izin Lingkungan Nomor: 503/2/03/LINK/BKPM&PT/2016 Tgl 6 Januari 2016.

15.	DELH	Kegiatan Ruas Jalan Nasional di Provinsi NTB (P. Lombok) sepanjang ± 307,07 Km	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan.	PT. Mitra Hijau Indonesia	SK DELH Nomor 69-II Tahun 2015 Tgl 23 Desember 2015 - Izin Lingkungan Nomor: 503/1/03/LINK/BKPM&PT/2016 Tgl 6 Januari 2016.
-----	------	--	--	---------------------------	---

JENIS DOKUMEN DI TAHUN 2016

NO	Jenis Dokumen	Nama Kegiatan	Pemrakarsa	Konsultan/Penyusun	SK. Kesepakatan, Kelayakan / Rekomendasi
1.	UKL-UPL	Rencana Kegiatan Pengembangan Cottage The Lombok Lodge (Pembangunan Jetty).	The Lombok Lodge	The Lombok Lodge	- Rekomendasi UKL-UPL Nomor 14 Tahun 2016 Tgl 15 Pebruari 2016 - Izin Lingkungan Nomor: 503/02-II/03/LINK/BKPM&PT/2016 Tgl 25 Pebruari 2016.
2.	AMDAL	PLTU Lombok FTP 2 (2 x 50 MW)	PT. PLN (Persero) UIP XI	PT. PLN (Persero) UIP XI	- Persetujuan KA-ANDAL Nomor: 75-II Tahun 2016 Tgl: 1 September 2016 - Rekomendasi KPA Nomor: 660/299/II/BLHP/2016 Tgl: 30 Desember 2016

					- SK Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor:503/06-II/03/SKKL/DPMPTSP/2017 Tgl: Pebruari 2017 - Izin Lingkungan Nomor:503/06-II/03/LINK/DPMPTSP/2017 Tgl: 14 Pebruari 2017
3.	AMDAL	Rencana Kegiatan Pembangunan Jembatan Lewa Mori dan Jalan Dua Jalur Batas Kota – Sp. Talabiu Kab. Bima	Dinas PU Kab. Bima	PT. Geospasia Wahana Jaya.	- Persetujuan KA-ANDAL Nomor 21-II Tahun 2016 Tgl 18 Maret 2016 - Rekomendasi Kelayakan Nomor 660/136/Amdal&PPKL-DLHK/2017 Tgl. 7 Pebruari 2017 - SK Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor:503/07-II/03/SKKL/DPMPTSP/2017

					Tgl: 22 Pebruari 2017 - Izin Lingkungan Nomor:503/07-II/03/LINK/DPMPTSP/2017 Tgl: 22 Pebruari 2017
4.	UK-UPL	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sumbawa Peaker 50 MW di Desa Badas Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat	PT. PLN (Persero) UIP XI	PT. Adi Banuwa	- Rekomendasi UKL-UPL Nomor 36-II Tahun 2016 Tgl 29 April 2016 - Izin Lingkungan Nomor: 503/03-V/03/LINK/BKPM&PT/2016 Tgl 11 Mei 2016.
5.	UK-UPL	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Bima Peaker 50 MW di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.	PT. PLN (Persero) UIP XI	PT. Adi Banuwa	- Rekomendasi UKL-UPL Nomor 37-II Tahun 2016 Tgl 29 April 2016 - Izin Lingkungan Nomor: 503/04-V/03/LINK/BKPM&PT/2016 Tgl 11 Mei 2016.

6.	UKL-UPL	Pembangunan SUTT 150 kV dan GI Mataram Incomer	PT. PLN (Persero) UIP XI	PT. Geoprodev Nusantara	- Rekomendasi UKL-UPL Nomor 83Tahun 2016 Tgl 30 September 2016 - Izin Lingkungan Nomor: 503/06-XI/03/LINK/BKPM&PT/2016 Tgl 7 November 2016.
7.	AMDAL	Pembangunan Hotel Santika/Santika Resort di Kabupaten Lombok Utara	PT Grahawita Santika	-	- Persetujuan KA-ANDAL Nomor 55-II Tahun 2016 Tgl. 30 Mei 2016 - Rekomendasi Kelayakan Nomor 660/979/II/BLHP/2016 Tgl: 7 Pebruari 2017 - SK Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor 48/2-SKKL/LH//2016 Tgl: 8 November 2016 - Izin Lingkungan Nomor 49/46-LL/LH//2016 Tgl: 8 November 2016

8.	AMDAL	Rencana pembangunan Embung Madanduru di Kabupaten Dompu	Balai Wilayah Sungai NT I	PT. Geospasia Wahana Jaya.	- Persetujuan KA-ANDAL Nomor 76-II Tahun 2016 Tgl. 29 Juli 2016 - Rekomendasi Kelayakan Nomor:660/279/II/BLHP/2016 Tgl:9 Desember 2016 - SK Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor:503/05-II/03/SKKL/DPMPTSP/2017 Tgl: Pebruari 2017 - Izin Lingkungan Nomor:503/05-II/03/LINK/DPMPTSP/2017 Tgl: Pebruari 2017
9.	UKL-UPL	Kegiatan Eksplorasi Bahan Galian Emas dan Mineral Pengikutnya serta kegiatan pendukungnya di	PT. Sumbawa timur mining	-	- Rekomendasi UKL-UPL Nomor 61-IITahun 2016 Tgl 24 Juni 2016 - Izin Lingkungan Nomor: 503/05-

		Kabupaten Bima dan kabupaten Dompu prov. NTB			VIII/03/LINK/BKPM&PT/2016 Tgl 15 Agustus 2016.
10.	UKL-UPL	Pembangunan Gardu Induk dan Transmisi 150 kV pada jalur PLTU Lombok FTP 2 – Gardu Induk Bayan – gardu Induk Tanjung	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara	-	- Rekomendasi UKL-UPL Nomor 82 Tahun 2016 Tgl 27 September 2016 - Izin Lingkungan Nomor: 503/07-IX/03/LINK/BKPM&PT/2016 Tgl 8 November 2016.
11.	AMDAL	Rencana Pembangunan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat	Balai Wilayah Sungai NT I	PT. Therasis Ero Jaya	- Persetujuan KA-ANDAL Nomor 67-II Tahun 2016 Tgl. 15 Agustus 2016 - Rekomendasi Kelayakan Nomor: 660/235/II/BLHP/2016 Tgl. 30 November 2016 - SK Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor: 503/04-II/03/SKKL/DPMPTSP/2017 Tgl. Pebruari 2017 - Izin Lingkungan Nomor: 503/04-

					II/03/LINK/DPMPTSP/2017 Tgl. Pebruari 2017
12.	AMDAL	Rencana Pembangunan Bendungan Mujur di Kabupaten Lombok Tengah	Balai Wilayah Sungai NT I	PT. Therasis Ero Jaya	- Persetujuan KA-ANDAL Nomor 188/59 Tahun 2017 Tgl. 3 April 2017 - Rekomendasi Kelayakan - SK Kelayakan Lingkungan Hidup - Izin Lingkungan
13.	AMDAL	Rencana Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam di Desa Senggigi Kec. Batu layar Kabupaten Lombok Barat dan di Desa Malaka Kec. Pemenang Kabupaten Lombok Utara	PT. Ira Zhafran Wisata	-	- Persetujuan KA-ANDAL Nomor 84 Tahun 2016 Tgl. 17 Oktober 2016 - Rekomendasi Kelayakan Nomor:660/291/II/BLHP/2016 Tgl. 21 Desember 2016 - SK Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor:503/07-I/03/SKKL/DPMPTSP/2017 Tgl. 22 Pebruari2017

					- Izin Lingkungan Nomor:503/02-I/03/LINK/DPMPTSP/2017 Tgl. 22 Pebruaari 2017
14.	UKL-UPL	Rencana Kegiatan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Labuhan Lombok	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok	-	- Rekomendasi UKL-UPL Nomor: 96-II Tahun 2016 Tgl. 29 November 2016 - Izin Lingkungan Nomor:503/08-XII/03/LINK/BKPM&PT/2016 Tgl. 5 Desember 2016
15.	AMDAL	Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Lombok Peakers 150 MW	PT. PLN (Persero) Unit Induk pembangunan XI	Arthayu Rali Perdana	- Persetujuan KA-ANDAL Nomor: 97-II Tahun 2016 Tgl. 9 Desember 2016 - Rekomendasi Kelayakan Nomor:660/857/Amdal&PPKL/2017 Tgl. 10 Mei 2017 - SK Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor:503/08-VIII/03/SKKL/DPMPTSP/2017 Tgl. 2 Agustus 2017

					- Izin Lingkungan Nomor:503/08-VIII/03/LINK/DPMPTSP/2017 Tgl. 2 Agustus 2017
16.	AMDAL	Rencana Kegiatan Marine Vessel Power Plant (MVPP) di Desa Taman AYu Kec. Gerung – Addendum Jeranjang	PT. PLN (Persero) Wilayah NTB	-	- Rekomendasi Kelayakan Nomor:660/162/II/BLHP/2016 Tgl 18 November 2016 - SK Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor:503/01/03/SKKL/BKPM&PT/2016 Tgl. 8 Desember 2016 - Izin Lingkungan Nomor:503/09-XII/03/LINK/BKPM&PT/2016 Tgl. 8 Desember 2016

JENIS DOKUMEN DI TAHUN 2017

NO	Jenis Dokumen	Nama Kegiatan	Pemrakarsa	Konsultan/Penyusun	SK. Kesepakatan, Kelayakan / Rekomendasi
1.	AMDAL	Rencana Kegiatan IUP Operasi Produksi Bahan Galian Mineral Logam Emas Mineral Pengikutnya Desa Batu Putih Dan Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat	PT. Bintang Bulaeng Perkasa	-	- Persetujuan KA-ANDAL Nomor:188.4/105.a Tahun 2017 Tgl 8 Juni 2017 - Rekomendasi Kelayakan Nomor:660/2099/Amdal&PPKL-DISLHK/2017 Tgl 13 September 2017 - SK Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor:503/01/03/SKKL/BKPM&PT/2016 Tgl. 8 Desember 2016 - Izin Lingkungan Nomor:503/11-X/03/LINK/DPMPSTSP/2017 Tgl. 9 Oktober 2017
2.	AMDAL	Pembahasan dokumen Addendum ANDAL dan RKL-RPL PLTU	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa	-	- Rekomendasi Kelayakan Nomor:660/2098/Amdal&PPKL-DISLHK/2017 Tgl 13 September 2017

		Lombok Barat Pembangunan Pelindung Pantai (Groin) Di Sekitar Pltu Jeranjang Di Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.	Tenggara		- SK Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor:503/13- X/03/SKKL/DPMPTSP/2017 Tgl. 27 Oktober 2017 - Izin Lingkungan Nomor:503/14- X/03/LINK/DPMPTSP/2017 Tgl. 27Oktober 2017
3.	AMDAL	Addendum ANDAL dan RKL-RPL Kegiatan OP Pertambangan Bahan Galian Emas DMP Di Kec. Ropang – Kab. Sumbawa	PT. Sumbawa Juta Raya	-	- Rekomendasi Kelayakan Nomor:660/2100/Amdal&PPKL- DISLHK/2017 Tgl 13 September 2017 - SK Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor:503/12- X/03/SKKL/DPMPTSP/2017 Tgl. 17 Oktober 2017 - Izin Lingkungan Nomor:503/13- X/03/LINK/DPMPTSP/2017 Tgl. 17 Oktober 2017

4.	AMDAL	Rencana Kegiatan Pembangunan Depot Mini LPG Pressurized Lombok, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Kab. Lombok Barat	PT. Pertamina Parta Niaga	-	- Persetujuan KA-ANDAL Nomor:660/2360/Amdal&PPKL-DISLHK/2017 Tgl 12 Oktober 2017 - Rekomendasi Kelayakan Nomor:660/2360/ Amdal&PPKL-DISLHK/2017 Tgl 12 Oktober 2017 - SK Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor:503/11-X/03/SKKL/DPMPTSP/2017 Tgl. Oktober 2017 - Izin Lingkungan Nomor:503/12-X/03/LINK/DPMPTSP/2017 Tgl. Oktober 2017
5.	UK-UPL	Rencana Kegiatan Normalisasi Dan Perkuatan Tebing Beton Di Sungai Sulin Kabupaten Lombok Barat -	Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I	-	- Rekomendasi UKL-UPL Nomor: 124 Tahun 2017 Tgl. 22 Agustus 2017 - Izin Lingkungan Nomor:503/15-XI/03/LINK/DPMPTSP/2017

		Kabupaten Lombok Tengah			Tgl. 16 November 2017
6.	UK-UPL	Rencana Pengolahan Pasir Besi Di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu	PT. Bumi Mas Kawinda Jaya	-	- Rekomendasi UKL-UPL Nomor: 119 Tahun 2017 Tgl. 18 Agustus 2017 - Izin Lingkungan Nomor:503/10-VIII/03/LINK/DPMPTSP/2017 Tgl. 24 Agustus 2017
7.	AMDAL	Pengaman Pantai Bintaro/Ampenan	BWS NT I	PT.Terasis Erojaya	- Persetujuan KA-ANDAL Nomor:814/77 Tahun 2018 Tgl 12 Maret 2018 - Rekomendasi Kelayakan Nomor:660/151/Amdal&PPKL-DISLHK/2018 Tgl 24 Januari 2018 - SK Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor:503/1-I/03/SKKL/DPMPTSP/2018 Tgl. 26 Januari 2018 - Izin Lingkungan Nomor:503/03-I/03/IL-AMDAL/DPMPTSP/2018 Tgl. 26 Januari 2018

8.	AMDAL	Pembangunan Bendungan Beringin Sila di Kab. Sumbawa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sumbawa	PT.Terasis Erojaya	- Persetujuan KA-ANDAL Nomor:188/52/Tahun 2018 Tgl 5 Pebruari 2018 - Rekomendasi Kelayakan Nomor:660/486/Amdal&PPKL-DISLHK/2018 Tgl 12 Maret 2018 - SK Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor:503/1-I/03/SKKL/DPMPTSP/2018 Tgl. 26 Januari 2018 - Izin Lingkungan Nomor:503/03-I/03/IL-AMDAL/DPMPTSP/2018 Tgl. 26 Januari 2018
9.	AMDAL	Pembangunan Bendungan Tiu Suntuk di Kab. Sumbawa Barat	Dinas PU dan PR Kab. Sumbawa Barat		- Persetujuan KA-ANDAL Nomor:188/54 Tahun 2018 Tgl 5 Pebruari 2018 - Rekomendasi Kelayakan Nomor:660/893/Amdal&PPKL-DISLHK/2018 Tgl 7 Mei 2018

					- SK Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor:503/1-I/03/SKKL/DPMPTSP/2018 Tgl. 26 Januari 2018 - Izin Lingkungan Nomor:503/03-I/03/IL-AMDAL/DPMPTSP/2018 Tgl. 26 Januari 2018
10.	AMDAL	Pembangunan dan pengoperasian Fasilitas Pemurnian Tembaga serta Fasilitas Pendukungnya	PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT. AMNT)	PT. Environment ESC	- Persetujuan KA-ANDAL Nomor:188.4/206/Tahun 2017 Tgl 8 Desember 2017 - Rekomendasi Kelayakan Nomor:660/151/Amdal&PPKL-DISLHK/2018 Tgl 24 Januari 2018 - SK Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor:503/1-I/03/SKKL/DPMPTSP/2018 Tgl. 26 Januari 2018 - Izin Lingkungan Nomor:503/03-I/03/IL-AMDAL/DPMPTSP/2018 Tgl. 26 Januari 2018

11.	AMDAL	Kegiatan Budidaya Perikanan dan Proses Pengolahan di Kawasan Teluk Saleh Kab. Sumbawa	PT. Lombok Aspara Bertani	-	- Persetujuan KA-ANDAL Nomor:188.4/186/Tahun 2017 Tgl 27 November 2017 - Rekomendasi Kelayakan Nomor:660/377/Amdal&PPKL-DISLHK/2018 Tgl 26 Pebruari 2018 - SK Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor:503/03-III/03/SKKL/DPMPTSP/2018 Tgl. 12 Maret 2018 - Izin Lingkungan Nomor:503/05-III/03/IL-AMDAL/DPMPTSP/2018 Tgl. 12 Maret 2018
12.	AMDAL	Addendum ANDAL dan RKL-RPL Bandar Udara Sultan M. Kaharuddin Sumbawa	Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara	PT. Trans Intra Asia	- Rekomendasi Kelayakan Nomor:660/189/Amdal&PPKL-DISLHK/2018 Tgl 29 Januari 2018 - SK Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor:503/2-II/03/SKKL/DPMPTSP/2018 Tgl. 28 Pebruari 2018

					- Izin Lingkungan Nomor:503/04-II/03/IL-AMDAL/DPMPTSP/2018 Tgl. 28 Pebruari 2018
13.	UKL-UPL	Pembangunan Dermaga Sebotok di Desa Sebotok Kec. Pelabuhan Badas Kab. Sumbawa	Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa	-	- Rekomendasi UKL-UPL Nomor: 124 Tahun 2017 Tgl. 22 Agustus 2017 - Izin Lingkungan Nomor:503/08-XII/03/LINK/BKPM&PT/2016 Tgl. 5 Desember 2016
14.	UKL-UPL	Pembangunan Dermaga Di Desa Bugis Medang Kec. Labuhan Badas, Kab Sumbawa	Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa	-	- Rekomendasi UKL-UPL Nomor: 124 Tahun 2017 Tgl. 22 Agustus 2017 - Izin Lingkungan Nomor:503/08-XII/03/LINK/BKPM&PT/2016 Tgl. 5 Desember 2016
15.	UKL-UPL	Kegiatan Pemasangan Jaringan Interkoneksi Kabel Laut 20 Kv (2 Sirkuit) dari	PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat	-	- Rekomendasi UKL-UPL Nomor: 522/2330 Tahun 2017 Tgl. 16 Oktober 2017 - Izin Lingkungan Nomor:503/16-

		Pulau Lombok ke 3 Gili (Gili Air, Gili Meno dan Trawangan)			XII/03/LINK/DPMPTSP/2017 Tgl. 7 Desember 2017
16.	UKL-UPL	Kegiatan penangkaran (Transplantasi) Karang Hias di Pulau Kaung Kec. Buer, Kab Sumbawa	CV. Surya Samawa		- Rekomendasi UKL-UPL Nomor: 188.4/209 Tahun 2017 Tgl. 15 Desember 2017 - Izin Lingkungan Nomor:503/17-XII/03/LINK/DPMPTSP/2017 Tgl. 29 Desember 2017
17.	DPLH	Kegiatan Budidaya Tiram Mutiara (<i>Pinctada maxima</i>) di Tanjung Bero, Desa Goa Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat	PT.NTT Kuri Pearl		- Rekomendasi DPLH Nomor: 188/174 Tahun 2017 Tgl. 1 November 2017 - Izin Lingkungan Nomor:503/15-XI/03/LINK/DPMPTSP/2017 Tgl. 11 Januari 2018
18.	UKL-UPL	Pemasangan Kabel Bawah Laut 20 Kv (2 Sirkuit) dari Pulau Lombok Ke Gili Gede Indah , Kec Sekotong Kab.	PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat		- Rekomendasi UKL-UPL Nomor: 188.4/210 Tahun 2017 Tgl. 15 Desember 2017 - Izin Lingkungan Nomor:503/01-I/03/IL-UKL-UPL/DPMPTSP/2018

		Lombok Barat			Tgl. 11 Januari 2018
19.	UKL-UPL	Kegiatan pembangunan Jaringan Distribusi 20 kv Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu	PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat Area Bima		- Rekomendasi UKL-UPL Nomor: 188/211 Tahun 2017 Tgl. 29 Desember 2017 - Izin Lingkungan Nomor:503/02-I/03/IL-UKL-UPL/DPMPTSP/2018 Tgl. 11 Januari 2018

JENIS DOKUMEN DI TAHUN 2018

NO	Jenis Dokumen	Nama Kegiatan	Pemrakarsa	Konsultan/Penyusun	SK. Kesepakatan, Kelayakan / Rekomendasi
1.	DPLH	Kegiatan Jaringan Tegangan Menengah 20 kV di Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa	PT. PLN (Pesero) Wilayah NTB Area Sumbawa	-	- Rekomendasi UKL-UPL Nomor: 124 Tahun 2017 Tgl. 22 Agustus 2017 - Izin Lingkungan Nomor:503/15-XI/03/LINK/DPMPTSP/2017 Tgl. 16 November 2017
2.	AMDAL	Rencana Kegiatan Penambangan Emas dan Mineral Pengikutnya di Kecamatan	PT. Indotan lombok Barat Bangkit (PT. ILBB)	-	- Persetujuan KA-ANDAL Nomor:814/100 Tahun 2018 Tgl 30 April 2018 - Rekomendasi Kelayakan Nomor:660/2099/Amdal&PPKL-

		Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.			DISLHK/2017 Tgl 13 September 2017 - SK Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor:503/01/03/SKKL/BKPM&PT/2016 Tgl. 8 Desember 2016 - Izin Lingkungan Nomor:503/11- X/03/LINK/DPMPTSP/2017 Tgl. 9 Oktober 2017
3.	UKL-UPL	Rencana Pembangunan Jetty Dolphin, Pemasangan Pipa dan Operasional Packing Plant 1 x 5000 Ton Steel Silo	PT. Wiharco Prima	-	- Rekomendasi UKL-UPL Nomor: 816/66 Tahun 2018 Tgl. 7 Maret 2018 - Izin Lingkungan Nomor:503/07-III/03/IL-UKL- UPL/DPMPTSP/2018 Tgl. 16 Maret 2018
4.	UKL-UPL	Kegiatan Pembangunan Galangan/Docking Kapal dan Fasilitas Pendukungnya	PT. Pantai Damai Sejahtera		- Rekomendasi UKL-UPL Nomor: 814/64/ Tahun 2018 Tgl. 8 Maret 2018 - Izin Lingkungan Nomor:503/15- XI/03/LINK/DPMPTSP/2017

					Tgl. 16 November 2017
5.	UKL-UPL	Rencana Kegiatan Pembangunan Terminal Khusus Wisata, Dusun Tanjung, Desa Gili Indah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB	PT. Marina Del Ray	General Konsultan	- Rekomendasi UKL-UPL Nomor: 814/102 Tahun 2018 Tgl. 7 Mei 2018 - Izin Lingkungan Nomor:503/15-XI/03/LINK/DPMPTSP/2017 Tgl. 16 November 2017
6.	DPLH	Kegiatan Operasional Pelabuhan Khusus Pariwisata Oleh PT. Gde & Kadek Brothers Layar Antarnusa	PT. Gde & Kadek Brothers Layar Antarnusa		- Rekomendasi DPLH Nomor: 660/539/Amdal&PPKL-DISLHK/2018 Tgl. 20 Maret 2018 - Izin Lingkungan Nomor:503/15-XI/03/LINK/DPMPTSP/2017 Tgl. 16 November 2017
7.	UKL-UPL	Kegiatan Budidaya Tambak Udang di Desa Kayangan Kecamatan	PT. Panen Berkat Sejahtera		- Rekomendasi UKL-UPL Nomor: 814/96 Tahun 2018 Tgl. 16 April 2018 - Izin Lingkungan

		Kayangan Kab. Lombok Utara			Nomor:503/10- IV/03/LINK/DPMPTSP/2018 Tgl. 26 April 2018
8.	AMDAL (Addendum)	Kegiatan Usaha penambangan pasir laut di Perairan Laut Selat Alas, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB	-		- Rekomendasi Kelayakan Nomor:660/666/Amdal&PPKL- DISLHK/2018 Tgl 27 Maret 2018 - SK Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor:503/05- IV/03/SKKL/DPMPTSP/2018 Tgl. 17 April 2018 - Izin Lingkungan Nomor:503/08- IV/03/LINK/DPMPTSP/2018 Tgl. 17 April 2018
9.	UKL-UPL	Kegiatan Reklamasi dan Operasional Pelabuhan Penyeberangan Sape di Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima oleh PT.	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)		- Rekomendasi UKL-UPL Nomor: 814/98 Tahun 2018 Tgl. 11 Mei 2018 - Izin Lingkungan Nomor:503/10- IV/03/LINK/DPMPTSP/2018 Tgl. 26 April 2018

		ASDP Indonesia Ferry (Persero)			
10.	AMDAL	Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Seluas 7.230 Ha di Kecamatan Moyo Utara, Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh PT. Esa Sampoerna Agro	PT. Esa Sampoerna Agro		- Persetujuan KA-ANDAL Nomor:814/127 Tahun 2018 Tgl 25 Juni 2018 - Rekomendasi Kelayakan Nomor:660/2099/Amdal&PPKL-DISLHK/2017 Tgl 13 September 2017 - SK Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor:503/01/03/SKKL/BKPM&PT/2016 Tgl. 8 Desember 2016 - Izin Lingkungan Nomor:503/11-X/03/LINK/DPMPTSP/2017 Tgl. 9 Oktober 2017

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2018

Pada tahun 2018 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan DLHK berjumlah 540 orang. Jabatan fungsional dilingkungan DLHK yaitu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dimana jumlah staf yang sudah mengikuti diklat berjumlah 7 orang, PPNS sebanyak 1 orang, Polisi Hutan sebanyak 94 orang, Pengendali Ekosistem Hutan sebanyak 4 orang, dan Surveyor pemetaan sebanyak 2 orang.

IV.3. Penegakan Hukum

Berbagai kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan selalu muncul setiap saat. Hal ini sebagai dampak dari kegiatan/ aktifitas manusia termasuk di dalamnya kegiatan industri maupun jasa pariwisata serta kegiatan lainnya merupakan sumber pencemar yang perlu melaksanakan pengendalian sejak awal karena tanpa ada langkah- langkah pencegahan akan menimbulkan masalah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Di sisi lain sekarang masyarakat sangat sensitif terhadap berbagai permasalahan hukum dan kecenderungan berbuat menurut caranya sendiri dengan mengerahkan masa mendatangi kegiatan usaha yang mereka anggap sebagai penyebab pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Bertolak dari itu dirasakan betapa pentingnya peran pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator serta mediator untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan berbagai kasus permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk itu Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian memiliki pos pengaduan kasus lingkungan kemudian bersama-sama instansi terkait akan melakukan verifikasi lapangan sebagai upaya penegakan hukum lingkungan.

Pada tahun 2018 permasalahan yang muncul dan yang telah ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB bersama instansi terkait adalah 2 (dua) kasus pengaduan masyarakat rata-rata kasus lingkungan yang dilaporkan tentang:

1. Adanya genangan air dan bau tidak sedap yang diduga berasal dari air limbah dan sampah Hotel Aruna Senggigi yang bisa bersumber dari STP, saluran drainase dan areal sekitar Hotel
2. Dugaan pencemaran dari limbah yang dihasilkan oleh toko mirasa seperti bau yang tidak sedap

IV.4. Peran Serta Masyarakat

IV.4.1. Program Kampung Iklim

Dalam menghadapi perubahan iklim, seluruh pihak termasuk masyarakat perlu melakukan tindakan mitigasi untuk mengurangi pengaruh terhadap dampak yang ditimbulkan. Dengan dilakukannya upaya mitigasi terhadap perubahan iklim, diharapkan kondisi lingkungan semakin baik sehingga terutama pengaruh iklim terhadap kehidupan masyarakat. Selain mengurangi emisi GRK, upaya mitigasi yang dilakukan dapat menekan biaya adaptasi, karena semakin besarnya konsentrasi GRK yang memicu perubahan iklim, akan memicu dampak perubahan iklim yang lebih besar, sehingga akan berdampak pada biaya pelaksanaan upaya adaptasi.

Dengan dilakukannya upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, ketahanan masyarakat diharapkan akan meningkat sehingga risiko yang mungkin terjadi dapat diminimalkan, antara lain dengan cara menyiapkan infrastruktur yang tahan terhadap bencana iklim, memperkuat kemampuan ekonomi, kapasitas sosial, tingkat pendidikan, serta menerapkan teknologi adaptasi perubahan iklim yang sesuai dengan kondisi lokal. Selain melakukan upaya adaptasi, masyarakat perlu terus didorong untuk melakukan

tindakan mitigasi yang akan memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi GRK secara global serta perbaikan tutupan vgetasi.

Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat terintegrasi dengan kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan masyarakat di tingkat lokal dengan memperhatikan faktor risiko iklim dan dampak perubahan iklim yang mungkin terjadi.

Konsentrasi gas karbon dioksida akan terus meningkat kecuali jika emisi/pancaran dari bahan bakar fosil dibatasi atau digunakan secara bijak bersama-sama. Sedangkan emisi karbon dioksida umumnya berasal dari minyak bumi, terutama dari gas alam, minyak bumi dan batubara, dari tahun ke tahun sebagai penyumbang terbanyak emisi gas CO₂ di muka bumi ini adalah dari peternakan dan pertanian.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) memperkirakan konsentrasi gas karbon dioksida didalam atmosfer akan naik menjadi sekitar 540 - 940 ppm pada tahun 2100. Kenaikan rata-rata konsentrasi gas CO₂ akan mengakibatkan kenaikan suhu rata-rata di bumi, hal tersebut mengakibatkan efek pemanasan global, yang akan mempengaruhi perubahan iklim setempat di bumi, pada akhirnya tentu akan mempengaruhi kehidupan di bumi.

Maksud diselenggarakannya kegiatan Fasilitasi Program Kampung Iklim (Proklim) adalah untuk memberikan pembekalan dan penyamaan persepsi tentang program kampung iklim (proklim) agar dijadikan pedoman oleh berbagai instansi dan penyuluh lapangan dalam melaksanakan upaya-upaya terkoordinasi dan terintegrasi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Penanganan terhadap dampak perubahan iklim tidak dapat dilakukan oleh segelintir sektor saja. Oleh karena itu koordinasi antar instansi mutlak diperlukan demi menjamin keberhasilan masyarakat NTB dalam melakukan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.



P E N U T U P

5.1. KESIMPULAN

1. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 menggunakan kerangka kerja model *Drivers-Pressures-State-Impact-Responses* berdasarkan pada media lingkungan hidup, meliputi: tataguna lahan dan hutan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana, perkotaan dan tata kelola.
2. Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah pada tahun 2018 ada 3 yaitu :
 - a. Alih Fungsi Lahan
 - b. Perubahan Kualitas dan kuantitas Air
 - c. Peningkatan Timbulan Sampah dan minimnya penanganan sampah
3. Inovasi dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai bentuk upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengatasi 3 (tiga) isu prioritas lingkungan hidup antara lain:
 - a. Reboisasi dan penghijauan
 - b. Program Gempita (Gerakan Membangun Tata Kelola Hutan secara Klaboratif dan Inovatif)
 - c. Zero waste program

- d. Pengawasan lingkungan melalui kegiatan Proper dan Dokumen pengelolaan lingkungan
- 4. Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah mendorong inisiatif berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun program dan kegiatan peningkatan keberlanjutan pembangunan sesuai dengan kompetisinya dan/atau secara sinergis dengan pelaku lain, khususnya terkait dengan isu prioritas lingkungan yang dituangkan dalam inovasi lingkungan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

5.2. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pengelolaan lingkungan hidup akan lebih terfokus pada isu prioritas lingkungan yang telah ada dan beberapa isu prioritas yang saling berkaitan, antara lain:

- a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- b. Rencana pengelolaan sampah dengan program Sistem Informasi Manajemen Sampah Terintegrasi (SMASH).
- c. Pembentukan satuan tugas pengelolaan sampah khusus di kawasan sungai dan laut.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan memberikan perhatian utama pada program-program inovasi yang telah dilakukan dan melanjutkan upaya-upaya perbaikan serta melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan dari program-program inovasi tersebut mencapai tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2018. Dokumen Kawasan Rawan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bappeda Provinsi NTB. Mataram.
- Anonim, 2018. Buku Data Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTB Tahun 2017. Pemerintah Provinsi NTB. Mataram.
- Anonim, 2018. Kerentanan Banjir Provinsi Nusa Tenggara Barat. BPBD Provinsi NTB. Mataram.
- Anonim, 2018. ESDM Dalam Angka 2015 Provinsi NTB. Dinas Pertambangan dan Energi Prov. NTB. 2015. Mataram.
- Anonim, 2018. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahn Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. NTB. 2017. Mataram.
- Anonim, 2018. Badan Meteorologi dan Geofisika Prov. NTB. 2018. Mataram.
- Anonim, 2018. Bappeda Prov. NTB. 2018. Mataram.
- Anonim, 2017. Musrenbang Provinsi Nusa Tenggara Barat 2018. Mataram.
- Anonim, 2016. Profil Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2016. Mataram.
- Anonim, 2016. Statistik Badan Lingkungan Hidup Prov. NTB Tahun 2016. BLHP Prov. NTB. Mataram.
- Anonim, 2016. Statistik Dinas Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2016. Dinas Kehutanan Provinsi NTB. Mataram.
- Anonim, 2016. Data dan Informasi Sumberdaya Air, Bendungan dan Embung. BISDA NTB. Mataram.
- Anonim, 2016. Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Air. BISDA NTB. Mataram. Provinsi NTB. Mataram
- Anonim, 2017, Buku Saku Potensi Ekosistem WP3K NTB_RZWP3K NTB. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. Mataram.
- BPS, 2018. Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2018. BPS, Cabang Provinsi NTB. Mataram.

LAMPIRAN I

TABEL DATA

Tabel 1. Luas Kawasan Lindung berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data: 2018

No	Nama Kawasan		Luas Kawasan (Ha)	Tutupan Lahan (Ha)			
				Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
I.	Kawasan Lindung						
	A.	Kawasan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya					
		¹ Kawasan Hutan Lindung	447.272,86	-	-	-	-
		² Kawasan Bergambut	-	-	-	-	-
		³ Kawasan Resapan Air	-	-	-	-	-
		Jumlah	447.272,86				
	B.	Kawasan Perlindungan Setempat					
		¹ Sempadan Pantai	-	-	-	-	-
		² Sempadan Sungai	-	-	-	-	-
		³ Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	-	-	-	-	-
		⁴ Ruang Terbuka Hijau	-	-	-	-	-
		⁵ Kawasan Sempadan Mata Air	-	-	-	-	-
		Jumlah					
	C.	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya					
		1. Kawasan Suaka Alam	5.360,06	Berhutan	-	-	-
		2. Kawasan Suaka Laut dan Perairan Lainnya	-	-	-	-	-
		3. Suaka Margasatwa Suaka Margasatwa Laut	21.674,68	Berhutan Savana	-	-	-
		4. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut	36.832,51	Hutan, Savana, Alang-alang	2.235	-	-
		5. Kawasan Pantai Berhutan Bakau	179.948,66	Bakau	-	Pantai Terbuka	Pasang Surut
		6. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut	41.330	Berhutan	-	-	-
		7. Taman Hutan Raya	3.155	-	-	-	-
		8. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut	21.976,06	-	-	-	-
		9. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	306,60	Berhutan	-	-	-
		Jumlah	310.583,57	-	-	-	-
	D.	Kawasan Rawan Bencana	-	-	-	-	-
		1. Kawasan Rawan Tanah Longsor	-	-	-	-	-
		2. Kawasan Rawan Gelombang Pasang	-	-	-	-	-
		3. Kawasan Rawan Banjir	-	-	-	-	-
		Jumlah					
	E.	Kawasan Lindung Geologi					
		1. Kawasan Cagar Alam Geologi	-	-	-	-	-
		i. Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil	-	-	-	-	-
		ii. Kawasan Keunikan Bentang Alama	-	-	-	-	-
		iii. Kawasan Keunikan Proses Geologi	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-
		2 Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi					
		i. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi	-	-	-	-	-
		ii. Kawasan Rawan Gempa Bumi	-	-	-	-	-
		iii. Kawasan RawanGerakan Tanah	-	-	-	-	-
		iv. Kawasan yang Terletak di Zona Patahan Aktif	-	-	-	-	-
		v. Kawasan Rawan Tsunami	-	-	-	-	-
		vi. Kawasan Rawan Abrasi	-	-	-	-	-
		vii. Kawasan Rawan Gas Beracun	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-
		3 Kawasan yang					
		i. Kawasan Imbuhan Air Tanah	-	-	-	-	-
		ii. Sempadan Mata Air	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-
	F.	Kawasan Lindung Lainnya					
		1 Cagar Biosfer	-	-	-	-	-
		2 Ramsar	-	-	-	-	-
		3 Taman Buru	48.668,05	Berhutan			
		4 Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah	-	-	-	-	-
		5 Kawasan pengungsian Satwa	-	-	-	-	-
		6 Terumbu Karang	-	-	-	-	-
		7 Kawasan Koridor bagi Jenis Satwa atau Biota Laut yang Dilindungi	-	-	-	-	-
		Jumlah	48.668,05	-	-	-	-
		Jumlah Total Kawasan Lindung	806.524,48	-	-	-	-
II.	Kawasan Budidaya		306,60	-	-	-	-
		Jumlah Total Kawasan Budidaya	306,60	-	-	-	-

Keterangan:

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Tabel 2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

No	Penggunaan Lahan di NTB	Luas Area (Ha)	Prosentase penggunaan Lahan (%)
1	Tambak	13.241,89	0,673
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	641.172,72	32,601
3	Tubuh Air	10.017,06	0,509
4	Sawah Irigasi	153.625,52	7,811
5	Pertanian Lahan Kering	137.164,63	6,974
6	Semak/Belukar	168.801,47	8,583
7	Permukiman	58.158,44	2,957
8	Pertanian Lahan Kering Campur	153.294,29	7,794
9	Sawah Tadah Hujan	149.358,74	7,594
10	Belukar Rawa	198,12	0,010
11	Pasir	1.346,56	0,068
12	Sawah Pasang Surut	16,47	0,001
13	Pertambangan	2.488,12	0,127
14	Savana	34.164,10	1,737
15	Perkebunan	191,17	0,010
16	Pelabuhan Laut	112,94	0,006
17	Lahan Kosong	38,78	0,002
18	Hutan Tanaman	2.176,93	0,111
19	Hutan Mangrove Sekunder	9.456,74	0,481
20	Hutan Mangrove Primer	78,11	0,004
21	Hutan Lahan Kering Primer	421.544,38	21,434
22	Tanah Terbuka	9.383,16	0,477
23	Bandar Udara Domestik/Internasional	536,35	0,027
24	Hutan Lahan Kering Campuran	10,42	0,001
25	Bandar Udara Domestik	152,79	0,008
	TOTAL	1.966.729,916	100

Keterangan : Data yang tersedia tidak di pilah berdasarkan Kabupaten/Kota se Provinsi NTB
 Sumber : Bata Citra Landsat (Bappeda Provinsi NTB)

Tabel 3. Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

NO	Fungsi Hutan	Luas Hutan (Ha)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1	Hutan Produksi	160.250,74
2	Hutan Lindung	293.685,83
3	Taman Nasional	444.149,86
4	Taman Wisata Alam	41.330,00
5	Taman Buru	71.645,64
6	Cagar Alam	21.976,06
7	Suaka Margasatwa	36.832,61
8	Taman Hutan Raya	3.155,00
B. Berdasarkan Status Hutan		
1	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	-
2	Hutan Hak/Hutan Rakyat	-
3	Hutan Kota	-
4	Taman Hutan Raya	-
5	Taman Keanekaragaman Hayati	-

1.073.076,74

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungn Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Tabel 4. Keadaan Flora dan Fauna
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2016

No.	Golongan	Nama Spesies Diketahui	Nama Latin	Status			
				Endemik	Terancam	Berlimpah	Dilindungi
	FAUNA						
1	Hewan menyusui/Mamalia	1. Babi hutan	<i>Sus scrova</i>			Berlimpah	Tidak dilindungi
		2. Bajing kelep	<i>Lomys horsfield</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		3. -	<i>Acerodon macklotii prajae</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		4. -	<i>Pteropus vampyrus kopangi</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		5. -	<i>Pipistrellus tenuis sewelanus</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		6. -	<i>Tylonycteris pachypus bhakti</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		7. Banteng	<i>Bos javanicus</i>		Terancam		Dilindungi
		8. Clurut Kecil	<i>Crocidula monticola</i>				
		9. Codot barong	<i>Cynopterus nusa tenggara nusa tenggara</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		10. Codot fajar gua	<i>Eonyterus spelacea glandifera</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		11. Cotot horsfield	<i>Cynopterus horsfieldii horsfieldii</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		12. Codot kerdil	<i>Aethalops alecto alecto</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		13. Codot pesek	<i>Cynopterus terminus</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		14. Kalong Nusa Tenggara	<i>Aceradon macklotii macklotii</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		15. Kalong Hitam	<i>Pteropus alecto</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		16. Kalong punggung Maluku	<i>Dobsonia moluccense moluccense</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		17. Kalong punggung gunung besar	<i>Dobsonia personii gradis</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		18. Kelelawar	<i>Aceradon macklotii prajae</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		19. Kelelawar	<i>Cynopterus sp</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		20. Kelelawar	<i>Pteropus vampyrus</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		21. Kelelawar	<i>Myotis muricola muricola</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		22. Kelelawar harpio	<i>Harpicephalus harpia</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		23. Kelelawar hidung orange	<i>Murina cyclotis peninsularis</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		24. Kelelawar hutan Hardwicke	<i>Kerivoula harpia hardwickii</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		25. Kelelawar kupu	<i>Kerivoula picta-picta</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		26. Kelelawar mega	<i>Megaderma spasma</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		27. Kelelawar mini Schreiber	<i>Mineoterus schreibersii</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		28. Kelelawar vampire kecil	<i>Megaderma spasma trifolium</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		29. Kera abu-abu	<i>Macaca fascicularis</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		30. Kera hitam	<i>Trachypitecus auratus</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		31. Kijang	<i>Mutiacus muncak</i>	Endemi			Dilindungi
		32. Kucing batu	<i>Prionailurus (=Felis) benghalensis javanensis</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		33. Kucing hutan/ Meong gawah	<i>Felis planiceps</i>		Terancam		Dilindungi
		34. Landak	<i>Hystrix brachyura</i>				
		35. Manggung gunung	<i>Tupaia montana</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		36. Motong Aik	<i>Cynogale bennetti</i>		Terancam		Dilindungi
		37. Musang/Luwak/ 38. Lelekat	<i>Viverricula indeca</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		39. Musang	<i>Paradoxurus</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		40. Pipistrel telinga besar	<i>Pipistrellus imbicus</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		41. Oei's pipistrelle	<i>Pipistrellus tenuis sewelanus</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		42. Rusa Timor	<i>Cervus Timorensis</i>	Endemik			Dilindungi
		43. Senggah, 44. Menjangan	<i>Muntiacus mutjak</i>		Terancam		Dilindungi
		45. Trenggiling	<i>Manis javanica</i>	Endemik			Dilindungi
		46. Bajing kelep	<i>Lomys horsfield</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		47. -	<i>Acerodon macklotii prajae</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		48. -	<i>Pteropus vampyrus kopangi</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		49. -	<i>Pipistrellus tenuis sewelanus</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		50. -	<i>Tylonycteris pachypus bhakti</i>	Endemik			Tidak dilindungi
2	Burung / Aves	1. Ayam hutan hijau	<i>Gallus varius</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		2. Ayam hutan merah	<i>Gallus gallus</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		3. Alap-alap sapi	<i>Falco moluccensis</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		4. Anis hutan	<i>Zoothera andromedae</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		5. Anis kembang /punglor	<i>Zoothera intirpres</i>		Terancam		Dilindungi
		6. Anis kuning	<i>Turdus onscrurus</i>		Terancam		Dilindungi
		7. Anis nusa tenggara/punglor kepala hitam	<i>Zoothera doherlyi</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		8. Anis sisik	<i>Zoothera dauma</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		9. Apung Tanag	<i>Anthus novaeseelandiae</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		10. Bambang Kuning	<i>Ixobrychus sinensis</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		11. Bambang Merah	<i>Ixobrychus cinnamomus</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		12. Bangau Bluwok	<i>Mytheria cinerea</i>		Terancam		Tidak dilindungi

	13.	Bangau Sadang Lawe	<i>Ciconia episcopus</i>		Terancam	Dilindungi
	14.	Belibis	<i>Dendracynna sp</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	15.	Belibis Batu	<i>Dendracynna javanica</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	16.	Belibis Kembang	<i>Dendracynna arcuata</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	17.	Betet Kelabu	<i>Lanius schach</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	18.	Beo/Tiong Mas	<i>Gracula freilgoas</i>	Endemik		Dilindungi
	19.	Berkik kembang besar	<i>Rostatula benghalensis</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	20.	Bekik rawa	<i>Gallinago megalala</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	21.	Bekokok sawah	<i>Andreola speciosa</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	22.	Bondol hijau dada merah	<i>Erythura hyperythra</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	23.	Bondol Jawa	<i>Lonchura leucogastroides</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	24.	Bondol kepala pucar	<i>Lonchura pallida</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	25.	Bondol pancawarna	<i>Lonchura quincticolor</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	26.	Bondol peking	<i>Lonchura punctulata</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	27.	Bondol taruk	<i>Lonchura molluca</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	28.	Bubut alang-langan	<i>Centropus malucco</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	29.	Butut sate putih	<i>Phaeton kepturus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	30.	Burun gereja ereasia	<i>Pasermontanus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	31.	Burung gosong	<i>Megapodius reinward</i>		Terancam	Dilindungi
	32.	Burung madu kelapa	<i>Anthreptes malacensis</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	33.	Burung madu matahari	<i>Nectarinia solaris</i>		Terancam	Dilindungi
	34.	Burung madu sriganti	<i>Cinnyris jugularis</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	35.	Cabai dahi hitam	<i>Dicoeum igniferum</i>	Endemik		Tidak dilindungi
	36.	Cabai gunung	<i>Dicoeum sanguinolentum</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	37.	Cabai jawa	<i>Dicoeum trochileum</i>	Endemi		Tidak dilindungi
	38.	Cabai lombok	<i>Dicoeum maugei</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	39.	Burung cabe	<i>Dicoeum sp.</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	40.	Caladi tilik	<i>Dendrocopos melucensis</i>		Terancam	Dilindungi
	41.	Cangak abu	<i>Ardea cinerea</i>	Endemi		Dilindungi
	42.	Cangak besar	<i>Ardea alaba</i>	Endemi		Dilindungi
	43.	Cangak merah	<i>Ardea purpurea</i>	Endemi		Dilindungi
	44.	Cakakak china	<i>Halcyon pillenta</i>		Terancam	Dilindungi
	45.	Cakakak suci	<i>Halcyon sanca</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	46.	Cakakak sungai	<i>Tadir humpus chiaris</i>		Terancam	Dilindungi
	47.	Cakakak tungir putih	<i>Caridanax fulgidus</i>	Endemik	T	Dilindungi
	48.	Celeput walacea	<i>Otus silvicalia</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	49.	Celepuk maluku	<i>Otus manguicus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	50.	Cerek kalung kecil	<i>Otus dublus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	51.	Ceret gunung	<i>Otus vulcania</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	52.	Cicakopi melayu	<i>Pormatorhinus montonus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	53.	Cici merah	<i>Cisticola exilis</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	54.	Cici padi	<i>Cisticola juncidis</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	55.	Cikalang besar	<i>Fregata minor</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	56.	Cikrak daun	<i>Phyllocopus tivirgatus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	57.	Cikrak kutub	<i>Phyllocopus borealis</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	58.	Cinenem jawa/kelincer	<i>Orthotomus sepium</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	59.	Cucak coklat	<i>Pycnonotus leucophrys</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	60.	Cucak gunung	<i>Pycnonotus bimaculatus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	61.	Cucak kutilang	<i>Pycnonotus aurigaster</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	62.	Dara laut	<i>Sterna sp.</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	63.	Dara laut benggala	<i>Sterna bengalensis</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	64.	Dara laut kecil	<i>Sterna albifrons</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	65.	Dara laut sayap hitam	<i>Sterna fulcata</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	66.	Dara laut tengkuk hitam	<i>Sterna sumatrana</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	67.	Dawah	<i>Ducula sp.</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	68.	Decu belang	<i>Streptopelia soprata</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	69.	Dederuk jawa	<i>Streptopelia bitorquata</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	70.	Delimukan zamrud	<i>Chaicophaps indica</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	71.	Elang atap besar	<i>Acipiter virgatus</i>		Terancam	Dilindungi
	72.	Elang atap coklat	<i>Acipiter fasciatus</i>		Terancam	Dilindungi
	73.	Elang atap kelabu	<i>Acipiter nevaehaliandiae</i>		Terancam	Dilindungi
	74.	Elang Bondol	<i>Haliastur indus</i>		Terancam	Dilindungi
	75.	Elang brontok	<i>Spizetus cirhatus</i>		Terancam	Dilindungi
	76.	Elang laut perut putih	<i>Hieraaetus leucagaster</i>		Terancam	Dilindungi
	77.	Elang perut karat	<i>Hieraaetus kieneril</i>		Terancam	Dilindungi
	78.	Elang flores	<i>Spizetus floris</i>		Terancam	Dilindungi
	79.	Elang tikus	<i>Elanus caeruleus</i>		Terancam	Dilindungi
	80.	Elang ular jari pendek	<i>Circaetus gallicus</i>		Terancam	Dilindungi
	81.	Gagak	<i>Corvus sp.</i>		Terancam	Dilindungi
	82.	Gagak kampung	<i>Corvus macrorhynchos</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	83.	Gagak flores	<i>Corvus florensis</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	84.	Gajahan kecil	<i>Numerius malinutus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	85.	Gajahan timur	<i>Numerius madagascariensis</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	86.	Gelatik batu kelabu	<i>Parus mayor</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	87.	Gelatik jawa	<i>Padda aryzivara</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	88.	Gemak loreng	<i>Turnix suscitator</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	89.	Gereja reasia	<i>Passer montanus</i>		Terancam	Tidak dilindungi

	90.	Gosong kaki merah	<i>Megapadius reinwardt</i>		Terancam	Dilindungi
	91.	Ibis rook-roko	<i>Plegadis falcinellus</i>			
	92.	Isap madu australia	<i>Lichmera indistincta</i>		Terancam	Dilindungi
	93.	Isap madu topi sisik	<i>Lichmera lombakia</i>		Terancam	Dilindungi
	94.	Itik benjut	<i>Anas gibberifrons</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	95.	Itik gunung	<i>Aupercilliosanas s</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	96.	Kacamata biasa	<i>Zasterops palperbrosus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	97.	Kacamata gunung	<i>Zasterops montanus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	98.	Kacamata laut	<i>Zasterops cloris</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	99.	Kacamata wallacea	<i>Zasterops wallacea</i>	Endemik		Tidak dilindungi
	100.	Kakatua kecil jambu kuning	<i>Cacatua sulphurea</i>	Endemik		Dilindungi
	101.	Kacilan	<i>Pachycephala fufatinka</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	102.	Kancilan bakau	<i>Pachycephala grisala</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	103.	Kancilan emas	<i>Pachycephala pectoralis</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	104.	Kancilan flores	<i>Pachycephala nudigula</i>	Endemik		Tidak dilindungi
	105.	Kancilan ranting	<i>Pachycephala saturatus</i>	Endemik		Tidak dilindungi
	106.	Kapasan sayap putih	<i>Kalage sweurii</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	107.	Kareo padi	<i>Amauromis phoenicurus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	108.	Kadasi emas	<i>Chrysococcyx lucidus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	109.	Kadidi ekor tajam	<i>Colidris acuminata</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	110.	Kecial kompo/ Gentong	<i>Lichmera lombakia</i>	Endemik		Dilindungi
	111.	-	<i>Lichmera indistincta</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	112.	Kecuit batu	<i>Motacilla cinerea</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	113.	Kecuit kerbau	<i>Motacilla flava</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	114.	Kehicap flores	<i>Monarcha flores</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	115.	Kehicap kacamata	<i>Monarcha trivirgatus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	116.	Kehicap ranting	<i>Hypothymis azurea</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	117.	Kekep babi	<i>Artamus leucorhynchus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	118.	Kepudak kuduk hitam	<i>Oriolus chinensis</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	119.	Kepudang sungu sumba	<i>Caracina doherlyi</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	120.	Kepudang sungu topeng	<i>Caracina personata</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	121.	Kerakbasi ramai	<i>Acrocephalus stentoreus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	122.	Kipasan belang	<i>Rhipidura javanica</i>	Endemik		Dilindungi
	123.	Kipas belang	<i>Rhipidura rufifrons</i>		Terancam	Dilindungi
	124.	Kipasan flores	<i>Rhipidura diluta</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	125.	Krikik-krikik australia	<i>Meropsornatus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	126.	Krikik-krikik laut	<i>Merops philippenus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	127.	Koakiau/Cikukua tanduk	<i>Philemon buceroides</i>		Terancam	Dilindungi
	128.	Kokokan laut	<i>Butoroides striatus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	129.	Kowak malam abu	<i>Nycticorax nycticorax</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	130.	Kowak malam merah	<i>Nycticorax coledonicus</i>		Terancam	Dilindungi
	131.	Kuntul besar	<i>Egretta alba</i>		Terancam	Dilindungi
	132.	Kuntul karang	<i>Egretta sacra</i>		Terancam	Dilindungi
	133.	Kuntul kecil	<i>Egretta garzetta</i>		Terancam	Dilindungi
	134.	Kuntul kerbau	<i>Bubulcus ibis</i>		Terancam	Dilindungi
	135.	Kuntul perak	<i>Egretta intermedia</i>		Terancam	Dilindungi
	136.	Kutilang	<i>Pycnonotus aurigaster</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	137.	Layang-layang	<i>Hirundo sp.</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	138.	Layang-layang api	<i>Hirundo rustica</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	139.	Layang-layang batu	<i>Hirundo tohticia</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	140.	Layang-layang loreng	<i>Hirundo striolata</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	141.	Mandar batu	<i>Golinula chloropus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	142.	Mandar besar	<i>Placeusporphyrio</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	143.	Mayar jambu	<i>Placeus manyar</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	144.	Majar tempua	<i>Placeus philippinus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	145.	Merbak cerucuk	<i>Pycnonotus goiaver</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	146.	Merpati batu	<i>Culumba livia</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	147.	Merpati hutan metalik	<i>Culumba vitiensis</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	148.	Nuri merah	<i>Domicella domicella</i>	Endemik		Dilindungi
	149.	Nuri pipih merah	<i>Geoffroyus geoffroyi</i>	Endemik		Dilindungi
	150.	Opor flores	<i>Lophazosterops supercilialis</i>	Endemik		Tidak dilindungi
	151.	Paok la'us	<i>Pita elegas</i>	Endemik		Tidak dilindungi
	152.	Pucuk padi belang/gara besi belang	<i>Phalacrocorax</i>	Endemik		Tidak dilindungi
	153.	Pucuk padi hitam/gara besi	<i>Phalacrocorax Sulcirostris</i>	Endemik		Tidak dilindungi
	154.	Pecuk ular	<i>Anhinga melanogaster</i>	Endemik		Dilindungi
	155.	Pekaka emas	<i>Halcyon capensis</i>	Endemik		Dilindungi
	156.	Pekaka emas	<i>Pelargops copesis</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	157.	Pergam hijau	<i>Decula aenea</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	158.	Pergam punggung hitam	<i>Decula lacemuluta</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	159.	Perkici pelangi	<i>Trichoglossus haemotodus</i>	Endemik		Dilindungi
	160.	Pelici timor	<i>Trichoglossus euteles</i>	Endemik		Dilindungi
	161.	Perkutut jawa	<i>Geopelia striata</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	162.	Perkutu loreng	<i>Geopelia maugei</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	163.	Perling kecil	<i>Apionis minor</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	164.	Pipit zebra	<i>Taeniopgia guttata</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	165.	Punai flores	<i>Treron floris</i>			
	166.	Punai gading	<i>Treron vernans</i>			

		167. Punai gagak	<i>Treron sphenura</i>				
		168. Punglor kepala merah	<i>Zoothera interpres interpres</i>		Terancam		Dilindungi
		169. Punglor kepala hitam	<i>Zoothera dohertyi</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		170. Puyuh batu	<i>Coturnix chinensis</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		171. Puyuh pepekoh	<i>Coturnix sp</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		172. Raja udang	<i>alcediacoerulescens</i>		Terancam		Dilindungi
		173. Raja udang	<i>Halcyon sp.</i>		Terancam		Dilindungi
		174. Raja udang biru	<i>Halcyon choris</i>		Terancam		Dilindungi
		175. Rajaudang erasia	<i>Alcedo otis</i>		Terancam		Dilindungi
		176. Raja udang meninting	<i>Alcedomeninting</i>	Endemik			Dilindungi
		177. Sepah hutan	<i>Pericrocatus flammeus</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		178. Sepah kerdil	<i>Pericrocatus lonsbergei</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		179. Serak jawa	<i>Tyto alba</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		180. Sepatu jengger	<i>Irediparra galinacea</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		181. Sriwang asia	<i>Terpsiphone paradisi</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		182. Sikatan belang	<i>Ficedula westermanni</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		183. Sikatan bodoh	<i>Ficedula hyperythra</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		184. Sikatan dada merah	<i>Ficedula dumetoria</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		185. Sikatan kepala abu	<i>Culicapa cydonensis</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		186. Sikatan paruh lebar	<i>Myagra ruficalis</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		187. Sikatan rimba ayam	<i>Rhinomy oscillans</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		188. Srigunting	<i>Dicurus sp.</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		189. Srigunting jambul rambut	<i>Dicurus hetentottus</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		190. Srigunting kelabu	<i>Dicurus leucapheous</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		191. Srigunting wallacea	<i>Dicurus densus</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		192. Tekukur biasa	<i>Streptopelia chinensis</i>			Berlimpah	Tidak dilindungi
		193. Tapekong jambul	<i>Hamiprocne longipennis</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		194. Tesia timur	<i>Tesia everetti</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		195. Tikusan alis putih	<i>Polioptila cinerea</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		196. Tikusan merah	<i>Porzana fusta</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		197. Tiong lampu biasa	<i>Eurystomus orientalis</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		198. Titiha telaga	<i>Tachybaptus reficollis</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		199. Trinil	<i>Tringa sp.</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		200. Trinil kaki hijau	<i>Tringa nebularia</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		201. Trinil pantai	<i>Tringa hypoleucos</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		202. Trinil semak	<i>Tringa glareala</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		203. Trulek topeng	<i>Vanellus miles</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		204. Tuwur asia	<i>Eudynamis scolopacea</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		205. Burung udang merah api	<i>Ceyx erithacus</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		206. Uncal buau	<i>Macropteryx albanus</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		207. Uncal kouran	<i>Macropteryx ruficeps</i>				
		208. Uncal loreng	<i>Macropteryx unchall</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		209. Walet linchi	<i>Collocalia inchi</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		210. Walet sapi	<i>Collocalia esculenta</i>			Berlimpah	Tidak dilindungi
		211. Walet sarang putih	<i>Collocalia fuscipagus</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		212. Walet sarang putih	<i>Aerodromus fuciphagus</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		213. Walik kembang	<i>Ptilinopus melanopus</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		214. Wili-wili	<i>Ercus magnirostris</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		215. Wiwik kelabu	<i>Coccyzus merulinus</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		216. Wiwik ucuang	<i>Coccyzus sepioides</i>		Terancam		Tidak dilindungi
3	Reptil	1. Cicak	<i>Hemodactylus frenatus</i>			Berlimpah	Tidak dilindungi
		2. Biawak	<i>Varanus solator</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		3. Kadal kebun	<i>Mabuya multi fasciata</i>			Berlimpah	Tidak dilindungi
		4. Kadal	<i>Sphenomorphus (=Carlia) sambalunika</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		5. Kadal	<i>Carlia (=Emoia sambalunika)</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		6. Penyu blimbing	<i>Demochelys corecea</i>		Ternacem		Dilindungi
		7. Penyu hijau	<i>Chelonia mydas</i>		Ternacem		Dilindungi
		8. Penyu lelang	<i>Lepidochelys olivacea</i>		Ternacem		Dilindungi
		9. Penyu pipih	<i>Natator depressa</i>		Ternacem		Dilindungi
		10. Penyu sisik	<i>Eretmochelys imbricata</i>		Ternacem		Dilindungi
		11. Penyu tempayan	<i>Coretta coretta</i>		Ternacem		Dilindungi
		12. Tokek terbang	<i>Draco baschmai</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		13. Tokek	<i>Cnemidophorus gonggong sp. nov.</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		14. Tokek	<i>Lapidodactylus lombocensis</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		15. Tokek	<i>Cryptoblepharus cursor</i>	Endemik			Tidak dilindungi
		16. Ular	<i>Gekko gekko</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		17. Ular	<i>Ahaetulla nasuta</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		18. Ular	<i>Brachymeria reticulatus</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		19. Ular	<i>Cerberus rynchops</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		20. Ular	<i>Caleophthalmus subradiata</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		21. Ular	<i>Cryptolytus insularis</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		22. Ular sanca timur	<i>Phyton timorensis</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		23. Ular python	<i>Python sp.</i>		Terancam		Tidak dilindungi
		24. Ular sanca batik/Ular sawak	<i>Python reticulatus</i>		Terancam		Dilindungi
		25. Ular hijau ekor merah	<i>Trimeresurus albobrunneus</i>		Terancam		Tidak dilindungi

		26. Ular sawak	<i>Phyton rimulus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
4	Amphibia	1. Kodok	<i>Bufo biporcatus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		2. Kodok	<i>Bufo mulonoscitus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		3. Katak pemakan serangga	<i>Fejervarya canrifora</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		4. Katak	<i>Fejervarya limnocharis</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		5. Katak	<i>Kolaola baleta</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		6. Katak	<i>Limnonectes dammermani</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		7. Katak	<i>Limnonectes kadarsani</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		8. Katak	<i>Occordazyga cf floresiana</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		9. Katak	<i>Oreophryne monticola</i>		Terancam	Dilindungi
		10. Katak merah	<i>Rana erythraea</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		11. Katak	<i>Rana florensis</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		12. Katak Sungai	<i>Limnonectes dammermani</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		13. Katak Sungai	<i>Limnonectes macrodon</i>		Terancam	Tidak dilindungi
5	Serangga	1. Belalang Bersungut Pendek	<i>Megaphlaeoba crassiceps</i>	Endemik		Tidak dilindungi
		2. Belalang Bersungut Pendek	<i>Phaeobella lombokensis</i>	Endemik		Tidak dilindungi
		3. Belalang Bersungut Pendek	<i>Phlaeobella sumbawana</i>	Endemik		Tidak dilindungi
		4. Belalang Bersungut Pendek	<i>Phlaeobella tristis</i>	Endemik		Tidak dilindungi
		5. Belalang Bersungut Pendek	<i>Phlaeobella sumbawae</i>	Endemik		Tidak dilindungi
		6. Capung	<i>Drepanosticta berlandi</i>	Endemik		Tidak dilindungi
		7. Kumbang	<i>Aegus acuminatus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		8. Kumbang	<i>Agestrata aruchalca</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		9. Kupu-kupu	<i>Amathusia phidipus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		10. Kumbang	<i>Batacera rubrus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		11. Kumbang	<i>Chrysoderma bimanensis</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		12. Kumbang	<i>Chrysoderma purpureifentris</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		13. Kumbang	<i>Chrysoderma smaragdula</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		14. Kumbang	<i>Dicheras bicornis</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		15. Kumbang	<i>Euryphagus pictus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		16. Kumbang	<i>Penthicades atomaris</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		17. Kumbang	<i>Polyclecty illuminata</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		18. Kumbang	<i>Prosopocoilus fruhstorferi</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		19. Kumbang	<i>Prosopocoilus giraffa</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		20. Kumbang	<i>Salva istharai</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		21. Kumbang	<i>Scamandra tamborana</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		22. Kumbang Tanah	<i>Alectorolophus unilobatus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		23. Kumbang Tanah	<i>Bibracte sumbawana</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		24. Kumbang Tanah	<i>Paralecterolophus subapterus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		25. Kumbang Tanah	<i>Apotomus sumbawanus</i>	Endemik		Tidak dilindungi
		26. Kumbang Tanah	<i>Caelostomus convexior</i>	Endemik		Tidak dilindungi
		27. Kumbang Tanah	<i>Calpodes blotei</i>	Endemik		Tidak dilindungi
		28. Kumbang Tanah	<i>Lebia acutangula</i>	Endemik		Tidak dilindungi
		29. Kumbang Tanah	<i>Pseudoloma andrewesi</i>	Endemik		Tidak dilindungi
		30. Kumbang topeng	<i>Cotacanthus incamates</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		31. Kupu-kupu	<i>Actias groenandaeli</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		32. Kupu-kupu	<i>Actias maenas</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		33. Kupu-kupu	<i>Appias albina</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		34. Kupu-kupu	<i>Appias lyncida</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		35. Kupu-kupu	<i>Atrophaneura nox</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		36. Kupu-kupu	<i>Attacus atlas</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		37. Kupu-kupu	<i>Attacus inopinatus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		38. Kupu-kupu	<i>Cotopsilia pomona</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		39. Kupu-kupu	<i>Cotopsilia pyranthe</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		40. Kupu-kupu	<i>Cotopsilia scylla</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		41. Kupu-kupu	<i>Cepora iudith</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		42. Kupu-kupu	<i>Cethosia hypsea</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		43. Kupu-kupu	<i>Cethosia penthesilea</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		44. Kupu-kupu	<i>Cethosia myrina</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		45. Kupu-kupu	<i>Cethosia tabora</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		46. Kupu-kupu	<i>Charaxes elwesi</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		47. Kupu-kupu	<i>Charaxes acelatus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		48. Kupu-kupu	<i>Cyrestis sp</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		49. Kupu-kupu	<i>Donaus chysippus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		50. Kupu-kupu	<i>Donaus genutia</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		51. Kupu-kupu	<i>Delias oraia</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		52. Kupu-kupu	<i>Delia perihara</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		53. Kupu-kupu	<i>Delias sumbawana</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		54. Kupu-kupu	<i>Deleschalia bisaltide</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		55. Kupu-kupu	<i>Euphaea climena</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		56. Kupu-kupu	<i>Euphaea eunice</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		57. Kupu-kupu	<i>Euphaea mulciber</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		58. Kupu-kupu	<i>Eurema hecabe</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		59. Kupu-kupu	<i>Euthalia aconthea</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		60. Kupu-kupu	<i>Euthalia atalanta</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		61. Kupu-kupu	<i>Euthalia sp</i>		Terancam	Tidak dilindungi

		62. Kupu-kupu	<i>Graphium agamemnon</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		63. Kupu-kupu	<i>Grophium anthipates</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		64. Kupu-kupu	<i>Grophium aristeus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		65. Kupu-kupu	<i>Grophium euryphylus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		66. Kupu-kupu	<i>Grophium sarpedon</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		67. Kupu-kupu	<i>Hebomoia glaucippe</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		68. Kupu-kupu	<i>Hypolimnas bolina</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		69. Kupu-kupu	<i>Hypolimnas sumbawana</i>			
		70. Kupu-kupu	<i>Ideopsis juvena</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		71. Kupu-kupu	<i>Lxias reinwardti</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		72. Kupu-kupu	<i>Jononia iphita</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		73. Kupu-kupu	<i>Leptosia nina</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		74. Kupu-kupu	<i>Lexias aegle</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		75. Kupu-kupu	<i>Melantis leda</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		76. Kupu-kupu	<i>Moduza prochis</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		77. Kupu-kupu	<i>Mycelis horsfieldi</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		78. Kupu-kupu	<i>Mycelis sp</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		79. Kupu-kupu	<i>Neptis hylas</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		80. Kupu-kupu	<i>Paclioa aristolochiae</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		81. Kupu-kupu	<i>Papilia conopus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		82. Kupu-kupu	<i>Papilia demoleus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		83. Kupu-kupu	<i>Papilia demolian</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		84. Kupu-kupu	<i>Papilia helenus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		85. Kupu-kupu	<i>Papilia memnon</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		86. Kupu-kupu	<i>Papilia peranthus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		87. Kupu-kupu	<i>Papilia polytes</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		88. Kupu-kupu	<i>Polyurapeckius</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		89. Kupu-kupu	<i>Polyura alphius</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		90. Kupu-kupu	<i>Polyura galaxia</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		91. Kupu-kupu	<i>Polyura hebe</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		92. Kupu-kupu	<i>Trumala hamata</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		93. Kupu-kupu raja heliphron	<i>Troides heliphron</i>		Terancam	Dilindungi
		94. Kupu-kupu raja helena	<i>Troides helena</i>		Terancam	Dilindungi
6	Molusca	1. Kima kecil	<i>Tridocna maxima</i>		Terancam	Dilindungi
		2. Kima pasir	<i>Hippopus</i>		Terancam	Dilindungi
		3. Kima raksasa	<i>Tridocna gigas</i>		Terancam	Dilindungi
		4. Kima selatan	<i>Tridocna derasa</i>		Terancam	Dilindungi
		5. Kima sisik	<i>Tridocna squamasa</i>		Terancam	Dilindungi
		6. Siput hijau	<i>Turbomarmoratus</i>		Terancam	Dilindungi
		7. Triton trompet	<i>Charonia tritonis</i>		Terancam	Dilindungi
		8. Troka	<i>Trochus niloticus</i>		Terancam	Dilindungi
		9. Karang kepala kambing	<i>Cassis cornuta</i>		Terancam	Dilindungi
7	Karang / Coral	1. Akar bahar	<i>Antiphatas spp.</i>		Terancam	Dilindungi
		2. Karang/coral	<i>Acropora aculeus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		3. Karang/coral	<i>Acropora acuminota</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		4. Karang/coral	<i>Acropora aspera</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		5. Karang/coral	<i>Acropora cerealis</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		6. Karang/coral	<i>Acropora cytherea</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		7. Karang/coral	<i>Acropora danai</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		8. Karang/coral	<i>Acropora dendrum</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		9. Karang/coral	<i>Acropora divaricata</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		10. Karang/coral	<i>Acropora echinata</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		11. Karang/coral	<i>Acropora elseyi</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		12. Karang/coral	<i>Acropora florida</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		13. Karang/coral	<i>Acropora formosa</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		14. Karang/coral	<i>Acropora gemmifera</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		15. Karang/coral	<i>Acropora granulosa</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		16. Karang/coral	<i>Acropora horrescens</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		17. Karang/coral	<i>Acropora humilis</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		18. Karang/coral	<i>Acropora hyacinthus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		19. Karang/coral	<i>Acropora latistella</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		20. Karang/coral	<i>Acropora microphthaima</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		21. Karang/coral	<i>Acropora millepora</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		22. Karang/coral	<i>Acropora nona</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		23. Karang/coral	<i>Acropora nasuta</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		24. Karang/coral	<i>Acropora noibilis</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		25. Karang/coral	<i>Acropora polifera</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		26. Karang/coral	<i>Acropora peniculata</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		27. Karang/coral	<i>Acropora plana</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		28. Karang/coral	<i>Acropora polystoma</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		29. Karang/coral	<i>Acropora samoensis</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		30. Karang/coral	<i>Acropora secalae</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		31. Karang/coral	<i>Acropora selaga</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		32. Karang/coral	<i>Acropora subgiabra</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		33. Karang/coral	<i>Acropora suharsoleae</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		34. Karang/coral	<i>Acropora tenuis</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		35. Karang/coral	<i>Acropora verenciannesi</i>		Terancam	Tidak dilindungi

	36.	Karang/coral	<i>Acropora vaughami</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	37.	Karang/coral	<i>Acropora yangei</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	38.	Karang/coral	<i>Alveopora fenestrata</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	39.	Karang/coral	<i>Alveopora verilliana</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	40.	Karang/coral	<i>Alveopora forbesi</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	41.	Karang/coral	<i>Alveopora mathai</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	42.	Karang/coral	<i>Alveopora poertangalare</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	43.	Karang/coral	<i>Blastamassa wellsi</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	44.	Karang/coral	<i>Catalaphyllia jardineri</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	45.	Karang/coral	<i>Cascincastrea exesa</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	46.	Karang/coral	<i>Cascincastrea sp.</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	47.	Karang/coral	<i>Cynaria lacrymalis</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	48.	Karang/coral	<i>Dendranephtea spp.</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	49.	Karang/coral	<i>Dendranephtea fistala</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	50.	Karang/coral	<i>Diaseris fragilis</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	51.	Karang/coral	<i>Deploastrea hellapora</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	52.	Karang/coral	<i>Echinapora lamellasa</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	53.	Karang/coral	<i>Echinapora sp.</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	54.	Karang/coral	<i>Echinapora speciosa</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	55.	Karang/coral	<i>Euphyllia cristata</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	56.	Karang/coral	<i>Euphyllia glabrescens</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	57.	Karang/coral	<i>Favia maritime</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	58.	Karang/coral	<i>Favia russeli</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	59.	Karang/coral	<i>Favia speciosa</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	60.	Karang/coral	<i>Favites spp</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	61.	Karang/coral	<i>Fungia fungites</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	62.	Karang/coral	<i>Fungia paupotensis</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	63.	Karang/coral	<i>Fungia Spp.</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	64.	Karang/coral	<i>Galaxea fascicularis</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	65.	Karang/coral	<i>Galaxea australiensis</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	66.	Karang/coral	<i>Galaxea retiformis</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	67.	Karang/coral	<i>Galaxea lobata</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	68.	Karang/coral	<i>Galaxea minor</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	69.	Karang/coral	<i>Galaxea pendulus</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	70.	Karang/coral	<i>Galaxea stakesi</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	71.	Karang/coral	<i>Heliopora actiniformis</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	72.	Karang/coral	<i>Heliopora coerulea</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	73.	Karang/coral	<i>Hepolitha limax</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	74.	Karang/coral	<i>Herpolitha sp</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	75.	Karang/coral	<i>Hydnophora exesa</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	76.	Karang/coral	<i>Hydnophora rigita</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	77.	Karang/coral	<i>Hydnophora exesa</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	78.	Karang/coral	<i>Hydnophora pilosa</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	79.	Karang/coral	<i>Hydnophora rigida</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	80.	Karang/coral	<i>Issis sp.</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	81.	Karang/coral	<i>Liptoseris explanata</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	82.	Karang/coral	<i>Liptoseris sp.</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	83.	Karang/coral	<i>Labophyllia corymbosa</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	84.	Karang/coral	<i>Labophyllia hemprichi</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	85.	Karang/coral	<i>Labophyllia spp.</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	86.	Karang/coral	<i>Merulina sp.</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	87.	Karang/coral	<i>Montastraea magnistellata</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	88.	Karang/coral	<i>Montipora danae</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	89.	Karang/coral	<i>Montipora digitata</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	90.	Karang/coral	<i>Montipora digitata</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	91.	Karang/coral	<i>Montipora spp</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	92.	Karang/coral	<i>Montipora tuberculata</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	93.	Karang/coral	<i>Montipora verucosa</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	94.	Karang/coral	<i>Nemanzophyllia turbida</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	95.	Karang/coral	<i>Nepthera spp.</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	96.	Karang/coral	<i>Pochyseris gemmacea</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	97.	Karang/coral	<i>Pochyseris lommelosa</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	98.	Karang/coral	<i>Pochyseris speciosa</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	99.	Karang/coral	<i>Palauastrea remosa</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	100.	Karang/coral	<i>Paraclavaria triangularis</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	101.	Karang/coral	<i>Pavana sp.</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	102.	Karang/coral	<i>Pavana varians</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	103.	Karang/coral	<i>Pectinia lactuca</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	104.	Karang/coral	<i>Pectinia sp.</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	105.	Karang/coral	<i>Pleragyra daedalea</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	106.	Karang/coral	<i>Pleragyra Lamellose</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	107.	Karang/coral	<i>Pleragyra sinuasa</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	108.	Karang/coral	<i>Plesiatrea versipora</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	109.	Karang/coral	<i>Plumigorgia hydraides</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	110.	Karang/coral	<i>Pocillopora domicornis</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	111.	Karang/coral	<i>Pocillopora eydouxii</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	112.	Karang/coral	<i>Pocillopora meandriana</i>	Terancam	Tidak dilindungi

		113. Karang/coral	<i>Pocillopora verucora</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		114. Karang/coral	<i>Porites lobata</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		115. Karang/coral	<i>Porites rus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		116. Karang/coral	<i>Porites cylindrica</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		117. Karang/coral	<i>Porites lichen</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		118. Karang/coral	<i>Porites spp.</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		119. Karang/coral	<i>Psammocora profundacella</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		120. Karang/coral	<i>Pasamodocora sp</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		121. Karang/coral	<i>Rumphella sp.</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		122. Karang/coral	<i>Soracophythin spp.</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		123. Karang/coral	<i>Seriatapora callendrum</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		124. Karang/coral	<i>Seriatapora hystris</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		125. Karang/coral	<i>Sinularia spp.</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		126. Karang/coral	<i>Stylopora pestilia</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		127. Karang/coral	<i>Symphyllia orgaricia</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		128. Karang/coral	<i>Symphyllia sp.</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		129. Karang/coral	<i>Symphyllia wilsoni</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		130. Karang/coral	<i>Tubastraea micranta</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		131. Karang/coral	<i>Tubastraea stellata</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		132. Karang/coral	<i>Tubastraea musica</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		133. Karang/coral	<i>Tubastraea masenterina</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		134. Karang/coral	<i>Xenia sp</i>		Terancam	Tidak dilindungi
8	Ikan / Pisces	1. Ikan layaran	<i>Heniochus sp</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		2. Ikan kakap	<i>Lutjanus fulviflamma</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		3. Ikan botana nasio	<i>Naso liferatus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		4. Ikan keeling jenngot	<i>Parupeneus spp.</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		5. Ikan kerapu susu	<i>Plectropomus maculatus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		6. Ikan bluestrone asli	<i>Pomacanthus imperator</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		7. Ikan enjel	<i>Pomacanthus spp</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		8. Ikan enjel doreng padang	<i>Pomacanthus diacanthus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		9. Ikan moris	<i>Zanclus conesceus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		10. Ikan burung laut	<i>Zebrasoma scopas</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		11. Ikan sebelah	<i>Psettodidae</i>		Berlimpah	Tidak dilindungi
		12. Ikan karang	<i>Ephibulus insidiator</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		13. Ikan karang	<i>Epinephelus quoyanus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		14. Ikan karang	<i>Gymnotorax zonipectus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		15. Ikan karang	<i>Halichoeres chrysus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		16. Ikan karang	<i>Halichoeres hortulanus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		17. Ikan karang	<i>Halichoeres melanurus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		18. Ikan karang	<i>Halichoeres purpurascens</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		19. Ikan karang	<i>Halichoeres schwaertzi</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		20. Ikan karang	<i>Halichoeres acuminatus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		21. Ikan karang	<i>Hemigymnus fuscatus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		22. Ikan karang	<i>Heniaichus varius</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		23. Ikan karang	<i>Labroides dimidiatus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		24. Ikan karang	<i>Lepidozygus topeinosoma</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		25. Ikan karang	<i>Leptojuilis cyanopleura</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		26. Ikan karang	<i>Lethrinus obsoletus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		27. Ikan karang	<i>Lutjanus bohor</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		28. Ikan karang	<i>Lutjanus decussates</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		29. Ikan karang	<i>Lutjanus erenbergghi</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		30. Ikan karang	<i>Lutjanus quinquelineatus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		31. Ikan karang	<i>Monotaxis gradoculus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		32. Ikan karang	<i>Mullalides vonicalensis</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		33. Ikan karang	<i>Naso lituratus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		34. Ikan karang	<i>Odonas niger</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		35. Ikan karang	<i>Ostracion melegris</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		36. Ikan karang	<i>Oxymonochanthus longirastis</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		37. Ikan karang	<i>Paracirrhites arcatus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		38. Ikan karang	<i>Paracirrhites fosteri</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		39. Ikan karang	<i>Paracirrhites tetracantha</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		40. Ikan karang	<i>Paracirrhites xanthosoma</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		41. Ikan karang	<i>Paracirrhites barberinus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		42. Ikan karang	<i>Paracirrhites bifasciatus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		43. Ikan karang	<i>Paracirrhites multifasciatus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		44. Ikan karang	<i>Paracirrhites signatus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		45. Ikan karang	<i>Pentapodus trivittatus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		46. Ikan karang	<i>Plagiotremus rhinorhynchus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		47. Ikan karang	<i>Plectorhynchus choetodonoides</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		48. Ikan karang	<i>Plectorhynchus goldmanni</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		49. Ikan karang	<i>Plectorhynchus orientalis</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		50. Ikan karang	<i>Pomacanthus orientalis</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		51. Ikan karang	<i>Pomacanthus imperator</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		52. Ikan karang	<i>Pomacanthus sexstriator</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		53. Ikan karang	<i>Pomacanthus alexanderiae</i>		Terancam	Tidak dilindungi
		54. Ikan karang	<i>Pormacentrus amboinensis</i>		Terancam	Tidak dilindungi

		55. Ikan karang	<i>Pomacentrus coeruleus</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		56. Ikan karang	<i>Pomacentrus chrysurus</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		57. Ikan karang	<i>Pomacentrus coelestis</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		58. Ikan karang	<i>Pomacentrus lepidogenys</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		59. Ikan karang	<i>Pomacentrus moluccensis</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		60. Ikan karang	<i>Pomacentrus vaiuli</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		61. Ikan karang	<i>Pomacentrus wardi</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		62. Ikan karang	<i>Pseudanthias dispar</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		63. Ikan karang	<i>Pseudanthias hutchie</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		64. Ikan karang	<i>Pseudanthias squamipinnis</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		65. Ikan karang	<i>Pseudanthias tuko</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		66. Ikan karang	<i>Pseudanthias evides</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		67. Ikan karang	<i>Pseudanthias magnifica</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		68. Ikan karang	<i>Pseudanthias tile</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		69. Ikan karang	<i>Pseudanthias trilineata</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		70. Ikan karang	<i>Pterois antennata</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		71. Ikan karang	<i>Pygopites diacanthus</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		72. Ikan karang	<i>Solarias sp.</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		73. Ikan karang	<i>Sargocentron caudimaculatum</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		74. Ikan karang	<i>Sargocentron melanospilos</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		75. Ikan karang	<i>Scarus bleekeri</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		76. Ikan karang	<i>Scarus capistratoides</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		77. Ikan karang	<i>Scarus flatipectoralis</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		78. Ikan karang	<i>Scarus ghobban</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		79. Ikan karang	<i>rubroviolaceus</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		80. Ikan karang	<i>Scarus vivolatus</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		81. Ikan karang	<i>Scarus billineat</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		82. Ikan karang	<i>Scarus margaritifler</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		83. Ikan karang	<i>Scarus trilineata</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		84. Ikan karang	<i>Siganus guttatus</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		85. Ikan karang	<i>Siganus vulpinus</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		86. Ikan karang	<i>Siganus fosteri</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		87. Ikan karang	<i>Schyaena sp</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		88. Ikan karang	<i>Stethojulis bandanensis</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		89. Ikan karang	<i>Stethojulis strigiventer</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		90. Ikan karang	<i>Stethojulis trilineata</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		91. Ikan karang	<i>Thalassoma hardwickii</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		92. Ikan karang	<i>Thalassoma janseni</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		93. Ikan karang	<i>Thalassoma lunare</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		94. Ikan karang	<i>Valincienna strigata</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		95. Ikan keeling jenggot	<i>Variola louti</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		96. Ikan kenari model	<i>Parupeneus spp</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		97. Ikan kepe	<i>Cheilinus fastiatus</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		98. Ikan kepe	<i>Chaetodon baronnesa</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		99. Ikan kepe	<i>Chaetodon spp.</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		100. Ikan kepe tiker	<i>Chaetodon trifasciatus</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		101. Ikan kerapu susu	<i>Chaetodon vagabundus</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		102. Ikan laut	<i>Plectropomus maculatus</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		103. Ikan layaran	<i>Cephalopholis miniata</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		104. Ikan morish	<i>Heniochus sp.</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		105. Ikan napoleon wrasse	<i>Zancius canescens</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		106. Ikan napoleon wrasse	<i>Chelinus unduratus</i>	Terancam	Tidak dilindungi
II.	FLORA	1. Adas manis	<i>Anethum graveolens</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		2. Ajan	<i>Diospyros sp.</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		3. Akar telur	<i>Stephania japonica</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		4. Akasia	<i>Acacia auriculiformis</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		5. Alang-lang	<i>Imperata cylindrica</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		6. Ampupu	<i>Eucalyptus deglupa</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		7. Andong	<i>Cordyline terminalis</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		8. Anggrek tanah	<i>Corymbarchis veratirifolia</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		9. Api-api	<i>Avicennia sp.</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		10. Api-api	<i>Avicennia lanata</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		11. Api-api	<i>Avicennia alba</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		12. Api-api putih	<i>Avicennia marina</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		13. Ara bote		Terancam	Tidak dilindungi
		14. Are	<i>Ficus racemasa</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		15. Aren	<i>Arenga piñata</i>		Berlimpah Tidak dilindungi
		16. Aru	<i>Caesalpinia bodus</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		17. Asam	<i>Tamrindus indica</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		18. Asam londo	<i>Pithecellobium duce bth</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		19. Awar-awar	<i>Ficus sp.</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		20. Badung	<i>Garcinia lateriflora</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		21. Bajur	<i>Pterospermum jawanicum</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		22. Bakau	<i>Rhisopora mucronata</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		23. Bakau	<i>Rhisopora sylosa</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		24. Bakau	<i>Rhisopora apiculata</i>	Terancam	Tidak dilindungi
		25. Bakau	<i>Rhisopora, sp.</i>	Terancam	Tidak dilindungi

	26.	Bakung-bakung	<i>Scaevola taccoda</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	27.	Beleman			Terancam		Tidak dilindungi
	28.	Bambu	<i>Bambusa sp.</i>			Berlimpah	Tidak dilindungi
	29.	Bantotan	<i>Ageratum conyzoides</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	30.	Bara bawi	<i>Villebrunea rubescens</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	31.	Baralimpe			Terancam		Tidak dilindungi
	32.	Baru bawa			Terancam		Tidak dilindungi
	33.	Baru-baru	<i>Osbornia octodonta</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	34.	Bebalang			Terancam		Tidak dilindungi
	35.	Bebanitan	<i>Petungga microcarpa</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	36.	Bebatu	<i>Astonia spectabilis</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	37.	Bebeluk	<i>Euodia glabra</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	38.	Beberas			Terancam		Tidak dilindungi
	39.	Bebile	<i>Centella asiatica</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	40.	Becek			Terancam		Tidak dilindungi
	41.	Belimbing wuluh	<i>Overrhoabilimbi</i>			Berlimpah	Tidak dilindungi
	42.	Benaro			Terancam		Tidak dilindungi
	43.	Bengkai	<i>Neuclea orientalis</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	44.	Bengkel talun	<i>Neuclea subdita</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	45.	Bentaeng	<i>Beilsch media sp.</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	46.	Bentunu	<i>Melochia umbellate</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	47.	Benut kodek	<i>Ficus ampelas</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	48.	Berarak			Terancam		Tidak dilindungi
	49.	Beras			Terancam		Tidak dilindungi
	50.	Beringin	<i>Ficus benjamina</i>			Berlimpah	Tidak dilindungi
	51.	Benora	<i>Kleinhovia hospital</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	52.	Beru	<i>Dysoxylum caulastachyum</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	53.	Beru	<i>Garuga floribunda</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	54.	Bidara	<i>Ziziphus mauritiana</i>			Berlimpah	Tidak dilindungi
	55.	Bidara	<i>Ziziphus jujube</i>			Berlimpah	Tidak dilindungi
	56.	Bidara cina	<i>Ziziphus tomorensis</i>			Berlimpah	Tidak dilindungi
	57.	Binong	<i>Tetrameles nudiflora</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	58.	Bintangor	<i>Callophyllum saulatri</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	59.	Bintangur	<i>Callophyllum sp.</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	60.	Bongo			Terancam		Tidak dilindungi
	61.	Boruno			Terancam		Tidak dilindungi
	62.	Buah puin			Terancam		Tidak dilindungi
	63.	Buah odak mama	<i>Planchonella obovata</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	64.	Buah odak nina	<i>Planchonella notida</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	65.	Bujak	<i>Anomum sp.</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	66.	Bulu			Terancam		Tidak dilindungi
	67.	Bunga api hutan	<i>Clerodendron compressum</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	68.	Baunga api-api	<i>Clerodendron speciosissimum</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	69.	Bunga melur			Terancam		Tidak dilindungi
	70.	Bunga panjang	<i>Elephantopus</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	71.	Bungur	<i>Logerstroemia speciosa pers</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	72.	Buni	<i>Antidesma bunius</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	73.	Bunut	<i>Ficus variegata</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	74.	Bunut tandan	<i>Ficus quercifolia</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	75.	Busur	<i>Acacia fomesiana</i>				
	76.	Cabe hutan			Terancam		Tidak dilindungi
	77.	Cabe hutan	<i>Pipier sp.</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	78.	Cakar ayam	<i>Pipier retrofractum</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	79.	Calincing gede	<i>Oxalis corymbosa</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	80.	Camar nyawa	<i>Conyza sp.</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	81.	Cawa wera			Terancam		Tidak dilindungi
	82.	Cemara	<i>Casuarina junghuhniana</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	83.	Cemara laut	<i>Casuarina equisetifolia</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	84.	Cempaka kuning	<i>Michela campaca</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	85.	Cempaka putih	<i>Michela alba</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	86.	Cengkeh	<i>Syzygium aromaticum</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	87.	Cermen hutan	<i>Micromelum minutum</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	88.	Ciplukan	<i>Physalis angulata</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	89.	Cocor bebek	<i>Kalanchoe pinnata</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	90.	Coklat	<i>Theobroma cacao</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	91.	Crème hutan	<i>Phyllanthus acidus</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	92.	Dadap	<i>Erythrina orientalis</i>			Berlimpah	Tidak dilindungi
	93.	Dadap	<i>Erythrina sp</i>			Berlimpah	Tidak dilindungi
	94.	Dadap	<i>Erythrina longipes</i>			Berlimpah	Tidak dilindungi
	95.	Dadap serep	<i>Erythrina sumbrans</i>				Tidak dilindungi
	96.	Dahu	<i>Dracontomelon sp.</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	97.	Damar	<i>Agathis sp.</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	98.	Dangar			Terancam		Tidak dilindungi
	99.	Dao daun besar	<i>Dracontomelon mangiferum</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	100.	Dao daun kecil	<i>Dracontomelon dao</i>		Terancam		Tidak dilindungi
	101.	Daramonge			Terancam		Tidak dilindungi
	102.	Daun putri	<i>Mussaenda incana</i>		Terancam		Tidak dilindungi

	103. Daun ungu	<i>Grathophyllum pictum</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	104. Dedilem		Terancam	Tidak dilindungi
	105. Dope	<i>Bauhinia sp.</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	106. Duabanga	<i>Duabanga moluccana</i>	Terancam	Dilindungi
	107. Duku	<i>Lansium domesticum</i>	Berlimpah	Tidak dilindungi
	108. Durian	<i>Durio zibethinus</i>	Berlimpah	Tidak dilindungi
	109. Durian	<i>Ochromonas lagopooides</i>	Berlimpah	Tidak dilindungi
	110. Duwet	<i>Eugenia cumini</i>	Berlimpah	Tidak dilindungi
	111. Enceng gondok	<i>Eichhornia crassipes</i>	Berlimpah	Tidak dilindungi
	112. Elak		Terancam	Tidak dilindungi
	113. Eler		Terancam	Tidak dilindungi
	114. Embur	<i>Trevesia sundaica</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	115. Endong-endongan	<i>Xanthophyllum excelsum</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	116. Erlak	<i>Dysoxylum sericeum</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	117. Falmboyan	<i>Delonix regia</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	118. Gadung	<i>Dioscorea hispida</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	119. Gadung tikus	<i>Tacca palimate</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	120. Gaharu	<i>Grinaps verstepghii</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	121. Gamal	<i>Gliricidia linfolia</i>	Berlimpah	Tidak dilindungi
	122. Gamal	<i>Gliricidia sepium</i>	Berlimpah	Tidak dilindungi
	123. Gambir laut	<i>Clerodendron inerme</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	124. Gandarusa	<i>Justicia gendarussa</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	125. Ganitri	<i>Elaeocarpus sphaericus</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	126. Garu	<i>Dysoxylum densiflorum</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	127. Gatep	<i>Samadera indica</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	128. Gageli		Terancam	Tidak dilindungi
	129. Gelang laut	<i>Sesuvium portulacastrum</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	130. Gelang laut	<i>Swedia maritime</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	131. Generong		Terancam	Tidak dilindungi
	132. Genjeling		Terancam	Tidak dilindungi
	133. Gewor	<i>Commelina diffusa</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	134. Gewor	<i>Murdania mudiflora</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	135. Gewor tali korang	<i>Commelina benghalensis</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	136. Glepu/Teteran/Kalimbambang	<i>Acaur nivaum</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	137. Girang	<i>Leea acuelata</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	138. Girang	<i>Leea aequata</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	139. Girang	<i>Tetrastigma sp</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	140. Girang, leea"Burgundy"	<i>Leea coccinea</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	141. Glodongan tiang	<i>Polyalthia longifolia</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	142. Gomez	<i>Richardia basilensi</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	143. Gurugedek	<i>Ervatamia sp</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	144. Heci	<i>Canarium olesum</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	145. Herba	<i>Pilea numularifolia</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	146. Huwi	<i>Dioscorea alata</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	147. Huwi buah	<i>Dioscorea bulbifera</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	148. Ipil	<i>Intsia bijuga</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	149. Iwis	<i>Corypha utan</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	150. Jabon	<i>Anthocephalus chinensis</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	151. Jakatuwa	<i>Scoparia dulcis</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	152. Jalantil	<i>Erigeron sumtensis</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	153. Jambu batu	<i>Psidium guajava</i>	Berlimpah	Tidak dilindungi
	154. Jambu dersana	<i>Syzgium malaccensis</i>	Berlimpah	Tidak dilindungi
	155. Jambu hutan	<i>Eugenia sp.</i>	Berlimpah	Tidak dilindungi
	156. Jambu hutan	<i>Eugenia polyantha</i>	Berlimpah	Tidak dilindungi
	157. Jambu hutan	<i>Eugenia subglauca</i>	Berlimpah	Tidak dilindungi
	158. Jambu hutan	<i>Metrosideros vera</i>	Berlimpah	Tidak dilindungi
	159. Jambu mete	<i>Anacardium occidentale</i>	Berlimpah	Tidak dilindungi
	160. Jarak	<i>Jatropha padagrica</i>	Berlimpah	Tidak dilindungi
	161. Jarak	<i>Jatropha curcas</i>	Berlimpah	Tidak dilindungi
	162. Jarong	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i>	Berlimpah	Tidak dilindungi
	163. Jati	<i>Tectona grandis</i>	Berlimpah	Tidak dilindungi
	164. Jati pasir	<i>Scaevolia frutescens</i>	Berlimpah	Tidak dilindungi
	165. Jati putih	<i>Gmelina arborea</i>	Berlimpah	Tidak dilindungi
	166. Jawan	<i>Aphanamyxix polistachia</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	167. Jelanten biasa	<i>Laportea stimulans</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	168. Jelanten kerbau	<i>Laportea decumana</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	169. Jelanten manuk	<i>Fleurya interrupta</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	170. Jeliman		Terancam	Tidak dilindungi
	171. Jeluntung		Terancam	Tidak dilindungi
	172. Jelintung	<i>Dyera sp.</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	173. Jempiring hutan	<i>Gardenia tubifera</i>	Berlimpah	Tidak dilindungi
	174. Jeruju hitam	<i>Acanthus ilicifolius</i>	Berlimpah	Tidak dilindungi
	175. Jeruk	<i>Citrus sp.</i>	Berlimpah	Tidak dilindungi
	176. Jeruk limau	<i>Citrus amblycarpa</i>	Berlimpah	Tidak dilindungi
	177. Johar	<i>Cassia siamea</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	178. Johar hutan	<i>Cassia sp.</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	179. Jontang	<i>Spilanthes iabadicensis</i>	Terancam	Tidak dilindungi

	180. Jowet	<i>Eugenia cumini</i>		Berlimpah	Tidak dilindungi
	181. Jakut carang	<i>Polygonium barbatum</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	182. Jakut ibun	<i>Drymaria cordata</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	183. Jakut lameta	<i>Leersia hexandra</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	184. Kaca piring	<i>Gordenia jasminoides</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	185. Kacemcem	<i>Spondias pinnata</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	186. Kahihutan	<i>Poederia foetida</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	187. Kakekeh	<i>Drynaria sp</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	188. Kakin bunga		Terancam		Tidak dilindungi
	189. Kaktus	<i>Eriosyce imitans</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	190. Kalagemang	<i>Croton sp.</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	191. Kaleang		Terancam		Tidak dilindungi
	192. Kaliandra	<i>Calliandra colothyrsus</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	193. Kalimambang		Terancam		Tidak dilindungi
	194. Kalimuta	<i>Excoecaria agallocha</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	195. Kalimuntung	<i>Rubus fraxinifolius</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	196. Kamboja	<i>Plumeria acuminata</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	197. Kapal baru		Terancam		Tidak dilindungi
	198. Kapuk randu	<i>Ceiba pentandra</i>		Berlimpah	Tidak dilindungi
	199. Kapuk hutan	<i>Bombax malabricum</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	200. Karanga		Terancam		Tidak dilindungi
	201. Kasane		Terancam		Tidak dilindungi
	202. Kasrie		Terancam		Tidak dilindungi
	203. Kasuk		Terancam		Tidak dilindungi
	204. Katekek		Terancam		Tidak dilindungi
	205. Katelo		Terancam		Tidak dilindungi
	206. Katsuri	<i>Abelmoschus moschatus</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	207. Kayu angel	<i>Actinodaphne sphaerocarpa</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	208. Kayu banten	<i>Lannea coromandelica</i>		Berlimpah	Tidak dilindungi
	209. Kayu batu	<i>Dacryodes costata</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	210. Kayu bentenu	<i>Melochia umbellata</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	211. Kayu duren	<i>Arcisia myrsicifolia</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	212. Kayu hitam	<i>Polyalthia lateriflora</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	213. Kayu je		Terancam		Tidak dilindungi
	214. Kayu kaleang		Terancam		Tidak dilindungi
	215. Kayu kaleang	<i>Pterospermum difersifolium</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	216. Kayu kopi	<i>Coffea robusta</i>		Berlimpah	Tidak dilindungi
	217. Kayu kuping		Terancam		Tidak dilindungi
	218. Kayu meme		Terancam		Tidak dilindungi
	219. Kayu pade		Terancam		Tidak dilindungi
	220. Kayu pait		Terancam		Tidak dilindungi
	221. Kayu pingan		Terancam		Tidak dilindungi
	222. Kayu pinyit		Terancam		Tidak dilindungi
	223. Kayu prapen	<i>Mollutus dispar</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	224. Kayu putih	<i>Eucalyptus alba</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	225. Kayu salamiung		Terancam		Tidak dilindungi
	226. Kayu sangkerang		Terancam		Tidak dilindungi
	227. Kayu tawar		Terancam		Tidak dilindungi
	228. Kayu ular/belek		Terancam		Tidak dilindungi
	229. Kecapi	<i>Sandoricum koetjape</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	230. Kecincang	<i>Nicolaia speciosa</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	231. Kedelean	<i>Crotalaria linifolia</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	232. Kedondong	<i>Spandias sp.</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	233. Kedondong hutan	<i>Spandias mambin</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	234. Kekungkung			Berlimpah	Tidak dilindungi
	235. Keladi hias	<i>Caladium bicolor</i>		Berlimpah	Tidak dilindungi
	236. Keladi rambat	<i>Syngonium padaphyllum</i>		Berlimpah	Tidak dilindungi
	237. Keladi-keladian	<i>Alacasia sp.</i>		Berlimpah	Tidak dilindungi
	238. Kelak		Terancam		Tidak dilindungi
	239. Kelanir	<i>Albizia placera</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	240. Kelanir	<i>Albizia placera</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	241. Kelapa	<i>Cococs nucifera</i>		Berlimpah	Tidak dilindungi
	242. Keleneng	<i>Syzygium sp.</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	243. Keliandra merah	<i>Calliandra calothyrsus</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	244. Kelicung	<i>Diospyras malabarica</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	245. Kelor	<i>Maringa oliefera</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	246. Keluwak	<i>Pengium edule</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	247. Kemangi gawah	<i>Ocimum sp.</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	248. Kemayung	<i>Axanopus compressus</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	249. Kembang bugang	<i>Clerodendron calamitosum</i>	Terancam		Tidak dilindungi
	250. Kembang sepatu	<i>Hibiscus rosinensis</i>		Berlimpah	Tidak dilindungi
	251. Kembang sepatu	<i>Hibiscus sabdarifa</i>		Berlimpah	Tidak dilindungi
	252. Kembang sepatu	<i>Malvaviscus arboreus</i>		Berlimpah	Tidak dilindungi
	253. Kambeang			Berlimpah	Tidak dilindungi
	254. Kemiri	<i>Aleurites moluccana</i>		Berlimpah	Tidak dilindungi
	255. Kemuning gawah	<i>Micromelum minitum</i>		Berlimpah	Tidak dilindungi
	256. Kenanga	<i>Cananga odorata</i>	Terancam		Tidak dilindungi

	257. Kenanga hutan	<i>Cananga sp.</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	258. Kenangas		Terancam	Tidak dilindungi
	259. Kenari	<i>Canariicum javan</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	260. Kapel	<i>Stelechocarpus sp.</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	261. Kepuh	<i>Sterculia foetida</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	262. Kepundung gawah	<i>Baccaurea recemosa</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	263. Kerepeh		Terancam	Tidak dilindungi
	264. Kerinyuh	<i>Euphatorium adoratum</i>	Berlimpah	Tidak dilindungi
	265. Kesambi	<i>Schleichera oleosa</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	266. Kesenek		Terancam	Tidak dilindungi
	267. Kesumbang bawi	<i>Sonchusarvensis</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	268. Ketak/kayu kawat	<i>Lygodium cicutatum</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	269. Ketantong		Terancam	Tidak dilindungi
	270. Ketapang	<i>Terminalia catapa</i>	Berlimpah	Tidak dilindungi
	271. Ketapisano		Terancam	Tidak dilindungi
	272. Kuntumung buntit		Terancam	Tidak dilindungi
	273. Ketimus	<i>Protium vulgare</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	274. Ketimus	<i>Protium javanicum</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	275. Ketumpangan	<i>Pilea microphylla</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	276. Ketuk manuk	<i>Chlorathus officialis</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	277. Kihujan	<i>Samanean saman</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	278. Kimpul	<i>Xanthosoma violaceum</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	279. Kinca/Kawista	<i>Limonia acidissima</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	280. Kirinyuh	<i>Euphatorium adoratum</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	281. Klicik	<i>Buchanania sessilifolia</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	282. Klokos udang	<i>Syzgium javanica</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	283. Koak	<i>Ficus fistulasa</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	284. Kolobemang		Terancam	Tidak dilindungi
	285. Kopi	<i>Coffe arabica</i>	Berlimpah	Tidak dilindungi
	286. Kopi hutan	<i>Ixora sp.</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	287. Kopi-kopian		Terancam	Tidak dilindungi
	288. Kowo aik	<i>Hyptis capitata</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	289. Krerong	<i>Eriglossum rubiginosum</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	290. Krikis	<i>Actinodaphne sp</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	291. Krokot	<i>Althenantera sp</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	292. Kumbi buah hijau	<i>Voacanga sp</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	293. Kumbi buah kuning	<i>Ervatomia sphaeracarpa</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	294. Kumis kucing	<i>Asystasis sp</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	295. Laban	<i>Vitex pupescens</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	296. Lada hutan	<i>Piper bantamense</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	297. Lamtoro	<i>Leucaena glauca benth</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	298. Lamun	<i>Enhalus acoroides</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	299. Lamun	<i>Halophila ovalis</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	300. Lamun	<i>Halophila minor</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	301. Lamun	<i>Thalassia hemprichii</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	302. Lamun	<i>Cymodocea ratundata</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	303. Lamun	<i>Cymodoce serrulata</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	304. Lamun	<i>Halodule univervis</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	305. Lamun	<i>Halodule pinifolia</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	306. Lamun	<i>Syringodium isoitifolium</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	307. Lamun	<i>Cymodoce serrulata</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	308. Laggem		Terancam	Tidak dilindungi
	309. Langon	<i>Salvia occidentalis</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	310. Lanu	<i>Salvia accidentalis</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	311. Lasi	<i>Homallium sp.</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	312. Lebek	<i>Lumnitzera racemosa</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	313. Lelengis	<i>Albizia lebeck</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	314. Lemayang	<i>Claoxylon erythrophyllum</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	315. Lemokek	<i>Ficus septic</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	316. Lempajor	<i>Lansium sp</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	317. Lempeak	<i>Dysoxylum gaudichaudianum</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	318. Lempeni	<i>Ardisia sp</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	319. Lempinyuh	<i>Blumeodendron tokbral</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	320. Lempinyuh	<i>Mallotus sp</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	321. Lempuyang	<i>Zingiber americans</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	322. Lempuyang	<i>Antrocephalus cadamba</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	323. Lemudu	<i>Lasianthus sp</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	324. Lengkoat		Terancam	Tidak dilindungi
	325. Lapus	<i>Polyscias nodosa</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	326. Lesiat		Terancam	Tidak dilindungi
	327. Lesuni		Terancam	Tidak dilindungi
	328. Liana	<i>Cissus discolor</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	329. Liana hias	<i>Cissus sp.</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	330. Libi	<i>Eugenia densiflora</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	331. Lili paris	<i>Clorophytum sp</i>	Terancam	Tidak dilindungi
	332. Lilit moyang		Terancam	Tidak dilindungi
	333. Lingua	<i>Pteracarpus indiscus</i>	Terancam	Tidak dilindungi

	334. Lingsar	<i>Pametia tomentosa</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	335. Liwar			Terancam	Tidak dilindungi
	336. Lumut	<i>Riccia sp.</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	337. Lumut daun	<i>Polytrichum sp.</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	338. Lumut hati	<i>Marhantiaceae</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	339. Lumut tanduk	<i>Anthoceros laevis</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	340. Luwing	<i>Ficus hispida</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	341. Mahoni	<i>Switenia macrophylla</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	342. Maja	<i>Crescentia cujete</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	343. Maja	<i>Eugenia operculata</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	344. Malaka	<i>Phyllanthus emblica</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	345. Manang mayung			Terancam	Tidak dilindungi
	346. Mandalean			Terancam	Tidak dilindungi
	347. Mangga	<i>Mangifera indica</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	348. Mangga hutan	<i>Mangifera sp.</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	349. Manggis hutan			Terancam	Tidak dilindungi
	350. Melinjo	<i>Gnetum gnemon</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	351. Mangkudu	<i>Morinda citrifolia L</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	352. Mangkudu/pace	<i>Morinda citrifolia L</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	353. Mentigi	<i>Cerriops tagl</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	354. Mimba	<i>Azadirachta indica</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	355. Mindi	<i>Mella azedarach</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	356. Mitak mame	<i>Rauvolfia reflexa</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	357. Nangga	<i>Palaquium amboinense</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	358. Nangka	<i>Artocarpus heterophyllus</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	359. Nyamplung	<i>Callophyllum inophyllum</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	360. Pala	<i>Knema cinerea</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	361. Pala	<i>Myristica sp.</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	362. Pala gunung	<i>Knema cinerea</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	363. Pinang	<i>Areca cathecu</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	364. Pinus	<i>Pinus merkusi jungh</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	365. Pulau/Mitak	<i>Aistonia scholaris</i>			Melimpah Tidak dilindungi
	366. Rambutan	<i>Nephelium lapporaceum</i>			Berlimpah Tidak dilindungi
	367. Randu	<i>Bombax sp.</i>			Berlimpah Tidak dilindungi
	368. Rengas	<i>Gluta rengas</i>			Berlimpah Tidak dilindungi
	369. Rotan	<i>Daemonorops sp.</i>			Berlimpah Tidak dilindungi
	370. Rotan kecil	<i>Daemonorops kunstleri</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	371. Salak	<i>Salacca edulis</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	372. Salinguru	<i>Actinodaphne diversifolia</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	373. Sangketan	<i>Achyranthes aspera</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	374. Sawo hutan	<i>Acras zabota</i>			Berlimpah Tidak dilindungi
	375. Sawo kecil	<i>Manilkara kauki</i>			Berlimpah Tidak dilindungi
	376. Sawo kecil Sumbawa	<i>Manilkara kauki samawensis</i>	Endemik		Tidak dilindungi
	377. Sawo susu	<i>Chrysaphyllum cainata</i>			Berlimpah Tidak dilindungi
	378. Sengon	<i>Albizia falcataria</i>			Berlimpah Tidak dilindungi
	379. Sengon	<i>Albizia chinensis</i>			Berlimpah Tidak dilindungi
	380. Sentigi	<i>Pemphis acidula</i>			Berlimpah Tidak dilindungi
	381. Sentul gawah	<i>Aglaia elliptica</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	382. Sentul mulon	<i>Aglaia macrocarpa</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	383. Singgapur	<i>Muntingia calaburfa</i>			Berlimpah Tidak dilindungi
	384. Sirih hutan	<i>Piper caninum</i>			Berlimpah Tidak dilindungi
	385. Sirsak	<i>Annona muricata</i>			Berlimpah Tidak dilindungi
	386. Soka	<i>Ixora sp.</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	387. Songga	<i>Strychnas ligustrina</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	388. Sonokeling	<i>Dalbegia latifolia</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	389. Sukun	<i>Artocarpus communis</i>			Berlimpah Tidak dilindungi
	390. Sureni	<i>Toona sureni</i>			Berlimpah Tidak dilindungi
	391. Tanjung	<i>Mimosops eleng L</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	392. Tengguli	<i>Cassia fistula</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	393. Terep	<i>Artocarpus elastic</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	394. Terep buku	<i>Amaracarpus sp</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	395. Turi/Ketujur	<i>Sesbania grandiflora</i>			Berlimpah Tidak dilindungi
	396. Walangan	<i>Pterospermum diversifolium</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	397. Walikukun	<i>Schoutenia ovate</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	398. Warni	<i>Mangifera caesia</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	399. Waru	<i>Hibiscus tiliaceus</i>			Berlimpah Tidak dilindungi
	400. Waru laut	<i>Trespesia populnea</i>		Terancam	Tidak dilindungi
	401. Widuri	<i>Colotropis gigantea</i>		Terancam	Tidak dilindungi

Keterangan :

Sumber : Balai Kesatuan Sumber Daya Alam Provinsi NTB

Tabel 5. Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

NO	Nama Perusahaan/Penangkar	SK	Jenis Satwa Dan Tumbuhan Yang Ditangkarkan
			Satwa Liar Yang Dilindungi
1	Farid Karamah	-	Rusa Timor
2	Ahmad Hasan, S.Sos.	-	Rusa Timor
3	Matrinduan	-	Rusa Timor
4	Koesnadi	-	Rusa Timor
5	H. Anwar .M, S.Sos.	-	Rusa Timor
6	Ahmad Rofiq	-	Rusa Timor
7	Joni	-	Rusa Timor
8	Ir. I Made Rethunaya	-	Rusa Timor
9	Sugeng Hariadi, SH., MH.	-	Rusa Timor
10	Muhammad Rum	-	Rusa Timor
11	Amsal Solaeman	-	Rusa Timor
12	Hadi Suryono	-	Rusa Timor
13	Piter Susanto	-	Rusa Timor
14	L. M. Hijerah	-	Rusa Timor
15	H. Ahmad Muharis	-	Rusa Timor
16	Wayan Sulendra	-	Rusa Timor
17	H. Muhdar H. Arsyad	-	Rusa Timor
18	Ignasius Gawe	-	Rusa Timor
19	H. Saleh AS	-	Rusa Timor
20	Fathan Ham Irfan	-	Rusa Timor
21	Fatahollah	-	Rusa Timor
22	Afif Lillah Zulkifli, SE	-	Rusa Timor
23	Albar Ahmach	-	Rusa Timor
24	Syahafuddin	-	Rusa Timor
25	Eddy Sudarmin	-	Rusa Timor
26	Siti Nurmah	-	Rusa Timor
27	Zulkarnaen	-	Rusa Timor
28	Muslim, S.Sos.	-	Rusa Timor
29	Lalu Faturrahman	-	Rusa Timor
30	Ahmad Zulyaden	-	Rusa Timor
31	Drs. H. Rachiman	-	Rusa Timor
32	P. Rachmadi	-	Rusa Timor
33	Hamzah Isya	-	Rusa Timor
34	Juhta	-	Rusa Timor
35	Hugeng Angkosodjojo	-	Rusa Timor
36	Inderson LA	-	Rusa Timor
37	Agus Titian Cokro	-	Rusa Timor
38	Lalu Sudiwangse	-	Rusa Timor
39	Djentayu Suprihandoko, SH.	-	Rusa Timor
Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi			
40	PT. Dinar Darum Lestari Unit Bima	-	Karang Hias
41	PT. Lombok Samudera Abadi	-	Karang Hias
42	H. Usman Muhsan	-	Jalak Bali
43	CV. Surya Samawa	-	Karang Hias
44	PT. Neptune Aquatic Marine	-	Karang Hias
45	H. Trino Junaidin, BA., S.Sos.	-	Jalak Bali
46	Solikin, ST.	-	Jalak Bali
47	Drs. Eddy Kuswanto	-	Jalak Bali
Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi			
48	UD. Aneka Flora Lestari	-	Gaharu (Gyrinops versteghii)
49	CV. Griya Agroforestry	-	Gaharu (Gyrinops versteghii)
50	PT. Segarang Alam Lestari	-	Gaharu (Gyrinops versteghii)

Keterangan :

Sumber : Balai Kesatuan Sumber Daya Alam Provinsi NTB

Tabel 6. Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan Provinsi : Nusa Tenggara Barat Tahun Data : 2018

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kritis (ha)			Luar Kawasan Hutan	Sangat Kritis (ha)				Penyebab Lahan Kritis
			Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi		Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Luar Kawasan Hutan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	BIMA	RASANAE TIMUR	-	-	-	19	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
2	BIMA	PALIBELO	-	-	-	23	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
3	BIMA	BELO	-	-	-	93	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
4	BIMA	TAMBORA	-	-	-	109	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
5	BIMA	AMBALAWI	-	-	-	204	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
6	BIMA	LAMBITU	-	-	-	225	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
7	BIMA	SOROMANDI	-	-	-	238	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
8	BIMA	WAWO	-	-	-	360	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
9	BIMA	DONGGO	-	-	-	1.692	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
10	DOMPU	HUTU	-	-	-	3	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
11	DOMPU	KEMPO	-	-	-	9	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
12	DOMPU	KILO	-	-	-	104	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
13	DOMPU	MANGGALEWA	-	-	-	180	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
14	DOMPU	PAJO	-	-	-	284	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
15	DOMPU	DOMPU	-	-	-	398	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
16	LOMBOK BARAT	SEKOTONG	-	-	-	61	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
17	LOMBOK TENGAH	BATUKLIANG UTARA	-	-	-	9	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
18	LOMBOK TENGAH	PUJUT	-	-	-	25	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
19	LOMBOK TENGAH	KOPANG	-	-	-	38	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
20	LOMBOK TIMUR	MASBAGIK	-	-	-	28	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
21	LOMBOK TIMUR	MONTONG GADING	-	-	-	168	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
22	LOMBOK TIMUR	SIKUR	-	-	-	186	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
23	LOMBOK TIMUR	SUELA	-	-	-	289	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
24	LOMBOK TIMUR	WANASABA	-	-	-	519	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
25	LOMBOK TIMUR	PRINGGASELA	-	-	-	660	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
26	LOMBOK TIMUR	AIKMEL	-	-	-	778	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
27	LOMBOK TIMUR	SEMBALUN	-	-	-	816	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
28	LOMBOK UTARA	KAYANGAN	-	-	-	1	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
29	LOMBOK UTARA	GANGGA	-	-	-	119	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
30	LOMBOK UTARA	BAYAN	-	-	-	326	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
31	SUMBAWA	LABUHAN BADAS	-	-	-	3	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
32	SUMBAWA	LUNYUK	-	-	-	10	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
33	SUMBAWA	PLAMPANG	-	-	-	36	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
34	SUMBAWA	ORONG TELU	-	-	-	46	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
35	SUMBAWA	LOPOK	-	-	-	111	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
36	SUMBAWA	MOYOHULU	-	-	-	135	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
37	SUMBAWA	LENANGGUAR	-	-	-	284	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
38	SUMBAWA	ROPANG	-	-	-	1.725	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
39	SUMBAWA	LANTUNG	-	-	-	1.835	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
40	SUMBAWA	BATULANTEH	-	-	-	5.307	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
41	SUMBAWA BARAT	BRANG REA	-	-	-	1	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
42	SUMBAWA BARAT	TALIWANG	-	-	-	2	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
43	SUMBAWA BARAT	BRANG ENE	-	-	-	3	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
44	SUMBAWA BARAT	SEKONGKANG	-	-	-	86	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
45	LOMBOK TIMUR	SEMBALUN	-	-	-	28	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
46	SUMBAWA	ALAS	-	-	-	36	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
47	SUMBAWA BARAT	BRANG REA	-	-	-	28	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
Total kriteria "kritis" di luar kawasan hutan (APL)						17.640	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
48	BIMA	LAMBU	-	5	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
49	BIMA	SANGGAR	-	11	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
50	BIMA	WERA	-	13	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
51	BIMA	WAWO	-	21	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
52	BIMA	SOROMANDI	-	56	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
53	BIMA	LANGGUDU	-	63	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
54	BIMA	DONGGO	-	164	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
55	DOMPU	PEKAT	-	21	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
56	DOMPU	DOMPU	-	40	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
57	DOMPU	PAJO	-	98	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
58	DOMPU	KEMPO	-	226	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
59	DOMPU	KILO	-	250	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
60	DOMPU	WOJA	-	1.447	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
61	DOMPU	MANGGALEWA	-	1.710	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
62	LOMBOK BARAT	LINGSAR	-	5	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
63	LOMBOK BARAT	BATULAYAR	-	72	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
64	LOMBOK BARAT	GUNUNG SARI	-	108	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
65	LOMBOK BARAT	LEMBAR	-	161	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
66	LOMBOK BARAT	NARMADA	-	556	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
67	LOMBOK BARAT	SEKOTONG	-	1.307	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
68	LOMBOK TENGAH	PRINGGARATA	-	9	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
69	LOMBOK TENGAH	BATUKLIANG UTARA	-	125	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
70	LOMBOK TENGAH	PRAYA BARAT DAYA	-	212	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
71	LOMBOK TENGAH	PUJUT	-	740	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
72	LOMBOK TIMUR	WANASABA	-	36	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
73	LOMBOK TIMUR	SEMBALUN	-	50	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
74	LOMBOK TIMUR	SAMBELIA	-	79	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
75	LOMBOK TIMUR	SUELA	-	358	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
76	LOMBOK TIMUR	JEROWARU	-	1.157	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
77	LOMBOK UTARA	PEMENANG	-	64	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
78	LOMBOK UTARA	TANJUNG	-	134	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
79	SUMBAWA	ROPANG	-	9	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
80	SUMBAWA	LENANGGUAR	-	11	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
81	SUMBAWA	LUNYUK	-	12	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
82	SUMBAWA	MOYOHULU	-	51	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
83	SUMBAWA	BATULANTEH	-	65	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
84	SUMBAWA	LANTUNG	-	74	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
85	SUMBAWA	LAPE	-	81	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
86	SUMBAWA	ORONG TELU	-	96	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
87	SUMBAWA	LABANGKA	-	100	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
88	SUMBAWA	TARANO	-	152	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
89	SUMBAWA	EMPANG	-	343	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
90	SUMBAWA	MARONGE	-	353	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
91	SUMBAWA	ALAS BARAT	-	407	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
92	SUMBAWA	LOPOK	-	1.085	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
93	SUMBAWA	PLAMPANG	-	2.828	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
94	SUMBAWA BARAT	BRANG ENE	-	5	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
95	SUMBAWA BARAT	SETELUK	-	19	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
96	SUMBAWA BARAT	TALIWANG	-	204	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
97	SUMBAWA BARAT	JERWEH	-	411	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
98	SUMBAWA BARAT	POTO TANO	-	1.120	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
Total kriteria "kritis" di Hutan Lindung (HL)						16.724	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
99	BIMA	RABA	1	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha
100	BIMA	ASAKOTA	23	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 big/ha

101	BIMA	LANGGUDU	30	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
102	BIMA	SANGGAR	30	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
103	BIMA	RASANA E TIMUR	42	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
104	BIMA	WOHA	55	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
105	BIMA	PARADO	61	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
106	BIMA	LAMBU	68	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
107	BIMA	TAMBORA	337	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
108	BIMA	AMBALAWI	374	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
109	DOMPU	HUU	10	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
110	DOMPU	PAJO	74	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
111	DOMPU	PEKAT	656	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
112	LOMBOK BARAT	GERUNG	70	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
113	LOMBOK TENGAH	PUJUT	21	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
114	LOMBOK TENGAH	PRAYA BARAT	1.146	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
115	LOMBOK TENGAH	PRAYA BARAT DAYA	1.468	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
116	LOMBOK TIMUR	PRINGGABAYA	92	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
117	LOMBOK TIMUR	SAMBELIA	1.270	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
118	LOMBOK UTARA	KAYANGAN	69	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
119	LOMBOK UTARA	BAYAN	203	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
120	LOMBOK UTARA	GANGGA	403	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
121	SUMBAWA	LOPOK	6	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
122	SUMBAWA	ALAS BARAT	10	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
123	SUMBAWA	UNTER IWES	26	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
124	SUMBAWA	PLAMPANG	30	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
125	SUMBAWA	EMPANG	81	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
126	SUMBAWA	MOYOHILIR	91	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
127	SUMBAWA	MOYOHULU	97	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
128	SUMBAWA	ORONG TELU	214	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
129	SUMBAWA	TARANO	418	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
130	SUMBAWA	LUNYUK	1.121	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
131	SUMBAWA BARAT	TALIWANG	5	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
132	SUMBAWA BARAT	SEKONGKANG	14	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
133	SUMBAWA BARAT	BRANG ENE	22	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
134	SUMBAWA BARAT	BRANG REA	39	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
135	BIMA	LAMBU	2	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
136	BIMA	RABA	2	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
137	BIMA	WERA	8	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
138	BIMA	RASANA E TIMUR	19	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
139	BIMA	ASAKOTA	91	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
140	BIMA	BELO	113	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
141	BIMA	WOHA	135	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
142	BIMA	MADA PANGGA	165	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
143	BIMA	PARADO	268	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
144	BIMA	LANGGUDU	391	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
145	BIMA	AMBALAWI	453	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
146	BIMA	SANGGAR	653	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
147	BIMA	MONIA	1.168	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
148	DOMPU	HUU	8	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
149	DOMPU	PEKAT	13	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
150	DOMPU	KILO	56	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
151	DOMPU	KEMPO	341	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
152	DOMPU	DOMPU	388	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
153	DOMPU	PAJO	582	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
154	DOMPU	WOJA	870	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
155	DOMPU	MANGGALAWA	1.152	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
156	LOMBOK BARAT	SEKOTONG	2.041	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
157	LOMBOK UTARA	TANJUNG	15	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
158	LOMBOK UTARA	GANGGA	22	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
159	SUMBAWA	BATULANTEH	7	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
160	SUMBAWA	LENANGGUAR	8	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
161	SUMBAWA	MOYOHULU	11	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
162	SUMBAWA	EMPANG	16	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
163	SUMBAWA	MARONGE	20	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
164	SUMBAWA	RHEE	21	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
165	SUMBAWA	UNTER IWES	47	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
166	SUMBAWA	LABUHAN BADAS	82	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
167	SUMBAWA	ORONG TELU	155	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
168	SUMBAWA	UTAN	163	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
169	SUMBAWA	LABANGKA	275	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
170	SUMBAWA	ROPANG	375	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
171	SUMBAWA	TARANO	925	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
172	SUMBAWA	LUNYUK	1.319	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
173	SUMBAWA	PLAMPANG	1.791	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
174	SUMBAWA BARAT	JERWEH	9	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
175	SUMBAWA BARAT	BRANG ENE	16	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
176	SUMBAWA BARAT	SETELUK	32	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
177	SUMBAWA BARAT	SEKONGKANG	34	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
178	SUMBAWA BARAT	TALIWANG	364	-	-	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
Total kriteria "kritis" di Hutan Produksi (HP)			23.303								
179	LOMBOK BARAT	LINGSAR	-	-	2	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
180	LOMBOK BARAT	NARMADA	-	-	283	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
181	BIMA	TAMBORA	-	-	91	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
182	DOMPU	PEKAT	-	-	832	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
183	LOMBOK TIMUR	MONTONG GADING	-	-	6	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
184	LOMBOK TIMUR	SUELA	-	-	24	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
185	LOMBOK TIMUR	AIKMEL	-	-	57	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
186	LOMBOK TIMUR	WANASABA	-	-	78	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
187	LOMBOK TIMUR	SEMBALUN	-	-	89	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
188	LOMBOK UTARA	BAYAN	-	-	12	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
189	BIMA	MADA PANGGA	-	-	4	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
190	LOMBOK BARAT	SEKOTONG	-	-	149	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
191	LOMBOK TENGAH	PRAYA BARAT	-	-	6	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
192	LOMBOK TENGAH	PUJUT	-	-	285	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
193	SUMBAWA	BATULANTEH	-	-	17	-	-	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
Total kriteria "kritis" di Hutan Konservasi					1.935						
194	SUMBAWA	MOYOHULU	-	-	-	-	-	-	-	10	tegakan < 100 bgt/ha
Total kriteria "sangat kritis" di luar kawasan hutan (APL)										10	
195	BIMA	WERA	-	-	-	-	-	-	731	-	tegakan < 100 bgt/ha
196	BIMA	SANGGAR	-	-	-	-	-	-	54	-	tegakan < 100 bgt/ha
197	BIMA	TAMBORA	-	-	-	-	-	-	3.698	-	tegakan < 100 bgt/ha
198	DOMPU	PEKAT	-	-	-	-	-	-	7	-	tegakan < 100 bgt/ha
199	LOMBOK TIMUR	SEMBALUN	-	-	-	-	-	-	6	-	tegakan < 100 bgt/ha
Total kriteria "sangat kritis" di Hutan Konservasi									4.496		
200	SUMBAWA BARAT	SEKONGKANG	-	-	-	-	-	1	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
201	SUMBAWA BARAT	JERWEH	-	-	-	-	-	13	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
Total kriteria "sangat kritis" di Hutan Lindung (HL)								14			
202	BIMA	TAMBORA	-	-	-	-	14	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
203	SUMBAWA BARAT	JERWEH	-	-	-	-	345	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
204	SUMBAWA BARAT	SEKONGKANG	-	-	-	-	956	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
205	BIMA	TAMBORA	-	-	-	-	336	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
206	SUMBAWA BARAT	SEKONGKANG	-	-	-	-	2	-	-	-	tegakan < 100 bgt/ha
Total kriteria "sangat kritis" di Hutan Produksi (HP)							1.653				

Keterangan : Luas Lahan Kritis Propinsi NTB sesuai SK Penetapan Lahan Kritis Nasional adalah 65.799 ha

Sumber : Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dodokan Moyosari

Tabel 7. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air *)
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data: 2017

No.	Tebal Tanah	Ambang Kritis Erosi	Besaran erosi (mm/10 tahun)	Status
				Melebihi/Tidak
1	< 20 cm	0,2 - 1,3	-	-
2	20 - < 50 cm	1,3 - < 4	-	-
3	50 - < 100 cm	4,0 - < 9,0	-	-
4	100 – 150 cm	9,0 – 12	-	-
5	> 150 cm	> 12	-	-

Keterangan: *) Data tidak tersedia

Sumber : Balai Pengujian Teknologi Pertanian Provinsi NTB

Tabel 8. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering *)**Provinsi : Nusa Tenggara Barat****Tahun Data: 2017**

No.	Parameter	Ambang Kritis	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
1	Ketebalan Solum	< 20 cm	> 100 cm	Melebihi
2	Kebatuan Permukaan	> 40 %	10 - 15 %	Tidak Melebihi
3	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	10 % - 20%	Tidak Memebihi
		> 80 % pasir kuarsitik	35%	Tidak Melebihi
4	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1,24	Tidak Melebihi
5	Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	57,40%	Tidak Melebihi
6	Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0 cm/jam	5,67	Tidak Melebihi
7	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	6,22	Tidak Melebihi
8	Daya Hantar Listrik	> 4,0 mS/cm	0,44	Tidak Melebihi
9	Redoks	< 200 mV	92,2	Melebihi
10	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	1,29 x 10	Melebihi

Keterangan: Pengambilan sampel dilakukan di Kabupaten Lombok Timur

Sumber : Balai Pengujian Teknologi Pertanian Provinsi NTB

Tabel 9. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah *)
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data: 2017

No.	Parameter	Ambang Kritis	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
1	Subsistensi Gambut di atas pasir kuarsa	> 35 cm/tahun untuk ketebalan gambut ≥ 3 m atau 10% / 5 tahun untuk ketebalan gambut < 3 m	N/A	N/A
2	Kedalaman Lapisan Berpirit dari permukaan tanah	< 25 cm dengan $\text{pH} \leq 2,5$	N/A	N/A
3	Kedalaman Air Tanah dangkal	> 25 cm	N/A	N/A

Keterangan: (Provinsi NTB Tidak Memiliki Lahan Gambut)
 Sumber : Balai Pengujian Teknologi Pertanian Provinsi NTB

Tabel 8. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data: 2018

No	Lokasi	Kepadatan (Ind/Ha)		Persentase tutupan(%)		Status		
		Minimal	Maksimal	Minmal	Maksimal	Kondisi	Kepadatan	Petupan
1	Kawasan Gili Matra dan Sekitarnya	-	4,180	-	80,6	Baik	Sangat Padat	Sangat Padat
2	Kawasan Senggigi dan Sekitarnya	-	-	-	-	-	-	-
3	Kawasan Lembar - Sekotong dan Sekitarnya	2.000	12.800	51,70	81,60	Baik	Sangat Padat	Sedang-Sangat Padat
4	Kawasan Kuta - Awaang dan Sekitarnya	1.200	3.266	15,16	95,50	Rusak - Baik	Sedang - Sangat padat	Jarang - Sangat Padat
5	Kawasan Tanjung Luar - Jerowaru dan Sekitarnya	1.333	11.244	32,47	88,60	Sedang - Baik	Sedang - Sangat padat	Jarang - Sangat Padat
6	Kawasan Gili Sulat - Labuhan Lombok dan Sekitarnya	3.140	5.644	67,37	78,87	Baik	Sangat Padat	Sangat Padat
7	Kawasan Labuhan Lalar - Maluk dan Sekitarnya	1.411	16.267	22,75	82,75	Rusak - Baik	Sedang - Sangat padat	Jarang - Sangat Padat
8	Kawasan Gili Balu - Alas dan Sekitarnya	5.156	11.566	64,85	82,65	Baik	Sangat Padat	Sangat Padat
9	Kawasan Labuhan Badas - Pulau Moyo dan Sekitarnya	-	1.144	-	33,50	Rusak	Sedang	Jarang
10	Kawasan Teluk Saleh	6.478	10.067	68,45	89,50	Baik	Sangat Padat	Sangat Padat
11	Kawasan Teluk Sanggar dan Sekitarnya	-	-	-	-	-	-	-
12	Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya	-	1.400	-	36,68	Rusak	Sedang	Jarang
13	Kawasan Sape dan Sekitarnya	-	2.711	-	48,00	Sedang	Sangat Padat	Jarang
14	Kawasan Teluk Waworada dan Sekitarnya	1.655	4.406	48,50	68,75	Sedang - Baik	Sedang - Sangat padat	Jarang - Sangat Padat
15	Kawasan Teluk Cempi dan Sekitarnya	1.344	1.900	47,65	55,75	Baik	Sangat Padat	Sangat Padat
16	Kawasan Lunyuk	-	3.976	-	77,75	Baik	Sangat Padat	Sangat Padat

Keterangan :

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB

Tabel 11. Luas dan Kerusakan Padang Lamun

Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Tahun Data: 2018

No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Persentase Area Kerusakan (%)
1	KABUPATEN LOMBOK BARAT	636,0	6,78
2	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	615,6	6,56
3	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	784,3	8,36
4	KABUPATEN SUMBAWA	4,477,0	47,73
5	KABUPATEN DOMPU	125,3	1,34
6	KABUPATEN BIMA	1,617,5	17,25
7	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	846,0	9,02
8	KABUPATEN LOMBOK UTARA	277,3	2,96
9	KOTA MATARAM	–	0,00
10	KOTA BIMA	–	0,00
Total		9.379	100,00

Keterangan :

Sumber : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTB

Tabel 12. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data: 2017

No.	Kabupaten/Kota	Luas Tutupan (Ha)	Persentase Luas Terumbu Karang (%)
1	Lombok Barat	2.482,20	6,69
2	Lombok Tengah	1.306,10	3,52
3	Lombok Timur	4.494,90	12,11
4	Sumbawa	10.856,00	29,26
5	Dompu	3.090,50	8,33
6	Bima	8.858,50	23,87
7	Sumbawa Barat	3.424,20	9,23
8	Lombok Utara	2.558,10	6,89
9	Kota Mataram	–	0,00
10	Kota Bima	36,5	0,1

Keterangan :

Sumber : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTB

Tabel 13. Luas Perubahan Penggunaan Lahan
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

No	Jenis Penggunaan Baru	Luas Lama (Ha)	Luas Baru (Ha)
1	Pertambangan	-	258.339,30
2	Instalasi Listrik	-	1,17
3	Jaringan komunikasi	-	68,46
4	Jalan	-	439,02
5	Instalasi Air	-	213,64
6	Fasilitas Umum	-	11,25
7	Sarpras Keselamatan	-	0,63
Total		-	259.454,40

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Tabel 14. Jenis Pemanfaatan Lahan
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

NO	Jenis Pemanfaatan Lahan	Jumlah	Skala Usaha	Luas	Keterangan
1	Tambang	39 IUP	Besar	319.990,35	IUP Logam
		1 IUP	Menengah	4.118	IUP Non Logam
		138 IUP	Kecil	2.499,01	IUP Batuan
		72 IPR	Rakyat	694	IPR
2	Perkebunan		Besar		
			Menengah		
			Kecil		
			Rakyat		
3	Pertanian		Besar		
			Menengah		
			Kecil		
			Rakyat		
4	Pemanfaatan Hutan		Besar		
		4 Perusahaan	Menengah	99.873	
		12082 Orang	Kecil	14,131,9	IUPHkm
		2894 Orang	Rakyat	3,152,,88	IUPHHK HTR

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NTB

TABEL 15. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
1	BATUAN (PASIR LAUT)	PT TIMUR SUKSES BERSAMA	1000		
2	BATUAN (PASIR DAN BATU)	H. ZULKIFLI	1,62		
3	BATUAN	PT.PELINDO III CAB. LEMBAR	0,00		200.000 m3/tahun
4	TANAH URUG	SARISAH SONI	0,88		
5	TANAH URUG	SUPARMAN	0,20		343 m3
6	TANAH URUG	BOHRI RAHMAN	0,24		
7	PASIR	MEGAWATI APRIANI	0,20		
8	BATUAN	JATIMAN	0,70		
9	BATU & TANAH URUG	SATRIAMAN	0,31		994 m3
10	TANAH URUG	SUPARDI	0,50		380 m3
11	TANAH URUG	NURSIDIN	0,27		
12	PASIR	SYAMSUDIN	0,15		
13	PASIR DAN BATU	I MADE ARCHA PURNADI	0,70		
14	TANAH URUG DAN BATU	ANTONO	0,87		
15	BATUAN (PASIR DAN TANAH URUG)	I KOMANG SUDARSANA	0,73		1.250 m3
16	BATUAN	I KOMANG SUWARTA	0,56		
17	PASIR	I MADE GREDEG	0,40		
18	PASIR URUG	FATURRAHMAN	0,20		
19	BATUAN	PT. GLOBAL MAS TEKNIKINDO	0,10		
20	BATUAN	MUSLEHUDIN	0,34		
21	PASIR URUG	SARISAH SONI	0,20		
22	PASIR URUG	SARIMIN	0,26		
23	BATUAN	H. SUHAIMI	1,19		3627 m3
24	BATUAN	I NYOMAN SUDARMA	0,75		1.156 m3
25	BATUAN	LALU MINAKSE	0,10		
26	BATUAN	JUMARLAN	0,15		
27	BATUAN	TAMRIN	0,74		
28	BATUAN	CV. VARICON	0,00		375 m3/bulan
29	BATU & TANAH URUG	SONI CANDRA DERMAWAN	1,22		

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
1	BATUAN	PT. SINAR BALI BINA KARYA	0,00		30 ton/hari
2	BATUAN	SUDARMONO	1,42		600 m3
3	BATUAN	Hj. NURJANAH	0,00		10.000 m3/tahun
4	PASIR & TANAH URUG	AHMAD RIDWAN	0,69		
5	BATUAN	MASNAH	1,25		
6	BATUAN	I KETUT RAI SUBRATA	0,70		
7	BATUAN	SALIMUDIN	1,75		
8	TANAH URUG & BATU	LALU SAHWIN	1,76		
9	BATUAN	H. TURMUZI	1,49		
10	BATUAN	AMAQ SAMSUL RIZAL	1,90		
11	BATUAN	MUHAMMAD	1,70		
12	BATUAN	HJ. MALA HAERANY	0,96		
13	BATUAN	I MADE ARCHA PURNADI	0,41		
14	BATUAN	WAYAN SUARTANA	0,21		
15	SIRTU	H. SADIKIN	0,40		
16	ANDESIT	JUMASIR	2,40		
17	BATUAN	SIDRATUL KURNIA	0,35		

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
1	BATUAN	SYAHRUL ALI MUNAWAR	0,88		
2	BATUAN	PT. SAKATA UTAMA/ISKAN NAHIDI	1,50		
3	BATUAN	H. ZULKIFLI/UD. SUMBER ALAM LESTARI	1,49		
4	BATUAN	UD. PUTRA RAHMAN/MUSTAYIB	1,35		
5	BATUAN	PT.HUTAMA KARYA/Ir. I WAYAN KARIADI	4,65		
6	BATUAN	UD. PASCAL PARDEDE MINERAL/MAHSIS PARADI	0,83		400
7	BATUAN	UD.PT.SUMBER SEJAHTERA LESTARI/SUGIHARTO N	1,34		
8	BATUAN	UD.PADAMANGAN/MARKIDAH	0,60		
9	BATUAN	PT. METRO LESTARI UTAMA/ZIAD ABDULLAH	10,51		7.738,50
10	BATUAN	PT. SINAR BALIBINAKARYA/Ir.WAYAN MAHARDIKA	4,00		3.286 m3

11	BATUAN	UD. SATU ATAP/FATMAWATI	1,70		
12	BATUAN	UD.PANDAWA LIMA/YEN ADIYANTO,ST	1,67		
13	BATUAN	UD.VINARIA/Drs. KARMIN	1,00		
14	BATUAN	UD. BERUGAK ELEN/H. MUHAMMAD SUKARDI	1,90		
15	BATUAN	UD.SENTRAL JAYA UTAMA/BUDI TANAYA	0,72		
16	BATUAN	CV. ARTHA MAHARDIKA/L.MUSLIHUN	1,50		
17	BATUAN	UD. BUNDA BUANA BAKTI/MUHAMAD ERSAN	1,00		
18	BATUAN	UD.RAHAYU/KASMIATI	0,47		
19	BATUAN	UD. MUJUR/ZAINUDIN	0,37		
20	BATUAN	PT. NUSA KARYA SAMPURNA	1,80		
21	BATUAN	PT. SELAPARANG PERKASA	1,20		48.450 m3/tahun
22	BATUAN	H. SUPARDI	1,40		
23	BATUAN	PT. INDOMINE UTAMA	6,60		17.777,63
24	BATU	PT. PRAMANA ARTHA RAHARJA	4,80		24.133,94 m3
25	TANAH URUG	INAQ ISMAN HAYADI	2,70		
26	BATUAN	AQ. MUHAEDI	1,80		
27	TANAH URUG & BATU)	PT. LOMBOK INFRASTRUKTUR PERKASA	3,00		
28	BATUAN (BATU)	SUTIMAN	1,00		
29	PASIR & SIRTU	PT. WASFA ANJANI PERSADA	12,04		
30	PASIR	MURTI ALIAS INAQ IDRUS	1,08		
31	BATUAN	CV. KENCANA UTAMA	2,50		
32	BATU	SUPARJO (1)	1,17		
33	BATU	SUPARJO (2)	1,50		
34	PASIR	BAIQ EMIL LASTUTI	1,70		
35	BATU	ZULKARNAEN	1,27		
36	BATU	LALU MESRIADI	1,50		
37	BATU	PT PRIMA BUMI AGUNG	3,82		
38	BATU	AMAQ RIKI	1,15		
39	PASIR	SEHABUDIN	1,88		
40	PASIR LAUT	PT. DINAMIKA ATRIA RAYA	1000,00		
41	BATU	PT. GILI MANAH LEMBANA	1,089		
42	BATU	PT. SANUR JAYA UTAMA	6,90		
43	BATU	PT. BUMI AGUNG ANNUSA	4,83		
44	BATU & SIRTU	ABDURRAHMAN HAYAZA	1,00		
45	BATUAN	PT. VARIA USAHA BETON	0,00		200 ton/hari
46	BATU	PT. JEPARI JAYA	0,00		300 ton/hari
47	BATUAN	CV. GRAHA UTAMA	2,50		
48	BATU	PT. ADITYA SINAR PRATAMA	2,08		
49	PASIR DAN BATU	PT.UTAMA BETON PERKASA/ROBY TJIOE	1,80		32.487 m3
50	PASIR DAN BATU	PT.UTAMA BETON PERKASA/ROBY TJIOE	2,00		
51	PASIR DAN BATU	PT.UTAMA BETON PERKASA/ROBY TJIOE	1,51		
52	ANDESIT	USWATUN HASANAH	1,27		
53	PASIR	CV. ISTANA KARYA	5,96		
54	BATU	PT. CITRA GADING ASRITAMA/Ir.ICHSAN SUAIDI	0,00		1.000 ton/bln
55	BATUAN	PT.SINAR BALIBINAKARYA/Ir.WAYAN MAHARDIKA	5,00		
56	BATU ANDESIT	SUKARLAN	4,79		
57	BATUAN	PT. BATU GUNUNG RINJANI JAYA PERKASA/ARIF S	2,70		
58	PASIR	MOH. JAZULI	2,29		
59	BATU ANDESIT	SANTOSO WIDJAYA	4,00		
60	PASIR	MUHAMAD ZAINAL IDRUS	1,62		
61	BATUAN	PAJRI	1,00		
62	BATUAN	JUNAEDI	1,47		
63	PASIR	MAHYI	0,30		
64	PASIR	AQ. SYAMSUL HADI	2,00		
65	PASIR	AQ. SYAMSUL HADI	1,50		
66	BATUAN	ALI MAHZAHA	0,80		
67	BATUAN	PT. BAHAGIA BANGUN NUSA	13,71		26.980.03
68	BATUAN	FATHURRAHMAN	0,70		
69	PASIR	ZAINUDIN	0,50		
70	PASIR	ISMAN HAYADI	1,72		
71	PASIR	AMAQ SUHIRMAN	0,80		
72	BATUAN	SATRIAWAN	0,80		
73	BATUAN	LALU SURYADI	0,80		
74	PASIR	MAHYI	1,36		
75	BATUAN	PT. MAJU BERKAT BESERUNG/SANTOSO WIJAYA	5,62		

76	BATUAN	SUHAIDI	0,80		
77	PASIR	SUHAIMI	1,00		
78	BATUAN	SUBAIDI	0,90		
79	BATUAN	H. SALMAN	0,30		
80	BATUAN	H. M. ZUHRI FAISAL MALIK	1,48		
81	BATUAN	SUKARLAN	4,00		
82	BATUAPUNG	SUBAIDI	0,50		
83	PASIR	AGUSTONO	0,60		
84	PASIR	HANDRI SURIATMAN	1,80		
85	PASIR PASANG & TANAH URUG	H. RATNASIH	2,75		
86	BATUAN	SUBUR	1,70		
87	BATUAN	OVINK SAYOGIE SUGHANDIE	0,80		
88	BATUAN	AHMAD RASYD RIDO	1,78		
89	PASIR	LALU WAWAN WIDIA PRANATA	1,00		
90	ANDESIT	H. LALU MOH. SINAREP	1,42		
91	BATUAN	PAJRI	1,00		
92	BATUAN	ABDUL AFIF MUIS	2,80		
93	PASIR	ZAINUDDIN	1,40		
94	BATUAPUNG	HAJI BAHARUDDIN	1,86		
95	BATUAN	MUSTAQIM	0,88		
96	PASIR	MUHAMMAD ERSAN UMAR	3,00		
97	PASIR, TANAH URUG & BATUAPUNG	HANAFI	0,64		
98	BATUAN	DIANA KUSUMA DEWI	2,13		
99	BATUAN	RIZKI HARTONO	2,50		
100	BATUAN	PT.KRESNA KARYA/Ir.MADE RETHUYANA,M.Sc.	13,64		
101	BATUAN	PT. EKA PRAYA JAYA/Ir.GEDE EDDY YANA AWAN	6,72		73.238,05 m3
102	BATUAPUNG	NADIA ANJASMARI FATRA	2,46		
103	BATUAPUNG	NADIA ANJASMARI FATRA	1,60		
104	PASIR	H. RATNASIH	2,40		

KABUPATEN LOMBOK UTARA

NO	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
1	BATUAN	PT. SURYA KARYA SARI	0,00		800 ton/hari
2	BATUAN	CV. SINAR ARTHA RINJANI	1,97		
3	PASIR DAN BATU	EDI SURYANTO	1,19		
4	PASIR DAN BATU	EDI SURYANTO	2,82		
5	BATUAN	ANDIKA NOPIAN	1,74		
6	BATU ANDESIT	SUHAEDI	0,40		
7	TANAH URUG & PASIR	RATNADI	4,64		
8	SIRTU	KUKUH KRIDASWORO	0,97		

KABUPATEN SUMBAWA

NO	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
1	SIRTU	HAFID	4,52		
2	BATUAN	PT. BUMI AGUNG ANNUSA	0,00		25 ton/hari
3	BATU & TANAH URUG	ISMAIL ABUBAKAR	4,94		
4	BATUAN (KALSEDON)	YUSDA SYARIFUDDIN	2,00		
5	BATUAN (BATU PECAH)	CV. CAHAYA BATU CRUSHER	2,83		
6	BATUAN	DEWI SARTIKA	2,40		
7	BATU PECAH	PT. SANUR JAYA UTAMA	24,70		
8	BATUAN	ZULKARNAIN (WIUP I)	1,24		
9	BATUAN	ZULKARNAIN (WIUP II)	0,84		
10	BATUAN	AGUS SUJONO	4,92		
11	PASIR DAN BATU	SRI AMI	3,33		
12	PASIR DAN BATU	SUNARNI DESI PRATIWI	4,53		
13	PASIR DAN BATU	IWAN SETIAWAN	1,41		
14	ANDESIT	ERYANTO	1,41		
15	SIRTU	PT. NIAT KARYA	8,20		
16	PASIR DAN BATU	IRWANSYAH	0,85		
17	PASIR DAN BATU	IRWANSYAH	1,79		
18	TANAH URUG & BATU BELAH	I GDE SANTANA	1,87		
19	TANAH URUG & BATU BELAH	I GDE SANTANA	2,21		
20	PASIR DAN BATU	CV. ARDI PUTRA	0,92		
21	SIRTU	JUFRI	4,83		
22	BATUAN	CV.IRFAN JAYA GROUP/IRFANSYAH	1,00		
23	SIRTU	MUHAMMAD YASIN	4,00		
24	BATUAN	AGUS SUJONO	2,05		
25	SIRTU	SUNARNI DESI PRATIWI	0,22		
26	BATUAN	BASO M. AMIN	0,90		
27	SIRTU	NURHALIMAH	0,99		
28	BATUAN	CV. FIQDAR	0,53		
29	BATUAN	LUBNAH	3,06		
30	BATUAN	LUBNAH	2,39		
31	PASIR & BATU	CV. SINAR UTAMA	3,42		801 m3
32	BATUAN	SURYA ANDIKA	0,27		
33	BATUAN	SYHARIBANI BULAENG	1,85		
34	BATUAN	PT. BAITI JANNATI LOMBOK	0,00		

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

No	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
1	BATUAN	PT. UNISERV INDONESIA	0,00		
2	BATUAN	PT. UNISERV INDONESIA	51,84		
3	BATUAN	PT. KARTIKA SARI Cipta Utama	0,00		30 ton/hari
4	PASIR & BATU	PT. BUNGA RAYA LESTARI/I KETUT SAMA	7,08		
5	PASIR & BATU	PT. NINDYA TOBANG ARTHA	1,70		
6	TANAH URUG	A. MUIN H. IDRIS	0,96		
7	TANAH URUG	HALAN JAMIRAN	1,50		
8	BATU KAPUR	PT. BUMI PASIR MANDIRI	108,60		
9	BATU ANDESIT	PT. BUMI PASIR MANDIRI	84,86		
10	BATUGAMPING	CV. SENUTUK INDAH	4,75		
11	BATUGAMPING	CV. PRASMA JAYA	4,50		
12	PASIR & BATU	HADI ZEIN (UD. PINAYUNGAN)	4,00		4.635 m3
13	PASIR & BATU	ADI WIRAWAN	4,90		
14	BATUAN	ARI SUPRIYONO	1,35		
15	BATUAN	PT. SINAR TUNAS KARYA UTAMA	2,05		
16	SIRTU	PT. EKA PRAYA JAYA	2,70		

KABUPATEN BIMA

No	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
1	BATUAN	MUH. SALIM	5,98		
2	BATUAN	ARUJI	1,81		
3	TANAH URUG	RAMLIN	4,65		
4	BATUAN (SIRTU)	MILUYO	3,12		
5	BATUAN	PT. CITRA NUSRA PERSADA	5,40		

KOTA BIMA

No	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
1	TANAH URUG, BATU BELAH	MUHAMMAD SIDIK	1,80		
2	BATUAN	M. RYAN KUSUMA PERMADI	4,86		
3	BATU DAN TANAH URUG	YACUB	2,75		
4	BATU	M. RYAN KUSUMA PERMADI	2,00		
5	BATU DAN TANAH URUG	YANDI FERDINANDUS SUTRISYO	4,00		

KABUPATEN DOMPU

No	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
1	BATU BELAH	PT. RANGGA EKA PRATAMA (Ir, Taksaka Luih)	3,40		
2	PASIR & BATU	NGATINI	2,00		
3	PASIR	SYACHRUL	4,72		
4	BATUAN (PASIR)	ABAKAR HOME	4,00		
5	BATUAN (SIRTU)	PT. DUNIA MAS	10,49		
6	BATUAN (SIRTU)	HARTATI	1,67		
7	BATUAN (TANAH URUG)	SAIDIN	4,17		
8	BATUAN	PT. DUNIA MAS	0,00		240 ton/hari
9	BATUAN	PT. LANCAR SEJATI	9,70		
10	BATU	CV. TIGA BERLIAN MOTOR	2,25		
11	BATUAN (KERIKIL & PASIR)	JUMAUN	2,85		
12	BATUAN	CV. RIZKI SAMADA	1,48		
13	TANAH URUG	CV. KIAN SUKSES	2,14		3.627 m3
14	BATUAN	PT. BUMI MINERAL TAMBORA JAYA	4,50		
15	BATUAN	CV.PASIR MAS TAMBORA JAYA	3,60		
16	BATUAN	PT. RANGGA EKAPRATAMA	8,82		

Keterangan :

Sumber : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NTB

Tabel 16. Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

NO	KABUPATEN/KOTA	Penghijauan			Reboisasi		
		Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (Batang)	Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (Batang)
1	KABUPATEN LOMBOK BARAT	–	–	–	51,43	51,43	24,322,00
2	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	–	–	–	–	–	–
3	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	250	250	100.000	1,381,00	1,381,00	96,900,00
4	KABUPATEN LOMBOK UTARA	–	–	–	–	–	–
5	KABUPATEN SUMBAWA	–	–	–	405,00	405,00	65,500,00
6	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	–	–	–	425,00	425,00	13,750,00
7	KABUPATEN DOMPU	50	50	20.000	550,00	550,00	120,000,00
8	KABUPATEN BIMA	125	125	50.000	6,060,00	6,060,00	2,408,250,00
9	KOTA MATARAM	–	–	–	–	–	–
10	KOTA BIMA	–	–	–	125,00	125,00	50,000,00
JUMLAH		425	425	170.000	8,997,43	8,997,43	2,778,322,00

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Tabel 17. Luas dan Kerusakan Lahan Gambut
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

No	Kab/Kota	Luas (Ha)	Kedalaman (M)	Prosentase Kerusakan (%)	Penyebab Kerusakan
1	2	3	4	5	6
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan : Tidak ada lahan gambut di Provinsi NTB

Tabel 18. Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

NO	KABUPATEN/KOTA	SK Definitif		Keterangan
	LOKASI/NAMA PERUSAHAAN	Jumlah Unit	Luas (Ha)	
1	KAB. LOMBOK TIMUR, KAB. LOMBOK BARAT, DAN KAB. LOMBOK UTARA/ PT. SADHANA ARIFNUSA	1	3.810	1 perusahaan berada pada 3 lokasi
2	KAB. DOMPU DAN KAB. BIMA/ PT. USAHA TANI LESTARI	1	22.820	
3	KABUPATEN BIMA/ PT. KOIN NESIA	1	4.960	
4	KAB. DOMPU DAN KAB. BIMA/ PT. AGRO WAHANA BUMI	1	28.644	
5	DESA GAPIT DAN DESA BOAL KEC. EMPANG KAB. SUMBAWA/ CV. SAHABAT FORESTRY	1	1.000	Setelah PNPB dan biaya oprasional. Sedang dalam tahap penanaman dan telah mendapat pembiayaan dari BLU kemen LHK.

Keterangan :

Sumber : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTB

Tabel 19. Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

NO	KABUPATEN/KOTA	Luas (Ha)	Keterangan
	LOKASI/KPH MITRA		
1	DESA SEKONGKANG KAB. SUMBAWA BARAT/BUMDES ORONG KLETA	1.100,00	
2	DESA REMPEK KEC. GANGGA KAB. LOMBOK UTARA/ KSU KOMPAK SEJAHTERA	623,25	Sedang persiapan oprasional
3	DESA GUMANTAR KEC. KAYANGAN KAB. LOMBOK UTARA/GAPOKTAN SANGA PATI	370,72	Menunggu proses pengesahan SPKS
4	DESA KABUL KEC. PRAYA BARAT DAYA KAB. LOMBOK TENGAH/KTH PANDAN TINGGANG	113,68	Sedang proses pembahasan SPKS
5	DESA KABUL KEC. PRAYA BARAT DAYA KAB. LOMBOK TENGAH/KTH MERTAK GREPEK	101,38	Sedang proses pembahasan SPKS
6	DESA BANYU URIP KEC. PRAYA BARAT KAB. LOMBOK TENGAH/KOPERASI TUNAS KARYA	1.400,00	Sedang proses pembahasan SPKS

Keterangan :

Sumber : DINAS KEHUTANAN PROVINSI NTB

Tabel 20. Perdagangan Satwa dan Tumbuhan
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data :

NO	Nama Spesies	Bagian -Bagian Yang Diperdagangkan	Status Menurut CITES

Keterangan :

Sumber :

Tabel 21. Jumlah dan Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

NO	Jenis IUP/JLWA							SK
	Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Jasa Aliran Air (Ha)	Luas Pemanfaatan Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	Luas Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Ha)	Luas Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (Ha)	Luas Penyerapan Karbon (Ha)	
	Lokasi							
1	PT. Tanah Hufa Indonesia/ Dusun Klui, Dusun Lendang Luar dan Dusun Malimbu, Desa Malaka KEC. PEMENANG KAB. LOMBOK UTARA	--	--	105,62	--	--	--	--
2	PT. Ira Zhafran Wisata/ Dusun Lendang Luar, Dusun Malak, KEC. PEMENANG KAB. LOMBOK UTARA dan Dusun Mangsit, Desa Sengigi KEC. BATU LAYAR KAB. LOMBOK BARAT	--	--	175,48	--	--	--	--
3	BumDes Sesaot/ Desa Sesot KEC. NARMADA KAB. LOMBOK BARAT	--	--	4,20	--	--	--	--
4	Koperasi KPRI "Rimbawan"/ Desa Buwun Sejati KEC. NARMADA KAB. LOMBOK BARAT	--	--	15,00	--	--	--	--
5	Koperasi Wisata/ Desa Bukit Pergasingan Desa Sembalun KEC. SEMBALUN KAB. LOMBOK TIMUR	--	--	60,00	--	--	--	--
6	Koperasi Syariah "Gunung Janggut Lestari"/ Desa Aik Berik KEC. BATUKLIANG UTARA KAB. LOMBOK TENGAH	--	--	50,00	--	--	--	--
7	PT. Berjaya Lombok Tirta/ Desa Bukit Tinggi KEC. GUNUNGSARI KAB. LOMBOK UTARA	--	--	4,00	--	--	--	--
8	BumDes Pusuk Lestari/ Desa Pusuk Lestari KEC. BATU LAYAR KAB. LOMBOK BARAT	--	--	100,00	--	--	--	--
9	Koperasi Tani Maju Bersama/ Wisata Alam Air Terjun Tiu Teja Desa Santong KEC. KAYANGAN KAB. LOMBOK UTARA	--	--	25,00	--	--	--	--
10	Yayasan Pondok Pesantren Al- Ma'arif Qamarul Huda dan Forum Kawasan Hutan Ranget/ Kawasan Hutan Lindung Ranget (RTK 6) Desa Suranadi KEC. NARMADA KAB. LOMBOK BARAT	--	--	2,60	--	--	--	--

Keterangan :
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Tabel 22. Kualitas Air Sumur *)
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

No	Lokasi Sumur	Waktu Sampling	Suhu	TDS	TSS	pH	DO	BOD	COD	Fosfat Sebagai P	Nitrit (NO ₂ ⁻)	Nitrat (NO ₃ ⁻)	Amonium (NH3-N)	Tembaga (Cu)	Besi (Fe)	Timbal (Pb)	Seng (Zn)	Clourida (Cl ⁻)	Flourida (F)	Belerang Sebagai H ₂ S	E. Coli	Total Coliform
			°C	mg/L	mg/L	-	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	MPN/100mL

Keterangan: *) Data tidak tersedia
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Tabel 23. Kualitas Air Laut
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2017

No	Nama Lokasi	Bujur Timur	Lintang Selatan	Suhu °C	Kecerahan cm	TSS mg/l	pH	Salinitas Promil	DO mg/l	BOD mg/l	COD mg/l	Nitrat mg/l	Fosfat mg/l	Nitrit mg/l	Amonia mg/l
1	Teluk Bima														
	Pantai Keu	118° 42' 36,82"	8° 22' 51,30"	27,8	950	0,013	8,42	31,8	8,7	10	100	0,01	0,42	0,009	< 0,001
	P.Kambing Timur	118° 41' 56,94"	8° 26' 53,58"	28,8	220	0,014	8,39	33,5	5,19	4	123	0,02	0,58	0,003	0,002
	Mangrove sisi Barat	118° 41' 31,29"	8° 26' 9,69"	29,1	110	0,022	8,37	17,42	4,65	14	115	< 0,01	2,62	0,004	0,003
2	Teluk Cempi														
	Tanjung Batu Putih	118° 24' 22,02"	8° 39' 55,82"	28,3	320	0,017	8,4	32,8	6,2	3	10,3	< 0,001	0,62	0,005	< 0,001
	Soro Adu	118° 25' 18,90"	8° 40' 27,11"	28,4	760	0,019	8,43	33	5,65	3	13,6	< 0,001	0,23	0,005	0,01
	Hu`u	118° 23' 46,30"	8° 45' 11,90"	29	360	0,018	8,36	33,7	5,71	9	12,4	< 0,001	0,15	0,004	0,001
3	Teluk Sanggar														
	Kore	118° 17' 55,71"	8° 21' 42,21"	27,5	800	0,013	8,18	30,2	6,65	4	16	< 0,01	0,73	0,001	0,01
	Takad Pase	118° 17' 35,91"	8° 21' 18,16"	27,7	1000	0,015	7,14	31,8	6,28	5	14	< 0,01	0,26	0,002	< 0,001
	Nisa	118° 16' 59,23"	8° 21' 17,93"	27,9	1000	0,012	7,96	32,5	32,5	6	17	< 0,01	0,16	0,004	< 0,001
4	Gili Matra														
	Sira	116° 6' 56,16"	8° 21' 49,97"	28,3	450	0,009	8,41	30	6,55	1	1,4	< 0,01	0,62	0,006	0,001
	Jambi Anom	116° 7' 55,02"	8° 21' 36,32"	28,7	500	0,01	8,47	31,1	7,91	6	13,6	0,01	0,22	0,004	0,001
	Nipah	116° 2' 31,24"	8° 25' 43,67"	27,5	1300	0,015	8,4	32,9	6,56	6	9	< 0,01	0,3	0,004	0,008
5	Senggigi & Mataram														
	Senggigi	116° 2' 33,34"	8° 29' 50,06"	28,2	900	0,01	8,51	33	6,46	4	14,5	0,01	0,9	0,008	0,004
	Duduk	116° 3' 22,392"	8° 30' 56,34"	27,4	900	0,003	8,51	33,2	8,14	4	13,5	0,01	0,98	0,009	0,003
	Montong	116° 3' 41,53"	8° 32' 33,55"	27,8	800	0,014	8,49	33,2	7,21	5	23	0,02	0,32	0,004	0,001
6	Sekotong														
	Loang Landak	115° 58' 32,87"	8° 42' 34,05"	27,7	700	0,006	8,37	32,2	5,95	4	11,4	0,02	0,22	0,004	0,007
	Takad Kembar	116° 1' 0,55"	8° 43' 54,95"	27,6	830	0,018	7,9	33	5,91	5	14,9	< 0,01	0,51	0,003	< 0,001
	Selat Gili Sudak	116° 1' 10,66"	8° 43' 30,89"	28	600	0,01	8,12	33,2	6,41	4	19	0,01	0,45	0,002	< 0,001

Keterangan :

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB

Tabel 24. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

NO	Nama dan Lokasi Stasiun Pengamat	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agsts	Sept	Okt	Nov	Des
1	LOMBOK BARAT/KEDIRI	449	227	99	92	18	41	1	12	89	55	361	149
2	LOMBOK TENGAH/BIL	458	291	325	34	1	9	6	9	5	0	247	112
3	SUMBAWA/ STAMET SUMBAWA	208	268	170	17	0	–	–	0	19	–	162	166
4	BIMA/STAMET BIMA	349	191	137	30	0	5	–	3	14	4	129	277

Keterangan :

Sumber : BMKG PROVINSI NTB

Tabel 25. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2017

No.	Kabupaten/Kota	Ledeng	Sumur	Sungai	Hujan	Kemasan	Lainnya
1	Lombok Barat	35.169	105.305	-	-	-	7.948
2	Lombok Tengah	50.806	128.935	-	-	-	947
3	Lombok Timur	151.219	100.654	-	-	-	8.610
4	Sumbawa	53.270	27.043	-	-	-	4.347
5	Dompu	18.624	5.176	-	-	-	20.863
6	Bima	14.327	31.854	-	-	-	41.544
7	Sumbawa Barat	7.307	19.259	-	-	-	2.275
8	Lombok Utara	15.585	7.714	-	-	-	14.404
9	Kota Mataram	74.939	20.495	-	-	-	8.075
10	Kota Bima	25.164	4.155	-	-	-	2.789

Keterangan :

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Tabel 26. Kualitas Air Hujan
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data: 2017

Waktu Pemantauan	pH	DHL	SO₄	NO₃	Cl	NH₄	Na
Jan	6.14	16.1	1.475	0.291	2.205	0.360	0.911
Feb	5.76	11.3	0.782	0.361	1.240	0.052	0.640
Mar	6.19	14.6	1.189	0.789	1.094	0.170	11.266
Apr	5.77	12.6	0.822	0.715	0.667	0.370	0.367
Mei	5.91	11.0	0.873	0.526	1.030	0.231	0.434
Juni	6.33	10.3	0.880	0.484	1.087	0.301	0.561
Juli	0	0	0	0	0	0	0
Agst	0	0	0	0	0	0	0
Sept	5.71	60.3	4.974	8.884	9.401	0.804	4.601
Okt	5.98	36.8	1.605	1.751	1.888	1.801	0.959
Nov	6.05	41.4	1.572	6.435	0.997	12.787	2.290
Des							

Keterangan:

Sumber : Badan Meteorologi dan Geofisika Provinsi NTB

Ca²⁺	Mg²⁺
0.805	0.208
0.463	0.176
3.219	0.719
0.495	0.102
0.372	0.089
0.535	0.121
0	0
0	0
2.987	0.674
1.396	0.156
4.655	0.445

Tabel 27. Kondisi Sungai-sungai Utama
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data: 2018

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Luas (km2)	Lebar Dasar)	Kedalaman)	Debit (m3/dtk)	
						Maks	Min
I	Kota Mataram						
1	Berenyok	6,78	25,55	-	-	-	-
2	Ancar	20,42	22,89	-	-	-	-
3	Jangkok	47,11	170,30	-	-	-	-
II	Kabupaten Lombok Barat			-	-	-	-
1	Jelateng	12,47	39,21	-	-	-	-
2	Tibuli	3,77	12,63	-	-	-	-
3	Dododkan	67,05	581,40	-	-	-	-
4	Babak	55,31	260,42	-	-	-	-
5	Kelongkong	19,65	32,94	-	-	-	-
6	Meninting- Midang	45,97	147,61	-	-	-	-
III	Kabupaten Lombok Utara			-	-	-	-
1	Rangsot	9,43	9,30	-	-	-	-
2	Gol	6,36	3,93	-	-	-	-
3	Benkak	8	6,75	-	-	-	-
4	Sokong	15,44	42,97	-	-	-	-
5	Segare	31,41	133,81	-	-	-	-
6	Luk	18,26	44,42	-	-	-	-
7	Penggolong	10,47	5,36	-	-	-	-
8	Sidutan	27,17	48,36	-	-	-	-
9	Brangringin	9,2	10,51	-	-	-	-
10	Lebah Pebali	10,28	9,94	-	-	-	-
11	Lendang Bahagia	6,32	4,38	-	-	-	-
12	Amor - Amor	23,59	60,42	-	-	-	-
13	Koangan	22,9	31,24	-	-	-	-
14	Reak	22,36	37,81	-	-	-	-
IV	Kabupaten Lombok Tengah			-	-	-	-
1	Renggung- Perempung	47,45	210,25	-	-	-	-
V	Kabupaten Lombok Timur			-	-	-	-
1	Beburung	26,3	89,34	-	-	-	-
2	Runggang	9,9	15,24	-	-	-	-
3	Belik	6,13	7,87	-	-	-	-
4	Mentareng	6,07	9,28	-	-	-	-
5	Nangka	16,5	33,03	-	-	-	-
6	Hangat	10,46	7,62	-	-	-	-
7	Rajak	13,94	17,14	-	-	-	-
8	Sambelia	21,15	57,59	-	-	-	-
9	Desa	28,79	73,47	-	-	-	-
10	Tanggik	30,33	92,71	-	-	-	-
11	Kukusan	34,13	92,00	-	-	-	-
12	Tojang	27,83	40,27	-	-	-	-
13	Geres Serodong	37,41	62,18	-	-	-	-
14	Belimbing	39,59	142,35	-	-	-	-
15	Aik Ampat	42,53	102,56	-	-	-	-
16	Menangapaok	8,93	12,34	-	-	-	-
17	Moyot	22,46	24,09	-	-	-	-
18	Palung	48,41	129,46	-	-	-	-
19	Kedome		30,79	-	-	-	-

20	Rere Penembem	18,04	60,27	-	-	-	-
VI	Kabupaten Sumbawa Barat			-	-	-	-
1	Brang Rea		846,25	-	-	-	-
2	Brang Sejongong		55,28	-	-	-	-
3	Brang Labuan		18,38	-	-	-	-
4	Brang Tebisu		11,62	-	-	-	-
5	Brang Tongoloka		53,64	-	-	-	-
6	Boa Nangaena		38,51	-	-	-	-
7	Brang Tatar		190,23	-	-	-	-
8	Brang Talonang		47,18	-	-	-	-
9	Brang Sepang		46,01	-	-	-	-
10	Brang Sekongkang		46,18	-	-	-	-
11	Brang Maluk		12,89	-	-	-	-
12	Brang benete		19,10	-	-	-	-
13	Brang Batu Kritik		18,79	-	-	-	-
14	Brang Jereweh		115,86	-	-	-	-
VII	KABUPATEN SUMBAWA			-	-	-	-
1	Brang Biji		209,79	-	-	-	-
2	Brang Pamulung		39,82	-	-	-	-
3	Brang Kanar		44,89	-	-	-	-
4	Brang Rhee		213,48	-	-	-	-
5	Brang Simonbe		86,32	-	-	-	-
6	Brang Aik Surik		67,68	-	-	-	-
7	Brang Beru		15,07	-	-	-	-
8	Brang Pemang		18,81	-	-	-	-
9	Brang Putu Pedu		23,24	-	-	-	-
10	Brang rhee		213,48	-	-	-	-
11	Brang Aik Surik		67,68	-	-	-	-
12	Brang Juru Mapin		21,89	-	-	-	-
13	Brang Ode		77,21	-	-	-	-
14	Brang Kokarpit		29,02	-	-	-	-
15	Brang Mapin		44,38	-	-	-	-
16	Brang Rintih		836.254,00	-	-	-	-
17	Brang Patihung		27.305,00	-	-	-	-
18	Brang Pangulir		36.144,00	-	-	-	-
19	Brang Beh		1,532,691	-	-	-	-
20	Brang Sangone		98.965,00	-	-	-	-
21	Brang Sumpe		165,00	-	-	-	-
22	Brang Garanta		25,44	-	-	-	-
23	Brang Pulit		801,02	-	-	-	-
24	Labuan Ijuk		29,96	-	-	-	-
25	Brang Nanga Bangka		99,32	-	-	-	-
26	Brang Bera		135,54	-	-	-	-
27	Brang Kolong		47,53	-	-	-	-
28	Labuan Nanggali		202,49	-	-	-	-
29	Brang Bual		51,32	-	-	-	-
30	Olat Putrinjaran		71,00	-	-	-	-
31	Brang Sangane		98,97	-	-	-	-
32	Brang Bual		51,32	-	-	-	-
33	Brang Lamenta		34,43	-	-	-	-
34	Brang Kesaming		112,02	-	-	-	-
35	Brang sebekil		85,91	-	-	-	-
36	Brang Jemplung		34,59	-	-	-	-
37	Brang Labangka		77,36	-	-	-	-

38	Brang Asmara		23,23	-	-	-	-
39	Brang Peniris		28,21	-	-	-	-
40	Brang Bako		79,34	-	-	-	-
41	Brang Tiram		84,94	-	-	-	-
42	Brang Kua		23,27	-	-	-	-
43	Brang Ode		21,01	-	-	-	-
44	Brang Bangkong		26,75	-	-	-	-
45	Brang Putu Pedu		23,24	-	-	-	-
46	Brang Luk		12,19	-	-	-	-
47	Brang Petupedu		48,36	-	-	-	-
48	Brang Rhee		213,48	-	-	-	-
49	Brang Simonbe I		86,32	-	-	-	-
VIII	KABUPATEN DOMPU			-	-	-	-
1	Sori Raba Baka		235,34	-	-	-	-
2	Sori Laba laju		217,53	-	-	-	-
3	Rasa Bou 1		19,75	-	-	-	-
4	Rasa Bou II		107,92	-	-	-	-
5	Sori Karama		46,76	-	-	-	-
6	Sori Bonto		11,89	-	-	-	-
7	Sorim Dumu		12,55	-	-	-	-
8	Sori Kempo		19,49	-	-	-	-
9	Sori Kambu		65,57	-	-	-	-
IX	KABUPATEN BIMA			-	-	-	-
1	Sori Padolo		17,37	-	-	-	-
2	Sori Pai Sari Sape		20,92	-	-	-	-
3	Sori Brang Kandi/ Sori Tewa awali Wera		66,23	-	-	-	-
4	Sori Cangakai		52,37	-	-	-	-
5	Sori Madapangga			-	-	-	-

Keterangan: Untuk mengukur lebar permukaan diperlukan kajian lebih lanjut

Sumber : Balai Informasi Infrastruktur Wilayah Provinsi NTB

Tabel 28. Kondisi Danau/Waduk/Situ/Embung
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

NO	Nama Kab/Kota Danau/Waduk/Situ/Embung	Luas (Ha)	Volume (m3)
1	Danau Segara Anak Senaru/ Sembalun, Bayan Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur	1.100	
2	Danau Rawa Taliwang/Sumbawa Barat	1.406	
3	Danau Satonda/Dompu	84,7	
4	Danau Gili Meno/Lombok Utara	7,5	

Keterangan :

Sumber : Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dodokan Moyosari

Tabel 29. Kualitas Air Sungai
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

NO	Nama Sungai	Titik Pantau	Nama Titik Sampling		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (C)	pH	DHL (us/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	Nitrit NO2 (mg/L)	Nitrat NO3 (mg/L)	Amonia NH3 (mg/L)	Klorin Bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (ug/L)	Minyak dan Lemak (ug/L)	Detergen (ug/L)	Fecal Coliform (Jumlah/100 ml)	Total Coliform (Jumlah/100 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
			Kode Titik Sampling	Hulu - Hilir																					
1	Sungai Rabalaju - Dompu		SR 1	Hulu 1		22,5	7,02	1445	172	2	7,56	3,08	< 4	< 0.006	0,547	< 0.060				< 5	<0,060		92.000		
		SR 2	Hulu 2		22,5	7,42	2,08	1.023	2	7,55	3,03	< 4	0,008	1.414	0,075				< 5	< 0.060		160.000			
		SR 3	Tengah 1		22,6	6,85	2,91	206	3	7,32	5,13	7,84	0,073	1.754	0,211				< 5	< 0.060		≥ 240.000			
		SR 4	Tengah 2		22,6	7,17	2,93	210	3	7,35	12,60	23,52	0,037	1718,00	0,287				< 5	0,073		160.000			
		SR 5	Hilir 1		21,7	6,6	3,43	268	3	6,50	12,80	31,36	0,061	2062,00	0,138				< 5	< 0.060		≥ 240.000			
		SR 6	Hilir 2		24,2	6,94	3,49	248	4	6,56	41,60	47,04	0,059	2099,00	0,134				< 5	< 0.060		160.000			
2	Sungai Brang Rea - Sumbawa Barat		SR 1	Hulu 1		19,8	6,76	1628	66	4,0	6,27	3,02	< 4	0,022	1.324	< 0.060				< 5	< 0.060		160.000		
		SR 2	Hulu 2		19,9	6,71	1961	28	4,0	7,20	2,88	< 4	0,019	1.336	< 0.060				< 5	< 0.060		160.000			
		SR 3	Tengah 1		19,9	6,79	2,40	58	9,0	6,55	3,40	15,68	0,036	2.036	0,156				< 5	< 0.060		≥ 240.000			
		SR 4	Tengah 2		24,7	6,95	1076	78	13,0	7,53	30,20	47,04	0,023	1.578	1.708				< 5	< 0.060		≥ 240.000			
		SR 5	Hilir 1		24,3	6,81	2,45	40	18,0	7,07	40,80	54,88	0,015	1.407	1.414				< 5	< 0.060		≥ 240.000			
		SR 6	Hilir 2		19,3	6,97	2,70	190	20,0	6,19	42,40	54,88	0,024	1.924	0,986				< 5	< 0.060		≥ 240.000			
3	Sungai Sidutan - Lombok Utara		SR 1	Hulu 1		15,7	6,77	6,77	824,3	0	7,58	0,35	8,8	0,007	0,5	0				14,0	-		6.800		
		SR 2	Hulu 2		13,5	6,42	6,42	891	1	7,58	1,13	8,8	0,009	1,57	0				26,0	-		9.300			
		SR 3	Tengah 1		14,9	6,39	6,39	912,1	0	7,21	1,01	11,73	0,006	2,03	0,05				7,0	-		9.200			
		SR 4	Tengah 2		15,5	6,83	6,83	887,4	0	8,22	1,35	10,4	0,007	1,4	0,026				14,0	-		14.000			
		SR 5	Hilir 1		19,2	6,97	6,97	808,1	0	8,05	0,33	10,67	0,006	0,8	0,07				13,0	-		11.000			
		SR 6	Hilir 2		23,3	6,41	6,41	2018	0	6,41	0,87	8,27	0,008	1,6	0,01				18,0	-		14.000			
4	Sungai Brang Biji - Sumbawa		SJ1	Hulu 1		18,2	6,49	2,24	1.018	0,0	7,3	0,24	14,27	0,005	0,67	0,07				20,0	-		6.800		
		SJ2	Hulu 2		23,2	6,48	3,32	1.487	0,0	7,89	0,03	4,53	0,003	0,43	0,06				25,0	-		11.000			
		SJ3	Tengah 1		24,1	6,55	3,82	1.704	1,0	5,5	0,1	1,87	0,01	0,4	0,19				26,0	-		140.000			
		SJ4	Tengah 2		24,4	6,61	3,89	1.739	1,0	5,25	0,6	1,07	0,019	1,2	0,18				26,0	-		94.000			
		SJ5	Hilir 1		22,8	6,71	3,92	1.756	0,0	5,82	0,18	7,2	0,018	1,3	0,11				35,0	-		33.000			
		SJ6	Hilir 2		23,9	6,92	13,17	5.900	0,0	6,36	0,31	4,27	0,026	0,9	0,167				34,0	-		49.000			
5	Sungai Sori Padolo - Kota Bima		SP 1	Hulu 1		23,8	6,67	5,95	2861	1,0	7,3	2,11	12,67	0,013	0,5	0,083				14,0	-		11.000		
		SP 2	Hulu 2		23,8	7,34	6,06	2714	2,0	7,65	0,71	13,73	0,006	0,5	0,12				33,0	-		350.000			
		SP 3	Tengah 1		21,5	6,86	6,94	3119	2,0	6,14	1,63	13,07	0,032	22,7	0,22				18,0	-		68.000			
		SP 4	Tengah 2		25,0	7,31	8,65	3869	14,0	6,42	0,79	12,93	0,057	0,3	0,2				9,0	-		68.000			
		SP 5	Hilir 1		24,9	7,39	6,27	2806	1,0	5,57	1,64	14,8	0,045	0,43	0,607				24,0	-		11.000			
		SP 6	Hilir 2		25,0	6,92	37,5	1675	1,0	6,2	1,15	19,6	0,143	0,76	0,61				20,0	-		280.000			
6	Sungai Sari/Jangka - Bima		SJ 1	Hulu 1		22,1	6,88	7,83	3535	1,0	6,85	0,47	10,13	0,008	0,8	0,09				7,0	-		220.000		
		SJ 2	Hulu 2		20,7	7,56	7,51	3351	0,0	7,21	0,45	10,53	0,015	0,6	0,13				10,0	-		170.000			
		SJ 3	Tengah 1		20,9	7,63	7,74	3467	2,0	7,34	1,52	11,2	0,011	0,4	0,04				20,0	-		130.000			
		SJ 4	Tengah 2		22,8	7,05	7,68	3428	1,0	7,16	2,39	7,73	0,01	1,7	< 0,02				14,0	-		49.000			
		SJ 5	Hilir 1		22,7	7,53	7,73	3462	12,0	7,21	0,75	1,73	0,03	2,3	0,06				35,0	-		49.000			
		SJ 6	Hilir 2		25,0	7,32	6,83	3060	1,0	7,2	0,89	2,27	0,034	3,9	< 0,02				19,0	-		920.000			

Keterangan :
Sumber : Dinas Lingkungn Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Tabel 30. Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

No	Nama Bendungan	Nama Titik Sampling		Parameter FISIKA							Parameter KIMIA														Parameter BIOLOGI	
		Koordinat	Hulu - Hilir	Debit	Suhu	DHL	TDS	TSS	Kekeruhan	Warna	pH	DO	BOD	COD	Amonium (NH ₃ -N)	Flourida (F)	Clourida (Cl ⁻)	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	Minyak & Lemak	Salinititi	Besi (Fe)	Sedimen Layang	Seng (Zn)	Detergen/ MBAS	E. Coli	Total Coliform
				l/s	°C	µmhos/cm	mg/L	mg/L	NTU	Pt,Co	-	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100ml	MPN/100ml
1	Bendungan Batu Jai	116° 16' 50,75" 08° 42' 40,96"	Hulu	18	27,7	347	208	1	12	0	7,6	4	0,3	< 2	0,415	0,217	11,07	1,908	12	00,00	< 0,030	26	< 0,010	< 0,040	> 2.400.000	> 2.400.000
		116° 16' 15,00" 08° 44' 51,00"	Tengah		32	236	141	6	90	1	7,3	3,3	20,2	23,52	0,176	< 0,060	7	1,049	5	00,00	0,173	15	< 0,010	< 0,040	220.000	280.000
		116° 15' 26,00" 08° 44' 07,00"	Hilir	1,2	31,2	223	134	5	60	1	7,8	3,5	26,2	47,04	0,294	< 0,060	8,05	0,732	1	00,00	0,04	66	< 0,010	< 0,040	94.000	140.000
2	Bendungan Pengga	116° 12' 22,54" 08° 46' 30,26"	Hulu	63	29,6	169,5	114	3	70	1	7,7	3,4	14,2	1,65	0,291	< 0,060	9,05	3,089	10	00,00	< 0,030	82	< 0,010	< 0,040	> 2.400.000	> 2.400.000
		116° 11' 42,77" 08° 46' 28,85"	Tengah		30	269	162	10	18	1	7,8	3,5	14,2	15,65	0,003	< 0,060	10,06	1,672	9	00,00	< 0,030	31	< 0,010	< 0,040	540.000	920.000
		116° 11' 11,22" 08° 45' 09,57"	Hilir	650	28,3	192,5	116	1	31	1	7,1	3,5	13,5	15,65	0,383	< 0,060	14,09	1,956	13	00,00	0,074	42	< 0,010	< 0,040	220.000	280.000
3	Bendungan Pandanduri		Hulu	20	24,5	285	170	1	3,3	0	7,8	3,5	9,3	15,68	0,213	< 0,060	18,12	1,624	7	00,00	0,156	36	< 0,010	< 0,040	#####	#####
		116° 26' 24,00" 08° 40' 50,00"	Tengah		26,5	216,5	130	1	15	2	9,5	3,4	10,8	15,68	0,096	< 0,060	4,03	1,38	52	00,00	< 0,030	16	< 0,010	< 0,040	110.000	140.000
		116° 26' 17,00" 08° 41' 03,00"	Hilir	35	29,5	210,7	120	2	37	3	9,3	3	16,3	23,52	0,045	< 0,060	5,03	1,347	12	00,00	< 0,030	30	< 0,010	< 0,040	220.000	280.000
4	Bendungan Tibu Kuning	115° 54' 25,50" 08° 17' 22,00"	Hulu	10,1	29,6	928	565	1	3,9	0	7,6	5,3	0,3	< 2	0,01	0,545	70,47	17,813	7	00,00	0,206	48	< 0,010	< 0,040	540.000	920.000
		115° 54' 21,60" 08° 46' 54,80"	Tengah		31,5	45	273	1	4,5	0	7,8	4,3	7,8	15,68	0,016	0,106	30,2	4,324	11	00,00	< 0,030	42	< 0,010	< 0,040	280.000	350.000
		115° 54' 21,60" 08° 46' 59,70"	Hilir	235	31,5	45	273	1	28	0	7,8	13,5	13,2	23,52	0,08	< 0,060	26,17	4,651	21	00,00	0,463	51	< 0,010	< 0,040	350.000	540.000

Keterangan: Perubahan Nomenklatur SKPD sehingga tidak ada anggaran untuk pengujian kualitas air Danau/Embung/Waduk/Situ
Sumber : Balai Informasi Infrastruktur Wilayah Provinsi NTB

Tabel 31. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Sembarangan Prov. NTB								
		Jumlah KK	JSP	% Akses JSP	JSSP	% Akses JSSP	Sendiri (JSP + JSSP)	%	Bersama (Sharing)	% Akses Bersama (Sharing)
1	SUMBAWA BARAT	32357	31713	97,62	33	0,14	31746	98,11	611	2,23
2	KOTA MATARAM	111251	99789	89,45	5386	4,95	105175	94,54	5529	5,09
3	LOMBOK BARAT	185868	91648	48,78	29314	15,48	120962	65,08	49654	27,8
4	KOTA BIMA	39020	24557	63,22	350	0,78	24907	63,83	10234	26,19
5	BIMA	121330	68939	56,84	11150	9,99	80089	66,01	24229	20,58
6	LOMBOK UTARA	62137	36292	58,21	7319	13,07	43611	70,19	10603	15,31
7	DOMPU	61371	29592	47,73	12481	21,5	42073	68,56	10260	16,25
8	SUMBAWA	119762	75540	61,86	4263	3,86	79803	66,63	20669	16,43
9	LOMBOK TENGAH	317184	172565	53,96	47828	14,91	220393	69,48	40851	12,91
10	LOMBOK TIMUR	395280	262223	66,16	33298	8,46	295521	74,76	24792	5,99
JUMLAH		1445560	892858		151422		1044280	72,24	197432	14,56

Keterangan :

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 32. Jumlah Penduduk Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

NO	KABUPATEN/KOTA	Tidak Sekolah		SD		SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2		S3	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	LOMBOK BARAT	110.913	122.482	86.318	90.920	45.272	43.464	63.090	46.592	2026	2687	11.240	9648	869	347	79	22
2	LOMBOK TENGAH	163.856	184.469	103.879	113.590	70.892	70.869	81.572	57.849	2616	3250	17.004	13.162	932	273	110	94
3	LOMBOK TIMUR	185.822	188.467	171.702	180.788	90.254	93.741	88.847	73.564	2666	3766	22.004	17.861	1086	401	108	100
4	SUMBAWA	54.290	53.147	72.074	78.835	37.808	39.438	45.738	38.832	1929	2766	8861	7959	384	179	17	17
5	DOMPU	40.962	40.606	13.372	14.670	11.638	12.492	20.601	17.249	827	1283	4811	4268	174	64	8	1
6	BIMA	66.261	65.165	55.202	56.683	29.175	31.392	65.305	58.721	1121	1922	11.617	11.183	379	135	41	38
7	SUMBAWA BARAT	19.101	18.908	18.166	21.495	7790	9490	14.094	10.672	539	913	3056	3124	189	74	6	2
8	LOMBOK UTARA	37.754	43.105	27.691	28.702	13.760	14.395	18.429	12.653	572	693	3370	2288	125	37	6	1
9	KOTA MATARAM	50.886	54.553	19.089	22.945	26.283	27.528	59.262	50.113	3169	4478	18.803	17.404	2319	1183	244	75
10	KOTA BIMA	18.154	17.609	7634	8792	7687	8632	21.419	20.589	822	1432	6372	6000	401	158	13	-
TOTAL		747.999	788.509	575.127	617.420	340.559	351.441	478.357	386.834	16.287	23.190	107.138	92.897	6858	2851	627	350

Keterangan :

L = Laki-Laki

P = Perempuan

Sumber : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI NTB

**Tabel 33. Jenis Penyakit Utama yang diderita Penduduk
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018**

No	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
1	Infeksi pada Saluran pernapasan bagian atas (ISPA)	318578
2	Penyakit Tekanan Darah Tinggi/Hypertensi	214080
3	Diare (termasuk tersangka kolera)	56759
4	Infeksi Akut pada saluran pernapasan bagian atas	44582
5	Kecelakaan dan Ruda Paksa	43953
6	Penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat (Rem)	41594
7	Gastritis	39161
8	Dispepsia	35880
9	Diabetes Melitus	33828
10	Observasi Febris	30186

Keterangan :

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 34. Jumlah Rumah Tangga Miskin
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

KABUPATEN	KEC BERBATASAN	KEC NTB	% KEC	DESA BERBATASAN	DESA NTB	% DESA BERBATASAN	JML PDD MISKIN SKTR KWS	JML PENDUDUK MISKIN SELURUHNYA	PENDUDUK NTB	% MISKIN SEKITAR per SELURUH	% MISKIN SEKITAR per JML PENDUDUK	% MISKIN per JML PENDUDUK	DESIL 1 SEKITAR	DESIL 2 SEKITAR	DESIL 3 SEKITAR	DESIL 4 SEKITAR	JUMLAH KK MISKIN SEKITAR	DESIL 1 SELURUH	DESIL 2 SELURUH	DESIL 3 SELURUH	DESIL 4 SELURUH	JML KK MISKIN SELURUHNYA	JML KK NTB	% KK MISKIN SEKITAR per SELURUH	% KK MISKIN SEKITAR per NTB	% KK MISKIN SELURUH per NTB
LOMBOK BARAT	8	10	80,00	42	122	34,43	130.560	349.367	711.712	37,37	18,34	49,09	16.282,00	10.552,00	7.004,00	5.872,00	39.549,00	37.620,00	27.500,00	20.229,00	17.944,00	103.293	229.998	38,29	17,20	44,91
LOMBOK TENGAH	6	12	50,00	26	139	18,71	102.160	501.616	1.032.258	20,37	9,90	48,59	18.815,00	7.607,00	3.651,00	2.525,00	32.598,00	70.543,00	43.023,00	26.997,00	22.825,00	163.388	313.306	19,95	10,40	52,15
LOMBOK TIMUR	10	20	50,00	43	254	16,93	115.834	707.558	1.286.048	16,37	9,01	55,02	16.520,00	8.720,00	6.788,00	4.406,00	36.434,00	93.335,00	53.645,00	42.499,00	30.827,00	220.306	381.584	16,54	9,55	57,73
SUMBAWA	23	24	95,83	115	166	69,28	117.499	158.581	507.715	74,09	23,14	31,23	6.000,00	7.867,00	10.543,00	7.599,00	32.009,00	7.787,00	10.137,00	14.160,00	10.722,00	42.806	141.738	74,78	22,58	30,20
DOMPU	8	8	100,00	58	81	71,60	82.071	114.044	214.152	71,96	38,32	53,25	4.187,00	7.133,00	7.091,00	3.581,00	21.992,00	5.509,00	9.603,00	10.097,00	5.501,00	30.710	56.599	71,61	38,86	54,26
BIMA	17	18	94,44	113	198	57,07	145.924	228.236	523.111	63,94	27,90	43,63	12.787,00	11.953,00	11.041,00	5.617,00	41.398,00	17.488,00	17.751,00	17.626,00	9.055,00	61.920	142.711	66,86	29,01	43,39
SUMBAWA BARAT	8	8	100,00	53	65	81,54	44.832	55.945	134.343	80,14	33,37	41,64	5.240,00	2.067,00	2.232,00	2.185,00	11.724,00	6.240,00	2.566,00	2.874,00	2.901,00	14.581	37.584	80,41	31,19	38,80
LOMBOK UTARA	5	5	100,00	24	33	72,73	95.381	123.957	232.747	76,95	40,98	53,26	18.399,00	5.713,00	2.430,00	1.115,00	27.657,00	22.661,00	8.127,00	3.789,00	1.813,00	36.390	69.989	76,00	39,52	51,99
KOTA BIMA	3	5	60,00	12	38	31,58	27.732	59.637	139.366	46,50	19,90	42,79	2.578,00	1.475,00	2.037,00	1.425,00	7.515,00	4.591,00	2.902,00	4.495,00	3.651,00	15.639	39.304	48,05	19,12	39,79
KOTA MATARAM	-	6	-	-	50	-	-	138.664	417.354	-	-	33,22	-	-	-	-	-	17.685,00	6.829,00	5.965,00	5.242,00	35.721	116.297	-	-	30,72
TOTAL	88	116	75,86	486	1.146	42,41	861.993	2.437.605	5.198.806	35,36	16,58	46,89	100.808,00	63.087,00	52.817,00	34.325,00	250.876,00	100.808,00	63.087,00	52.817,00	34.325,00	724.754	1.529.110	34,62	16,41	47,40

0,35

Keterangan :
Sumber : Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 35. Jumlah Limbah Padat dan Cair Berdasarkan Sumber Pencemaran
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

No	Sumber Pencemar	Type / Jenis / Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (m3/hari *)	Volume Limbah Cair (m3/hari)	Volume Limbah B3 Padat (m3/hari *)	Volume Limbah B3 Cair (m3/hari *)
A. Bergerak							
1	Mandalika	Terminal	1				
2	Sila		0,05				
3	Kempo		0,23				
4	Sambinae		0,04				
5	Ampenan		0,25				
6	Lembar		0,21				
7	Narmada		0,41				
8	Kopang		0,54				
9	Prava		1,02				
10	Labuhan Haji		0,15				
11	Masbagik		0,25				
12	Sumer Payung		0,29				
13	Empang		0,27				
14	Taliwang		0,28				
15	Alas		0,32				
16	Gerung		-				
17	Woha		-				
18	Tanjung		0,21				
19	Keruak		0,16				
20	Labuhan Lombok		0,25				
21	Dara		0,09				
22	Tente		0,10				
23	Sape		0,10				
24	Kumbe		0,10				
25	Dompu		0,12				
26	Pelabuhan Lembar	Pelabuhan	100				
27	Pelabuhan Kavangan		120				
28	Pelabuhan Poto Tano		75				
29	Pelabuhan Sape	Bandara	5				
30	Bandara Lombok Internasional		67,789				
31	Bandara Sultan Kaharuddin		75				
32	Bandara Sultan Salahuddin		75				
B. Tidak Bergerak							
1	RSUP Prop. NTB	Rumah Sakit					
2	RSI Siti Hajar						
3	RSK St. Antonius						
4	RS Risa Sentra Medika						
5	RS Bhayangkara						
6	RS Biomedika						
7	RSU Praya						
8	RS Yatofa						
9	RSUD Kabupaten Lombok						
10	RSUD Selong						
11	RS. Risa						
12	RSUD Lombok Barat						
13	RSUD Kota Mataram						
14	RSUD Bima						
15	RSU Persiapan Sondosia						
16	RSUD Dompu						
17	RSUD KSB						
18	RSUD Sumbawa						
19	RSUD Kota Bima						

Keterangan : *) Data tidak tersedia

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi NTB
Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Tabel 36. Suhu Udara Rata-Rata Bulanan
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

NO	Nama dan Lokasi Stasiun	Suhu Udara Rata-Rata Bulanan (C)											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	LOMBOK BARAT	26,5	26,7	27,1	27,6	26,7	25,8	25,1	24,9	26,1	27,4	27,8	27,8
2	LOMBOK TENGAH	26,2	26,4	26,6	27,0	24,9	25,9	25,0	24,9	26,1	27,6	27,6	27,6
3	SUMBAWA/STAMET SUMBAWA	26,6	26,2	26,5	27,9	27,7	27,0	26,5	26,4	27,7	29,5	29,0	28,1
4	BIMA/STAMET BIMA	27,2	26,8	27,3	27,8	27,2	26,6	25,7	26,0	27,2	28,8	28,9	28,1

Keterangan :

Sumber : BMKG PROVINSI NTB

Tabel 37. Kualitas Udara Ambien

Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Tahun Data : 2018

Lokasi	Peruntukan	SO2 (ug/Nm3)	No2 (ug/Nm3)	O2 (ug/Nm3)	HC (ug/Nm3)	PM10 (ug/Nm3)	PM2,5 (ug/Nm3)	TSP (ug/Nm3)	Pb (ug/Nm3)	Dustfall (ug/Nm3)	Total Fluorides sebagai F	Fluor Index (ug/Nm3)	Khlorine dan Khlorine Dioksida	Sulphat Index (ug/Nm3)
KABUPATEN LOMBOK BARAT	Transportasi	6,92	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Industri	8,61	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemukiman	7,31	4,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perkantoran	9,96	3,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KABUPATEN LOMBOK TENGAH	Transportasi	< 2,57	8,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Industri	4,23	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemukiman	6,55	7,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perkantoran	6,49	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KABUPATEN LOMBOK TIMUR	Transportasi	6,14	15,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Industri	4,40	11,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemukiman	6,03	6,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perkantoran	3,80	11,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KABUPATEN SUMBAWA	Transportasi	8,27	15,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Industri	7,95	15,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemukiman	4,84	7,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perkantoran	< 2,57	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KABUPATEN DOMPU	Transportasi	9,20	25,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Industri	< 2,57	8,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemukiman	3,92	8,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perkantoran	4,32	9,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KABUPATEN BIMA	Transportasi	< 2,57	5,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Industri	23,23	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemukiman	13,12	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perkantoran	13,90	14,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KABUPATEN SUMBAWA BARAT	Transportasi	16,11	11,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Industri	10,28	11,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemukiman	21,84	11,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perkantoran	< 2,57	7,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KABUPATEN LOMBOK UTARA	Transportasi	7,71	5,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Industri	7,14	6,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemukiman	2,80	5,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perkantoran	3,97	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KOTA MATARAM	Transportasi	4,66	13,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Industri	13,90	9,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemukiman	4,83	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perkantoran	16,54	17,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KOTA BIMA	Transportasi	7,91	13,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Industri	16,02	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemukiman	11,68	13,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perkantoran	11,95	14,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Tabel 38. Penggunaan Bahan Bakar Industri Dan Rumah Tangga
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

No	Penggunaan	Minyak Bakar (Kilo Liter)	Minyak Tanah (Kilo Liter)	Gas (Kilo Liter)	Batubara (Kilo Liter)
A	Industri	-	-	-	-
1	Kimia Dasar	-	-	-	-
2	Mesin dan Logam Dasar	-	-	-	-
3	Industri Kecil	-	-	-	-
4	Aneka Industri	-	-	-	-
		-	-	-	-
B	Rumah Tangga	-	-	-	-
		-	-	-	-
C	Kendaraan	-	-	-	-
1	Mobil Beban	-	-	-	-
2	Penumpang Pribadi	-	-	-	-
3	Penumpang umum	-	-	-	-
4	Bus besar pribadi	-	-	-	-
5	Bus besar umum	-	-	-	-
6	Bus Kecil pribadi	-	-	-	-
7	Bus kecil umum	-	-	-	-
8	Truck Besar	-	-	-	-
9	Truck Kecil	-	-	-	-
10	Roda Tiga	-	-	-	-
11	Roda Dua	-	-	-	-
TOTAL		-	39.000	-	-

Keterangan : Data yang tersedia pada Dinas ESDM terpisah tiap Kabupaten/Kota bukan berdasarkan
Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB

LPG (Kilo Gram)	Briket (Kilo Liter)	Kayu Bakar (Kilo Liter)	Biomassa (Kilo Liter)	Bensin (Kilo Liter)	Solar (Kilo Liter)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
76.223.040				328.879	155.300

an penggunaan

Tabel 39 Penggunaan Bahan Bakar
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

No	Kabupaten/Kota	Premium (KL)	Solar (KL)	Kerosene / Minyak Tanah (KL)	LPG (Kg)
1	Kodya Mataram	43.856	12.624	-	16.159.920
2	Kota Bima	21.331	10.366	5.830	-
3	Kab. Bima	24.389	10.188	8.280	-
4	Kab. Dompu	26.020	15.429	6.310	-
5	Kab. Lombok Barat	40.930	23.830	-	13.639.920
6	Kab. Lombok Tengah	52.986	19.369	-	19.629.120
7	Kab. Lombok Timur	58.536	24.193	-	22.636.080
8	Kab. Sumbawa	39.887	30.304	14.935	-
9	Kab. Sumbawa Barat	10.930	6.889	3.645	-
10	Kab. Lombok Utara	10.032	2.108	-	4.158.000
Total		328.897	155.300	39.000	76.223.040

Keterangan : Data yang tersedia pada Dinas ESDM terpisah tiap Kabupaten/Kota

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB

Tabel 40. Tabel Perubahan Penambahan Ruas Jalan
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

No	Jenis Jalan	Panjang (km)		
		2013	2014	2015
1	Jalan Kelas I	-	65,93	133,70
2	Jalan Kelas II			
4	Jalan Kelas III A	753,38	1.196,29	1.464,32
5	Jalan Kelas III B	825,31	948,46	915,15
6	Jalan Kelas III C	59,38	59,38	59,38
7	Belum Tembus/Tidak Dirinci	134,20	134,20	134,20
TOTAL		1.772,27	2.404,26	2.706,75

Keterangan:

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Tabel 41. Dokumen Izin Lingkungan
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

NO	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
1	DPLH	Kegiatan Jaringan Tegangan Menengah 20 kV di Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa	PT. PLN (Pesero) Wilayah NTB Area Sumbawa
2	AMDAL	Rencana Kegiatan Penambangan Emasn dan Mineral Pengikutnya di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.	PT. Indotan lombok Barat Bangkit (PT. ILBB)
3	UKL-UPL	Rencana Pembangunan Jetty Dolphin, Pemasangan Pipa dan Operasional Packing Plant 1 x 5000 Ton Steel Silo	PT. Wiharco Prima
4	UKL-UPL	Kegiatan Pembangunan Galangan/Docking Kapal dan Fasilitas Pendukungnya	PT. Pantai Damai Sejahtera
5	UKL-UPL	Rencana Kegiatan Pembangunan Terminal Khusus Wisata, Dusun Tanjungan, Desa Gili Indah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB	PT. Marina Del Ray
6	DPLH	Kegiatan Operasional Pelabuhan Khusus Pariwisata Oleh PT. Gde & Kadek Brothers Layar Antarnusa	PT. Gde & Kadek Brothers Layar Antarnusa
7	UKL-UPL	Kegiatan Budidaya Tambak Udang di Desa Kayangan Kecamatan Kayangan Kab. Lombok Utara	PT. Panen Berkas Sejahtera
8	AMDAL (Addendum)	Kegiatan Usaha penambangan pasir laut di Perairan Laut Selat Alas, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB	PT. Dinamika Atria Raya
9	UKL-UPL	Kegiatan Reklamasi dan Operasional Pelabuhan Penyeberangan Sape di Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
10	AMDAL	Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Seluas 7.230 Ha di Kecamatan Moyo Utara, Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh PT. Esa Sampoerna Agro	PT. Esa Sampoerna Agro
11	UKL-UPL	Rencana Usaha dan atau Budidaya Tambak Udang di Lokasi Dusun Amor-Amor Desa Gumantar, Kec. Kayangan, Kabupaten Lombok Utara	PT. Sumber Agromina Jaya
12	UKL-UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan pembangunan Tambak Udang di Desa Sambik Elen, Kec. Bayan, Kabupaten Lombok Utara	An. Hendry Setiawan
13	UKL-UPL	Rencana Pembangunan Convensional Buoy Mooring (CBM) Kapasitas 17.500 DWT di TTBM Ampenan	PT. Pertamina (Persero)
14	UKL-UPL	Pekerjaan Pengerukan Pelabuhan Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur, Prov. NTB	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lombok Timur
15	AMDAL (Addendum)	Perubahan Pengembangan Kawasan Pariwisata Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Prov. NTB	PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) ITDC
16	AMDAL	Kegiatan Pembangunan Galangan/Docking Kapal dan Fasilitas Pendukungnya di Desa Labuan Tereng, Kec. Lembar	PT. Pantai Damai Sejahtera

17	AMDAL	Pengembangan Pelabuhan Lalar di Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat	Dinas PU Kab. Sumbawa Barat
18	UKL-UPL	Rencana Pengembangan Fasilitas Terminal Liquid Petroleum Gas (LPG) di TBBM Bima	PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V
19	UKL-UPL	Pembangunann SUTT 150 kV dan GI Jalur GI Mataram – GI Switching Mataram	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara
20	UKL-UPL	Rencana Kegiatan Pembangunan Pengaman Pantai (Break Water) dan Pipe Line MFO di PLTD Ampenan Oleh PT. PLN (Persero) Wil NTB Sektor Pembangkit Lombok	PT. PLN (Persero) Wil NTB Sektor Pembangkit Lombok

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungn Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Tabel 42. Perusahaan yang mendapat izin mengelola LB3
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

No	Nama Perusahaan	Jenis usaha	Ada/Tidak	Jenis Izin No Izin
MATARAM				
1	PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Lombok PLTD AMPENAN	Pembangkit listrik	ada ijin	
2	PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Lombok PLTD TAMAN	Pembangkit listrik	ada ijin	
3	PT PERTAMINA (Persero) – TBBM Ampenan	Migas distribusi	ada ijin	
4	PT. Wahyu Nusantara Indah	Pengumpul LB3	ada ijin	
5	PT Anugrah Mandiri Jaya Energi	Pengumpul LB3	ada ijin	
6	RSU Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rumah sakit	ada ijin	
7	RSU Kota Mataram	Rumah sakit	ada ijin	
8	Hotel Grand Legi	Hotel	ada ijin	
9	Hotel Lombok Rava	Hotel	ada ijin	
10	HOTEL LOMBOK PLAZA	Hotel	ada ijin	
11	Hotel Lombok Garden	Hotel	ada ijin	
12	Hotel Santika Mataram Lombok	Hotel	ada ijin	
13	RUMAH SAKIT RISA SENTRA MEDIKA	Rumah sakit	ada ijin	
14	RSUD KOTA MATARAM	Rumah sakit	ada ijin	
15	RUMAH SAKIT HARAPAN KELUARGA	Rumah sakit	ada ijin	
16	RUMAH SAKIT ISLAM SITI HAJAR	Rumah sakit	Tidak ada	
LOMBOK BARAT				
17	PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Lombok – PLTU Jeranjang	Pembangkit listrik	ada ijin	Penyimpanan LB3 Padat dan cair
				Penyimpanan LB3 Fly Ash dan Bottom Ash
				Penyimpanan LB3 Fly Ash
				Penyimpanan LB3 Bottom Ash
18	RSUD PATUT PATUH PATJU	Hotel	ada ijin	
19	ASTON SUNSET BEACH RESORT	Hotel	ada ijin	
20	Sheraton Senggigi Beach Resort	Hotel	ada ijin	
21	The Jayakarta Lombok Beach Resort & Spa	Hotel	ada ijin	
22	The Santosa Villas and Resort Lombok	Hotel	ada ijin	
23	Hotel Holiday Resort Lombok	Hotel	ada ijin	
24	PT Phonix Mas Percada	Hotel	Tidak ada	
25	PT. NARMADA AWET MUDA	Hotel	ada ijin	
LOMBOK UTARA				
26	Jeeva Klui Resort	Hotel		
27	Hotel Vila Ombak	Hotel	ada ijin	
28	The Oberoi Lombok	Hotel	ada ijin	
29	HOTEL TUGU LOMBOK	Hotel	Tidak ada	
30	The Lombok Lodge	Hotel	Tidak ada	
31	Hotel Puri Saron	Hotel	Tidak ada	
LOMBOK TENGAH				
32	PT PERTAMINA – DPPU Lombok Group	Migas distribusi	ada ijin	
33	RSUD PRAYA	Rumah sakit	ada ijin	
34	PT. Istana Putri Mandalika/Hotel Novotel Lombok	Hotel	ada ijin	
LOMBOK TIMUR				
35	PT PLN (Persero) - PLTD PAOK MOTONG	Pembangkit listrik	ada ijin	
36	RSUD Dr. R. Soedjono Selong	Rumah sakit	ada ijin	
SUMBAWA				
37	PT PLN (Persero) – PLTD LABUHAN	Pembangkit listrik	ada ijin	
38	PT PERTAMINA (Persero) – TBBM BADAS	Migas distribusi	ada ijin	
39	PT. Moyo Safarai Abadi/Hotel Amanwana Resort	Hotel	Tidak ada	
40	Rumah Sakit Umum Kabupaten Sumbawa	Rumah sakit	ada ijin	
41	Rumah Sakit Umum Rujukan Provinsi NTB	Rumah sakit	ada ijin	
42	PT. Sumbawa Timur Mining	Tambang emas	ada ijin	
SUMBAWA BARAT				
43	PT PLN (Persero) - PLTD TALIWANG	Pembangkit listrik	ada ijin	Penyimpanan sementara LB3 Oli bekas, filter oli bekas, majun, dinamo bekas, lampu bekas, drum oli bekas
44	Hotel Grand Royal Taliwang	Hotel	ada ijin	
45	PT Amman Mineral	Tambang emas	ada ijin	
46	PT Bumi Harapan Jaya	Tambak Udang	ada ijin	Penyimpanan sementara LB3 Oli bekas, filter oli bekas, majun, dinamo bekas, lampu bekas
47	RSUD Asy-Syifa'	Rumah sakit	ada ijin	Penyimpanan sementara LB3 Limbah medis, lampu bekas
DOMPU				
48	PT PLN (Persero) – PLTD Dompu	Pembangkit listrik	ada ijin	
49	PT Sukses Mantap Sejahtera	Pabrik gula	ada ijin	
KOTA BIMA				
50	PT PLN (Persero) – PLTD BIMA	Pembangkit listrik	ada ijin	
51	PT PLN (Persero) – PLTD NI'U	Pembangkit listrik	ada ijin	
52	PT PERTAMINA (Persero) – TBBM BIMA	Migas distribusi	ada ijin	

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungn Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Tabel 43. Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL))

Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Tahun Data : 2018

NO	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu	Hasil Pengawasan
1	Koperasi Karyawan (Kokar) Katala	10 Juli 2018	1.) Perusahaan telah memiliki kelayakan lingkungan berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 814/340/II/BPD/2005 tanggal 18 Agustus 2005 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Lapangan Golf di Desa Sekongkang Atas Kabupaten Sumbawa Barat oleh Koperasi Karyawan Katala. 2.) Perusahaan telah mengelola air limbah domestic yang dihasilkan dengan mengolah air limbahnya pada IPAL Domestik PT. AMNT 3.) Perusahaan belum melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) setiap enam (6) bulan sekali kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bupati Sumbawa Barat, DLH Provinsi NTB dan DLH Kabupaten Sumbawa Barat
2	Bandara Sultan M. Salahuddin Bima	05-Sep-18	1.) Perusahaan telah memiliki Ijin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 503/12/03/LINK/BKPMPT/2015 2.) Perusahaan belum melaksanakan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan Matriks RKL-RPL kegiatan Bandara Udara Sultan M. Salahuddin Bima 3.) Perusahaan belum pernah melaporkan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
3	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara - PLTMG Bima Peaker 50 MW	05-Sep-18	1.) Perusahaan wajib tetap melaporkan pelaksanaan UKL UPL setiap 6 (enam) bulan sekali kepada DLHK Provinsi NTB, DLH Kota Bima dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI 2.) Lokasi pembuangan sampah perlu di jaga housekeepingnya dan dibuatkan pagar pembatas agar sampah tidak jatuh dan mencemari laut 3.) Perusahaan wajib membuat TPS LB3 sesuai dengan Keputusan Kepala Bapedal Nomor 1 Tahun 1995
4	PT. Sumbawa Jutaraya	31 Agustus 2018	1.) Perusahaan agar menyerahkan salinan dokumen Adenum ANDAL Kegiatan Operasi Pertambangan Bahan Galian Emas dan Mineral Pengkitkutnya di Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB kepada DLHK Provinsi Nusa Tenggara Barat paling lambat tanggal 30 september 2018 2.) Perusahaan agar melengkapi laporan Dokumen RKL -RPL dengan grafik hasil ui dari masing-masing pengujian 3.) Perusahaan wajib memantau kualitas air sungai, sumur pantau, air limbah tambang, air limbah proses pengelolaan air minum, air tanah. Sumur bor (hulu dan hlir tailing dam) sesuai dengan Matriks Program Pemantauan Lingkungan Area IUP PT. SJR (Kegiatan Operasi Produksi dan Eksplorasi Lanjutan) 4.) Perusahaan wajib tetap melaporkan pelaksanaan RKL -RPL setiap enam (6) bulan sekali kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bupati Sumbawa, Dinas ESDM Provinsi NTB dan DLHK Provinsi NTB dan KLHK 5.) Perusahaan wajib menguji emisi gas buang mesin genset dengan menggunakan metode isokinetik dan melaporkan perhitungan gas rumah kaca yang dihasilkan bagi industri yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

5	PT. Sumbawa Timur Mining	31 Agustus 2018	1.) Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan dan melaporkan kepada instansi terkait mengenai perkembangan kegiatan perusahaan sesuai ketentuan dalam kontrak karya 2.) Perusahaan wajib tetap melaporkan pelaksanaan RKL -RPL setiap enam (6) bulan sekali kepada DLHK Provinsi NTB, Dinas ESDM Provinsi NTB, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, DLH Kabupaten Dompu, DLH Kabupaten Bima, Bupati Dompu, Bupati Bima, dan KLHK 3.) Perusahaan wajib tetap melakukan Pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dan menyerahkan ke pihak ketiga yang berizin
6	PT. Usahatani Lestari	05-Sep-18	1.) Tim pengawasan DLHK Provinsi NTB berkoordinasi dengan DLH Kabupaten Bima karena pada saat pengawasan ke lapangan (lokasi kegiatan) pimpinan atau pihak yang bertanggung jawab dari pihak perusahaan tidak berada di tempat
7	PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	13 Juli 2018	1.) Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan RKL -RPL setiap enam (6) bulan sekali kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, DLHK Provinsi NTB dan DLH Kabupaten Lombok Tengah
8	PT. PLN (Persero) - Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara/PLTMGU Lombok Peaker 150 MW	13 Juli 2018	1.) Perusahaan wajib membuat sumur resapan/biopori sesuai dengan ketersediaan lahan dan peraturan yang berlaku 2.) Perusahaan wajib tetap melaporkan pelaksanaan RKL -RPL setiap enam (6) bulan sekali ke DLHK Provinsi NTB tembusan ke DLH Kota Mataram dan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan RI 3.) Lokasi pengambilan sampel air permukaan dan air laut disesuaikan dengan lokasi yang terdapat dalam dokumen 4.) Perusahaan wajib memasang patok/papan nama lokasi pemantauan air selama tahap konstruksi 5.) Perusahaan wajib membuat TPS LB3 sesuai Kepdal 01 Tahun 1995 6.) Perusahaan wajib menyimpan limbah B3 yang dihasilkan dalam kemasan LB3 yang dilengkapi simbol dan label serta diberi palet 7.) Bangunan TPS LB3 wajib dilengkapi dengan papan nama, simbol dan koordinat
9	PT. Bumi Sarana Utara	23 Februari 2018	1.) Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan RKL -RPL setiap enam (6) bulan sekali kepada DLHKPKP Kabupaten Lombok Utara tembusan ke DLHK Provinsi NTB dan KLHK 2.) Perusahaan wajib membuat saluran air limbah yang kedap air dan tertutup agar tidak tercampur dengan air hujan 3.) Perusahaan wajib mengurus IPLC ke LHKPP Kabupaten Lombok Utara 4.) Perusahaan wajib melakukan pemantauan air limbah outlet IPAL setiap bulan sesuai dengan PermenLH Nomor 5 tahun 2014 Baku Mutu Air Limbah 5.) Wajib melaporkan Pengelolaan air limbah setiap 3 bulan ke DLHPPK Kabupaten Lombok Utara K14 tembusan ke DLHK Provinsi NTB dan KLHK 6.) Perusahaan wajib memasang <i>flowmeter</i> pada pipa outlet pengelolaan air limbah 7.) Perusahaan wajib melakukan pemantauan genset dengan parameter yang dipantau sesuai dengan PermenLH 13 tahun 2009 tentang Baku Utas Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi setiap 3 tahun sekali 8.) Perusahaan wajib memantau kualitas udara ambien sesuai PP 41 tahun 1999 setiap 6 bulan sekali 9.) Perusahaan wajib melakukan pemantauan udara emisi boiler setiap 6 bulan sekali sesuai PermenLH 7 tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Ketel Uap 10.) Perusahaan wajib melakukan pelaporan pemantauan udara emisi genset dan boiler, serta pemantauan kualitas udara ambien setiap 6 bulan sekali ke DLHPPK Kabupaten Lombok Utara tembusan ke DLH Provinsi NTB dan KLHK 11.) Perusahaan wajib membuat bangunan penyimpanan LB3 sesuai dengan Kepdal 01 tahun 1995 12.) Perusahaan wajib menyampaikan laporan pengelolaan LB3 setiap 3 bulan sekali kepada KLHK tembusan ke DLHK Provinsi NTB dan DLHPPK Kabupaten Lombok Utara 13.) Perusahaan wajib menyimpan LB3 yang dihasilkan di TPS LB3

10	Aruna Senggigi	27 Februari 2018	1.) Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan RKL -RPL setiap enam (6) bulan sekali kepada DLH Kabupaten Lombok Barat tembusan ke DLHK Provinsi NTB dan KLHK 2.) Perusahaan wajib mengurus IPLC ke DLH Kabupaten Lombok Barat 3.) Perusahaan wajib melakukan pemantauan air limbah outlet STP1 dan STP2 setiap bulan sesuai dengan PermenLH 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah 4.) Wajib melaporkan pengelolaan air limbah setiap 3 bulan ke DLHK kabupaten Lombok Barat tembusan ke DLHK Provinsi NTB dan KLHK 5.) Perusahaan wajib memasang <i>flowmeter</i> pada pipa outlet pengelolaan air limbah sesuai kewajiban yang tercantum dalam dokumen RKL -RPL 6.) Perusahaan agar mengurus izin pemanfaatan hasil pengelolaan IPAL untuk aplikasi ke tanah kepada Kabupaten Lombok Barat 7.) Perusahaan wajib mengurus izin penyimpanan Limbah B3 8.) Wajib menyesuaikan TPS Limbah B3 sesuai Kepdal 03 tahun 1995 9.) Perusahaan wajib menyampaikan laporan pengelolaan LB3 setiap 3 bulan sekali kepada KLHK tembusan ke DLHK Provinsi NTB dan DLH Kabupaten Lombok Barat
----	----------------	------------------	---

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungn Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Tabel 44. Bencana Banjir, Korban, dan Kerugian

Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Tahun Data : 2018

NO	KABUPATEN/KOTA	Total Area Terendam (Ha)	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
			Mengungsi	Meninggal	
1	KABUPATEN LOMBOK BARAT	--	230	--	--
2	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	--	--	--	--
3	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	--	8	1	575.000.000
4	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	--	--	6	800.000.000
5	KABUPATEN SUMBAWA	--	--	1	515.095.000
6	KABUPATEN DOMPU	--	--	--	--
7	KOTA BIMA	--	--	--	3.786.000.000
8	KOTA MATARAM	--	--	--	--
9	KABUPATEN LOMBOK UTARA	--	--	--	--
10	KABUPATEN BIMA	--	--	1	--

Keterangan :

Sumber : BPBD PROVINSI NTB

<http://pusatkrisis.kemkes.go.id/Banjir-di-LOMBOK-BARAT-NTB>

Tabel 45. Bencana Kekeringan, Luas, Dan Kekeringan
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Perkiraan Kerugian (Rp)
1	LOMBOK BARAT	6	6.678	20.034	-
2	LOMBOK TENGAH	9	13.278	282.793	-
3	LOMBOK UTARA	4	11.552	33.138	-
4	LOMBOK TIMUR	9	51.582	153.681	-
5	SUMBAWA BARAT	4	6.258	18.775	-
6	SUMBAWA	18	23.706	84.998	-
7	DOMPU	7	6.113	19.186	-
8	KOTA BIMA	5	567	2.835	-
9	KAB. BIMA	9	8.203	24.608	-
10	KOTA MATARAM	0	-	-	-
TOTAL		71	127.937	640.048	-

Keterangan:

Sumber: BPBD Provinsi NTB

Tabel 46. Bencana Kebakaran Hutan/Lahan, Luas, Dan Kerugian
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

No	Kabupaten /Kota	Perkiraan Luas Hutan / Lahan Terbakar (Ha)	Penyebab Kejadian	Perkiraan Kerugian (Rp.)
1.	Lombok Timur	42	-	-
2.	Lombok Utara	16,3	-	-
TOTAL		58,3	-	-

Keterangan :

Sumber: BPBD Provinsi NTB

Tabel 47. Bencana Alam Tanah Longsor dan Gempa Bumi, Korban, Kerugian
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

NO	Kabupaten/Kota	Jenis Bencana	Jumlah Korban Meninggal (Jiwa)	Perkiraan Kerugian (Rp)
1	Kabupaten Lombok Utara	Gempa Bumi	466	
2	Kabupaten Lombok Barat	Gempa Bumi	40	
3	Kabupaten Lombok Timur	Gempa Bumi	31	
4	Kabupaten Lombok Tengah	Gempa Bumi	2	
5	Kota Mataram	Gempa Bumi	9	
6	Kabupaten Sumbawa	Gempa Bumi	5	
7	Kabupaten Sumbawa Barat	Gempa Bumi	2	

Keterangan :

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB

Tabel 48. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk

Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Tahun Data : 2018

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH (KM2)	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK (%)
1	LOMBOK BARAT	1,053,92	718.648	679,57
2	LOMBOK TENGAH	1,208,40	1.041.669	858,40
3	LOMBOK TIMUR	1,605,55	1.294.756	804,41
4	SUMBAWA	6,643,98	514.063	76,98
5	DOMPU	2,324,60	220.503	93,07
6	BIMA	4,389,40	528.993	119,80
7	SUMBAWA BARAT	1,849,02	139.448	73,88
8	LOMBOK UTARA	809,53	239.332	290,80
9	KOTA MATARAM	61,3	425.876	6,878,87
10	KOTA BIMA	207,5	146.959	693,03
TOTAL		20,153,20	5.270.247	259,82

Keterangan :

Sumber : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROV

Tabel 49. Jenis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

Kab/Kota	Nama TPA	Jenis TPA	Luas (Ha)	Kapasitas (M3)	Volume eksisting	Sampah masuk harian (ton)
Kab. Lobar dan Kota Mataram	TPA Regional Kebon Kongok	-	8,41	-	-	333
Kab. Lombok Tengah	TPA Pengengat	-	10	-	-	12,25
Kab. Lombok Timur	TPA Ijo Balit	-	8	-	-	15,4
Kab. Lombok Utara	TPA Jugil	-	8	-	-	21
Kota Bima	TPA Oi Mbo	-	7	-	-	46
Kab. Bima	TPA Waduwani	-	7	-	-	20
Kab. Dompu	TPA Lune	-	9	-	-	39,6
Kab. Sumbawa	TPA Raberas	-	6	-	-	64,37
Kab. Sumbawa	TPA Lekong/Alas	-	9	-	-	51,6
Kab. Sumbawa Barat	TPA Batu Putih	-	5	-	-	28,7

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungn Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Tabel 50. Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah Per hari
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Sampah (Ton/Hari)
1	Mataram	425.876	314,3
2	Lombok Barat	718.648	469,56
3	Lombok Utara	239.332	149,15
4	Lombok Tengah	1.041.669	645,73
5	Lombok Timur	1.294.756	801,74
6	Sumbawa Barat	139.448	92,39
7	Sumbawa	514.063	311,85
8	Dompu	220.503	164,27
9	Bima	528.993	325,94
10	Kota Bima	146.959	113,83
	TOTAL	5.270.247	3.388,76

Keterangan :
Sumber : Dinas Lingkungn Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Tabel 51. Jumlah bank Sampah
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

A. Kabupaten Lombok Timur

No	Nama Bank Sampah	DESA	Nama Pengurus	No Hp	STATUS	Volume Transaksi	Nilai Transaksi	Deposit yang sudah diterima	Perlengkapan diterima					
									Karung	Timbangan	Gerobak	Gudang	BT	Buku Besar
1	BS Bintang Seruni	Seruni mumbul	Masyhur	085253011332	1	2.691,50	8.429.000,00	5.000.000,00	200	1	1	1	110	1
2	BS Sang Alang	Gunung Malang	Suardi	087763070122	1	220,00	410.000,00	1.000.000,00	25	1	1	1	-	1
3	BS Embang-embangan	Pringgabaya utara	Raudai	08199790948	1	231,00	450.000,00	1.000.000,00	0	1	1	-	-	-
4	BS Karya Mandiri	Tanjung luar	Hadijah	081918417033	1	394,00	1.136.000,00		25	1	1	1	25	
5	BS Ninanta	Ketangga	Helmiatun Aini	087882077112	1	116,50	224.000,00	1.000.000,00	10	2	-	1	-	-
6	BS Barakah	Wanasaba daya	Mawardi	081933122353	1	234,00	625.000,00	1.000.000,00	50	1	1	1	-	-
7	Karya Mandiri	Labuan pandan	Rusman Pratama	085244635130	1	268,00	308.000,00	1.500.000,00	25	1	1	1	-	-
8	BS Batu Yang	Batu Yang			1	257,00	477.600,00		0	1	-	-	-	-
9	BS Kayangan	Labuhan Lombok			2				0	0	-	-	-	-
10	BS Lenek	Lenek	Ujib Uddin	081803752250	2			1.000.000,00	0	0	1	1	-	-
11	BS Apit Aik	Apit Aik	Abdul Rahman	081917742976	1	1.873,00	3.401.900,00	2.500.000,00	25	1	1	1	-	-
12	BS Toya	Toya	Waton	082340209674	2				0	0	-	-	-	-
13	BS Suntalangu	Suntalangu			2				0	0	-	-	-	-
14	BS Sambang Rinjani	Beriri Jarak	Nani Mulyana	082340998590	2			1.000.000,00	0	0	1	1	-	-
15	BS Pohgading	Pohgading	Zainul Aripin	085338185947	2	160,00	260.000,00		0	0	-	-	-	-
Total						6.445,00	15.721.500,00	15.000.000,00						

B. KABUPATEN LOMBOK TENGAN

NO	NAMA BANK SAMPAH	DESA	NAMA PENGURUS	NO HP	STATUS	Volume Transaksi	Nilai Transaksi	Deposit yang sudah diterima	Perlengkapan diterima					
									Karung	Timbangan	Gerobak	Gudang	BT	Buku Besar
1	BS Berkarya	Mertak	Sukirman	082341382102	1	1.997,95	5.718.650,00	5.000.000,00	25	1	1	0	30	0
2	BS Kawo Sejahtera	Kawo	Padi Arpan	087865580765	1	11.408,00	41.983.883,00	5.000.000,00	0	1	0	0	0	0
3	BS Bintang Kenalu	Janapria	Irham Hadi	081805728001	1	387,50	1.164.950,00	1.000.000,00	20	0	0	0	0	0
4	BS Maju Mandiri	Pengadang	Wahyudi	085339417407	1	738,50	1.429.250,00	2.500.000,00	50	1	1	1	25	0
5	BS Penujak	Penujak	Panji/abdi	085339491929	2				0	0	0	0	0	0
6	BS Pengengat	Pengengat	Maszuki	085205036476	2				0	0	0	0	0	0
7	BS Jago Berkah	Jago (Wir)	Ahmad Wirahadi	081805739316	2				0	0	0	0	0	0
8	BS Bereuk Sejahtera	Bunut Baoq	M. Mansyur	087752048793	1	539,60	695.440,00	1.000.000,00	25	1	0	1	25	0
9	BS Rahayu	Montong Gamang	Habibah	081917424373	1	1.199,00	3.146.500,00			1	0	0	25	1
10	BS Karya Sejahtera	Sepakek	Andi Suandi, S.Pd	083162924766	1	835,30	2.197.440,00		75	1	1	1	50	0
11	BS Sangkerang	Sangkerang	Indri	085937010622	2			500.000,00	0	1	0	0	25	0
12	BS YADAEN	Dasan Baru	Ramli Ahmad	081917476720	1				25	1	0	0	0	0
Total						17.105,85	56.336.113,00	15.000.000,00	220,00	8,00	3,00	3,00	180,00	1,00

C. KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO	NAMA BANK SAMPAH	DESA	NAMA PENGURUS	NO HP	STATUS	Volume Transaksi	Nilai Transaksi	Deposit yang sudah diterima	Perlengkapan diterima					
									Karung	Timbangan	Gerobak	Gudang	BT	Buku Besar
1	BS Bersemi	Telagawaru	Juhaeriyah	081805270655	1	592,00	1.688.800,00	1.000.000,00	50	1	0	1	0	0
2	BS Sejahtera	Terong Tawah	Jupri	087865730558	1	2.302,00	4.939.968,00	2.500.000,00	75	1	1	1	50	0
3	BS Buwun Mas Baru	Buwun Mas	Abdul Majid	081317111322	2			1.500.000,00	25	1	0	0	0	0
4	BS Tunas Muda Sekotong	Sekotong Tengah	Ahmad Rijalulail	087865901919	1	8.629,22	15.824.650,00	5.000.000,00	300	1	0	1	100	0
5	BS Karya Sejahtera	Banyumulek	Ramli	085337350518	1	2.781,75	6.280.475,00	2.000.000,00	50	1	1	1	0	0
6	BS Kebon Ayu Mandiri	Kebon Ayu	Siti Saudah	087865931084	1	2.254,00	4.177.500,00	2.500.000,00	50	1	0	1	80	0

7	BS Beriuk Pade Genem	Sigerongan	Amir Marzuki	087866248881	1	365	988.840,00	1.000.000,00	25	1	1	1	50	0
8	BS Pelangan	Pelangan	Abdul Siri	087865491328	2				25	1	0	0	0	0
9	BS Onor Semangat	Lingsar	miftahul faraji	081907177000	2				25	1	0	0	15	0
10	BS Geger, Girang, Genem	Langko	Zaenudin	085937034661	1	242	607.950,00		25	1	1	1	15	0
11	BS Bina Masyarakat Mandiri	Kuripan Utara	Bohri	087865680747	1	1.687,55	3.429.195,00	2.500.000,00	50	1	1	1	25	0
12	BS Makmur Mandiri	Sukamakmur	Nurdinah	087877247999	1				25	1	0	0	0	0
13	BS Pesona	Dasan Geres	M. Imam Ramail	082350307800	1	266,00	419.200,00	100.000,00	30	1	1	1	30	0
14	BS Mutiara	Lembar Selatan	H. Suherman	085945731654	2	724	1.334.000,00	1.000.000,00	25	1	1	0	20	0
15	BS Sejahtera	Peteluhan Indah		087865739719	2				25	1	0	0	10	0
Total						19.843,52	39.690.578,00	19.100.000,00	805,00	15,00	7,00	9,00	395,00	-

D. KOTA MATARAM

NO	NAMA BANK SAMPAH	KELURAHAN	NAMA PENGURUS	NO HP	STATUS	Volume Transaksi	Nilai Transaksi	Deposit yang sudah diterima	Perlengkapan diterima					
									Karung	Timbangan	Gerobak	Gudang	BT	Buku Besar
1	BS Jempong Sejahtera	Jempong Baru	Hadijah dan Sudiani	087863968760	1	9880,25	30.462.875,00	10.000.000,00	50	2	1	1	25	0
2	BS Selagelas	Selagelas	Fendi Ardiansyah	087864600508	2			500.000,00	25	1	0	0	0	0
3	BS Loang Baloq	Bendega	Sudiati	081917916385	1	5151,75	11.622.175,00	5.000.000,00	50	1	1	1	0	0
Total						15.032,00	42.085.050,00	15.500.000,00						

E. KABUPATEN LOMBOK UTARA

NO	NAMA BANK SAMPAH/BS	DESA	NAMA PENGURUS	NO HP	STATUS	Volume Transaksi	Nilai Transaksi	Deposit yang sudah diterima	Perlengkapan diterima					
									Karung	Timbangan	Gerobak	Gudang	BT	Buku Besar
1	BS Medana	Medana	Ifa		1	2.273,00	2.843.500,00	2.000.000,00	50	1		0	0	0
2	BS Sokong	Sokong	Sahdi		1	886,00	1.693.625,00	2.600.000,00	25	1		0	0	0
3	BS Gondang	Godang	Heru Gunawan		1	714,50	1.867.200,00	2.200.000,00	25	1		0	0	0
4	BS Pemenang Barat	Pemenang Barat	L. Syafawi		1	2.126,02	5.019.100,00	5.500.000,00	100	1		0	0	0
5	BS Gumantar	Gumantar			1	957,00	2.230.500,00	2.320.000,00	50	1		0	0	0
Total						6.956,52	13.653.925,00	14.620.000,00						

F. BANK SAMPAH DI DESTINASI WISATA

NO	NAMA BANK SAMPAH/BS	LOKASI	NAMA PENGURUS	NO HP	KETERANGAN
1	BS Sembalun	Sembalun			
2	BS Aik Berik	Aik Berik			
3	BS Pantai Pink	Pantai Pink			
4	BS Pakuan	Pakuan			

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungn Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Tabel 52. Kegiatan Fisik Lainnya Oleh Instansi
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data :

NO	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan

Keterangan :
Sumber :

Tabel 53. Status Pengaduan Masyarakat
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

NO	Pihak Yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Progres Pengaduan
1	Surat teguran dari Kantor Desa Senggigi tanggal 19 April 2018	Adanya genangan air dan bau tidak sedap yang diduga berasal dari air limbah dan sampah Hotel Aruna Senggigi yang bisa bersumber dari STP, saluran drainase dan areal sekitar Hotel	1 DLHK Provinsi NTB telah melakukan verifikasi lapangan pada tanggal 20 April 2018 bersama aparat desa senggigi 2 Dari verifikasi lapangan disepakati beberapa point antara lain : a. Hotel Aruna agar tetap meningkatkan kembali operasional STP agar limbah sebelum dibuang ke badan air memenuhi baku mutu b. Hotel Aruna agar berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Senggigi terhadap drainase jalan yang tidak optimal c. Hotel Aruna wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewajiban yang dimiliki dalam dokumen lingkungannya d. Agar memasang koordinat pada titik penataan di lokasi STP kamar dan STP BOH, koordinat titik penataan, mencatat pH dan debit harian, melaporkan pengukuran air limbah setiap bulan, melaporkan hasil uji setiap 3 bulan sekali pada lab terakreditasi serta menyusun SOP pengeoperasian dan tanggap darurat IPAL sesuai PermenLHK 68 tahun 2016. Sampai saat ini, Hotel Aruna sudah melaporkan kegiatan usaha dalam pengelolaan lingkungan kepada DLHK Provinsi NTB
2	Masyarakat	Dugaan pencemaran dari limbah yang dihasilkan oleh toko mirasa seperti bau yang tidak sedap	1 DLHK Provinsi NTB telah melakukan verifikasi pada tanggal 15 Mei 2018 untuk menindaklanjuti terhadap arahan perbaikan pengelolaan lingkungan hidup pada toko Mirasa yang dikeluarkan oleh DLH Kota Mataram tanggal 5 April 2018 yang a. Perizinan bidang lingkungan hidup b. Pengelolaan limbah cair c. Pengelolaan limbah B3 d. Pengelolaan limbah padat (sampah) e. Berdasarkan hasil verifikasi ke lokasi kegiatan bahwa Toko Roti Mirasa belum menindaklanjuti arahan perbaikan pengelolaan lingkungan hidup yang bertuang dalam point-point diatas 2 Beberapa rekomendasi yang disepakati sebagai saran dan tindaklanjut yang harus dilakukan oleh Toko Mirasa antara lain : a. Toko Roti Mirasa wajib segera untuk membuat dokumen lingkungan dan mengajukan permohonan izin lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal 5 April 2018 b. Toko Roti Mirasa wajib melakukan pengendalian pencemaran limbah cair pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) paling lambat 8 (delapan) bulan sejak tanggal 5 April 2018 c. Limbah cair yang dihasilkan harus dibawah baku mutu air limbah domestik sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 tahun 2016 tentang Baku Mutu Limbah Domestik d. Toko Roti Mirasa wajib membuat Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (LB3) sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengendali Dampak Lingkungan Nomor 01 tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal 5 April 2018 e. Toko Roti Mirasa wajib melakukan perbaikan pemilahan sampah organik dan sampah anorganik paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 5 April 2018 f. Toko Roti Mirasa agar segera membuat kerjasama pengangkutan sampah ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Tabel 54 . Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) t Bidang Lingkungan Hidup
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

No.	Nama Organisasi/Yayasan/Kelompok/LSM	Alamat
1	Forum Komunikasi Kelompok Pemerhati Sumber Daya Alam (FKKPSDA)	Jl. BTN Pemda Blok S18 (Komplek RS Tipe B) Praya - Kabupaten Lombok Tengah
2	Lebaga Peduli Lingkungan dan Kesehatan NTB	Dasan Beloam Desa Sepit Kecamatan Keruak - Kabupaten Lombok Timur
3	Asosisasi Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia	Jl. Bung Hatta No. 38 A Majeluk - Mataram
4	Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTB	Jl. Jombang IC No. 01 BTN Taman Baru - Mataram

Keterangan:

Sumber : Bakesbangpoldagri Prov NTB

Tabel 55. Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut tingkat pendidikan
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

NO	Tingkat Pendidikan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Doktor (S3)	-	-	1
2	Master (S2)	-	-	38
3	Sarjana (S1)	-	-	270
4	Diploma (D3/D4)	-	-	17
5	SLTA	-	-	214
Total		-	-	540

Keterangan :
Sumber : Dinas Lingkungn Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Tabel 56. Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Staf yang telah mengikuti Diklat
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

NO	Nama Instansi	Staf Fungsional			Staf yang Sudah Diklat	
		Jabatan Fungsional	Laki - Laki	Perempuan	Laki - Laki	Perempuan
1	-	Umum	-	-	-	-
2	-	Polhut	-	-	-	-
3	-	PEH	-	-	-	-
4	-	Surveyor	-	-	-	-
5	-	Penyuluh	-	-	-	-
6	-	Pranata Lab	-	-	-	-

Keterangan :
Sumber : Dinas Lingkungn Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Tabel 57. Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data: 2018

No.	Nama Orang / Kelompok / Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
1	TGH. Hasanain Juaini LC, MH	Pembina Lingkungan - Kalpataru	Presiden RI	2016
2	Elizah	Perintis Lingkungan - Kalpataru	Presiden RI	2016

Keterangan:

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Tabel 58 Kegiatan/Program yang diinisiasi masyarakat
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data: 2018

No	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Penyuluhan (Bulan/tahun)
1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	DLHK	kelompok masyarakat berlokasi di kawasan sekitar Gunung Rinjani	2018
3	Perlindungan mata air dengan vegetasi/civil teknis	DLHK	Kelompok Pengelola Mata Air di NTB	2018

Keterangan:

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Tabel 59. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku**Provinsi : Nusa Tenggara Barat****Tahun Data : 2018**

NO	URAIAN	Dua Tahun Sebelumnya/Data 2017	Satu Tahun Sebelumnya
1	PERTANIAN	27.230,174.6	-
	a. Pertanian Sempit		
	- Tanaman Bahan Makanan		
	- Tanaman Perkebunan		
	- Peternakan dan Hasil - hasilnya		
	b. Kehutanan		
	c. Perikanan		
2	Pertambangan dan Penggalian	24.108,618.8	-
3	Industri Pengolahan	4.909,792.5	-
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	90.623.9	-
5	Bangunan	10.987,929.1	-
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	16.380,764.7	-
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2.303,211.3	-
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	211.109.2	-
9	Jasa - Jasa	2.459,700.5	-
PRODUK DOMESTIK BRUTO		-	-
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS		-	-

Keterangan :

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Tabel 60. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

NO	URAIAN	Dua Tahun Sebelumnya/Data 2017	Satu Tahun Sebelumnya
1	PERTANIAN	20.879,656.8	-
	a. Pertanian Sempit		
	- Tanaman Bahan Makanan		
	- Tanaman Perkebunan		
	- Peternakan dan Hasil - hasilnya		
	b. Kehutanan		
	c. Perikanan		
2	Pertambangan dan Penggalian	19.635,139.6	-
3	Industri Pengolahan	4.206,655.1	-
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	78.058.3	-
5	Bangunan	9.054,621.4	-
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	12.111,622.9	-
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2.157,765.4	-
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	157.586.6	-
9	Jasa - Jasa	2.001,854.7	-
PRODUK DOMESTIK BRUTO		-	-
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS		-	-

Keterangan :

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Tabel 61 . Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

No	Jenis Produk Hukum Bidang LH	Jenis Produk Hukum Bidang Kehutanan	Nomor dan Tanggal	Tentang
1	Pergub Nomor 51 Tahun 2012 tentang RAN GRK Provinsi NTB	Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan DAS	-	-
2	SK Nomor 658.1 -29 Tahun 2018 tentang TPA Regional Kebon Kongok	Pergub 33 Tahun 2013 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2013 – 2032	-	-
3	MoU tentang Percepatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Masyarakat di Wilayah KPH Provinsi NTB (Permprov NTB dengan Dikektur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KLHK)	MoU Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung/Hutan Produksi (Permprov NTB dengan 9 Kab/Kota NTB) Tahun 2017	-	-

Keterangan :

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Tabel 62. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data : 2018

NO	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan (Rp)
1	Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan	-	-	1.445,615,200
2	Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	583.806.000
3	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	-	-	530.313.400
4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	-	-	1.911,256,000
5	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	-	-	833.639.200
6	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	-	-	528.103.400
7	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-	-	435.651.400
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	2.328,320,700

Keterangan :
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi NTB

Tabel 63. Pendapatan Asli Daerah
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data :

NO	Sumber	Jumlah (Rp)
	Pajak	
	Restribusi	
	Laba BUMD	
	Pendapatan Lainnya Yang Sah	
	Jumlah	
	dst	

Keterangan :

Sumber :

Tabel 64. Inovasi Pengelolaan LH daerah
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data :

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi

Keterangan :
Sumber :

Tabel 65. Pelestarian Kearifan Lokan LH
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Tahun Data :

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Bentuk Kearifan Lokal	Nama Kearifan Lokal	Deskripsi

Keterangan :

Sumber :

LAMPIRAN

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI TAHAPAN
PENYUSUNAN DOKUMEN
IKPLHD



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pejanggik Nomor 12 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83121
Telepon: (0370) 622373 Fax: (0370) 632016 Website: www.ntbprov.go.id

Mataram, Januari 2019

Nomor : / /PPL-DISLHK/2019
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada :
Yth. (Daftar terlampir)
di
Tempat

Bismillaahirrahmaanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang: Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi NTB perlu melakukan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Tahun 2018 sebagai informasi mengenai kondisi lingkungan hidup dan dapat diakses oleh masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengharap kehadiran Saudara dalam rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 29 Januari 2019

Waktu : 09.00 WITA s.d. selesai

Tempat : Aula Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
Jl. Majapahit No. 54 Mataram NTB

Agenda : 1. Pembentukan Tim Penyusun Dokumen IKPLHD.
2. Pengumpulan data-data penunjang dari OPD terkait.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

An. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIS DAERAH

Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D

Pembina Utama (IV/e)

NIP. 19610806 198703 1 002

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
2. Bupati/Walikota se NTB.

**LAMPIRAN PESERTA RAPAT PERSIAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI NTB TAHUN 2019**

NAMA INSTANSI	JUMLAH PESERTA (ORANG)
OPD	
1. Dinas Perindustrian Provinsi NTB	1 orang
2. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB	1 orang
3. Dinas Perumahan Pemukiman Provinsi NTB	1 orang
4. Dinas Kesehatan Provinsi NTB	1 orang
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	1 orang
6. Dinas Perhubungan Provinsi NTB	1 orang
7. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	1 orang
8. Dinas Perdagangan Provinsi NTB	1 orang
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi NTB	1 orang
10. Dinas Pariwisata Provinsi NTB	1 orang
11. Dinas Sosial Provinsi NTB	1 orang
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	1 orang
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB	1 orang
14. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi NTB	1 orang
15. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB	1 orang
16. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	1 orang
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB	1 orang
18. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB	1 orang
19. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB	1 orang
20. Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	1 orang
21. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB	1 orang
22. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB	1 orang
23. Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB	1 orang
24. Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB	1 orang
25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB	1 orang
26. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB	1 orang
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB	1 orang
28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB	1 orang
29. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB	1 orang
Tim Penyusun Dokumen	
30. Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan DLHK Provinsi NTB	1 orang
31. Lalu Moh. Nazar Fajri, SE. MPA (Wakil Dekan II Universitas Nahdlatul Wathan Mataram)	1 orang
32. Gendewa Tunas Rancak, ST. MT (Dekan Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Mataram)	1 orang
33. Jufri, ST (Balai Informasi Infrastruktur Wilayah Dinas PU Provinsi NTB)	1 orang
34. Wahyudin, ST. M.Eng (Dosen Tetap Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram)	1 orang

35.	Eksutif Daerah WALHI Mataram	1 orang
36.	Direktur WWF Nusra	1 orang
37.	Yudi Hermawan, S.Hut. M.Si (Akademisi Universitas Al Azhar Mataram)	1 orang
38.	Dr. Siti Hilyana (Akademisi Universitas Mataram)	1 orang
39.	Dr. Nurliah (Akademisi Universitas Mataram)	1 orang

Kepala Bidang Penataan dan Pengelolaan Lingkungan

Dr. Ahmad Fathoni
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19760202 199902 1 001

Notulensi Rapat I

Agenda : Rapat Pembentukan tim dan Pengumpulan Data Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi NTB Tahun 2018

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Januari 2019

Tempat : Aula Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Siti Hyliana

1. Penetapan isu prioritas harus saling keterkaitan.
2. Prosentase luasan hutan yang terkonversi harus jelas.
3. Isu Prioritas lainnya dari masing-masing OPD:
 - a. Alih fungsi lahan (isu Utama) karena terjadi perubahan hutan menjadi lading pertanian, luasan RTRW yang semakin berkurang;
4. Dinas PU PR : pembagian jalan nasional (88 %), jalan provinsi (70 %). Perlu data fungsi lahan sebelum dipergunakan menjadi jalan. DED Jalan, pemukiman dan SDA dan Renstra yang sudah sinkron dengan RPJMD. Selain itu, alih fungsi lahan menjadi lahan pemukiman.
5. Dinas Perhubungan : perlu memetakan apa saja permasalahan yang ada di Provinsi NTB dan hubungannya dengan masing-masing OPD. Seperti di Dinas Perhubungan terkait dengan Polusi.

Di RAD GRK sampai dengan 2020 sudah ada target capaian untuk menurunkan emisi GRK;

- Program kegiatan emisi gas buang. Ada data 2017. Kab/kota melakukan pengujian kualitas udara.
 - Perhitungan emisi gas buang dihitung dari jumlah kendaraan yang melewati titik sampling.
 - Apa regulasi D. Perhubungan dalam mengantisipasi pelebaran jalan (pengaruh lalu lintas dan polusi)?
6. BP2AKB : KTA (kekerasan thdp anak), KTP (kekerasan thdp perempuan), surat form data.

Sampah terbesar dari RT (generasi perempuan). Bagaimana upaya BP2AKB dalam upaya mengurangi point tsb. Apakah juga tertuang di Renstra.

Bagaimana upaya BP2AKB dengan keterlibatan dalam ekomoni biru. (Renstra).

7. Dinas Kesehatan : pemeriksaan kualitas air sumur (uji petik sampel) hanya pada sumur penduduk yang digunakan untuk air minum dengan parameter yang tidak sesuai dengan tabel. (E.Coli)

Kendala utama : keterbatasan biaya dan ketersediaan lab terakreditasi pada masing-masing kabupaten/kota.

- Sanitasi /jamban menjadi salah satu program Dinas Kesehatan.
- NTB sudah ada terobosan BAS No (Buang Air Sembarangan) Nol ada pada pilar utama.
- Dinas Kesehatan mengutamakan pada kesiapan masyarakat. Di NTB dari 1138 desa, sudah 50 % (558 desa) BAS No.
- Strategi percepatan dalam upaya BAS Nol, dengan Pemicuan (kelompok masyarakat):
- bantuan langsung masyarakat (jamban).
- Bertanggung jawab terhadap air minum yg diakses masyarakat.
- Tinggi E.Coli pada sarana air minum non Pipa (contoh: pada kawasan KSB).

8. Disnakertrans : TPT (tingkat Pengangguran Terbuka) sudah melebihi target RPJMD. Renstra.

9. ESDM : seluruh kegiatan diawali perizinan (Dok lingkungan). Cek IUPHHK (prosetase luasan kawasan pinjam pakai untuk pertambangan). Konversi lahan hutan menjadi pertambangan. Kegiatan usaha pertambangan di ikuti dengan Jaminan Usaha Tambang untuk mengantisipasi fungsi lahan.

10. Cek jumlah izin yang dikeluarkan BPMTSP.

11. Dinas Koperasi : pelaku usaha apakah ada penggunaan bahan baku yang tidak/belum ramah lingkungan. (contoh: furniture dari mana asalnya). Row material yang digunakan diusahakan yang ramah lingkungan.

12. BPSDM : limbah domestik (dari catering) kegiatan rapat-rapat. Kerjasama dengan pihak ketiga. Akan diupayakan dioleh dengan BSF.

Upaya inovasi : seleksi pejabat/ASN dalam upaya pengelolaan lingkungan;

13. Dinas Kominfo : sosialisasi, penyebarluasan informasi (elektronik, cetak) tentang upaya pengelolaan lingkungan.

Data penggunaan radio di masing-masing kawasan (pesisir, perumahan, dll) untuk menyampaikan informasi upaya pengelolaan lingkungan (pesan-pesan lingkungan);

14. Dinas Peternakan :

- a. kegiatan Biogas (cek data sebaran biogas di masing-masing kab/kota).
- b. Kegiatan memanfaatkan jerami untuk pakan ternak dan tidak dibakar.

15. Dinas Perdagangan : pencegahan peredaran merkuri dan sianida.

16. Dinas Perumahan dan Pemukiman :

- a. Peningkatan kawasan kumuh pada pemukiman.
- b. Peningkatan kualitas jalan (pembangunan RRH). Jalan lingkungan Total jalan yg dibangun 870 km dan rumah layak huni (1500 unit) dari 326.000 unit rumah tidak layak di NTB. Kawasan kumuh lebih banyak di kawasan perkotaan.
- c. Perlu support dari tata ruang dan Dinas kesehatan. (untuk jamban).
- d. Prosentasi lingkungan kumuh yang sudah beralih status ada di seluruh kab/kota se NTB kecuali KSB.

17. Nazar (UNW) :

- a. Tipologi pemukiman
- b. Perlu sinergitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- c. Perda terkait sampah dan sanitasi Karena di kawasan perumahan belum ada pengelolaan limbah domestic (septic tank).

18. Cek luasan lahan pertanian yang berubah dan perubahannya karena apa.

19. Cek RAD GRK.

20. Cek sumber data dari masing-masing OPD apabila ada kesamaan jenis data.

21. Isu Prioritas:

- a. Rusaknya jaringan irigasi dan kurangnya/hilangnya mata air akibat gempa terutama pada kawasan sekitar titik pusat gempa (29 Juli – 5 Agustus);
- b. Pembangunan sarana prasarana penyediaan air minum masih kurang;
- c. Tingginya E.Coli di air.

Dokumentasi Rapat I







PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jalan Majapahit No.: 54. MATARAM 83126 Telepon (0370) 633071 Fax. (0370) 633961
Website : www.dishut.ntbprov.go.id E-Mail : dishut@dishut.ntbprov.go.id

Mataram, 18 Maret 2019

Nomor : 005/819 /PPL-DISLHK/2019
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Kepada :
Yth. (Daftar Terlampir)
di
Tempat

Bismillaahirrahmaanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Berdasarkan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.1362/SETJEN/DATIN/PD/DTN.0/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 Perihal: Penyampaian Dokumen IKPLHD Tahun 2018, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara pada rapat penyusunan dokumen IKPLHD Provinsi NTB Tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 20 Maret 2019

Waktu : 08.30 WITA s.d. selesai

Tempat : Aula Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB.
Jl. Majapahit No. 54 Mataram

Agenda : 1. Analisis Data Penunjang Dokumen IKPLHD
2. Penentuan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Provinsi NTB

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Taradina (0817268984)
email: penataanlingkungan@gmail.com.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Ir. MADANI MUKAROM, BSc.F, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19630405 198903 1 019

Lampiran Undangan:

Nomor : 005 / 819 / PPL- DISLHK / 2019	
Tanggal : 18 Maret 2019	
1.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
2.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
3.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB
4.	Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat
5.	Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dodokan Moyosari Nusa Tenggara Barat
6.	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat
7.	Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup DLHK Provinsi NTB
8.	Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan DLHK Provinsi NTB
9.	Lalu Moh. Nazar Fajri, SE. MPA (Wakil Dekan II Universitas Nahdlatul Wathan Mataram)
10.	Gendewa Tunas Rancak, ST. MT (Dekan Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Mataram)
11.	Jufri, ST (Balai Informasi Infrastruktur Wilayah Dinas PU Provinsi NTB)
12.	Wahyudin, ST. M.Eng (Dosen Tetap Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram)
13.	Eksutif Daerah WALHI Mataram
14.	Direktur WWF Nusra
15.	Yudi Hermawan, S.Hut. M.Si (Akademisi Universitas Al Azhar Mataram)
16.	Kasi Penataan Lingkungan DLHK NTB
17.	Dr. Siti Hilyana (Akademisi Universitas Mataram)
18.	Dr. Nurliah (Akademisi Universitas Mataram)
19.	Staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (5 orang)

Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup



Dr. Ahmad Fathoni
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19760202 199902 1 001

Hasil Rapat II

Agenda : Rapat II Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi NTB Tahun 2018

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Maret 2019

Tempat : Aula Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Agenda Pembahasan :

1. Konfirmasi data-data penunjang (65 Tabel data) yang sudah terisi (35 tabel) dan belum terisi (30 tabel);
2. Analisis awal data-data penunjang yang telah terisi, trend terhadap perubahan data dan penjelasan metode DPSIR yang digunakan dalam penyusunan laporan IKPLHD;
3. Penentuan isu prioritas lingkungan hidup (3 isu) yang akan dibahas dalam dokumen IKPLHD sesuai dengan kondisi terkini di Provinsi NTB dan didukung dengan data-data terupdate.

Agenda 1.

1. Tabel 6. Data luasan lahan kritis pada tahun 2018 dihitung menggunakan metode yang berbeda dengan data pada tahun 2013, sehingga terdapat perbedaan yang cukup signifikan terhadap luasan lahan kritis pada periode 2018 dengan periode 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini juga akan menjadi bahan pembahasan dalam laporan IKPLHD karena luasan lahan kritis juga menjadi perhatian utama DLHK dalam upaya rehabilitasi hutan/lahan akibat alih fungsi lahan hutan menjadi lahan jagung terutama di kawasan Kabupaten Dompu dan Bima;
2. Tabel Kualitas Air Laut, Kualitas air danau/situ/embung dan Kualitas air hujan tidak dapat diisi karena Laboratorium Lingkungan DLHK Provinsi NTB maupun Dinas/Instansi terkait tidak melakukan pengukuran terhadap air laut, air danau maupun air hujan.

Agenda 2

1. Untuk mendukung penyusunan laporan IKPLHD, diperlukan minimal data 2-3 tahun terakhir untuk mengetahui trend peningkatan dan penurunannya.
2. Hal ini juga untuk mencari penyebab dan upaya untuk mengatasi kendala peningkatan/penurunan kualitas lingkungan berdasarkan data-data penunjang berdasarkan tabel data (65 Tabel);

Agenda 3

Berdasarkan hasil diskusi, disepakati Isu Prioritas Lingkungan Hidup yang akan dibahas dalam dokumen IKPLHD dan akan menjadi dasar program inovasi pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan isu lingkungan yang ada di 2018, yaitu:

1. Alih fungsi lahan (pertanian jagung) sandingkan luasan lahan penanaman jagung 2017 dan 2018.
2. Perubahan Kualitas Air (Kuantitas dan Kualitas) (Gempa).
3. Peningkatan Timbulan sampah dan minimnya penanganan sampah.

Rapat selanjutnya akan membahas program inovasi yang sudah dilaksanakan di Tahun 2018 sebagai bentuk upaya mengatasi isu lingkungan hidup yang ada di Provinsi NTB.

Notulensi Rapat III

Penentuan Program Inovasi pada
Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)
Provinsi NTB Tahun 2018

Hari/Tanggal : Senin, 15 Maret 2019
Tempat : Aula Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Agenda Rapat:

Membahas program inovasi lingkungan hidup yang menjadi jawaban dari 3 (tiga) isu prioritas lingkungan hidup.

Dr. Siti Hyliana	• Perlu koordinasi dengan Dinas Pertanian terkait luasan lahan pertanian terutama lahan jagung di kawasan Pulau Sumbawa (Dompu dan Bima); • Perlu kajian perhitungan terkait total ekonomi value terhadap produksi jagung dan apakah sinkron dengan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat produksi jagung. • Perlu ada kajian pada titik mana terjadi pencemaran lingkungan • Perlu Identifikasi desa di NTB yang memiliki potensi sampah lebih banyak (termasuk karakteristik sampah) • Perlu diperhitungkan pengaruh iklim dengan potensi apa yang bisa/cocok ditanam sebagai bahan sirkulan ekonomi. • Perlu Kajian terhadap kebutuhan perluasan lahan dan produksi jagung, apakah masih memerlukan lahan tambahan atau sudah mencukupi atau bahkan melampaui Daya dukung lahan. • Perlu Kajian sedimentasi sebagai dampak dari produksi jagung. • Terkait pencemaran air di kawasan NTB, perlu dibahas kembali apakah akibat dari gempa atau akibat aktivitas manusia. (Point-point ini akan menjadi saran masukan bagi Pemerintah Daerah Provinsi NTB sebagai salah satu upaya pengelolaan lingkungan)
Gendewa Tunas Racak (Universitas Nahdatul Ulama)	Kualitas Air Pasca Gempa • Pasca Gempa yang terjadi di Kawasan Lombok Utara, sudah ada mapping terkait sumber air yang bisa di akses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. • Kendala yang ada: kualitas airnya kurang memenuhi tandar baku mutu secara kualitas. (fisik : bau dan warna), (kimia dan biologi) • Beberapa titik air memiliki kualitas air baik namun kuantitasnya tidak banyak. • Perlu Kajian kualitas lingkungan terhadap sumber air sebelum gempa dan setelah gempa (titik yang sama) untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas air

	Sampah • Sudah ada Perda sampah dan program zero waste sedang on progress. • Sudah ada Bank sampah • Di Provinsi Bali ada pengelolaan sampah dengan system Biomassa sampah (pellet dari sampah yang bisa menjadikan sampah menjadi energy listrik) • Saat ini sedang dikembangkan SMASH (Sistem Online Manajemen Sampah) yaitu dengan memanfaatkan aplikasi mySMASH pada android system. • Bisa dikembangkan Sirkular ekonomi 1 desa 1 konsep pengelolaan (fokus 1 desa 1 point (pupuk, sayur). • Pembatasan dan pengawasan terhadap ekspansi jagung. • Perlu perhitungan daya dukung lingkungan (kebutuhan, kualitas dan kuantitas air) serta dampak lingkungan akibat dari program jagung. • Aplikasi bank sampah. (layanan jemput sampah). Ismash (untuk pemerintah), Smash (untuk masyarakat), • Smart dropbox (kendala harus terkoneksi wifi) • System deteksi siapa yg membuang sampah sembarangan. • Kendala: kurangnya sarana prasana terhadap pengelolaan sampah. • Kurangnya pemahaman terhadap aplikasi.
Fatah (DLHK)	Alih fungsi lahan (pertanian jagung) • Perlu koordinasi dengan OPD terkait • Dapat dilakukan upaya reboisasi
Yudi Hermawan (Universitas Al Azhar Mataram)	Alih fungsi lahan (pertanian jagung) • Perlu sosialisasi penggunaan/konversi lahan jagung • Perlu diterapkan system pertanian terpadu (Argoforestry) agar lebih bermanfaat; (pertanian, perkebunan, perternakan). • Pemanfaatan sekror pertanian lain. Sampah • Edukasi pada masyarakat sekitar kawasan sungai
Munzir	• Program inovasi harus sesuai dengan regulasi Kualitas Air • Pencemaran E.Coli NTB melebihi ambang batas perlu di sinkronkan dengan pola hidup masyarakat sekitar kawasan sungai; • Kandang ternak dibuang ke selokan, tidak dimanfaatkan sebagai biogas. • Koordinasi dengan pertanian, perternakan dan Dinas/instansi terkait tentang kandang
Jupri (BIIW)	Kualitas Air • Hasil lab sedimentasi pada kawasan bendungan. • Perlu evaluasi minimal 12 kali pada kualitas air di masing-masing sungai

	• Perlu koordinasi dan pembagian jadwal untuk periode pemantauan (DLHK Prov, DLH Kab/Kota, DPU, dll) • Perlu dipertimbangkan konsep “rumah menghadap sungai” Alih Fungsi Lahan (Pertanian JAgung) • Pengurangan dampak erosi dengan sistem terasering pada lahan jagung. Pengaruhnya pada gempa: • Kualitas hanya sesaat pada saat gempa saja; • Kuantitas (terusan segara) hilang; • Pengelolaan sampah setelah gempa;
--	--

Kesimpulan Program Inovasi Lingkungan Hidup:

Alih fungsi lahan (pertanian jagung)	:	• Reboisasi dan penghijauan • Agroforestry
Perubahan Kualitas Air (Kuantitas dan Kualitas)	:	• Edukasi • Konsep “rumah menghadap sungai”
Peningkatan Timbulan sampah dan minimnya penanganan sampah	:	• Program Zero Waste • SMASH (Sistem Online Manajemen Sampah) • Sirkular ekonomi 1 desa 1 konsep penghasil

Dokumentasi Rapat III

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)

Senin, 15 April 2019





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jalan Majapahit No.: 54, MATARAM 83126 Telepon (0370) 633071 Fax. (0370) 633961
Website : www.dishut.ntbprov.go.id E-Mail : dishut@dishut.ntbprov.go.id

Mataram, 29 April 2019

Nomor : 005 / 1809 / PPL-DISLHK/2019
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Rapat IKPLHD
Provinsi NTB Tahun 2018**

Kepada :
Yth. (Daftar Terlampir)
di
Tempat

Bismillaahirrahmaanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Berdasarkan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.1362/SETJEN/DATIN/PD/DTN.0/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 Perihal: Penyampaian Dokumen IKPLHD Tahun 2018, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara pada rapat penyusunan dokumen IKPLHD Provinsi NTB Tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 2 Mei 2019

Waktu : 09.00 WITA s.d. Selesai

Tempat : Aula Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
NTB.

Jl. Majapahit No. 54 Mataram

Agenda : Dalam Rangka Finalisasi Dokumen IKPLHD Provinsi NTB
Tahun 2018

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Taradina (0817268984)
email: penataanlingkungan@gmail.com.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Nusa Tenggara Barat


Ir. MADANI MUKAROM, BSc.F, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)

Lampiran Undangan:

Nomor : 005 / 1809 / PPL - DLHK / 2019	
Tanggal :	
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
3.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
4.	Kepala Bidang Penataan dan Pengelolaan Lingkungan DLHK Provinsi NTB
5.	Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan DLHK Provinsi NTB
6.	Lalu Moh. Nazar Fajri, SE. MPA (Wakil Dekan II Universitas Nahdlatul Wathan Mataram)
7.	Gendewa Tunas Rancak, ST. MT (Dekan Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Mataram)
8.	Jufri, ST (Balai Informasi Infrastruktur Wilayah Dinas PU Provinsi NTB)
9.	Wahyudin, ST. M.Eng (Dosen Tetap Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram)
10.	Eksutif Daerah WALHI Mataram
11.	Direktur WWF Nusra
12.	Yudi Hermawan, S.Hut. M.Si (Akademisi Universitas Al Azhar Mataram)
13.	Kasi Penataan Lingkungan DLHK NTB
14.	Dr. Siti Hilyana (Akademisi Universitas Mataram)
15.	Dr. Nurliah (Akademisi Universitas Mataram)
16.	Staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2 orang)

Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan
DLHK Provinsi NTB

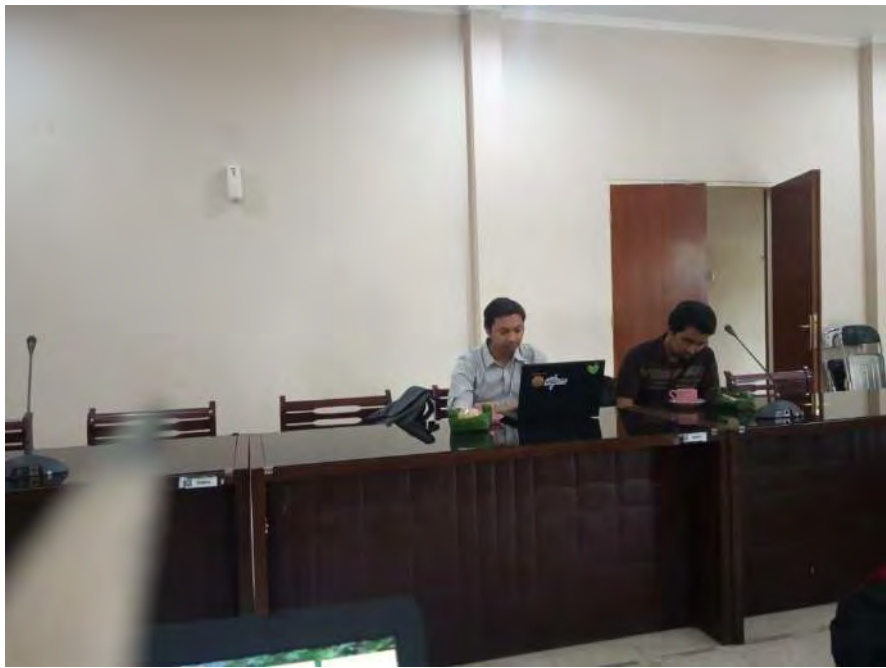

Dr. Ahmad Fathoni
NIP. 19760202 199902 1 001

Dokumentasi Rapat IV

Finalisasi Dokumen IKPLHD Provinsi NTB Tahun 2019

Kamis, 3 Mei 2019





LAMPIRAN III

CV TENAGA AHLI



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jalan Majapahit No.: 54. MATARAM 83126 Telepon (0370) 633071 Fax. (0370) 633961

Website : www.dishut.ntbprov.go.id E-Mail : dishut@dishut.ntbprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 100/02.1 / PPL - DAK / 2019

TENTANG

TIM PENGUMPULAN DATA DAN PENYUSUNAN
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (IKPLHD)
PROVINSI NTB TAHUN 2018

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan untuk melestarikan keberadaan sumber daya secara berkesinambungan baik kualitas maupun kuantitasnya serta menanggulangi dampak aktivitas manusia maupun pengaruh peristiwa alam terhadap komponen lingkungan hidup, perlu disusun Dokumen/Buku Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 yang berisi hasil analisis dan informasi mengenai keadaan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Sosial (SDS) dan Sumber Daya Buatan (SDB) Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Dokumen/Buku Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi NTB Tahun 2018 sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Tim ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB tentang Tim Pengumpulan Data Dan Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB;
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tufas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Membentuk Tim Pengumpulan Data Dan Penyusunan Dokumen/Buku Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. mengumpulkan data tentang Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Sosial (SDS) dan Sumber Daya Buatan (SDB) Daerah sebagai bahan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) ;
- b. menganalisis data tentang Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Sosial (SDS), dan Sumber Daya Buatan (SDB) Daerah untuk mengetahui keadaan dan kualitas Lingkungan Hidup Daerah;
- c. melaksanakan penulisan tentang Dokumen/Buku Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat;

- e. dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat;

- KETIGA Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2018 Nomor: 15/DPA/TAPD/2018 Tanggal 26 Desember 2018.
- KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 2 Januari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI NTB

MAGANI MUKROM



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat (sebagai laporan);
2. Bupati/Walikota Se-Nusa Tenggara Barat masing-masing di tempat;
3. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar;
4. Inspektur Inspektorat Provinsi NTB di Mataram;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

LAMPIRAN I :KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI NTB

NOMOR : 180/02.1 /PRL-DLHK /2019
TANGGAL : 2 Januari 2019

SUSUNAN TIM PENGUMPULAN DATA DAN PENYUSUNAN
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (IKPLHD)
PROVINSI NTB TAHUN 2018

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTB	Pembina
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	Ketua
3.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	Anggota
4.	Kepala Bidang Penataan dan Pengelolaan Lingkungan DLHK Provinsi NTB	Anggota
5.	Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan DLHK Provinsi NTB	Anggota
6.	Lalu Moh. Nazar Fajri, SE. MPA (Wakil Dekan II Universitas Nahdlatul Wathan Mataram)	Anggota
7.	Gendewa Tunas Rancak, ST. MT (Dekan Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Mataram)	Anggota
8.	Jufri, ST (Balai Informasi Infrastruktur Wilayah Dinas PU Provinsi NTB)	Anggota
9.	Wahyudin, ST. M.Eng (Dosen Tetap Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram)	Anggota
10.	Eksutif Daerah WALHI Mataram	Anggota
11.	Direktur WWF Nusra	Anggota
12.	Yudi Hermawan, S.Hut. M.Si (Akademisi Universitas Al Azhar Mataram)	Anggota
13.	Kasi Penataan Lingkungan DLHK NTB	Anggota
14.	Staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2 orang)	Anggota
15.	Dr. Siti Hilyana (Akademisi Universitas Mataram)	Tenaga Ahli
16.	Dr. Nurliah (Akademisi Universitas Mataram)	Tenaga Ahli

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI NTB



BIODATA

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Dr. Nurliah, S.Pi., M.Si
2	Jabatan Fungsional	Lektor
3	Jabatan Struktural	-
4	NIP	19770416 200801 2 018
5	NIDN	001604006
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Soppeng, 16 April 1977
7	Alamat Rumah	Perum Elite Mataram Asri Blok O No. 8 Mataram
8	No. Telepon/Fax/HP	0878742013168
9	Alamat Kantor	Jl. Majapahit No.62 Mataram
10	Nomor Telepon/Fax	(0370) 621485/ (0370) 640189
11	Alamat e-mail	li_buhari@yahoo.com
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S1 = 30 orang; S2 = - orang
13	Mata Kuliah yang Diampuh	1. Manajemen Sumberdaya Perairan
		2. Oseanografi
		3. Ekologi Perairan
		4. Biologi Perikanan
		5. Biologi Laut
		6. Statistika

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	Universitas Hasanuddin	Universitas Hasanuddin
Bidang Ilmu	Manajemen Sumberdaya Perairan	Pengelolaan Lingkungan Laut Dangkal dan Pantai	Perikanan
Tahun Masuk- Lulus	1995 - 1999	2000 – 2003	2007 – 2012
Judul Skripsi/Thesis /Disertasi	Optimasi Pengelolaan Ikan Madidihang (<i>Thunnusalbacares</i>) di Teluk Bone Sekitar Kabupaten Bone	Dampak Eutrofikasi terhadap Ekosistem Terumbu Karang di Perairan Spermonde Sulawesi Selatan	Performa, Efektivitas Pengelolaan dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Daerah Perlindungan Laut
Nama Pembimbing/ Promotor	1. Prof. Dr. Ir. Achmar Mallawa, M.Sc 2. Ir. Faizal Amir, M.Si 3. Ir. Suarni, M.Si	1. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc 2. Dr. Budimawan, DEA	1. Prof. Dr. Ir. M. Natsir Nessa, MS 2. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc 3. Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam Ali, M.Si

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1.	2018	Kesesuaian Daya Dukung Perairan untuk Pengembangan Budidaya Lobster Berbasis Mina Wisata Bahari di Kabupaten Lombok Utara	DRPM Ristekdikti	180
2.	2018	Struktur Komunitas Ikan pada Ekosistem Lamun di Pulau Lombok	DIPA PNBP	10
3.	2017	Peforma Perikanan Pelagis Kecil Berpendekatan <i>Ecosystem Approach to Fisheries Management</i> di Kawasan Teluk Jor Kabupaten Lombok Timur	DIPA PNBP	10
4.	2016	Kajian Potensi Sumberdaya Makrozoobentos Pada Ekosistem Padang Lamun Pantai Sire, Kabupaten Lombok Utara	DIPA PNBP	15
5.	2015	Kelimpahan Fitoplankton sebagai Indikator Kesuburan Perairan di Pantai Cemara Kabupaten Lombok Barat	DIPA PNBP	10
6.	2015-2016	Perubahan Perilaku Masyarakat Pesisir Melalui Minapolitan Rumput Laut	MP3EI	150
7.	2014	Perubahan Perilaku Masyarakat Pesisir Melalui Minapolitan Rumput Laut	MP3EI	135
8.	2014	Perikanan Tradisional Hiu di Tanjung Luar, Lombok Timur	BOPTN	21
9.	2013	Penilaian Indikator <i>Ecosystem Aproach to Fisheries Manajement</i> (EAFM) di WPP 713 – Provinsi NTB	WWF Indonesia dan KKP	75
10.	2013	Pengendalian Penyakit Saprolegniasis Pada Ikan Nila (<i>Oreochromis Niloticus</i>) Menggunakan Bakteri Kitinolitik Isolat Lokal	Hibah Bersaing DIKTI	75
11.	2013	Perikanan Tradisional Hiu di Tanjung Luar, Lombok Timur	BOPTN	23

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1.	2018	Pelatihan Digital Marketing Bagi Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) Hasil Perikanan di Kota Mataram	BOPTN	5
2.	2017	Diversifikasi Olahan Berbasis Ikan Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan Di Kabupaten	DIPA PNBP	4,5

		Lombok Utara		
3.	2015	Pengenalan Jenis-Jenis Hiu dan Status Konservasinya pada Anak Usia Sekolah Dasar di Tanjung Luar, Kabupaten Lombok Timur	DIPA PNB	5
4.	2014	Sosialisasi Kekayaan Bahari pada Anak Usia Sekolah Dasar di Kabupaten Lombok Barat	DIPA PNB	5

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/ Tahun	Nama Jurnal
1.	Operationalizing the social-ecological systems framework in pond aquaculture	Vol. 12, no 1 2018, pp. 485–518	International Journal of the Commons
2.	Improving pond aquaculture production on Lombok, Indonesia	497 (2018) : 64 - 93	Aquaculture
3.	Three Gene Phylogeny Of The Thoreales (Rhodophyta) Reveals High Species Diversity	2018 https://doi.org/10.1111/jpy.12618	Phycologia
4.	Jenis Dan Status Konservasi Hiu Yang Didaratkan Di PPI Tanjung Luar, Nusa Tenggara Barat	1/1/2015	Spermonde
5.	Perubahan Perilaku Dan Keseimbangan Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Melalui Penerapan Model Minapolitan Rumput Laut Di Pulau Lombok	Vol 10/2/2014	Journal Sosek STTP Gowa
6.	Diversity of freshwater red algae (Rhodophyta) in Malaysia and Indonesia from morphological and molecular data	53/4/2014	Phycologia
7.	The Dynamics of Benthic Algae among Herbivorous Coral Reef Fishes	26/ 2013	World Applied Sciences Journal
8.	Performa Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat di Kepulauan Spermonde Kabupaten Pangkep, Sulsel. -	Volume 2, Nomor 1, 29 – 35/2012	Torani Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan.
9.	Rethinking Traditional's Institution Participation in Coastal Resources Management	Volume 1, Nomor 2, 2011	JICoR, Journal of Indonesian Coral Reefs
10.	Performance of Community Based Marine Protected Area at Wakatobi Regency South East Sulawesi	Volume 1, Nomor 2, 2011	JICoR, Journal of Indonesian Coral Reefs

F. Pengalaman Penyampaian Makalah secara Oral pada Pertemuan/Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	The 1st International Conference and Workshop on Bioscience and Biotechnology	Fish Structure Community in Seagrass Bed of Gili Asahan West Lombok	Mataram, 28 November 2018
2.	Simposium Nasional Kelautan dan Perikanan III	Distribusi, Kelimpahan dan Ukuran Koloni Bambu Laut Isis Hippuris di TWP Laut Banda	Makassar, 7 Mei 2016
3.	Simposium Nasional Pengelolaan Tuna Berkelanjutan	Status Pengelolaan Perikanan Tuna Dengan Pendekatan Ekosistem Di Prov. Nusa Tenggara Barat	10 – 11 Desember 2014, Bali
4.	Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) VIII dan Kongress XI Ikatan Sarjana Oseanologi (ISOI),	Jenis Dan Status Konservasi Hiu Yang Didaratkan Di PPI Tanjung Luar, Nusa Tenggara Barat	17 – 18 November 2014, Balikpapan
5.	Wallacea Darwin Science Symposium	Key factors affecting Marine Protected Area's effectiveness	4 – 5 September 2012
6.	Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) VIII dan Kongress VIII Ikatan Sarjana Oseanologi (ISOI),	Performa Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat di Kepulauan Spermonde Kabupaten Pangkep, Sulsel	25 – 27 September 2011, Makassar
	2nd Coral Reefs Management Symposium on the Coral Triangle Areas.	Performance of Community Based Marine Protected Area at Wakatobi Regency South East Sulawesi	28 – 30 September 2011, Kendari

Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
-	-	-	-	-

Pengalaman Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/D
-	-	-	-	-

G. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial	Tahun	Tempat	Respons Masyarakat
-----	----------------------------------	-------	--------	--------------------

	Lainnya yang Telah Diterapkan		Penerapan	
-	-	-	-	-

H. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikoanya.

Mataram 10 Februari 2019
Pengusul,

(Dr. Nurliah, S.Pi.,M.Si.)

BIODATA ANGGOTA TIM 1

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Dr. Sitti Hilyana
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala / IV a
3	Jabatan Struktural	-
4	NIP	19651008 199203 2 001
5	NIDN	0008106514
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Kelayu, 8 Oktober 1965
7	Alamat Rumah	Jl. Panji Anom II/8 Mataram
8	No. Telepon/Fax/HP	087878866954
9	Alamat Kantor	Jl. Majapahit No.62 Mataram
10	Nomor Telepon/Fax	(0370) 621485/ (0370) 640189
11	Alamat e-mail	sittihilyana@yahoo.com
12	Lulusan yang Telah dihasilkan	S1 = >100 orang; S2 = 6 orang
13	Mata Kuliah yang diampuh	1. Manajemen Sumberdaya perairan 2. Biologi Laut 3. Kewirausahaan 4. Konservasi Perairan 5. Pengantar Ilmu Ekonomi Perikanan 6. Ekowisata

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Mataram	Institut Pertanian Bogor	Institut Pertanian Bogor
Bidang Ilmu	Sosek Pertanian	Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut	Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut
Tahun Masuk-Lulus	1984 - 1990	1999 - 2001	2008 – 2011
Judul skripsi/Thesis/ Disertasi	Peran PRPTE dalam Meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan di Kabupaten Lombok Barat	Transformasi Kultural dan Struktural Masyarakat Kawasan Wisata Bahari	Optimasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Konservasi Pulau-Pulau Kecil
Pembimbing/ Promotor	1. Ir. Moechtar Djoebeng, SU 2. Ir. Abu Bakar Ahmad, MP	1. Prof. Dietrich G. Bengen, DEA, Ph.D 2. Prof. Viktor Nikijuluw, M.Sc, Ph.D	1. Prof. Dietrich G. Bengen, DEA, Ph.D 2. Dr. Ahmad Fahrudin, M.Sc 3. Dr. Ir. Fredinand Yulianda, M.Sc

C. Pengalaman Penelitian dalam 7 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Kerjasama
1	2015	Pengembangan Model Ekowisata dalam Mendukung Industrialisasi Pariwisata Berbdi Kawasan Teluk Saleh Pulau Sumbawa asis Blue Economy (Tahun III)	MP3EI
2	2014	Pengembangan Model Ekowisata dalam Mendukung Industrialisasi Pariwisata Berbdi Kawasan Teluk Saleh Pulau Sumbawa asis Blue Economy (Tahun II)	MP3EI
3	2013	Pengembgan Model Ekowisata dalam Mendukung Industrialisasi Pariwisata Berbdi Kawasan Teluk Saleh Pulau Sumbawa asis Blue Economy (Tahun I)	MP3EI
4	2013	Penyusunan Rencana Pengelolaan Ekowisata Alam di Kawasan Hutan Sekaroh Lombok Timur	Dishut Prov. NTB
5	2012	Analisis Kelayakan Pengembangan Tambak Rakyat di Kawasan Pesisir Sumbawa Barat	Bappeda KSB
6	2012	Analisis Nilai Manfaat Ekosistem Terumbu Karang Kawasan Teluk Saleh Pulau Sumbawa	Bappeda Prov. NTB
7	2011	Optimasi Pemanfaatan ruang Kawasan Konservasi Gili Sulat-Gili Lawang	Hibah Pasca
8	2010	Analisis Potensi Matapencanharian Alternatif Masyarakat Pesisir Kebun Talu Lembar Kabupaten Lombok Barat	Hibah Bersaing DIKTI
9	2010	Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengelolaan Desa Wisata Pantai Berwawasan Kerakyatan dan Lingkungan di Kawasan Gili Gede Kabupaten Lombok Barat (Lanjutan)	Hibah Bersaing DIKTI
10	2009	Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengelolaan Desa Wisata Pantai Berwawasan Kerakyatan dan Lingkungan di Kawasan Gili Gede Kabupaten Lombok Barat,	Hibah Bersaing DIKTI
11	2008	Analisis Ekonomi dan Ekologis Sumberaya Pesisir dan Laut Kawasan Pesisir Cemara Kabupaten Lombok Barat (Lanjutan)	RISTEK
12	2007	Analisis Ekonomi dan Ekologis Sumberdaya Pesisir Pantai Cemara Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat,	RISTEK
13	2007	Pengembangan Policulture sebaga Upaya Pengentasan Kemiskinan Masyarakat di kawasan Sekotong Lombok Barat	DKP RI
14	2007	Peningkatan Income Masyarakat Pesisir melalui Penerapan Pola Sylvofishery di Kawasan Sekotong Lombok Barat	DKP RI
14	2006	Penyusunan Master Plan Pengelolaan Ekosistem Mangrove se Nusa Tenggara Barat	BP.DAS Dephut

15	2006	Identifikasi dan Inventarisasi Tingkat Kekritisian Ekosistem Mangrove se Nusa Tenggara Barat	BP.DAS Dephut
----	------	--	---------------

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 7 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Kerjasama
1.	2015	Penerapan Teknologi Silvofishery sebagai Upaya pemberdayaan Masyarakat Sekitar hutan Mangrove dalam Mendukung Kedaulatan Pangan di Kabupaten Lombok Timur	RISTEK
2.	2014	Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang sebagai Asset Pengembangan Ekowisata Bahari di Kawasan Batu Putih Lombok Barat	IFAD
3	2014	Inovasi Pemanfaatan Limbah Serbuk Kayu sebagai Media Tumbuh Tanaman Organik Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Pulau-Pulau Kecil	KKN-PPM
4	2013	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Agribisnis Rumput Laut di Kawasan Teluk Gerupuk Kabupaten Lombok Tengah	Mandiri
5	2013	Penguatan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Wirausaha Pengolahan Hasil Perikanan di Kawasan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Lombok Barat	DIPA PNB
6	2012	Fasilitasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat	DKP Prov. NTB
7	2011	Bimbingan Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Tata Ruang	DKP Prov. NTB
8	2011	Fasilitasi Inisiasi Pembentukan Kawasan Konservasi Perairan Teluk Bumbang Kabupaten Lombok Tengah	DKP Prov. NTB
9	2011	Bimbingan Teknis bagi Aparat Pemda tentang Perencanaan Penataan Ruang Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat	DKP Prov. NTB
10	2010	Pelatihan bagi aparat Pemda Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Penataan Ruang Pulau-Pulau Kecil se Pulau Lombok	DKP Prov. NTB
11	2010	Pelatihan Bagi Aparat Pemda Intorduksi Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Prov. Nusa Tenggara Barat	DKP Prov. NTB
12	2010	Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang di Gugusaan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Lombok Barat	DKP RI
13	2010	Penyuluhan Peningkatan kapasitas Masyarakat Sekitar Mangrove di Kawasan Pesisir Sekotong Kabupaten Lombok Barat	DKP RI
14	2009	Pelatihan Stakeholders “Penerapan Logic Model dalam Mendukung Program Coastal Community Resilience (CCR)” di Kawasan Pesisir NTB	DKP RI
15	2009	Penyuluhan dan pembuatan demplot “Penerapan Pola	DKP RI

		Silvofishery sebagai alternatif Peningkatan Income Masyarakat Pesisir”, Sekotong	
16	2009	Pemberdayaan Wanita Nelayan dalam Meningkatkan Nilai Ekonomi hasil-hasil Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Lombok Barat	DKP RI
17	2008	Sosialisasi Coastal Community Ressilience (CCR) dalam rangka mempersiapkan masyarakat menghadapi bencana	DKP RI
18	2008	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Program Mitra Bahari Nusa Tenggara Barat	DKP RI
19	2008	Pembinaan Masyarakat Pesisir dalam Upaya Pelestarian Ekosistem Hutan Mangrove di Kawasan Sekotong Kab. Lobar	DKP Prov. NTB

E. Pengalaman Fasilitator 5 tahun terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Kerjasama
1.	2015	Tim Teknis RZWP3K Provinsi Nusa Tenggara Barat	KKP
2.	2015	Tim Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Prov NTB 2013-2018	Bappeda
3	2015	Tim Penyusunan Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	KKP
4	2015	Evaluator Pangripta Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bappeda
5	2014	Penyusun Rencana Strategis Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-PulauKecil Prov. NTB	KKP
6	2014	Fasilitator Pengelolaan Terumbu Karang dalam Mendukung Pengembangan Ekowisata Bahari di kawasan WP3K	KKP
7	2014	Fasilitator Bimtek Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Berbasis Ekosistem di Prov. NTB	DKP
8	2014	Fasilitator Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil NTB	KKP
9	2014	Fasilitator Penyusunan Action Plan Pengelolaan Mangrove Provinsi NTB	Dephut
10	2013	Fasilitator Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat	DKP Prov. NTB
11	2012	Fasilitator Penndayagunaan Pulau-Pulau Kecil Berbasis Sumberdaya Pulau Bajo Pulo	DKP Prov. NTB
12	2011	Fasilitator Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Tata Ruang	DKP Prov. NTB
13	2011	Fasilitator Inisiasi Pembentukan Kawasan Konservasi Perairan Teluk Bumbang Kabupaten Lombok Tengah	DKP Prov. NTB
14	2011	Fasilitator Perencanaan Penataan Ruang Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat	KKP
15	2010	Fasilitator Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Penataan Ruang Pulau-Pulau	DKP Prov. NTB

	Kecil se Pulau Lombok	
--	-----------------------	--

F. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No .	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/ Tahun	Nama Jurnal
1	Analisis Kuantifikasi Manfaat Ekosistem Terumbu Karang di Kawasan Gili Sulat-Gili Lawang Kabupaten Lombok Timur	Volume 2, Nomor 2, April-Juli 2012	Jurnal Mitra Bahari.
2	Nilai Manfaat Ekosistem Mangrove Kawasan Konservasi Gili Sulat-Gili Lawang Kabupaten Lombok Timur	Volume 3, Nomor 3, Agust-Nop 2011	Jurnal Mitra Bahari.
3	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB sebagai Green Spasial Planning	Volume 1 Nomor 2, Sept-Des 2009	Buletin Planolog Dephut RI
3	Analisis Evaluasi Zona pada Kawasan Konservasi Gili Sulat-Gili Lawang kabupaten Lombok Timur	Volume 2, Nomor 2, April-Juli 2011	Jurnal Mitra Bahari.
4	Nilai Ekonomi Ekosistem Mangrove Kawasan Pesisir Cemara kabupaten Lombok Barat	Volume 3, Nomor 3, Agust-Nop 2009	Jurnal Mitra Bahari.
5	Analisis Ekonomi Produktif Bagi Masyarakat Pesisir Kabupaten Lombok Barat	Volume III Nomor 1 Tahun 2010	Jurnal Vinisi UMM
6	Identifikasi Tingkat Kekritisian Ekosistem mangrove di Pulau Lombok.	Volume 3, Nomor 2, April-Juni 2009	Jurnal Mitra Bahari.
7	Penerapan Teknologi Drum Evaporator dalam Pengolahan Garam di pesisir Empol Lombok Barat	Volume 2, Nomor 2, April-Juli 2008	Jurnal Mitra Bahari.
8	Identifikasi dan Inventarisasi Kondisi Ekosistem Mangrove di Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat.	Volume 1, Nomor 3, Agust-Nop 2007	Jurnal Mitra Bahari.
9	Strategi Pengembangan Pariwisata Bahari secara Berkelanjutan di Lombok Barat	Tahun 2007	Jurnal Lemlit Unram

G. Pengalaman Penyampaian Makalah secara Oral pada Pertemuan/Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Pertemuan Ilmiah Tahun (PIT) IX dan Kongress IX Ikatan Sarjana Oseanologi (ISOI).	Analisis Nilai Manfaat Terumbu Karang Pulau Moyo	21– 23 Oktober 2012, Mataram
2.	Kongres ke VIII Nasional Pengelolaan Pesisir, laut dan Pulau-Pulau Kecil	Analisis Kesesuaian Lahan dan daya Dukung Kawasan Bagi pengembangan Ekowisata Bahari di Kawasan Konservasi Gili Sulat-Gili	22-24 Oktober 2012, Mataram

		Lawang Kab. Lotim	
3.	Konferensi dan Seminar Nasional BKPSL	Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Berbasis Ekowisata Bahari	21-23 Agustus 2012, Mataram
4.	Seminar Jurusan Budidaya Pertanian Unram	Analisis Keberlanjutan Pengembangan Maricultur di Kawasan Teluk Saleh	13 Mei, 2011, Mataram
5	Konas PWPPPK.	Analisis Ekologi-Ekonomi Terumbu Karang di Kawasan Teluk Saleh	22-24 Oktober 2012, Mataram
6	Seminar Nasional Geomatika	Analisis Zonasi Kawasan Konservasi Berbasis Geospasial	7-9 Desember 2011, Mataram
7	Seminar Nasional PIT ISOI	Pengembangan Ekowisata Berbasis Blue Economy di Kawasan Teluk Saleh	11-12 Nopember 2013 Jakarta
8	Seminar Nasional IMFISERN	Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil Berkelanjutan	Semarang, 2014
9	Seminar nasional APIKI	Pola Adaptasi Masyarakat Pesisir dalam Menghadapi Perubahan Iklim	Jakarta, 2014
10	Seminar Sosek Perikanan	Analisis Keberlanjutan Perikanan Demersal Kawasan Teluk Saleh	Jakarta, 2015
11	Seminar Ekowisata	Pengembangan Ekowisata Sistem Klaster di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Jakarta, 2015

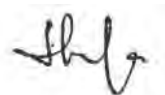
H. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 5 tahun Terakhir (Pemerintah, Asosiasi atau Institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
-	Penghargaan sebagai Lulusan Terbaik pada periode wisuda September 2011 di Program Doktorat Sekolah pasca Sarjana IPB	Rektor IPB	2011

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikoanya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan proposal pengabdian sumber dana PNBP

Mataram, 10 Februari 2019
Anggota



(Dr. Sitti Hilyana, M.Si)